



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);

14. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 13);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023 – 2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi adalah dokumen perencanaan Pemerintah Jawa Barat untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD dan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Daerah Kota.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
  - a. mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPD;
  - b. mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan keterpaduan perencanaan pembangunan Daerah, baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
  - c. mewujudkan keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan Daerah; dan

- d. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. kedudukan, peran dan fungsi;
- b. sistematika, isi dan uraian;
- c. penyusunan RKPD; dan
- d. pengendalian dan evaluasi.

### BAB IV

#### KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI

##### Pasal 4

RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:

- a. secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab, yang wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun;
- b. secara normatif, menjadi dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah dan penyusunan KUA PPAS yang akan diusulkan oleh Wali Kota untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD;
- c. secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab setiap Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
- d. secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB V  
SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN

Pasal 5

- (1) Sistematika penulisan RKPD adalah sebagai berikut:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum kondisi Daerah;
  - c. kerangka ekonomi daerah dan keuangan Daerah;
  - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
  - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
  - f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
  - g. penutup.
- (2) Sistematika, isi dan uraian RKPD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e memuat program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan indikatif.
- (2) RKPD menjadi pedoman untuk penyusunan Renja Perangkat Daerah dan penyusunan Rancangan KUA dan PPAS.
- (3) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan dan sub kegiatan pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, Wali Kota dengan Pimpinan DPRD menyusun berita acara kesepakatan untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2024.
- (4) Penambahan kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan apabila terjadi akibat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan setelah RKPD ditetapkan.

BAB VI  
PENYUSUNAN RKPD

Pasal 7

- (1) RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPD, yang disusun dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. persiapan penyusunan RKPD;
  - b. penyusunan rancangan awal RKPD;
  - c. penyusunan rancangan RKPD;
  - d. pelaksanaan Musrenbang RKPD;

- e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
  - f. penetapan RKPD.
- (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 dalam RPD, mempedomani RKP, program strategis nasional dan RKPD Provinsi.
  - (3) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan.

#### Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:
  - a. pendahuluan;
  - b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
  - c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
  - d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
  - e. penutup.
- (3) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan untuk diverifikasi dan diselaraskan dengan RKPD.

### BAB VII

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Pasal 9

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2024.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengendalian kebijakan;
  - b. pengendalian pelaksanaan; dan
  - c. evaluasi hasil.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pengendalian dan evaluasi RKPD, Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan menghimpun dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan dari setiap Perangkat Daerah.
- (3) Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 7 JULI 2023  
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 7 JULI 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 12



LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 12 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sehubungan dengan berakhirnya periode Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya pada tahun 2022, dan memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Bahwa Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati, Wali Kota Akan Dilaksanakan Secara Serentak Pada Tahun 2024. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 13 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023 - 2026.

RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari RPD Tahun 2023 - 2026 yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang diawali dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Bagi Perangkat Daerah, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun 2024.

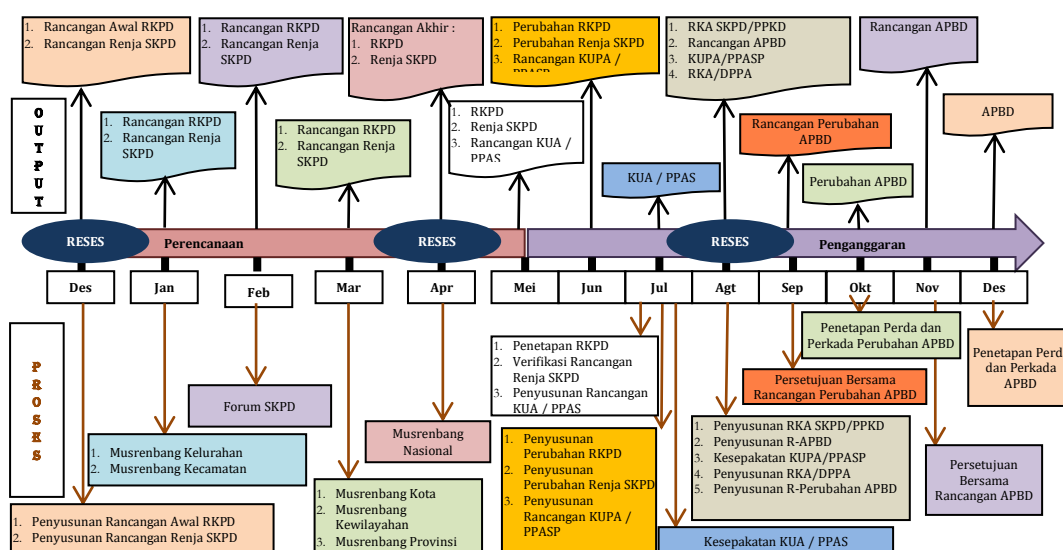
Penyusunan RKPD merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh pemangku kepentingan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian RKPD mempunyai

kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD Tahun 2024 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif, teknokratik, politis, *top-down* dan *bottom-up*, holistik, tematik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat dan mendongkrak pencapaian kinerja yang akan didanai dan bukan sekedar untuk melaksanakan tugas fungsi perangkat daerah bersifat rutinitas semata. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan daerah memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas daerah, program prioritas dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

Gambar 1.1  
Proses dan Tahapan Pelaksanaan Penyusunan RKPD Tahun 2024



Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tatacara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan

evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahapan dalam penyusunan RKPD dimulai dari tahap persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD.

Memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini terutama dengan resesi ekonomi dunia akan berdampak pada pencapaian target pembangunan yang telah dicanangkan sebelumnya. Oleh karena itu kondisi ini harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan RKPD Tahun 2024 terutama dalam penentuan target indikator seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB, Indeks Daya Beli, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, Indeks gini dan sebagainya sehingga perlu penyesuaian dengan mempertimbangkan ketersediaan data serta memperhatikan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Selain itu permasalahan yang dihadapi oleh Kota Tasikmalaya yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan diantaranya kemiskinan, stunting, persampahan, inflasi dan digitalisasi pelayanan publik. Rencana untuk mengatasi permasalahan tersebut menjadi prioritas dalam RKPD Tahun 2024.

## 1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
30. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
31. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93);
32. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
33. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
34. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);

35. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1);
36. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 48);
37. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 13);

### 1.3. Hubungan Antar Dokumen

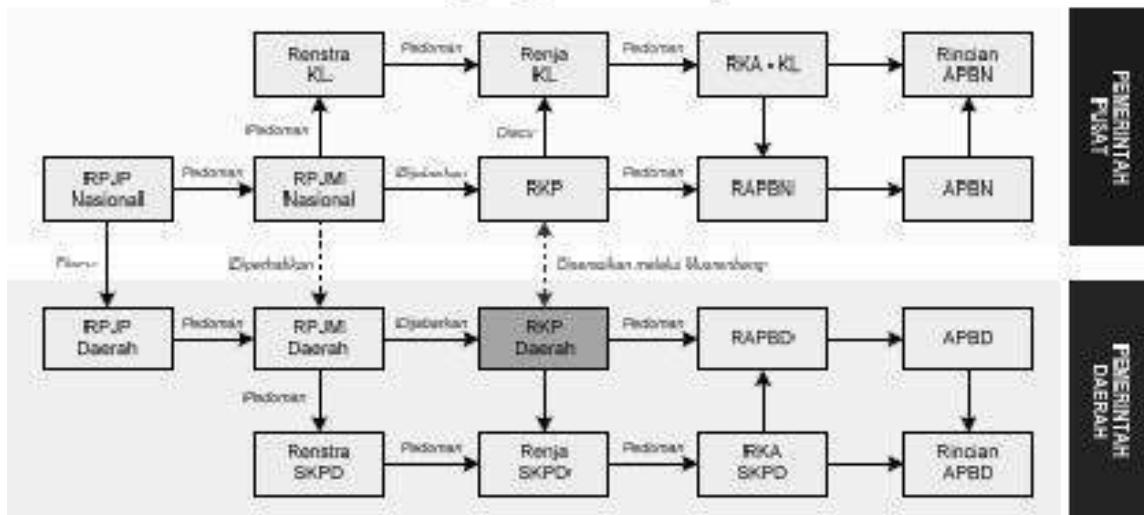
Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan lainnya. Adapun hubungan antara RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. RKPD Tahun 2024 mengacu dan mendukung RKP dan Program Startegis Nasional Tahun 2024;
2. RKPD Tahun 2024 mengacu dan mendukung RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024;
3. RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023 - 2026;
4. RKPD Tahun 2024 mempertimbangkan hasil pembangunan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2022;
5. RKPD Tahun 2024 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya;
6. RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024. Proses penyusunan RKPD dengan Renja PD dilakukan secara simultan dan sifatnya saling melengkapi; dan
7. RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman penyusunan KUA dan PPAS serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tasikmalaya Tahun 2024.

Hubungan keterkaitan antara RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.2.

### Hubungan Keterkaitan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penaganggaran Lainnya



#### 1.4. Maksud dan Tujuan

Dokumen RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023 – 2026 serta menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Tahun 2024 dan digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Adapun tujuan RKPD Tahun 2024 adalah:

1. Mewujudkan pencapaian tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah Kota Tasikmalaya;
2. Menetapkan prioritas pembangunan, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan Tahun 2024;
3. Mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan mulai dari pusat, provinsi dan kota.
4. Mewujudkan keselarasan, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
5. Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

#### 1.5. Sistematika Dokumen

Dokumen RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024 disusun sesuai dengan sistematika yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, meliputi:

#### BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan mengenai latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan dan sistematika dokumen RKPD.

- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**  
Menyajikan gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan serta permasalahan pembangunan.
- BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**  
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
- BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**  
Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional.
- BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**  
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.
- BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
Menyajikan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan.
- BAB VII PENUTUP**  
Menyajikan kesimpulan dan kaidah pelaksanaan RKPD.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

#### 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

##### 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

##### 2.1.1.1. Letak Geografis dan Kondisi Administrasi Kota

Kota Tasikmalaya terletak antara 108°08'38" BT-108°24'02" BT dan antara 7°10' LS-7°26'32" LS, berada di bagian tenggara Provinsi Jawa Barat, berjarak ± 105 km dari Kota Bandung dan ± 255 km dari Kota Jakarta. Batas wilayah administrasi Kota Tasikmalaya diatur ber Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya pasal 6 ayat (1) bahwa Kota Tasikmalaya mempunyai batas-batas wilayah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cisayong dan Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Cihaurbeuti dan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jatiwaras dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Singaparna, Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya.

Luas wilayah administrasi Kota Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, terdeliniasi wilayah administrasi Kota Tasikmalaya seluas 18.422 hektar (sumber Badan Informasi Geospasial, 2017). Secara administratif, Kota Tasikmalaya terbagi atas 10 Kecamatan dan 69 Kelurahan. Untuk lebih jelasnya mengenai letak orientasi dan batas administrasi dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1.  
Peta Orientasi dan Pembagian  
Wilayah Kota Tasikmalaya

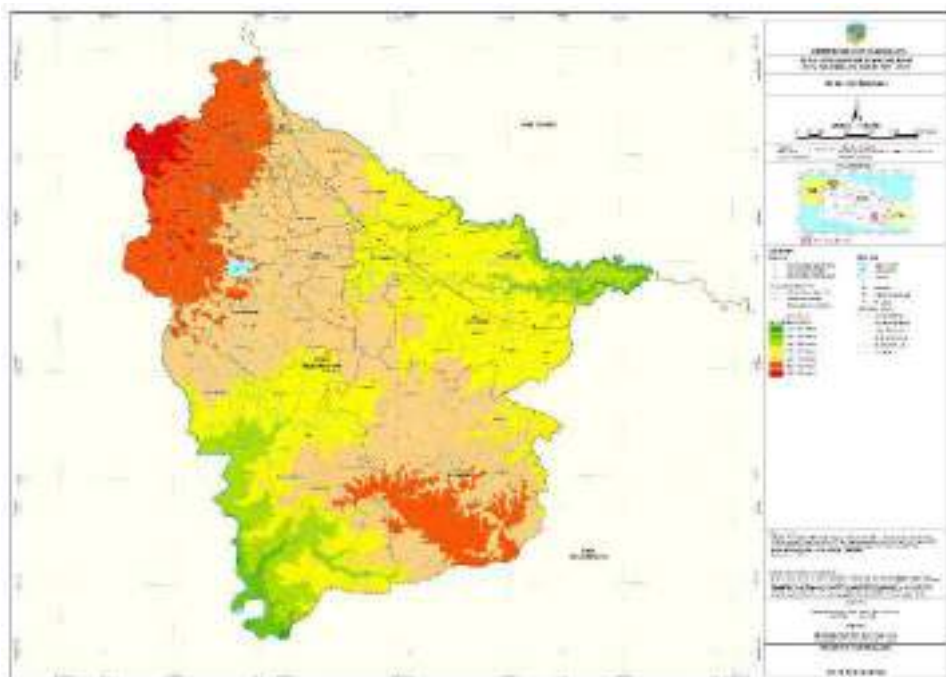


Sumber : Data BIG (diolah), 2017

##### 2.1.1.2. Topografi

Berdasarkan bentang alamnya, Kota Tasikmalaya berada pada ketinggian antara 201 sampai dengan 503 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan mempunyai dataran dengan kemiringan relatif kecil. Daerah tertinggi berada di Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari (kaki Gunung Galunggung) yaitu 503 mdpl sedangkan terendah berada di Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu yaitu 201 mdpl.

Gambar 2.2.  
Peta Topografi Kota Tasikmalaya



Sumber : Data BIG (diolah), 2017.

Ditinjau dari segi fisiografi wilayah, sebagian besar tempat tertinggi Kota Tasikmalaya terdapat di bagian barat dan selatan, kemudian menurun ke tengah di sekitar pusat kota menuju utara, serta sebagian kecil dari timur ke tengah dan utara Kota Tasikmalaya. Pada bagian selatan wilayah Kota Tasikmalaya, di sekitar Kecamatan Kawalu dan Tamansari, kondisinya cenderung berbukit-bukit dengan ciri hutan dan kebun campuran.

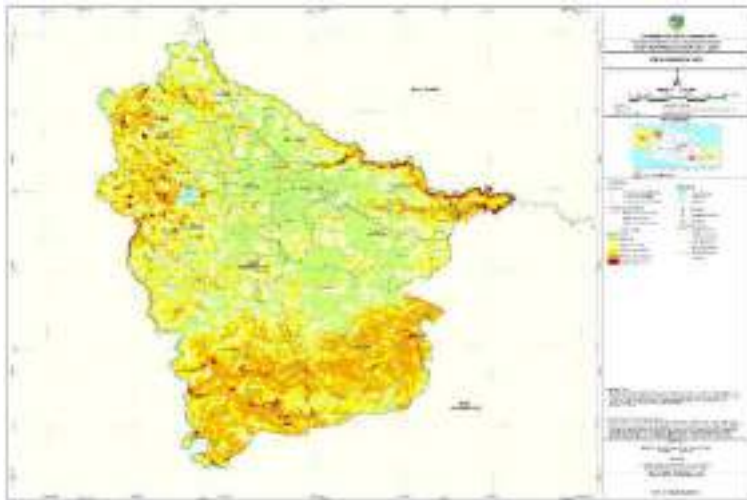
Kondisi Rupa Bumi (geomorfologi) seperti ini membagi dua wilayah Kota Tasikmalaya menjadi arah Barat Laut dan arah Selatan Kota Tasikmalaya (lihat Gambar 2.3). Kondisi fisik bentang alam ini sangat terkait dengan kondisi hidrologi, selain itu juga dipengaruhi oleh kondisi topografi dan kemiringan lerengnya. Dari kondisi ini Kota Tasikmalaya terbagi kedalam dua daerah aliran sungai (DAS), yaitu di sebelah Utara hingga Timur Laut merupakan DAS Citanduy dengan aliran air menuju kearah Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis. Sedangkan di sebelah Barat hingga Barat Daya merupakan DAS Ciwulan dimana aliran air menuju kearah Kecamatan Sukaraja dan Tanjung Jaya di Kabupaten Tasikmalaya. Tabel 2.1 memperlihatkan kondisi kemiringan lahan di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.1.  
Kondisi Kemiringan Lahan Kota Tasikmalaya

Kelas Lereng	Luas (Hektar)	% Luas
0 – 2 %	5.372,15	29,16
2 – 5 %	4.574,18	24,83
5 – 15 %	4.882,58	26,50
15 – 25 %	1.543,24	8,38
25 -40 %	1.799,53	9,77
>40 %	250,36	1,36
Total	18.422,04	100,00

Sumber : Data BIG dan Hasil Pengolahan, 2017.

Gambar 2.3.  
Peta Morfologi Kota Tasikmalaya



*Sumber : Data BIG (diolah), 2017.*

#### 2.1.1.3. Geologi

Berdasarkan hasil kajian peta geologi lembar Tasikmalaya (T. Budhitrisna, 1982), struktur geologi Kota Tasikmalaya terbentuk dari material dasar berupa batuan induk vulkanik, yaitu susunan batuan yang terdiri dari breksi vulkanik termampat lemah dengan bongkah lava andesit yang dihasilkan pada tingkat gunung api tua. Batuan ini tersebar merata, menutupi hampir seluruh wilayah Kota Tasikmalaya. Pada tingkatan gunung api muda, susunan batuan yang dihasilkan mulai dari breksi gunung api, lahar, tufa berlapis, batuan andesit sampai basal yang tersebar secara terbatas di bagian tenggara. Sedangkan pada bagian utara, tengah dan selatan terdapat sesar normal, sesar naik, serta lipatan berupa antiklin dan siklin.

Pola struktur sesar normal akan menimbulkan pemotongan pada bagian tubuh batuan dan umumnya membentuk gawir, sedangkan sesar naik disamping dapat membentuk gawir juga perlapisan batuan menjadi berlipat-lipat dan hancur, bidang pemotongan ini merupakan bidang lemah yang biasanya membentuk gawir-gawir curam dan terjal dimana proses gerakan tanah ini dapat berkembang, hal ini sering terlihat pada bantaran sungai akibat pengikisan dan penyempitan.

Gambar 2.4.  
Peta Geologi Kota Tasikmalaya



*Sumber : Data BIG (diolah), 2017.*

#### 2.1.1.4. Hidrologi dan Hidrogeologi

Potensi sumber daya air dari air permukaan di Kota Tasikmalaya meliputi sungai dan air dalam cekungan (danau/situ). Di wilayah Kota Tasikmalaya mengalir 51 Daerah Irigasi yang termasuk dalam 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Citanduy dan DAS Ciwulan. DAS Citanduy memiliki limpasan air sungai rata-rata bulanan sebesar  $17 \text{ m}^3/\text{detik}$  atau rata-rata harian sekitar  $5,5 \text{ m}^3/\text{detik}$ , sedangkan DAS Ciwulan memiliki limpasan air sungai rata-rata harian sebesar  $13,7 \text{ m}^3/\text{detik}$ . Jumlah kedua limpasan adalah  $1.658.880 \text{ m}^3/\text{hari}$ .

Sedangkan waduk/situ di Kota Tasikmalaya mempunyai potensi menyediakan air sebesar  $1.646.750 \text{ m}^3$ . Situ-situ tersebut adalah Situ Gede di Kecamatan Mangkubumi ( $6.000 \text{ m}^3/\text{detik}$ ), Situ Cibeureum, Situ Cibantaran, Situ Malingping, Situ Bojong dan Situ Cicangri di Kecamatan Tamansari ( $6.000 \text{ m}^3/\text{detik}$ ).

Selain potensi air permukaan, Kota Tasikmalaya memiliki potensi kandungan air tanah yang relatif dangkal, karena air tanah dapat diperoleh dari sumur dengan kedalaman antara  $3,00-10,00 \text{ m}$ . Kedalaman sumur gali untuk bisa keluar air cukup dangkal, antara  $1,50-7,00 \text{ m}$ . Sumber air tanah dalam bentuk mata air yang terdapat di Kecamatan Mangkubumi, Bungursari, Kawalu dan Tamansari.

Ditinjau dari kondisi hidrogeologi, Kota Tasikmalaya dikategorikan sebagai daerah akuifer, alirannya didasarkan melalui celahan dan ruang antara butir yang merupakan ciri dari lereng gunung api strato. Sistem akuifer di Kota Tasikmalaya yang dapat dimanfaatkan untuk pengambilan air dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu; sistem akuifer tunggal pada unit vulkanik, sistem akuifer pada celahan-celahan batuan sedimen tersier serta sistem akuifer rekahan-rekahan yang dibentuk oleh batu gamping.

Gambar 2.5.  
Peta Hidrologi Kota Tasikmalaya



Sumber : Data BIG (diolah), 2017.

#### 2.1.1.5. Klimatologi

Pada tahun 2022 suhu udara rata-rata di Kota Tasikmalaya mencapai 24,9°C. dengan suhu terendah 21,2°C yang terjadi pada bulan September dan tertinggi 30,9°C yang terjadi pada bulan Mei dengan kelembaban udara rata-rata 87,8%. Rata-rata suhu dan kelembaban udara pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

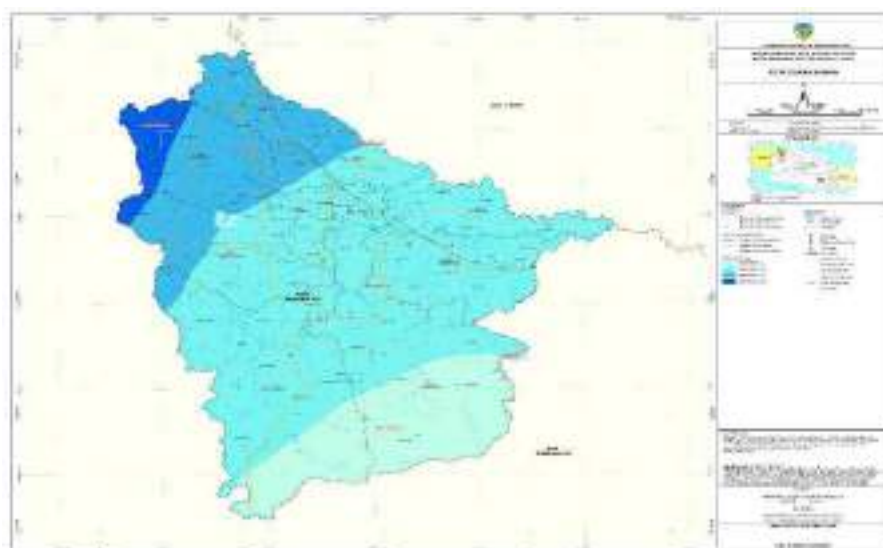
Tabel 2.2.  
Rata-rata suhu dan kelembaban udara  
Tahun 2022

Bulan Month	Suhu/Temperature (°C)			Kelembaban/Humidity (%)		
	Minimu m	Rata-rata Average	Maksimu m Maximum	Minimu m	Rata-rata Average	Maksimu m Maximum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari/January	21,3	25,0	30,8	56,0	89,0	100
Februari/February	21,2	25,1	31,1	63,0	80,0	87,0
Maret/March	21,6	25,1	30,7	71,0	90,0	98,0
April/April	21,3	25,2	30,3	73,0	91,0	90,0
Mei/May	21,4	25,4	30,9	64,0	91,0	91,0
Juni/June	21,3	24,4	29,4	73,0	90,0	98,0
Juli/July	22,1	24,5	29,1	71,0	87,0	95,0
Agustus/August	21,6	24,2	28,6	75,0	88,0	95,0
September/September	21,3	25,4	29,6	71,0	87,0	96,0
Oktober/October	22,0	25,7	26,6	77,0	90,0	96,0
November/November	22,1	25,0	29,0	72,0	85,0	95,0
Desember/December	21,9	24,7	29,8	67,0	86,0	94,0
Rata-rata/Average	21,5	24,9	29,6	69,4	87,8	94,6

Sumber: Kota Tasikmalaya Dalam Angka, BPS Tahun 2023.

Curah hujan paling tinggi selama tahun 2022 terjadi pada bulan September yaitu 561 mm dan paling rendah terjadi pada bulan Juli yaitu 108 mm. Sedangkan hari hujan paling banyak terjadi pada bulan Oktober sebanyak 28 hari. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Gambar 2.6.  
Peta Klimatologi Kota Tasikmalaya



Sumber : Data BIG (diolah), 2017.

Tabel 2.3.  
Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan  
di Kota Tasikmalaya Tahun 2022

Bulan Month	Jumlah Curah Hujan Number of Precipitation (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari) Number of Rainy Days (day)
Januari / January	434,0	17,0
Februari / February	280,0	11,0
Maret / March	501,0	17,0
April / April	404,0	17,0
Mei / May	132,0	18,0
Juni / June	292,0	18,0
Juli / July	108,0	16,0
Agustus / August	215,0	12,0
September / September	561,0	22,0
Oktober / October	501,0	28,0
November / November	350,0	22,0
Desember / December	369,0	21,0
Rata-rata / Average	345,6	18,3

Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka, BPS 2023

#### 2.1.1.6. Penggunaan Lahan dan Tutupan Lahan

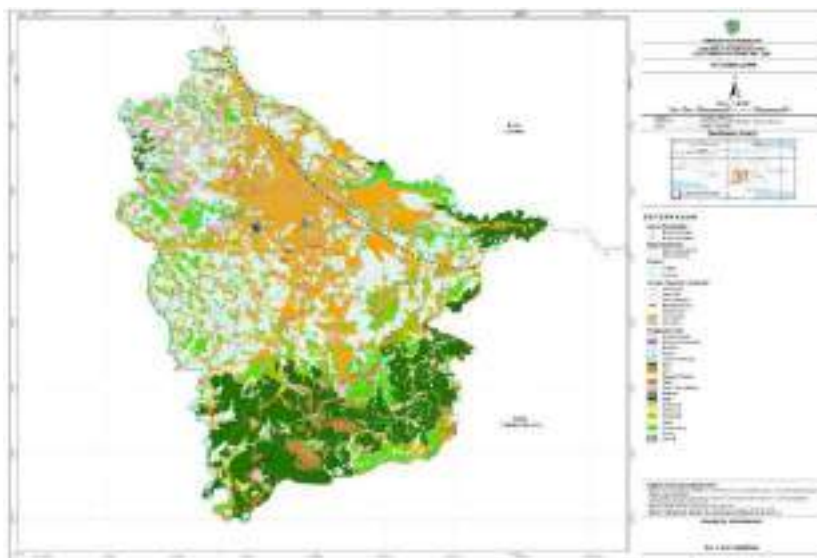
Penggunaan lahan Kota Tasikmalaya didominasi lahan sawah sebesar 35,246%, permukiman sebesar 28,646% dan hutan sebesar 19,382%. Berikut rincian penggunaan lahan kota Tasikmalaya.

Tabel 2.4.  
Penggunaan Lahan Kota Tasikmalaya

Penggunaan Lahan	Luas	
	Hektar	%
Bangunan Industri	58,57	0,318
Bangunan Pemerintahan	10,70	0,058
Danau/Situ	50,56	0,27
Empang	263,30	1,42
Fasilitas Peribadatan	0,87	0,005
Hutan	3570,56	19,382
Kawasan Pariwisata	4,78	0,026
Ladang	217,18	1,179
Lahan Tidak Terbangun	697,38	3,786
Lapangan	17,21	0,093
Pasar	14,30	0,078
Pemukiman	24,88	0,135
Peremukiman	5277,20	28,646
Sawah	6493,10	35,246
Semak Belukar	141,22	0,767
Sungai	82,05	0,445
Terminal	7,69	0,042
Jumlah	18.422,04	100,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2022.

Gambar 2.7.  
Peta Penggunaan Lahan Kota Tasikmalaya



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2022.

#### 2.1.1.7. Wilayah Rawan Bencana

Potensi rawan bencana di Kota Tasikmalaya, diantaranya adalah bencana gempa bumi dan ikutannya, bencana alam geologi aliran lahar dan rawan gerakan tanah skala menengah.

Intensitas suatu guncangan gempa bumi pada suatu peristiwa gempa bumi pada suatu daerah atau wilayah tertentu tidak hanya tergantung pada kekuatan gempa bumi yang terjadi dan jarak daerah atau wilayah terhadap pusat gempa bumi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi geologi setempat. Lapisan-

lapisan sedimen lunak permukaan dapat memperkuat atau mengamplifikasi gelombang gempa bumi dan menjadi lebih kuat dibandingkan dengan daerah sekitarnya yang disusun oleh batuan keras.

Di wilayah Kota Tasikmalaya untuk potensi bencana gempa bumi berdasarkan kajian Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2019 terdapat 3 zona potensi bencana gempa bumi dan ikutannya di Kota Tasikmalaya, yaitu sebagai berikut:

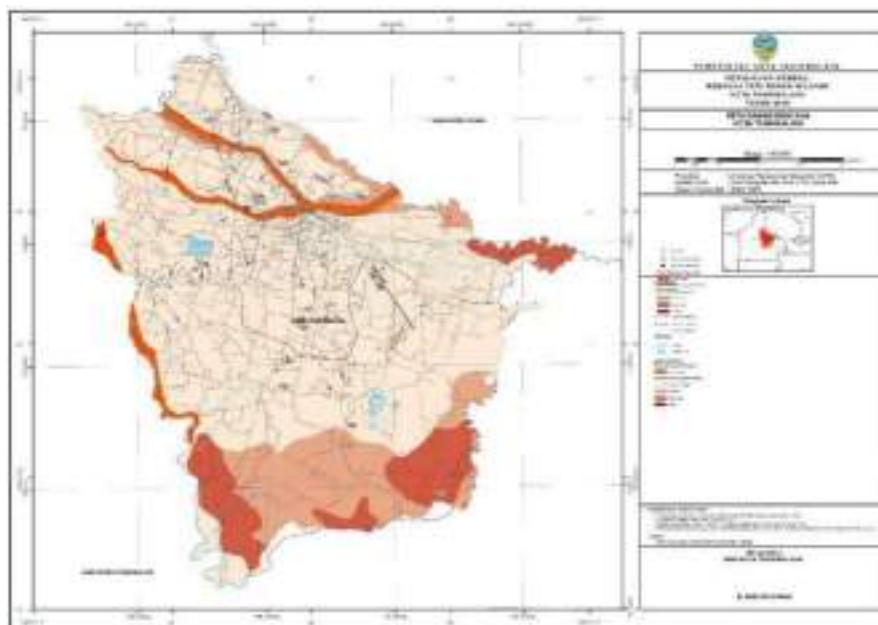
1. Zona Potensi Bencana Gempa bumi dan Ikutan I, meliputi sebagian kecil wilayah Kecamatan Cibeureum, Tamansari, Kawalu dan Mangkubumi;
2. Zona Potensi Bencana Gempa bumi dan Ikutan II, meliputi 50% wilayah Kecamatan Indihiang, 65% wilayah Kecamatan Cipedes, 60% wilayah Kecamatan Tawang, 75% wilayah Kecamatan Cihideung, 45 % wilayah Kecamatan Cibeureum dan 50% wilayah Kecamatan Kawalu;
3. Zona Potensi Bencana Gempa bumi dan Ikutan III, meliputi 50% wilayah Kecamatan Indihiang, 35% wilayah Kecamatan Cipedes, 40% wilayah Kecamatan Tawang, 25% wilayah Kecamatan Cihideung, 40% wilayah Kecamatan Cibeureum dan 25% wilayah Kecamatan Kawalu.

Potensi bencana gerakan tanah di Kota Tasikmalaya akan terjadi di sepanjang aliran sungai yang memiliki tebing sungai yang cukup terjal  $>45^\circ$ . Sungai-Sungai yang terdapat di Kota Tasikmalaya dan sekitarnya, memiliki ciri lembah berbentuk V, menunjukkan bahwa sungai-sungai tersebut memiliki karakter erosi makan ke hulu dan ke dasar lembah. Potensi gerakan tanah yang dapat terjadi diantaranya runtuh tanah penutup, jatuhnya bongkah tanah dan bongkah batuan beku. Potensi gerakan tanah di kota ini dapat juga terjadi di bukit-bukit/gunung-gunung yang telah ditambang atau digali, sehingga menyisakan bukit-bukit berlereng terjal. Mengingat batuan penyusun bukit-bukit ini yang terdiri dari campuran breksi, lava dan tufa yang bersifat lepas antara satu dengan lainnya dan tidak terkompaksi secara baik, sangat besar potensi terjadinya gerakan tanah jenis jatuhnya atau runtuh bongkah breksi dan lava.

Potensi bencana gunungapi sebagai potensi bencana ikutan yang mungkin dapat terjadi pada peristiwa gempa bumi kuat berdasarkan peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Galunggung, Jawa Barat berskala 1 : 50.000 (Direktorat Vulkanologi/PVMBG, 1983). Potensi bencana gunungapi tersebut diantaranya berupa potensi lontaran batu pijar dan hujan abu lebat pada radius 1,5 km dari pusat erupsi. Potensi terlanda lontaran batu pijar terdapat pada radius 4 km dari pusat erupsi dan potensi terlanda hujan abu vulkanik dan terkena lontaran batu pijar pada radius 8 km dari pusat erupsi. Selain itu gunungapi ini juga mempunyai daerah yang selalu berpotensi terancam aliran awan panas, lava dan gas beracun (arsir kotak-kotak), zona potensi terlanda aliran awan panas (arsir tegak), lava dan lahar hujan serta daerah potensi terlanda aliran lahar hujan (arsir mendatar).



Gambar 2.8.  
Peta Rawan Bencana Kota Tasikmalaya



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2022.

#### 2.1.1.8. Kondisi Kependudukan

##### 1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 sebanyak 733.467 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,32% dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 723.920 jiwa. Jumlah dan pertumbuhan penduduk di Kota Tasikmalaya dari tahun 2020 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5.  
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Tasikmalaya  
Tahun 2020-2022

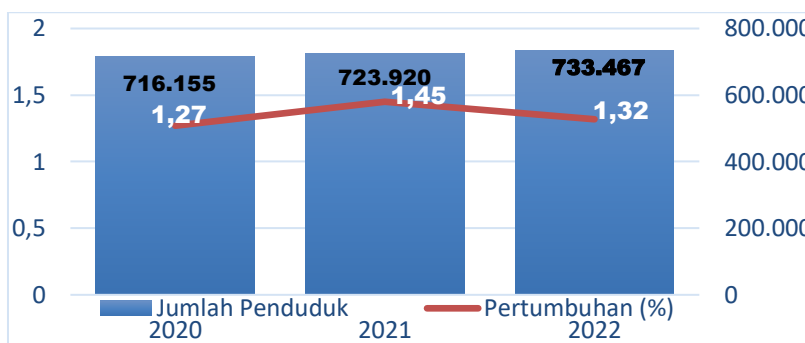
Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan (%)
2020	716.155	1,27
2021	723.920	1,45
2022	733.467	1,32

Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka, BPS 2023

Perkembangan jumlah penduduk pada kurun waktu tahun 2020 - 2022 mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya seperti ditunjukkan dalam gambar berikut ini:

Gambar 2.9.

Perkembangan Demografi Kota Tasikmalaya 2020-2022



Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka, BPS Tahun 2023.

Berdasarkan data dari BPS, komposisi penduduk Kota Tasikmalaya terdiri dari laki-laki sebanyak 372.285 jiwa dan perempuan sebanyak 361.182 jiwa. Sebaran jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Mangkubumi, yaitu sebanyak 99,96 ribu jiwa atau 13,63 persen, sedangkan jumlah penduduk terkecil di Kecamatan Purbaratu sebanyak 45,42 ribu jiwa atau 6,19 persen. Data sebaran penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6.

Jumlah Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2022

Kecamatan	Penduduk (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)
Kawalu	98,64	13,45	2.372
Tamansari	79,62	10,86	2.166
Cibeureum	69,69	9,50	3.745
Purbaratu	45,42	6,19	3.735
Tawang	61,61	8,40	8.929
Cihideung	73,69	10,05	13.521
Mangkubumi	99,96	13,63	4.135
Indihiang	59,36	8,09	5.451
Bungursari	63,09	8,60	3.591
Cipedes	82,39	11,23	9.114
Kota Tasikmalaya	733,47	100,00	4.005

Sumber : Kota Tasikmalaya Dalam Angka, BPS Tahun 2023.

Berdasarkan kepadatannya, sebagian besar penduduk Kota Tasikmalaya terkonsentrasi di 3 (tiga) kecamatan yang berada di pusat kota. Hal ini terlihat dari kepadatan penduduknya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Cihideung 13.521 jiwa/km<sup>2</sup>, Kecamatan Cipedes 9.114 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kecamatan Tawang 8.929 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan 7 (tujuh) kecamatan lainnya memiliki kepadatan penduduk yang berkisar antara 2.166 jiwa/km<sup>2</sup> hingga 5.451 jiwa/km<sup>2</sup>. Hal ini berarti terdapat ketimpangan sebaran penduduk yang mencolok antara 3 kecamatan kawasan pusat kota dan 7 kecamatan lainnya.

## 2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Struktur Usia

Ditinjau dari jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat diketahui bahwa Kota Tasikmalaya memiliki jumlah penduduk dengan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan (sex ratio) relatif konstan setiap tahunnya, yaitu berkisar antara 103,07 sampai dengan 103,21 untuk kurun waktu tahun 2020-2022. Hal ini berarti dari 100 penduduk perempuan di Kota Tasikmalaya terdapat 103 penduduk laki-laki. Tabel berikut memperlihatkan jumlah penduduk di Kota Tasikmalaya menurut jenis kelamin.

Tabel 2.7.  
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Tasikmalaya  
Tahun 2020-2022

Tahun	Jenis Kelamin				Laki-laki +Perempuan	Sex Rasio
	Laki-laki		Perempuan			
	Jumlah	%	Jumlah	%		
2020	363.740	50,79	352.415	49,21	716.155	103,21
2021	367.563	50,77	356.358	49,22	723.921	103,14
2022	372.285	50,76	361.182	49,24	733.467	103,07

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, Data diolah 2023.

Data Penduduk Kota Tasikmalaya tahun 2022 menurut jenis kelamin per kelompok umur adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8.  
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Tasikmalaya  
Tahun 2022

KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 4	31.438	29.922	61.360
5 - 9	28.487	27.375	55.862
10 - 14	31.085	29.086	60.171
15 - 19	31.521	29.851	61.372
20 - 24	30.466	29.487	59.953
25 - 29	30.267	28.823	59.090
30 - 34	29.643	27.827	57.470
35 - 39	28.200	26.759	54.959
40 - 44	26.863	24.977	51.840
45 - 49	24.441	23.806	48.247
50 - 54	21.360	21.479	42.839
55 - 59	18.922	19.162	38.084
60 - 64	14.772	15.216	29.988
65 - 69	11.511	11.919	23.430
70 - 74	7.164	8.019	15.183
75 +	6.145	7.474	13.619
JUMLAH	372.285	361.182	733.467

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2023.

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa komposisi penduduk Tasikmalaya paling tinggi berada pada usia produktif. Hal tersebut menjadi modal dasar

pembangunan yang sangat potensial. Sumber Daya Manusia yang berkualitas adalah motor penggerak utama pembangunan.

### 3. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan perkembangan dan karakteristik wilayah, dapat teridentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perdagangan jasa, perumahan permukiman, industri dan lain-lain. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 pengembangan struktur ruang Kota Tasikmalaya memiliki 3 (tiga) fokus kebijakan yaitu:

- a) pemantapan fungsi pusat pelayanan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa;
- b) peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan; dan
- c) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Sedangkan kebijakan pengembangan pola ruang meliputi:

- a) Kebijakan pengelolaan kawasan lindung, meliputi:
  - peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
  - pelestarian kawasan cagar budaya; dan
  - penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kota.
- b) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, meliputi:
  - pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
  - pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien

Selain itu terdapat potensi pengembangan wilayah yang kemudian ditetapkan sebagai kawasan strategis sebagai berikut :

- a) Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek ekonomi, meliputi:
  - kawasan pusat kota;
  - kawasan peruntukan industri dan pergudangan;
  - kawasan minapolitan di Kecamatan Indihiang dan Kecamatan Bungursari;
  - kawasan pendidikan terpadu di Kecamatan Tamansari;
- b) Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek lingkungan, meliputi:
  - kawasan Situ Gede di Kecamatan Mangkubumi; dan
  - kawasan Wisata Alam Urug di Kecamatan Kawalu.
- c) Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek pertahanan dan keamanan negara adalah kawasan Pangkalan Udara Wiriadinata.

#### 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

##### 2.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tabel 2.9.  
Indikator Makro Kota Tasikmalaya Tahun 2020 - 2022

NO.	INDIKATOR	2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Pembangunan Manusia	72,05	73,04	73,25	73,31	73,95	73,83
	Indeks Pendidikan	67,95	68,46	68,25	69,12	68,50	69,18
	Rata-rata Lama Sekolah	9,35	9,33	9,55	9,52	9,70	9,53
	Harapan Lama Sekolah	13,47	13,45	13,51	13,46	13,54	13,47
	Indeks Kesehatan	80,4	80,23	81,06	80,52	81,65	80,97
	Usia Harapan Hidup	72,35	72,15	72,75	72,34	73,15	72,63
	Indeks Daya Beli	55,79	70,93	57,58	70,78	59,63	71,85
	Pengeluaran per Kapita	7,63	10,26	8,57	10,21	9,86	10,57
2	PDRB Perkapita ADH Berlaku	30,23	32,51	30,77	31,56	31,04	34,05
3	PDRB Perkapita ADH Konstan		21,60		22,08		22,88
4	PDRB ADH Berlaku	22,08	21,59	22,98	22,85	23,61	24,97
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	2,5	-2,01	4,5	3,57	5,00	5,01
6	Inflasi	2,5	1,61	2,25	1,17	2,00	6,65
7	Indeks gini	0,41	0,366	0,4	0,414	0,39	0,405
8	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,22	1,27	0,21	1,45	0,20	1,32
9	Angka Kemiskinan	13,5	12,97	12,5	13,13	11,50	12,72
10	Tingkat Pengangguran terbuka	8,50	7,95	7,72	7,66	7,02	6,62

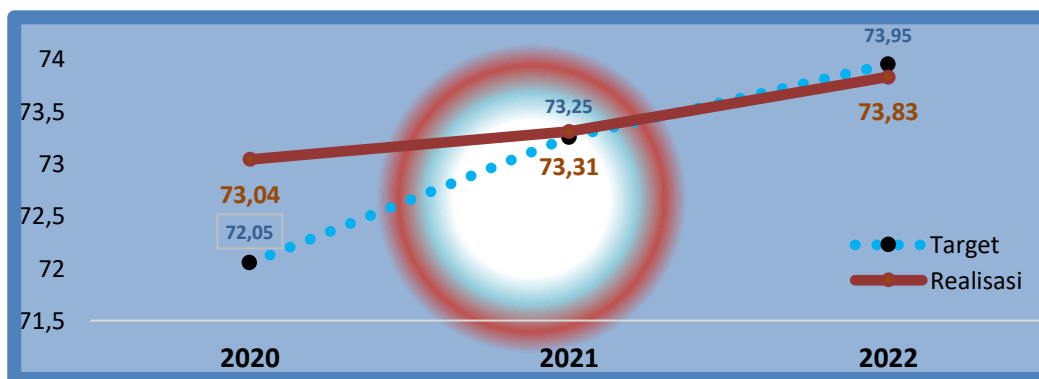
Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, Data diolah, 2023.

### 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan dan Standar hidup layak.

Capaian IPM Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2022 dapat dilihat pada gambar berikut:

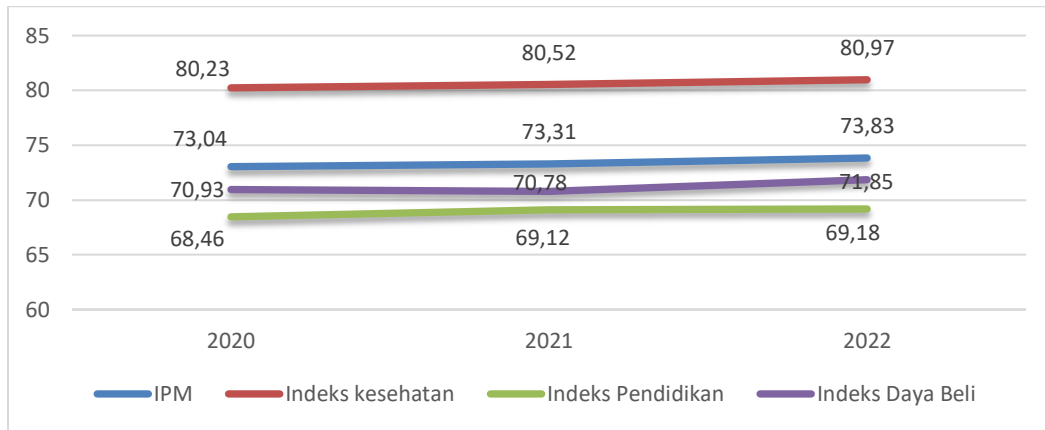
Gambar 2.10.  
Target & Realisasi Indeks Pembangunan Manusia Kota Tasikmalaya 2020-2022 (Point)



Sumber : BPS Kota

Tasikmalaya. 2023

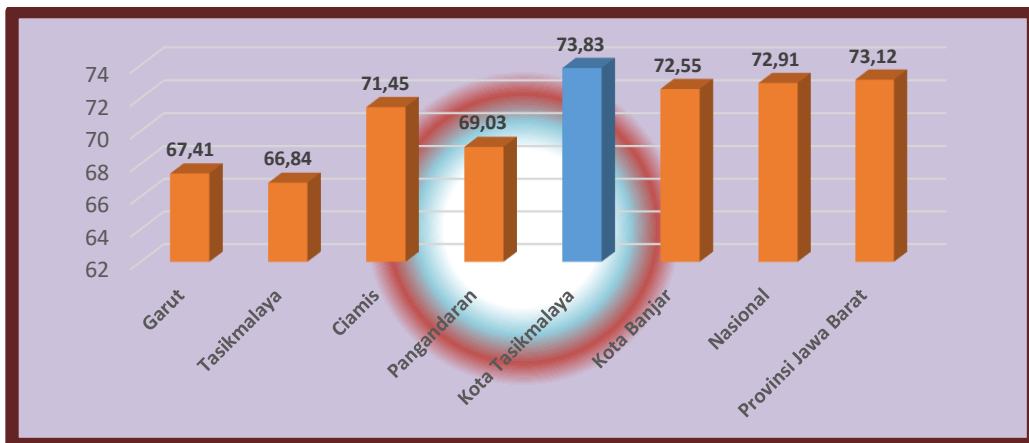
Gambar 2.11.  
Perkembangan IPM Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2022



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya. 2023

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa IPM Kota Tasikmalaya terus mengalami kenaikan yaitu 73,04 poin pada tahun 2020 meningkat menjadi 73,83 poin pada tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan capaian IPM provinsi dan nasional dan beberapa daerah di priangan timur, capaian IPM Kota Tasikmalaya tahun 2022 lebih tinggi dari capaian nasional, provinsi Jawa Barat dan daerah lainnya di priangan timur.

Gambar 2.12.  
Perbandingan IPM Kota Tasikmalaya, Nasional, Jawa Barat dan Daerah di Priangan Timur



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya. 2023

## 2. Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (2.100 kilo kalori) dan bukan makanan. Konsep yang dipakai oleh pemerintah (BPS) dan juga beberapa negara lain dalam menentukan kemiskinan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Penduduk dikatakan miskin jika penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan adalah rupiah yang diperlukan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum akan makanan (2.100 kkal/kapita/hari) dan bukan makanan.

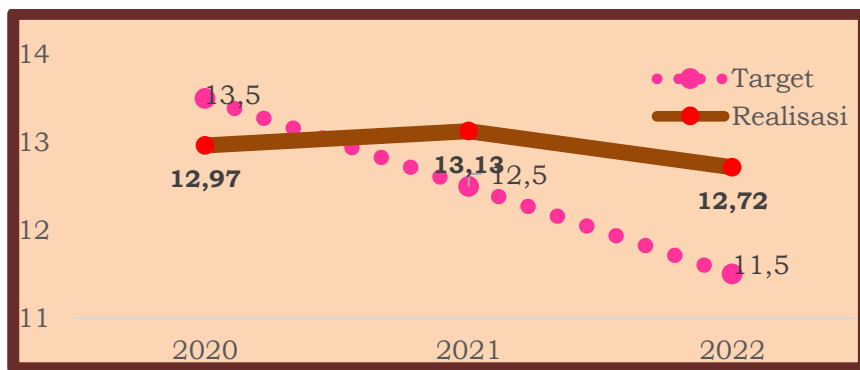
Tabel 2.10.  
Data Kemiskinan Kota Tasikmalaya 2020 - 2022

Indikator	2020	2021	2022
Tingkat Kemiskinan (%) (P0)	12,97	13,13	12,72
Penduduk Miskin (ribu orang)	86,13	89,46	87,13
Garis Kemiskinan (Rp/bulan/kapita)	470.150	480.341	498.711
Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,75	2,41	2,34
Keparahan Kemiskinan (P2)	0,39	0,69	0,65

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya.

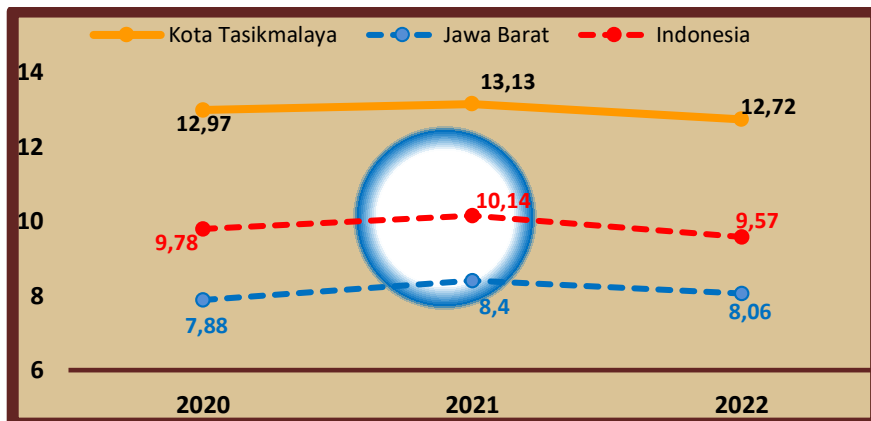
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 kemiskinan Kota Tasikmalaya masih berada pada angka yang masih tinggi yaitu 12,72%, di atas tingkat kemiskinan nasional dan Provinsi Jawa Barat.

Gambar 2.13.  
Target & Realisasi Angka Kemiskinan Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2022 (Persen)



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya

Gambar 2.14.  
Kemiskinan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dan Nasional



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya

Kemiskinan Kota Tasikmalaya bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan daerah lainnya di provinsi Jawa Barat maka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11  
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa barat

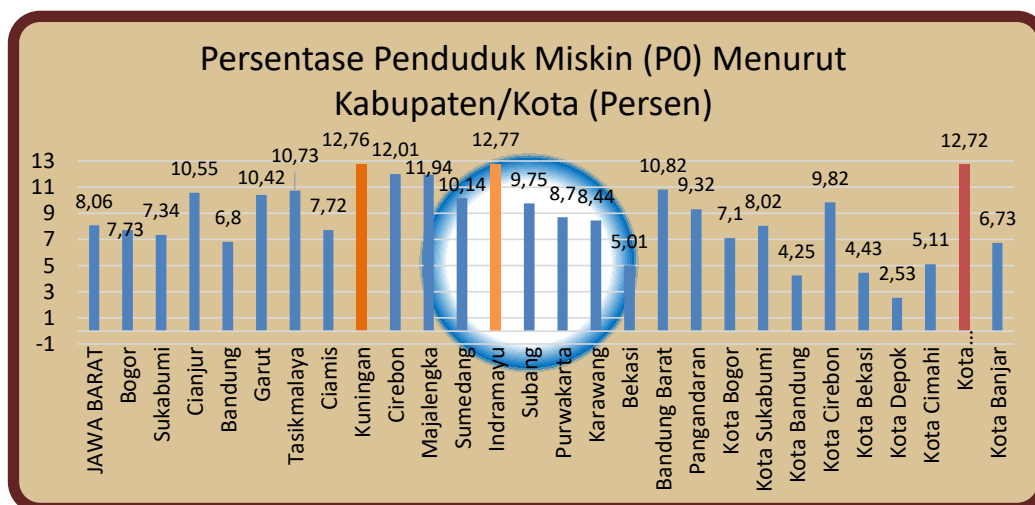
Nama Wilayah	Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)	
	2021	2022
JAWA BARAT	8.40	8.06
Bogor	8.13	7.73
Sukabumi	7.70	7.34
Cianjur	11.18	10.55
Bandung	7.15	6.80
Garut	10.65	10.42
Tasikmalaya	11.15	10.73
Ciamis	7.97	7.72
Kuningan	13.10	12.76
Cirebon	12.30	12.01
Majalengka	12.33	11.94
Sumedang	10.71	10.14
Indramayu	13.04	12.77
Subang	10.03	9.75
Purwakarta	8.83	8.70
Karawang	8.95	8.44
Bekasi	5.21	5.01
Bandung Barat	11.30	10.82
Pangandaran	9.65	9.32
Kota Bogor	7.24	7.10
Kota Sukabumi	8.25	8.02
Kota Bandung	4.37	4.25
Kota Cirebon	10.03	9.82
Kota Bekasi	4.74	4.43
Kota Depok	2.58	2.53
Kota Cimahi	5.35	5.11
Kota Tasikmalaya	13.13	12.72
Kota Banjar	7.11	6.73

Sumber : BPS Jawa Barat, 2023.

Sejak tahun 2008 Kota Tasikmalaya menjadi wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Jawa Barat, sejalan dengan pembangunan yang dilaksanakan melalui program penanggulangan kemiskinan, pada tahun 2022 Kota Tasikmalaya telah berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 12,72 persen dan menduduki urutan ke 3 (tiga) dari bawah atau dengan kata lain Kota Tasikmalaya tidak lagi menjadi wilayah termiskin di Jawa Barat.



Gambar 2.15.  
Kemiskinan Jawa Barat



Sumber : BPS Jawa Barat, 2023.

Berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan ekstrem, jumlah penduduk miskin ekstrem di Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 sebanyak 23,88 ribu jiwa.

Tabel 2.12.  
Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (Ribu Jiwa)	
	2021	2022
Bogor	107.25	146.12
Sukabumi	24.61	19.90
Cianjur	57.04	36.16
Bandung	66.96	56.43
Garut	30.32	82.17
Tasikmalaya	28.24	15.74
Ciamis	5.51	17.90
Kuningan	24.03	31.89
Cirebon	64.44	81.89
Majalengka	43.84	24.13
Sumedang	31.71	36.82
Indramayu	75.82	53.05
Subang	57.51	35.44
Purwakarta	18.58	16.93
Karawang	28.22	64.02
Bekasi	56.00	25.82
Bandung Barat	28.25	33.59
Pangandaran	5.61	5.93
Kota Bogor	13.59	14.45
Kota Sukabumi	9.98	4.49
Kota Bandung	24.79	25.37
Kota Cirebon	13.06	5.32
Kota Bekasi	33.25	61.75
Kota Depok	9.44	17.57
Kota Cimahi	8.34	2.63
Kota Tasikmalaya	27.17	23.88
Kota Banjar	2.08	2.49
Provinsi Jawa Barat	895.64	941.86

Sumber : BPS Jawa Barat, 2023.

### 3. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari 21.589,5 Milyar pada tahun 2020 dan menjadi 24.974,68 pada tahun 2022. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.13. dan tabel 2.14.

Tabel 2.13.  
Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya  
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2022 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2020	2021	2022
(1)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan	1 079,4	1 100,18	1 202,36
B Pertambangan dan Penggalian	1,8	1,91	1,99
C Industri Pengolahan	3 051,3	3 159,59	3 450,78
D Pengadaan Listrik dan Gas	2,9	2,99	3,15
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	90,7	96,31	97,44
F Konstruksi	3 341,1	3 700,54	3 975,54
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	4 719,3	4 954,11	5 416,72
H Transportasi dan Pergudangan	2 028,6	2 072,51	2 320,07
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1 148,6	1 209,65	1 440,33
J Informasi dan Komunikasi	915,2	978,57	1 038,06
K Jasa Keuangan dan Asuransi	2 201,9	2 396,31	2 596,50
L Real Estat	360,6	397,89	438,12
M,N Jasa Perusahaan	222,2	240,39	288,50
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	895,5	921,48	918,53
P Jasa Pendidikan	483,9	511,52	534,79
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	501,0	547,86	605,46
R,S,T, U Jasa Lainnya	545,5	553,75	646,33
Produk Domestik Bruto	21 589,5	22 845,56	24 974,68

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2023

Selain PDRB Atas Dasar Harga Berlaku juga dilakukan penghitungan PDRB berdasarkan Harga Konstan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.14.  
Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya  
Atas Dasar Harga Konstan, Tahun 2020 - 2022 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2020	2021	2022
(1)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	658,9	660,75	690,75
B Pertambangan dan Penggalian	1,3	1,36	1,38
C Industri Pengolahan	2 153,5	2 194,62	2 312,87

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2020	2021	2022
(1)	(4)	(5)	(6)
D Pengadaan Listrik dan Gas	1,6	1,68	1,74
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	59,6	63,01	63,00
F Konstruksi	2 333,3	2 475,68	2 577,18
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3 575,0	3 681,31	3 841,48
H Transportasi dan Pergudangan/	1 435,1	1 439,91	1 542,85
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	753,5	771,50	879,72
J Informasi dan Komunikasi	869,8	932,45	989,33
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1 470,0	1 552,58	1 539,33
L Real Estat	290,4	319,77	341,52
M,N Jasa Perusahaan <i>Activities</i>	156,6	168,53	193,83
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	579,3	591,46	591,23
P Jasa Pendidikan	306,5	314,93	321,55
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial <i>Activities</i>	361,1	386,04	416,11
R,S,T, Jasa Lainnya <i>Activities</i>	424,4	425,66	477,17
Produk Domestik Bruto	15 430,0	15 981,25	16 781,04

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2023

#### 4. Struktur Perekonomian

Dari besaran PDRB, dapat digambarkan kontribusi nilai tambah setiap kategori dalam pembentukan PDRB atau distribusi persentase kategorial terhadap pembentukan PDRB sehingga terlihat struktur perekonomiannya. Semakin besar persentase suatu kategori semakin besar pengaruh kategori tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah, sehingga akan tampak kategori-kategori yang menjadi pemicu pertumbuhan di wilayah bersangkutan. Lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.15.

Tabel 2.15.  
Peranan Kategorial dalam PDRB Kota Tasikmalaya  
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 - 2022 (Persen)

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2020	2021	2022
(1)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,00	4,82	4,81
B Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01	0,01
C Industri Pengolahan	14,13	13,83	13,82
D Pengadaan Listrik dan Gas/	0,01	0,01	0,01
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,42	0,42	0,39
F Konstruksi	15,48	16,20	15,92

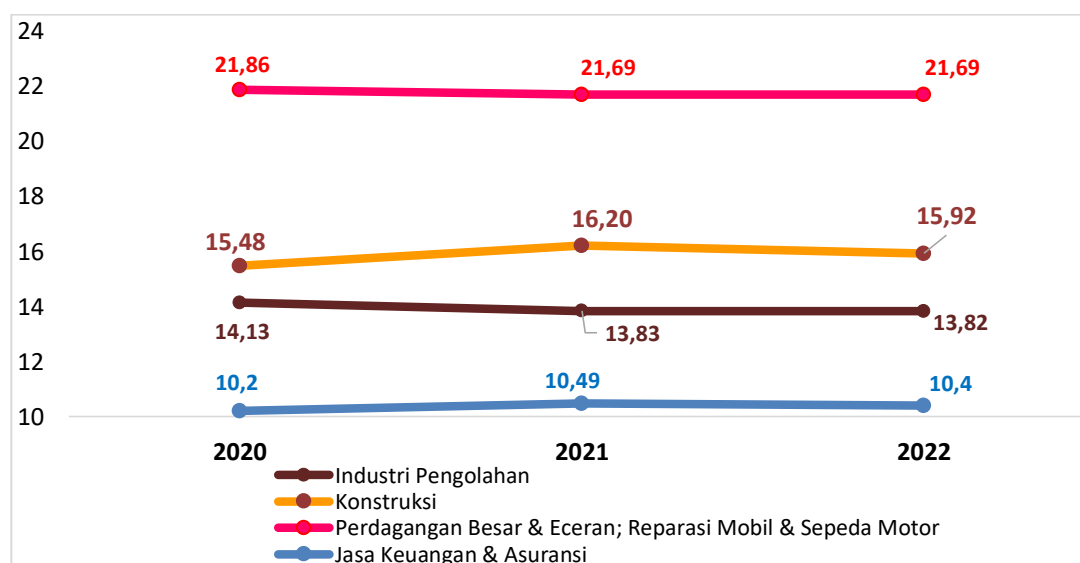
Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>		2020	2021	2022
(1)		(4)	(5)	(6)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/	21,86	21,69	21,69
H	Transportasi dan Pergudangan	9,40	9,07	9,29
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,32	5,29	5,77
J	Informasi dan Komunikasi	4,24	4,28	4,16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/	10,20	10,49	10,40
L	Real Estat	1,67	1,74	1,75
M,N	Jasa Perusahaan	1,03	1,05	1,16
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,15	4,03	3,68
P	Jasa Pendidikan	2,24	2,24	2,14
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/	2,32	2,40	2,42
R,S,T, U	Jasa Lainnya <i>Activities</i>	2,53	2,42	2,59
Produk Domestik Bruto/		100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2023.

Selama tiga tahun terakhir (2020 - 2022) struktur perekonomian Kota Tasikmalaya didominasi oleh kategori lapangan usaha; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Industri Pengolahan. Telah terjadi pergeseran struktur ekonomi pada periode lima tahun terakhir. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dari tahun 2020 s.d. 2022 menduduki peringkat pertama kontribusinya terhadap PDRB Kota Tasikmalaya. Peranan Kategori PDRB Kota Tasikmalaya tahun 2020 s.d 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.16.

Empat Besar Peranan Kategori PDRB Kota Tasikmalaya, 2020-2022 (Persen)



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2023

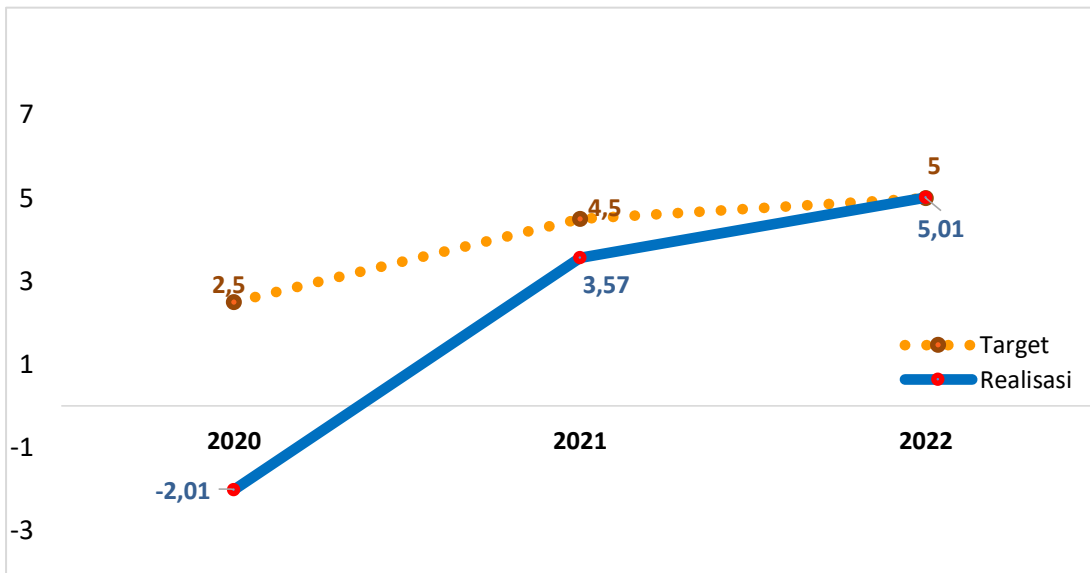
Empat besar kontribusi kategori lapangan usaha terhadap PDRB Kota Tasikmalaya pada tahun 2022, antara lain Kategori Perdagangan Besar dan

Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,69 persen, kemudian disusul oleh Kategori Konstruksi sebesar 15,92 persen, dan Kategori Industri Pengolahan sebesar 13,82 persen serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 10,40 persen.

### 5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Umumnya, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) diukur dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. LPE Kota Tasikmalaya dalam 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi, seiring dengan terjadinya pandemic covid-19 sektor ekonomi mengalami pelambatan pada tahun 2020 dan tahun 2021, yang mengalami pertumbuhan -2,01 persen dan 3,57 persen. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi tercatat 5,01 persen seiring dengan pemulihan ekonomi dan kinerja perekonomian yang semakin baik. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

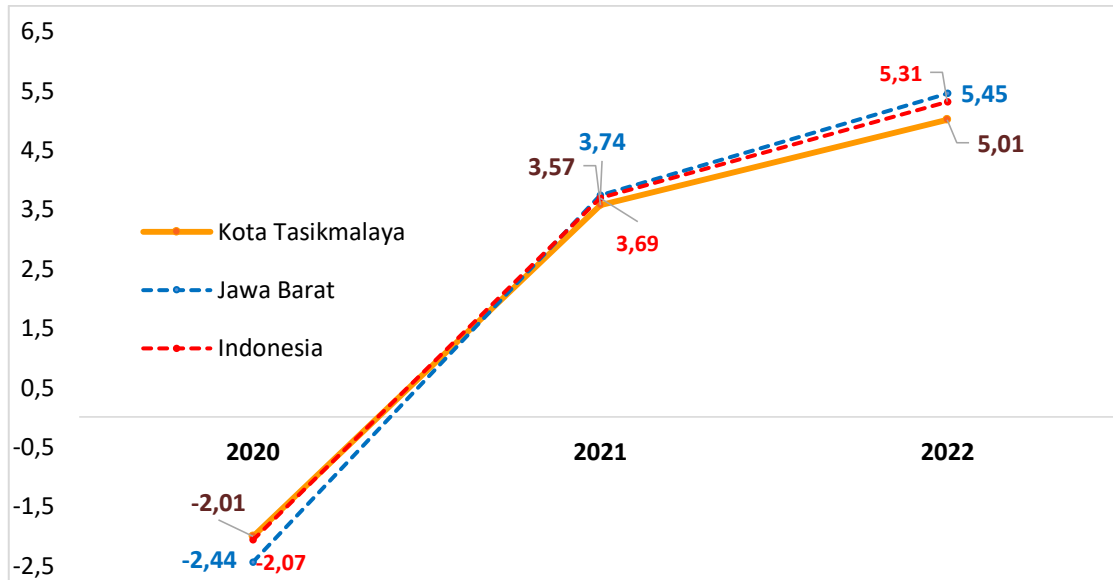
Gambar 2.17.  
Target & Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Tasikmalaya  
2020 - 2022 (Persen)



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2023

Gambar 2.18.

LPE Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020 – 2022 (persen)



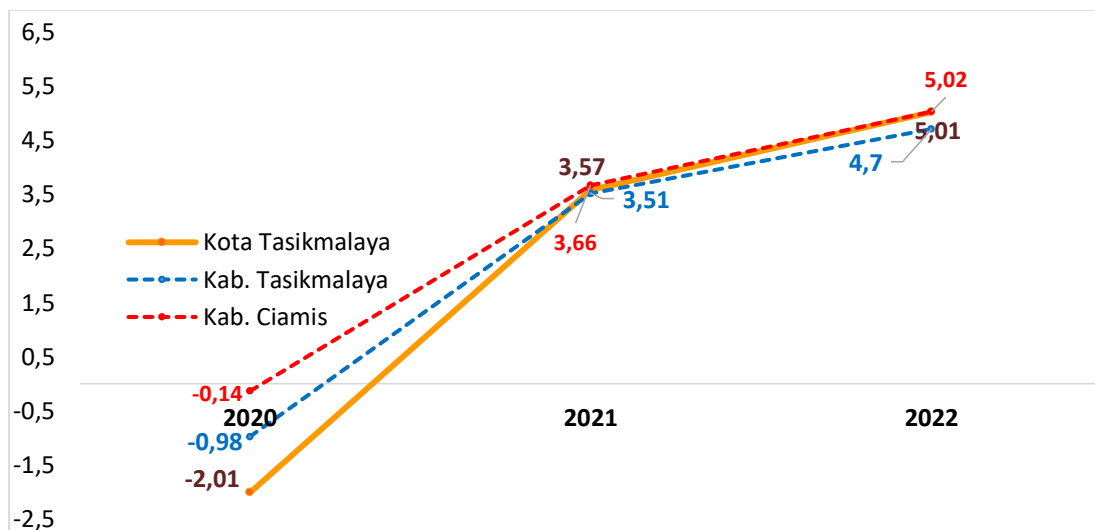
Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2023

Bila dibandingkan dengan LPE Jawa Barat dan Nasional, LPE Kota Tasikmalaya tahun 2022 lebih rendah. Berikut gambaran perbandingan LPE Kota Tasikmalaya dengan LPE Jawa Barat dan LPE Nasional.

Apabila dibandingkan dengan daerah tetangga, LPE Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.19.

LPE Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis Tahun 2020 - 2022



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2023

## 6. PDRB Menurut Pengeluaran

PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16.  
PDRB menurut pengeluaran Tahun 2020 - 2022

Komponen PDRB Pengeluaran	Distribusi PDRB Seri 2010 Menurut Pengeluaran (Persen)		
	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	72.07	69.67	69.84
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2.35	2.29	2.21
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11.05	10.87	10.26
Pembentukan Modal Tetap Bruto	31.67	33.15	32.32
Perubahan Inventor	1.31	-0.65	-0.22
Net Ekspor Impor Antar Daerah	-18.46	-15.32	-14.41
Produk Domestik Regional Bruto	100.00	100.00	100.00

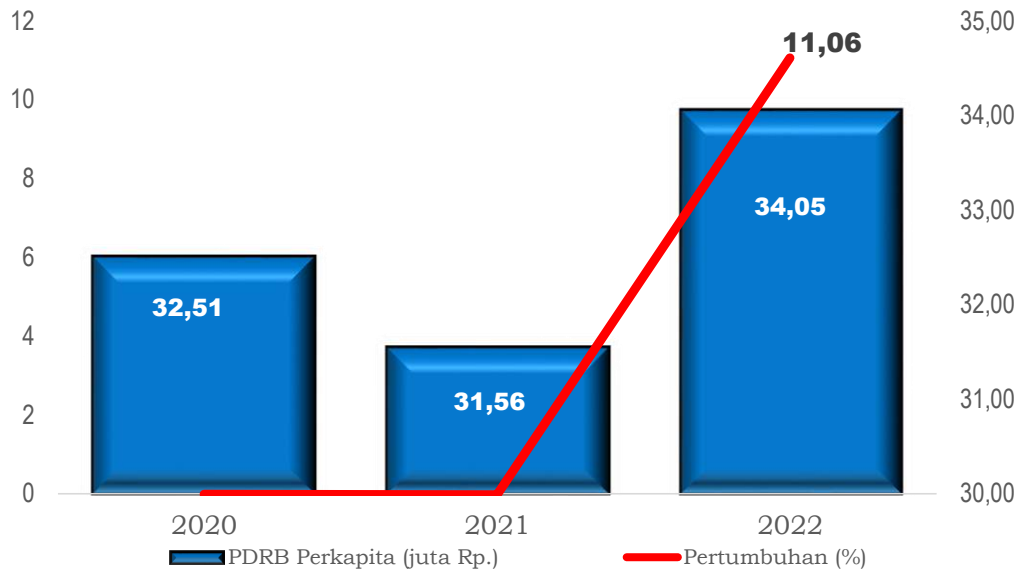
Sumber : BPS Kota Tasikmalaya Tahun 2023

Dari sisi pengeluaran, pengeluaran konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi tertinggi terhadap PDRB pengeluaran yaitu 69,84 persen atau naik sebesar 0,17 persen dari tahun 2021 sebesar 69,67 persen. Adapun pembentukan modal tetap bruto mengalami penurunan dari 33,15 persen pada tahun 2021 menjadi 32,32 persen pada tahun 2022. Begitu juga dengan Pengeluaran Konsumsi LNPRT dan Pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami penurunan. Sedangkan perubahan inventori dan net ekspor impor antar daerah mengalami kenaikan meskipun masih dalam kontribusi negatif.

## 7. PDRB Perkapita

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku di Kota Tasikmalaya tahun 2022 sebesar Rp.34,05 juta mengalami peningkatan sebesar 11,06 persen dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp.31,56 juta. Peningkatan PDRB Perkapita ini merupakan indikasi bahwa pemulihan ekonomi dan kinerja perekonomian di Kota Tasikmalaya semakin membaik pada tahun 2022.

Gambar 2.20.  
Pendapatan Perkapita Kota Tasikmalaya dan Laju Pertumbuhannya  
Tahun 2020-2022

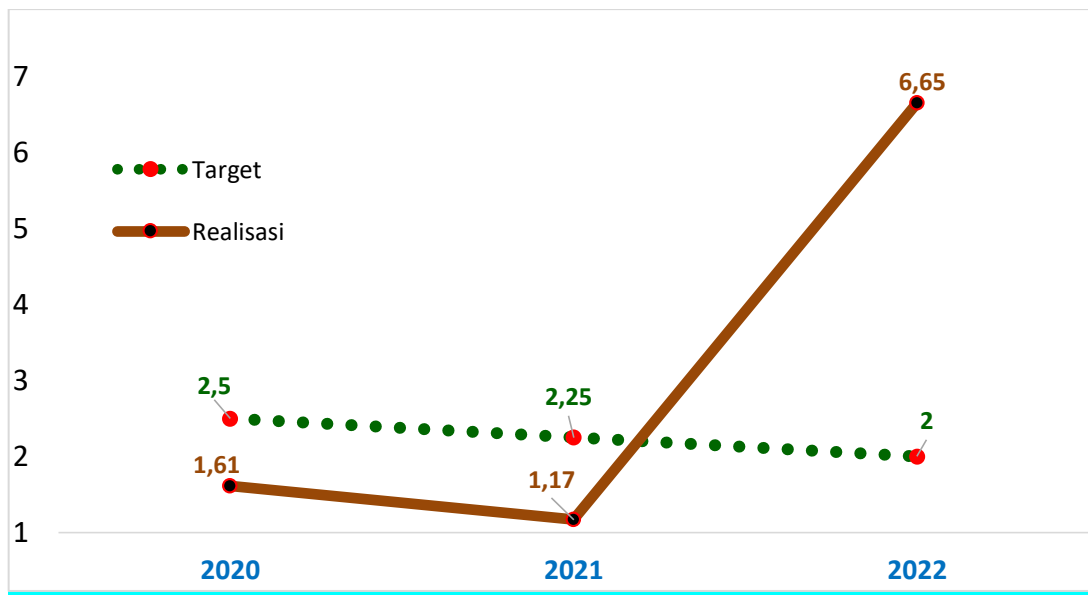


Sumber : BPS Kota Tasikmalaya Tahun 2023.

### 8. Inflasi

Inflasi Kota Tasikmalaya pada tahun 2020 dan 2021 tercatat relative rendah dan terkendali, yaitu pada tahun 2020 tercatat 1,61 persen dan secara signifikan semakin terkendali pada tahun 2021 yang tercatat 1,17 persen. Namun pada tahun 2022 inflasi Kota Tasikmalaya tercatat 6,65 persen, hal ini dampak dari kenaikan harga BBM, kenaikan harga Bahan Bakar Rumah Tangga (Gas) dan kenaikan harga telur ayam ras yang terjadi pada tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.20.

Gambar 2.21.  
Target & Realisasi Inflasi Kota Tasikmalaya, 2020-2022 (Persen)

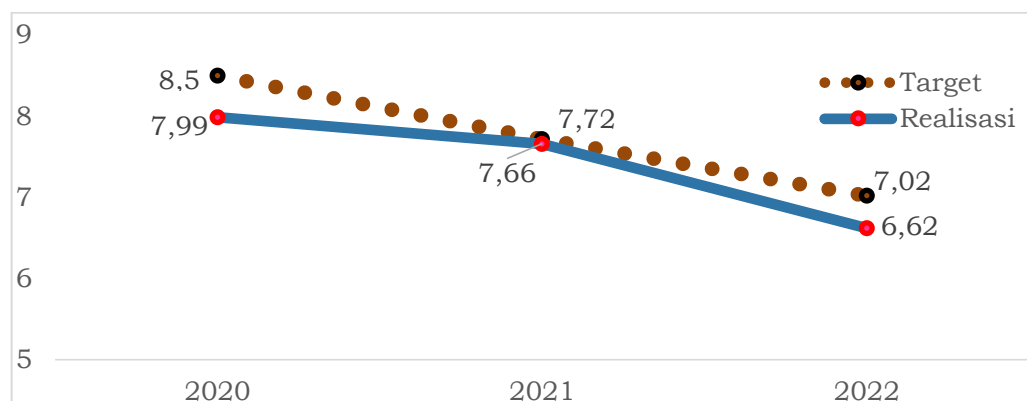


Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2023



9. Tingkat Pengangguran Terbuka

Gambar 2.22.  
Target & Realisasi Tingkat Pengangguran Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2022 (Persen)



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2023

Menurut data Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) BPS Tahun 2022, jumlah penduduk usia kerja di Kota Tasikmalaya sebanyak 525.972 orang, dari jumlah tersebut yang termasuk dalam Angkatan Kerja sebanyak 347.063 orang atau 65,98 persen, sedangkan yang Bukan Angkatan Kerja adalah sebanyak 178.909 orang atau 34,02 persen. Data lebih lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.17.  
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kategori Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2022

Kategori	Tahun		
	2020	2021	2022
Angkatan Kerja	343.285	342.585	347.063
1. Bekerja	315.844	316.349	324.099
2. Pengangguran Terbuka	27.441	26.236	22.964
Bukan Angkatan Kerja	172.612	178.418	178.909
Jumlah	515.897	521.003	525.972
Persentase Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	92,01	92,34	93,38
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja	66,54	65,75	65,98
Tingkat Pengangguran Terbuka	7,99	7,66	6,62

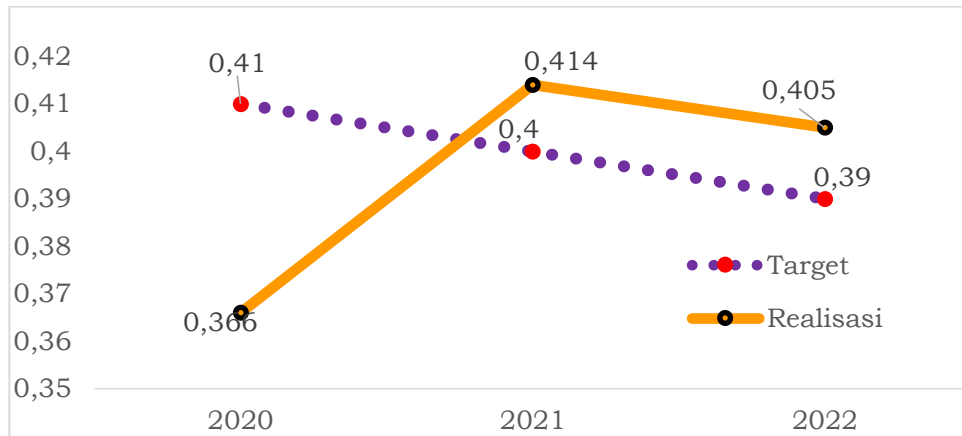
Sumber : Data Sakernas BPS Tahun 2022

### 10. Indeks Gini

Salah satu ukuran kesenjangan ekonomi yang biasa digunakan adalah Koefisien Gini (Indeks Gini). Kesenjangan ekonomi diukur dengan seberapa besar perbandingan distribusi dari pengeluaran dengan distribusi pemerataan ideal (uniform) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien Gini yang lebih besar dari 0,50 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup serius.

Indeks Gini di Kota Tasikmalaya pada tahun 2020-2022 dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.23.  
Target & Realisasi Indeks Gini Kota Tasikmalaya, 2020-2022 (Point)



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2023.

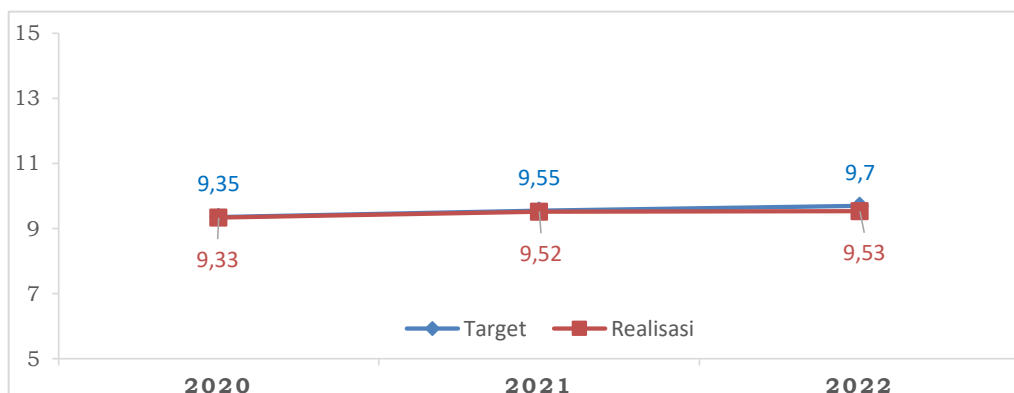
### 2.1.2.2. Kesejahteraan Sosial

#### 2.1.2.2.1. Pendidikan

##### 1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Capaian angka rata-rata lama sekolah (RLS) di Kota Tasikmalaya dari tahun 2020 hingga 2022 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 capaian rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas di Kota Tasikmalaya sebesar 9,33 tahun meningkat menjadi 9,53 tahun pada tahun 2022 artinya bahwa secara rata-rata penduduk Kota Tasikmalaya usia 25 tahun ke atas telah bersekolah selama 9,53 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas I SMA. Capaian RLS pun dapat dilihat melampaui target yang telah ditentukan. Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Gambar 2.24.  
Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2020 - 2022



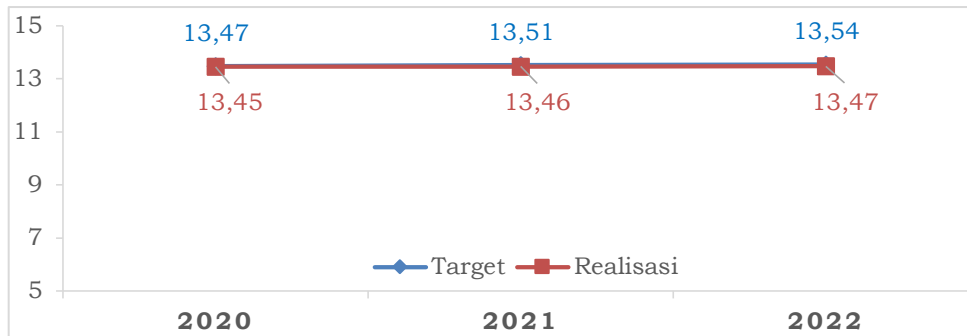
Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2023

## 2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS Kota Tasikmalaya pada tahun 2020-2022 terus mengalami peningkatan. Angka HLS Kota Tasikmalaya berkisar pada 13,45 tahun sampai 13,47 tahun. Dengan kata lain lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun) di masa mendatang memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga D1 atau D2. Namun demikian, pada tahun 2020, 2021 dan 2022 terdapat selisih dari target yang telah ditentukan meskipun tidak terlalu signifikan yakni sebesar 0,02, 0,05 dan 0,07 tahun. Harapan Lama Sekolah di Kota Tasikmalaya secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Gambar 2.25.

Capaian Harapan Lama Sekolah Tahun 2020 - 2022

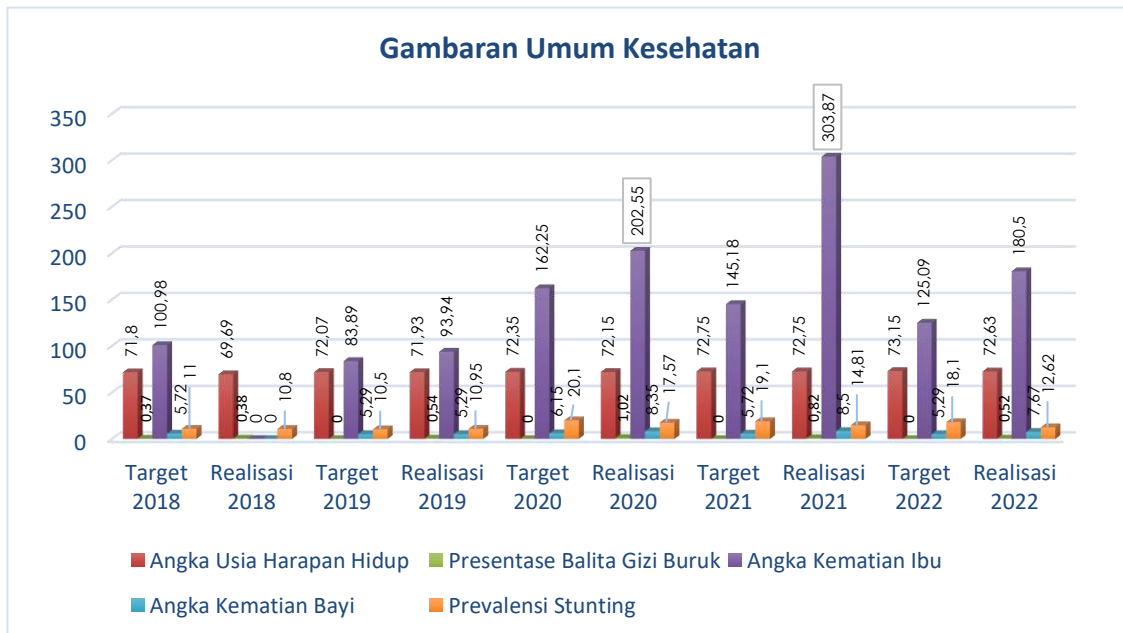


Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2023.

### 2.1.2.2.2. Kesehatan

Gambaran umum indikator makro kesehatan Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu 2018-2022 adalah sebagaimana tabel dan gambar berikut:

Gambar 2.26.



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2023.

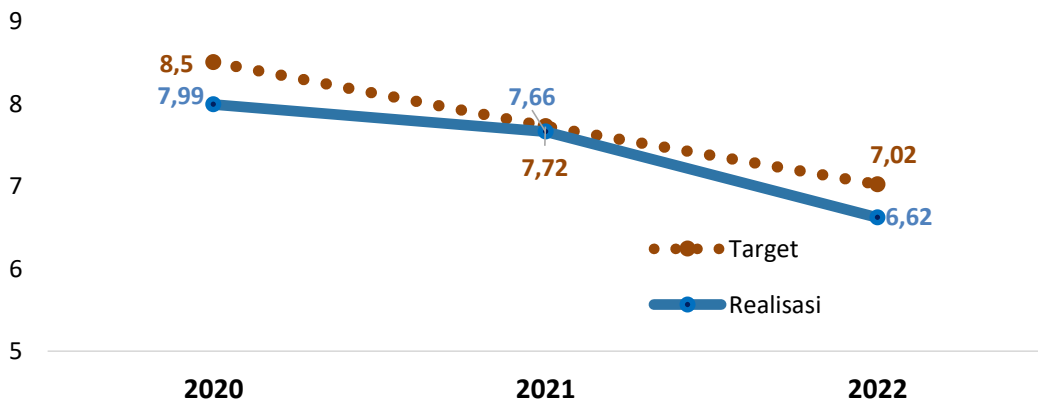
Indikator makro kesehatan yang tidak bisa memenuhi target adalah Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan persentase balita gizi buruk. Angka kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH pada Tahun 2022 dengan target 125,09, dan realisasi 180,5. Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun 2021 dimana Angka Kematian Ibu mencapai 303,87. Angka kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH pada Tahun 2022 adalah 7,67 persen dengan target 5,29 persen. Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun 2021 dimana AKB tercatat sebesar 8,5 persen. Sedangkan untuk persentase balita gizi buruk yang ditargetkan sebesar 0 persen, masih saja terdapat 0,52 persen di tahun 2022 walaupun mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 0,3 persen. Permasalahan tersebut disebabkan oleh masih rendahnya derajat kesehatan ibu hamil, rendahnya kesadaran ibu hamil memeriksakan kehamilan, masih adanya pernikahan dini dan masih adanya proses kelahiran diluar fasilitas kesehatan.

### 2.1.2.2.3. Ketenagakerjaan

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka dan Partisipasi Angkatan Kerja. Capaian hal tersebut di Kota Tasikmalaya tahun 2020 - 2022 dapat dilihat dari tabel dan gambar berikut:

Gambar 2.27.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2022 (persen)

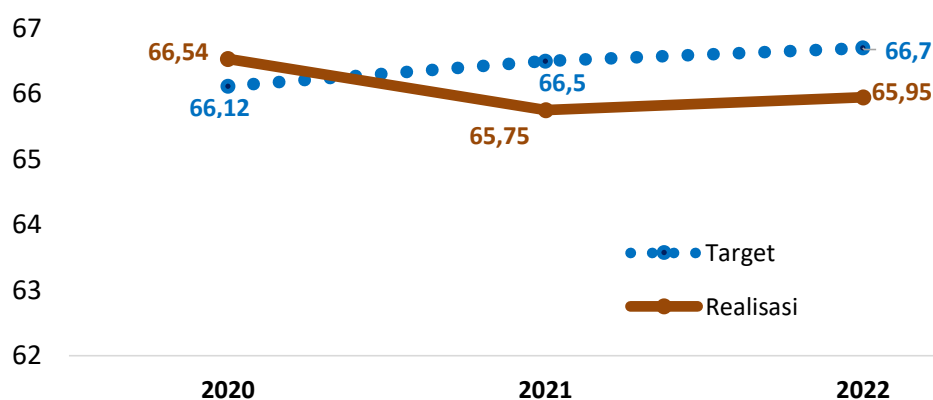


Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2023

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2022 Tingkat Pengangguran di Kota Tasikmalaya mengalami penurunan sebesar 1,04 persen, yaitu dari 7,66 persen pada tahun 2021, menjadi 6,62 persen pada tahun 2022, demikian halnya dengan capaian target yang telah ditetapkan dapat terpenuhi. Hal ini merupakan salah satu indikasi yang menunjukkan bahwa berbagai program dan kegiatan terkait ketenaga kerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya telah berhasil dilaksanakan.

Gambar 2.28.

Partisipasi Angkatan Kerja Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2022 (persen)



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2023.

Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Tasikmalaya pada tahun 2020 tercatat 66,54 persen. Namun akibat pandemi Covid-19 yang terjadi di Kota Tasikmalaya berdampak pada penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2021 menjadi 65,75 persen dan pada tahun 2022 menjadi 65,95 persen.

#### 2.1.2.2.4.Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Seni budaya merupakan wujud kearifan lokal yang keberadaannya harus dipertahankan masyarakat dan pemerintah daerah.

Tabel 2.18.  
Jumlah Grup dan Gedung Seni Budaya  
Tahun 2020 - 2022

Uraian	2020	2021	2022
Jumlah grup kesenian (buah)	173	173	173
Jumlah gedung (unit)	1	1	1

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, 2023.

Sementara itu, salah satu aktivitas masyarakat dalam menjaga kebugaran tubuh dan bersosialisasi, ditunjukkan dengan banyaknya klub olahraga. Dari tahun 2020 sampai dengan 2022, jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk sekitar 2 sampai 3 klub. Sementara jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk hanya sekitar 0,6 gedung, artinya gedung olahraga masih kurang.

Tabel 2.19.  
Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga di Kota Tasikmalaya  
Tahun 2020 - 2022

Uraian	2020	2021	2022
Jumlah klub olahraga (buah)	260	260	260
Jumlah gedung olahraga (unit)	71	71	71

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, 2023.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

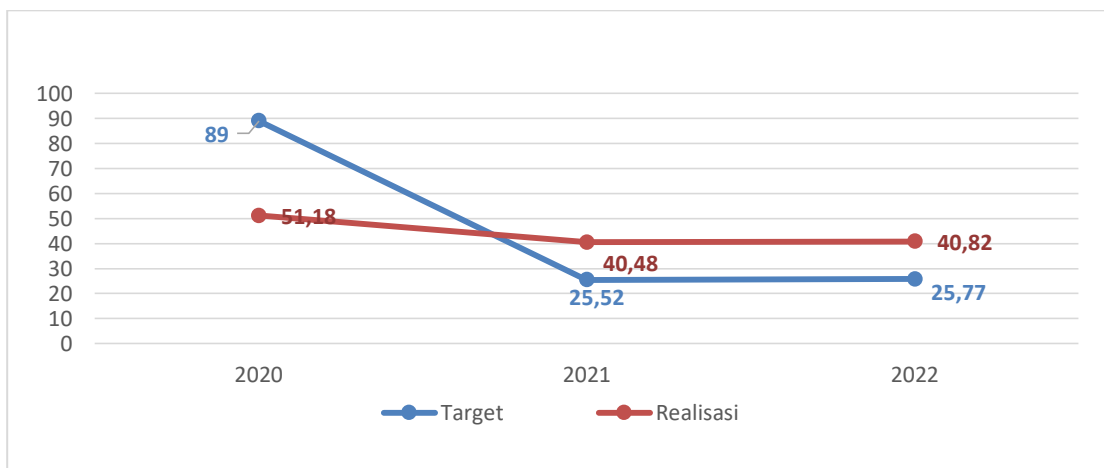
2.1.3.1. Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1. Urusan Pendidikan

1. Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar merupakan indikator pendidikan yang mengukur partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. APK didefinisikan sebagai jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk usia jenjang tertentu. Capaian APK PAUD, SD, dan SMP di Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

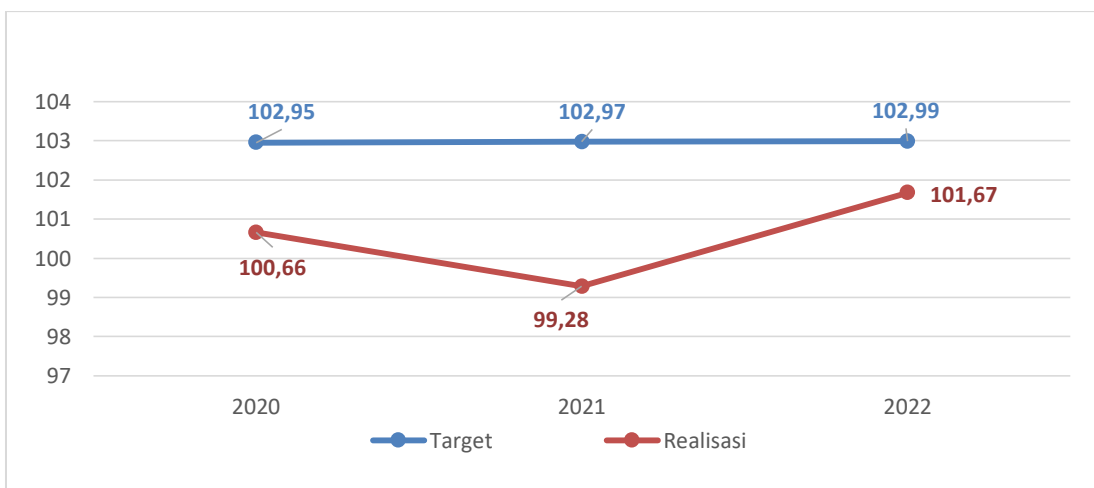
Gambar 2.29.  
Angka Partisipasi Kasar PAUD Tahun 2020-2022



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2023.

Pada tahun 2021 dan 2022 terdapat perubahan target dan formulasi sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022. Pada tahun 2021, dari target 25,52 tercapai 40,48 persen dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan sebesar 0,02 persen. Jika dilihat dari target yang telah ditentukan pada tahun 2021 dan 2022 telah melampaui target yang ditetapkan.

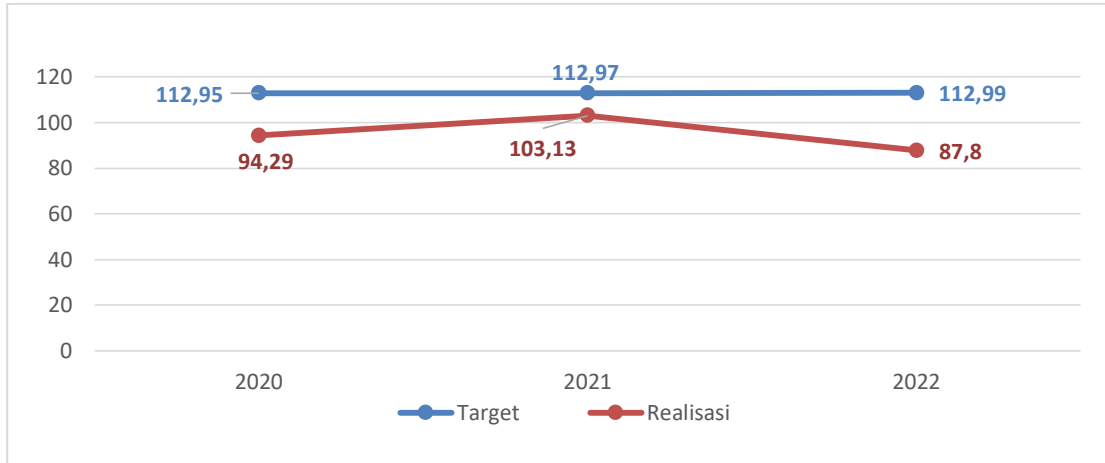
Gambar 2.30.  
Angka Partisipasi Kasar SD Tahun 2020-2022



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2023.

Pada jenjang Sekolah Dasar APK mengalami fluktuasi, terjadi penurunan pada tahun 2021 sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 APK SD sebesar 101,67 artinya mengalami kenaikan sebesar 2,39 persen dari tahun sebelumnya, selain itu APK SD pun belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Gambar 2.31.  
Angka Partisipasi Kasar SMP Tahun 2020-2022



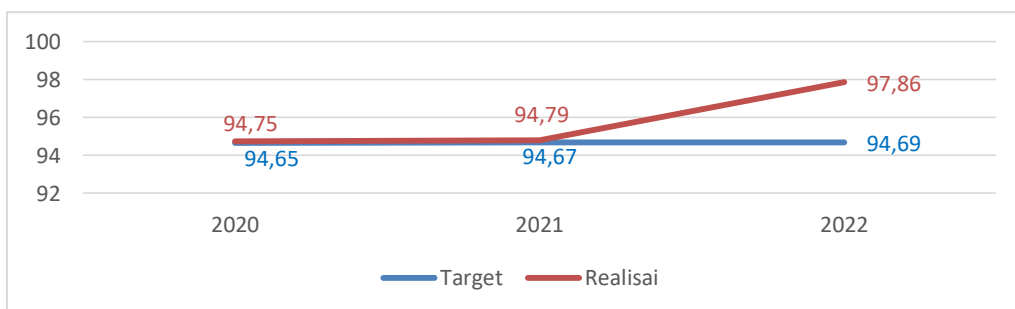
Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2023

APK SMP mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 APK SMP mengalami kenaikan sebesar 8,84 persen dan pada tahun 2022 mengalami penurunan dari 103,13 persen menjadi 87,8 persen. Seperti halnya APK PAUD dan SD, APK SMP pun belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

## 2. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur seberapa banyak anak usia sekolah yang bersekolah tepat waktu. APM didefinisikan sebagai jumlah siswa/penduduk kelompok usia tertentu yang bersekolah pada tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk kelompok usia tertentu.

Gambar 2.32.  
Angka Partisipasi Murni SD Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2022

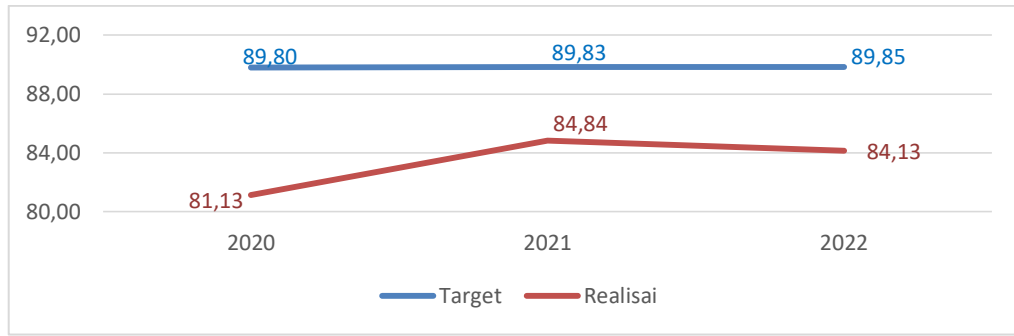


Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2023.

APM SD/MI Sederajat pada tahun 2022 menunjukkan angka 97,86 persen sedangkan tahun sebelumnya 94,79 persen atau dengan kata lain naik sebesar 3,07 persen. Jika dilihat dari target yang telah ditentukan pada tahun 2020, 2021 dan 2022 telah melampaui target yang ditetapkan.

Gambar 2.33.

Angka Partisipasi Murni SMP Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2022



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2023.

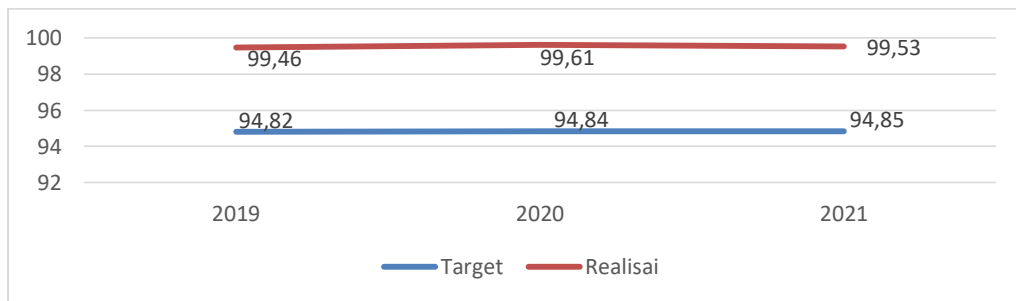
Pada jenjang SMP, APM mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 3,71 persen dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,71 persen. APM SMP tidak mencapai target yang telah ditentukan, hal ini disebabkan oleh adanya peserta didik diluar usia sekolah.

### 3. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah anak usia 7-12 dan 13-15 tahun yang sedang bersekolah dibagi seluruh jumlah anak usia SD (7-12) dan usia SMP (13-15). Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.34.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun Kota Tasikmalaya Tahun 2019-2021

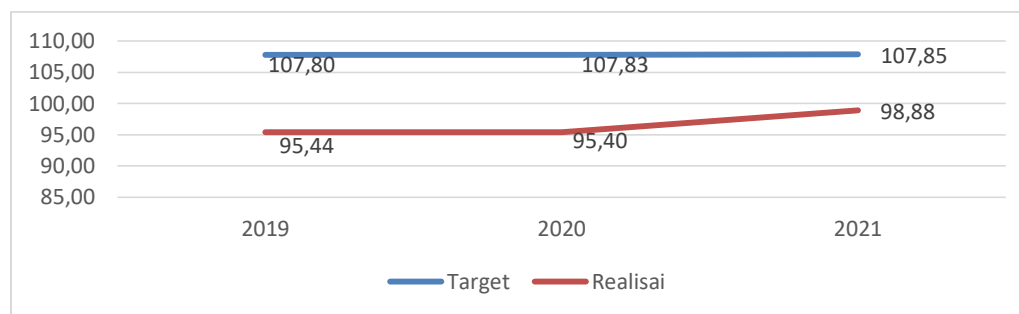


Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

Perbandingan realisasi APS yang dicapai pada tahun 2020 dan 2021 untuk usia 7-12 tahun mengalami penurunan 0,08 persen, yakni dari sebesar 99,61 persen menjadi 99,53 persen. Nilai APS sebesar 99,53 persen artinya dari seluruh penduduk usia 7-12 tahun masih bersekolah, sisanya 0,47 persen ada yang tidak/belum sekolah dan yang sudah tidak bersekolah lagi (putus sekolah).



Gambar 2.35.  
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun Kota Tasikmalaya  
Tahun 2019-2021



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2023

Sementara itu, Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 13-15 tahun sebesar 98,88 persen terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya yakni 95,40 persen. Angka Partisipasi Sekolah 13-15 tahun lebih rendah jika dibandingkan dengan 7-12 tahun dengan kata lain semakin tinggi tingkatan pendidikan semakin rendah turun tingkat partisipasi sekolahnya. Berbagai alasan yang melatarbelakangi antara lain kekurangan biaya, keterbatasan akses ke sekolah, keharusan untuk mencari nafkah, menikah dan lain-lain.

#### 4. Ketersediaan Sekolah

Ketersediaan sekolah jenjang pendidikan dasar di Kota Tasikmalaya tahun 2022 dapat dilihat Pada tabel 2.22 berikut.

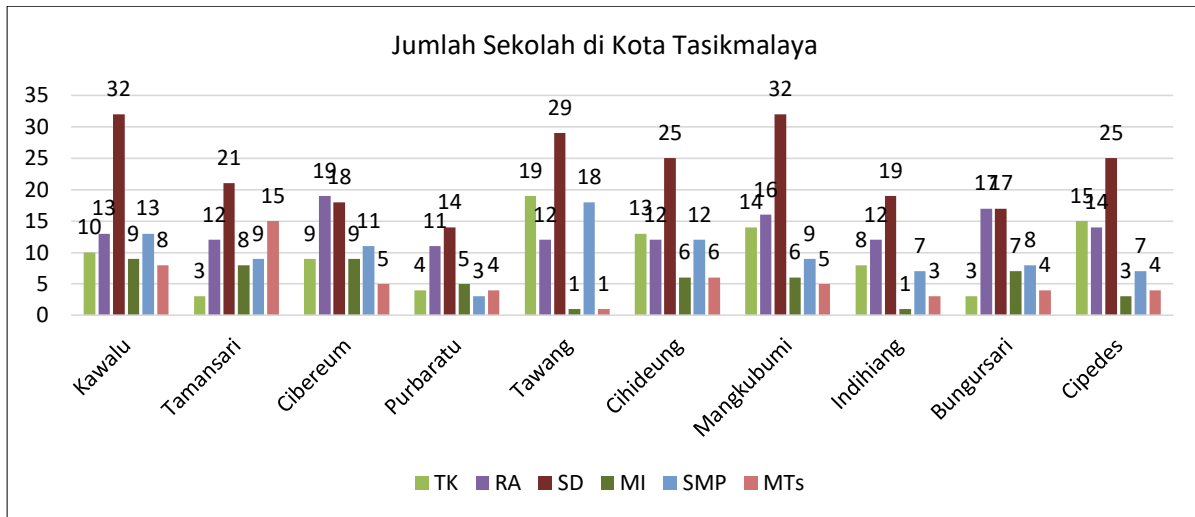
Tabel 2.20.  
Jumlah Sekolah di Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2022

No	Tahun	SD/MI					SMP/MTs				
		SD		Jumlah SD	MI	Jumlah SD dan MI	SMP		Jumlah SMP	MTs	Jumlah SMP dan MTs
		Negeri	Swasta				Negeri	Swasta			
1	2018	199	30	229	53	282	21	53	74	55	129
2	2019	199	30	229	53	282	21	54	75	55	130
3	2020	199	32	231	55	286	21	76	97	55	152
4	2021	199	33	232	55	286	21	60	81	51	132
5	2022	193	36	229	55	284	21	65	86	55	141

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2023.

Sebaran sekolah per kecamatan dapat terlihat pada gambar 2.21, untuk tingkat SD, MI, SMP dan MTs sebarannya antar kecamatan cukup merata.

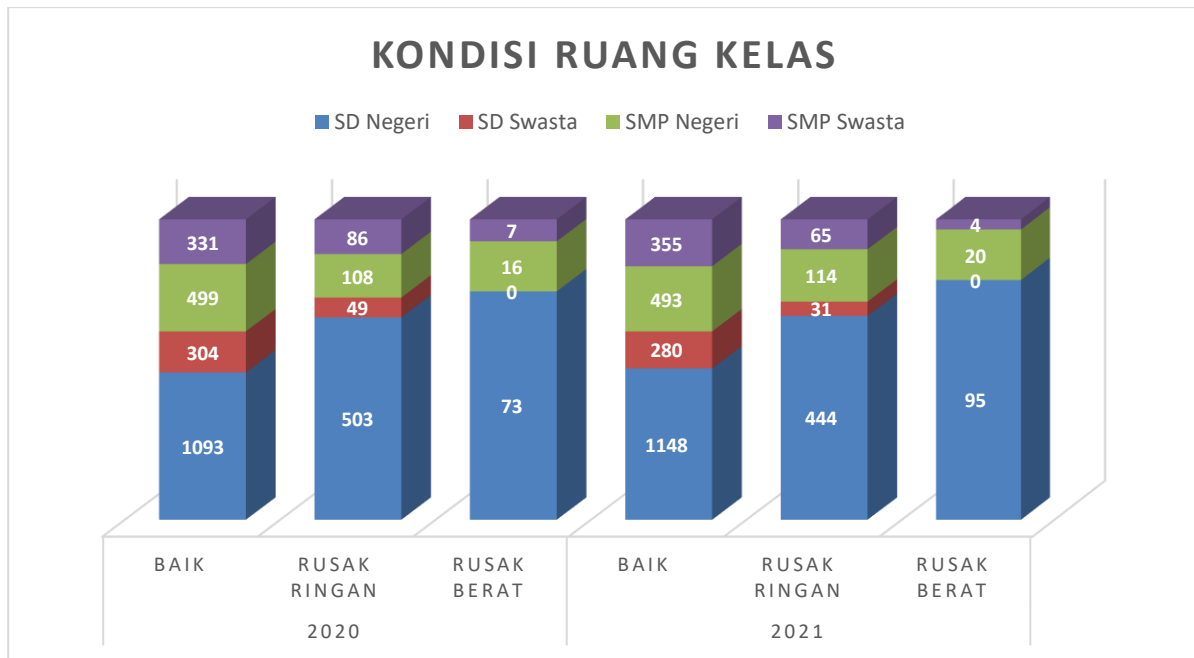
Gambar 2.36.  
Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Tahun 2021



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2022.

Selain sebaran sekolah, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang cukup penting adalah ruang kelas. Kondisi ruang kelas SD dan SMP di Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

Gambar 2.37.  
Kondisi Ruang Kelas SD dan SMP Tahun 2020 dan 2021



Sumber : Dinas Pendidikan, data diolah, 2022.

## 5. Rasio Guru-Murid

Salah satu penunjang peningkatan angka indikator rata-rata lama sekolah adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, seperti jumlah sekolah dan rombongan belajar (rombel) yang mencukupi untuk semua penduduk usia sekolah, juga banyaknya guru yang mengajar mencukupi untuk semua murid. Selain jumlah guru yang mencukupi, kualitas guru pun sangat menentukan berhasil tidaknya suatu pendidikan.

Tabel 2.21.  
Rasio Guru-Murid dan Rombel-Murid  
SD di Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2022

Tingkatan Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Jumlah Rombel	Rasio Guru-Murid	Rasio Rombel-Murid
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2018	2.991	64.276	2.367	1 : 21,50	1 : 27,10
2019	2.982	63.827	2.390	1 : 21,36	1 : 26,60
2020	3.234	63.475	2.398	1 : 19,60	1 : 26,50
2021	3.188	62.421	2.025	1 : 19,58	1 : 30,82
2022	3.330	62.469	2.443	1 : 18,76	1 : 25,57

Sumber: : Data Pokok Pendidikan – Dinas Pendidikan 2023

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa untuk tingkat Sekolah Dasar pada tahun 2022, rasio murid dengan guru selama periode tersebut berada pada posisi 1 : 18,76. Sedangkan untuk rasio rombel-murid sebesar 1 : 25,57, kondisi ini belum sesuai dengan standar sesuai Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Jenjang pendidikan lanjutan (SMP) menunjukkan kecenderungan lebih baik dibandingkan dengan sekolah tingkat dasar dari sisi rasio guru dan murid serta rasio murid dan rombel. Rasio guru dengan murid berada pada posisi 1 : 15,39. Hal ini menunjukkan bahwa satu orang guru SMP/MTs di Kota Tasikmalaya melayani 15 orang murid SMP/MTs. Dengan demikian rasio guru dan murid SMP di Kota Tasikmalaya sudah di atas standar. Sedangkan untuk rasio rombel-murid pada tahun 2022 sebesar 1 : 28,94 hal ini masih di atas standar yaitu 1 : 32 walaupun mengalami kenaikan sebagaimana Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

Tabel 2.22.  
Rasio Guru-Murid dan Rombel-Murid  
SMP di Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2022

Tingkatan Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Jumlah Rombel	Rasio Guru-Murid	Rasio Rombel-Murid
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)	(6)
2018	1.685	28.116	974	1 : 16,7	1 : 28,9
2019	1.665	28.155	976	1 : 16,8	1 : 28,7
2020	1.764	28.571	1.970	1 : 17,2	1 : 23,8
2021	1.777	28.739	1.057	1 : 16,17	1 : 27,19
2022	1.843	28.357	980	1 : 15,39	1 : 28,94

Sumber: : Dinas Pendidikan, 2023

Selain pendidikan formal yang dilaksanakan juga dilaksanakan pendidikan non formal diantaranya pendidikan kesetaraan. Berikut data murid program kesetaraan di Kota Tasikmalaya pada tahun 2020 - 2022.

Tabel 2.23.  
Jumlah Murid Program Paket A, B dan C  
di Kota Tasikmalaya Tahun 2020 - 2022

No	Kecamatan	2020			2021			2022		
		Paket A	Paket B	Paket C	Paket A	Paket B	Paket C	Paket A	Paket B	Paket C
1	Cihideung	6	33	128	10	84	271	17	86	287
2	Cipedes	-	112	254	-	81	217	-	83	228
3	Tawang	8	34	129	10	39	105	20	53	98
4	Indihiang	-	86	275	1	39	95	0	31	93
5	Kawalu	-	135	400	8	114	296	18	104	260
6	Cibeureum	2	175	363	-	98	281	4	57	244
7	Tamansari	20	201	486	1	241	464	20	201	486
8	Mangkubumi	-	69	209	2	90	248	5	116	282
9	Bungursari	-	49	110	3	45	137	7	71	182
10	Purbaratu	13	123	297	11	146	315	16	155	305
Kota Tasikmalaya		49	1.017	2.651	46	977	2.429	107	957	2.465

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2023.

## 6. Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan

Salah satu indikator kualitas pendidikan adalah Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan. Jumlah penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan di Kota Tasikmalaya dalam rentang waktu tahun 2020 - 2022 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.24.  
Jumlah penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan  
Yang Ditamatkan di Kota Tasikmalaya Tahun 2020 - 2022

No	Tingkatan Sekolah	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Sekolah Dasar	195.569	205.221	183.408
2	Sekolah Menengah Pertama	121.863	109.851	103.594
3	Sekolah Menengah Atas	158.909	164.661	180.645
4	Perguruan Tinggi	39.556	41.270	58.325

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, Data diolah 2023

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2022, didominasi oleh tamat Sekolah Dasar dengan persentase sebesar 34,87 persen, Sekolah Menengah Pertama sebesar 19,70 persen, Sekolah Menengah Atas sebesar 34,34 persen, dan Perguruan Tinggi sebesar 11,09 persen. Namun demikian terdapat kenaikan pada jumlah penduduk yang lulus pada tingkat Perguruan Tinggi setiap tahunnya.

## 7. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan

Capaian indikator kinerja urusan pendidikan tahun 2020 - 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25.  
Capaian Indikator Pelayanan  
Urusan Pendidikan Tahun 2020- 2022

No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisa	Target	Realisa	Target	Realisa
1	Jumlah Wirausaha baru sektor Pendidikan	Orang	100	100,00	100	100,00	100	100
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	%	89,46	51,18	25,52	40,48	25,77	40,82
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	102,95	100,66	_*	_*	_*	_*
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	112,95	94,29	_*	_*	_*	_*
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	94,65	94,75	94,67	94,79	94,69	97,86
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	89,80	81,13	89,83	84,84	89,85	84,13
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A (%)	%	89	99,30	_*	_*	_*	_*
8	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B (%)	%	107,83	88,85	_*	_*	_*	_*
9	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia SD/MI (per 10.000)	%	39,81	37,66	_*	_*	_*	_*

No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisa	Target	Realisa	Target	Realisa
10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia SMP/MTs (per 10.000)	%	36,26	35,06	_*	_*	_*	_*
11	Rasio guru/murid SD/MI (per 10.000)	Poin	511,49	518,04	_*	_*	_*	_*
12	Rasio guru/murid SMP/MTs (per 10.000)	Poin	727,60	687,64	_*	_*	_*	_*
13	Rasio guru/murid per kelas rata-rata SD/MI/Paket A (per 1.000)	Poin	0,22	0,20	_*	_*	_*	_*
14	Rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP/MTs/Paket B (per 1.000)	poin	0,58	0,58	_*	_*	_*	_*
15	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	96,08	71,45	_*	_*	_*	_*
16	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	96,58	78,81	_*	_*	_*	_*
17	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	98,09	100,00	_*	_*	_*	_*
18	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,93	100,00	_*	_*	_*	_*
19	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pelatihan kursus	%	100	100,00	_*	_*	_*	_*

No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisa	Target	Realisa	Target	Realisa
20	Persentase Wirausaha Baru sektor pendidikan yang dibina	%	100	100,00	_*	_*	_*	_*
21	Persentase Lulusan Kesetaraan Paket A, B dan C	%	99,00	100,00	_*	_*	_*	_*
22	Persentase Capaian Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	%	85,00	92,90	_*	_*	_*	_*
23	Persentase pelayanan pendidikan yang dihitung	%	90,00	100,00	_*	_*	_*	_*
24	Persentase Siswa Prestasi yang dicapai ke Tingkat Provinsi jenjang SD dan SMP	%	30,00	11,54	_*	_*	_*	_*
25	Persentase Siswa SDN dan SMPN yang terlayani BOS	%	97,00	100,00	_*	_*	_*	_*
26	Persentase Kegiatan UPTD Pendidikan SKB yang dilaksanakan	%	100,00	100,00	_*	_*	_*	_*
27	Tingkat Partisipasi anak usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	_*	_*	6,5	7,02	6,52	10,2

No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisa	Target	Realisa	Target	Realisa
28	Tingkat Kelulusan Warga Belajar pada Lembaga Kursus dan Pelatihan	%	-*	-*	100	100	100	100
29	Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Jenjang PAUD	%	-*	-*	100	78,55	100	81,48
30	Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Jenjang SD	%	-*	-*	100	71,40	100	73,98
31	Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Jenjang SMP	%	-*	-*	100	66,48	100	66,82
32	Persentase Pemenuhan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan	%	-*	-*	100	70,97	100	71,15
33	Presentase siswa yang mengikuti pendidikan karakter / keagamaan	%	-*	-*	100	100,00	100	100
34	Persentase capaian pengembangan kurikulum	%	-*	-*	100	100	100	100



No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisa	Target	Realisa	Target	Realisa
35	Persentase Pendidik PAUD + Pendidikan Dasar yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D-IV dan Bersertifikat Pendidik	%	-*	-*	51,35	53,23	51,35	45,93
36	Persentase Siswa berprestasi yang dicapai ke Tingkat Provinsi jenjang Pendidikan Dasar	%	-*	-*	30	34,78	40	40,32

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2023.

\_\* Indikator baru pada RPJMD Perubahan

Tabel di atas menunjukkan bahwa APM SD/MI Sederajat pada tahun 2022 menunjukkan angka 97,86 persen sedangkan tahun sebelumnya 94,79 persen atau dengan kata lain naik sebesar 3,07 persen. Jika dilihat dari target yang telah ditentukan pada tahun 2020, 2021 dan 2022 telah melampaui target yang ditetapkan. Pada jenjang SMP, APM mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 3,71 persen dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,71 persen. APM SMP tidak mencapai target yang telah ditentukan, hal ini disebabkan oleh adanya peserta didik diluar usia sekolah. Untuk Tingkat Kelulusan Warga Belajar pada Lembaga Kursus dan Pelatihan terealisasi 100 persen sesuai dengan target sedangkan pemenuhan perlengkapan sarana prasarana pendidikan dasar masih terus diupayakan sehingga kedepannya dapat memenuhi target yang diharapkan. Capaian persentase siswa berprestasi yang dicapai ke Tingkat Provinsi jenjang pendidikan dasar pada tahun 2022 yakni dari target 40 persen terealisasi sebesar 40,32 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sehubungan pada tahun sebelumnya dipengaruhi oleh Pandemi Covid 19 dengan adanya pembatasan kegiatan yang mengumpulkan massa, sehingga kegiatan berjenis pelombaan banyak yang di tunda dan atau dibatalkan penyelenggaraanya.

#### 2.1.3.1.2. Urusan Kesehatan

Data capaian pelayanan umum urusan kesehatan dalam kurun waktu tahun 2020 - 2022 secara umum mengalami fluktuasi. Secara lengkap data capaian indikator kinerja pembangunan daerah urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2.26.  
Capaian Indikator Pelayanan  
Urusan Kesehatan Tahun 2020-2022

	Indikator	Satuan	Tahun					
			2020		2021		2022	
			Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi
1	Persentase masyarakat miskin mendapat jaminan Kesehatan	%	67,5	29,53	76,9	40,75	76,9	98,39
2	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	6,15	8,35	5,72	8,5	5,72	7,67
3	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	162,25	202,55	145,18	303,87	145,18	180,15
4	Prevalensi Stunting	%	20,10	17,57	19,1	14,81	18,10	12,62
5	Persentase capaian SPM penyakit menular dan tidak menular	%	100	43,13	100	54,15	100	68,17
6	Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	100	95,45	100	95,5	100	95,45
7	Persentase layanan jaminan kesehatan nasional masyarakat miskin	%	90	100,00	100	80,31	95	95,56
8	Persentase ketersediaan obat dan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	80	48,57	90	66,6	90	91,11
9	Cakupan pelayanan kesehatan ibu, anak dan remaja	%	100	81,62	100	100	100	100
10	Persentase Rumah Tangga yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	%	38	41,37	45,13	40,83	45,13	43,88
11	Persentase balita gizi buruk	%	0	1,02	0,5	0,82	0	0,52
12	Capaian Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga yang memenuhi standar	%	53	15	54,25	38,21	54,25	38,21
13	Persentase Puskesmas sesuai standar permenkes 75	%	90	36,37	95	77	95	100
14	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar	%	80	40,63	80	71	80	77,27
15	Persentase pelayanan kesehatan keluarga	%	75	100	85	75,17	85	85,24
16	Persentase Penyakit menular ditangani	%	100	100	100	61,5	100	88,55

	Indikator	Satuan	Tahun					
			2020		2021		2022	
			Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi
	sesuai tatalaksana standar							
17	Persentase penyakit tidak menular yang ditangani sesuai tatalaksana standar	%	100	100	100	50,5	100	57,98
19	Capaian fasilitas kesehatan tahapan pertama yang terakreditasi	%	100	95,45	100	95	100	27,27
20	Persentase Penyelenggaraan Operasional Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya	%	100	100	100	100	100	100
21	Capaian Penyelenggaraan Operasional Pelayanan terhadap jumlah lab dan gudang farmasi	%	100	100	100	100	100	100
22	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
23	Persentase implementasi sistem informasi kesehatan	%	100	100	100	100	100	100
24	Persentase standar pelayanan minimal rumah sakit	%	83	82,25	100	100	86	100
25	Akreditasi Rumah Sakit dr. Soekardjo	kategori	5	5	5	5	5	9
26	Cost Recovery Ratio (CRR)	%	100	100	100	100	100	98
27	Persentase capaian Mutu dan Keselamatan Pasien	%	82	82	83	83	83	74,93
28	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dr. Soekardjo	%	80	80	85	83,45	85	70,83

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, 2023.

Pelayanan kesehatan sangat didukung oleh ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Berikut disampaikan jumlah fasilitas dan tenaga kesehatan di Kota Tasikmalaya sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.27.  
Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2022

No	Puskesmas	No	Rumah Sakit / Faskes Lainnya
1	Kersanagara	1	RSUD dr. Soekardjo
2	Kawalu	2	RS ISLAM Hj. Siti Munaroh
3	Karanganyar	3	RS Jasa Kartini
4	Tamansari	4	RSB dr. Hj. Karmini EH
5	Cibeureum	5	RS Tasik Medika Citratama (TMC)
6	Purbaratu	6	RSB UMMI
7	Kahuripan	7	RSIA Sayang Bunda
8	Tawang	8	RSIA Widaningsih
9	Cihideung	9	RS Syifa Medina
10	Cilembang	10	RSIA Bunda Aisyah
11	Mangkubumi	11	RS Prasetya Bunda
12	Sambongpari	12	RS Permata Bunda Tasikmalaya
13	Indihiang	13	RS Hermina
14	Parakanyasag	14	RS Jantung
15	Bungursari	15	Fasilitas Kesehatan lainnya (6 unit)
16	Sukalaksana		
17	Bantar		
18	Cipedes		
19	Panglayungan		
20	Cigeureung		
21	Urug		
22	Sangkali		

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, 2023.

Selain fasilitas kesehatan, jumlah SDM kesehatan/tenaga medis di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28.  
Jumlah Tenaga Medis di Fasilitas Kesehatan Kota Tasikmalaya Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah			Rasio terhadap Jmlh Penduduk	Standar SK Menko Kesra no 54/2013
		Laki-laki	Perempuan	Total		
1	Dokter Spesialis	96	41	137	27,8	11
2	Dokter Umum	92	131	223	24,4	45
3	Dokter Gigi	15	52	67	7,9	13

No	Uraian	Jumlah			Rasio terhadap Jmlh Penduduk	Standar SK Menko Kesra no 54/2013
		Laki-laki	Perempuan	Total		
4	Dokter Gigi Spesialis	1	3	4	3,3	-
5	Perawat	611	939	1.550	197,8	180
6	Bidan	-	742	742	89,5	120
7	Tenaga Kesehatan Masyarakat	20	55	75	7,2	16
8	Tenaga Kesehatan Lingkungan	17	19	36	6,1	18
9	Tenaga Gizi	20	72	92	12,8	14
10	Tenaga Kefarmasian	11	69	80	37,9	
	a. Tenaga Teknis Kefarmasian	-	-	-	-	24
	b. Apoteker	-	-	-	-	12

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, 2023.

Berdasarkan data di atas, masih terdapat beberapa ketersediaan SDM kesehatan yang berada di bawah standar yaitu Dokter Umum, Dokter Gigi, Bidan, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Tenaga Kesehatan Lingkungan, Tenaga Gizi dan Tenaga Teknis Kefarmasian.

#### 2.1.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pertumbuhan perekonomian suatu wilayah dan kehidupan sosial masyarakat perlu didukung oleh konektivitas dan kondisi jaringan jalan yang memadai. Pelaksanaan penyelenggaraan jalan di Kota Tasikmalaya, berdasarkan pada Keputusan Walikota Tasikmalaya nomor 541.03/Kep.136-DPUPR/2017 tentang Penetapan Status Ruas Jalan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai Jalan Kota, ditetapkan bahwa panjang jalan kota di Kota Tasikmalaya adalah sepanjang 450,742 km. Kinerja infrastruktur jalan dan jembatan diukur berdasarkan kondisi jalan dan jembatan. Selama kurun waktu dari tahun 2020 sampai dengan 2022, terdapat peningkatan kinerja setiap tahunnya. Meskipun meningkat terdapat 2 indikator kinerja yang tidak memenuhi target yaitu jumlah jembatan yang ditangani dan persentase jembatan yang ditangani. Tidak terpenuhinya target penanganan jembatan dikarenakan kegiatan diprioritaskan untuk perbaikan kondisi jalan dan penyelesaian pembangunan Jalan Lingkar Utara. Secara rinci kinerja infrastruktur jalan dan jembatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29.

Kinerja Infrastruktur Jalan dan Jembatan Tahun 2020 – 2022

Indikator	Satuan	Tahun					
		2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Panjang Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	Km	437,220	379,525	360,594	397,127	369,608	402,422
Persentase Jalan dan Jembatan	%	97,00	84,20	80,00	88,11	82,00	89,28

Indikator	Satuan	Tahun					
		2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
dalam kondisi baik							
Panjang jalan dan jembatan yang dibangun terhadap target	Km	2,15	2,45	_*	_*	_*	_*
Capaian jumlah jalan dan jembatan yang dibangun terhadap target	%	33,55	38,25	_*	_*	_*	_*
Panjang jalan dan jembatan yang ditingkatkan terhadap target	Km	60	16,083	_*	_*	_*	_*
Capaian jalan dan jembatan yang ditingkatkan terhadap target (200 Km)	%	30	8,04	_*	_*	_*	_*
Panjang jalan dan jembatan yang dipelihara secara rutin	Km	60	45,9	_*	_*	_*	_*
Capaian panjang jalan dan jembatan yang dipelihara secara rutin (target 300 Km selama 5 thn, 60 Km per tahun)	%	20	15,3	_*	_*	_*	_*
Panjang jalan yang dibangun	Km	_*	_*	1	3,309	2	4,389
Persentase panjang jalan yang dibangun	%	_*	_*	50	165,45	100	219,45
Panjang jalan yang ditingkatkan	Km	_*	_*	10	14,026	20	27,353
Persentase panjang jalan yang ditingkatkan	%	_*	_*	50	70,13	100	136,77

Indikator	Satuan	Tahun					
		2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Panjang jalan yang direhabilitasi	Km			10	5,575	20	25,057
Persentase panjang jalan yang direhabilitasi	%	-*	-*	50	27,88	100	125,29
Jumlah jembatan yang ditangani	Unit	-*	-*	6	6	12	9
Persentase jembatan yang ditangani	%	-*	-*	8,22	8,22	16,44	12,33

Ket : \* = Perubahan indikator

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2023.

Panjang jalan kota belum seluruhnya dilengkapi dengan bangunan pelengkap jalan terutama drainase. Fungsi drainase jalan adalah untuk melimpaskan air secepat mungkin dari badan jalan, karena adanya genangan air di badan jalan akan mempengaruhi keawetan struktur jalan. Kinerja bangunan pelengkap jalan terdiri dari pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan dari tahun 2020 sampai dengan 2022 mengalami perkembangan, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.30.  
Kinerja Bangunan Pelengkap Jalan Tahun 2020-2022

Indikator	Satuan	Tahun					
		2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Panjang pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan bangunan pelengkap jalan	Km	20	37,03	-*	-*	-*	-*
Capaian pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan bangunan pelengkap jalan	%	94,34	123,43	-*	-*	-*	-*
Panjang drainase yang dikelola dan dikembangkan	Km	-*	-*	60	76,69	70	97,80
Persentase Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	%	-*	-*	13,31	17,01	15,53	21,70

Ket : \* = Perubahan indikator

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2023.

Terdapat 35 Daerah Irigasi yang berada di Kota Tasikmalaya dengan luas 5.321 Hektar terdiri dari 29 Daerah Irigasi merupakan kewenangan Kota (luas 1.749 Hektar, total panjang 332,53 Km), 5 Daerah Irigasi merupakan kewenangan Provinsi (luas 1.445 Hektar, total panjang 81,35 Km) dan 1 Daerah Irigasi Kewenangan Pusat (luas 2.128 Hektar, total panjang 196 Km). Kinerja infrastruktur irigasi selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2022, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.31.  
Kinerja Jaringan Irigasi dan Pengairan Lainnya Tahun 2020-2022

Indikator	Satuan	Tahun					
		2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase sarana prasarana jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	66,6	66,6	_*	_*	_*	_*
Capaian jaringan irigasi dalam kondisi baik	KM	134,53	134,53	_*	_*	_*	_*
Capaian penanganan jaringan pengairan lainnya (target 40 Km selama 5 thn)	%	20	5,95	_*	_*	_*	_*
Capaian penanganan jaringan pengairan lainnya	Km	8	2,38	_*	_*	_*	_*
Persentase luas sawah terairi	%	_*	_*	75	75	80	80
Persentase sumber daya air dalam kondisi baik	%	_*	_*	34,95	45,67	35,53	37,50

Ket : \* = Perubahan indikator

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2023.

Kinerja Tata Ruang yang terdiri dari capaian kesesuaian pemanfaatan ruang, capaian pengawasan ijin pemanfaatan ruang, mengalami peningkatan selama tahun 2020 - 2022. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.32.  
Capaian Kinerja Tata Ruang Tahun 2020-2022

Indikator	Satuan	Tahun					
		2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Capaian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTR	%	90	91	87	88	90	97,02
Capaian pengawasan ijin pemanfaatan ruang	%	96	97	97	97,15	98	98



Capaian dokumen rencana detail tata ruang yang disusun	Dokumen	-	-	_*	_*	_*	_*
Prosentase tersedianya dokumen rencana tata ruang wilayah daerah	%	_*	_*	50	50	100	100

Ket : \* = Perubahan indikator

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2023.

Capaian indikator kinerja tata bangunan di tahun 2020 – 2022 telah memenuhi target. Indikator kinerja persentase bangunan gedung yang ditangani telah terlampaui di tahun 2021 dan 2022, hal ini disebabkan adanya penanganan gedung kantor kelurahan dengan kondisi rusak yang menjadi prioritas. Target dan realisasi tiap indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.33.  
Capaian Indikator Kinerja Tata Bangunan Tahun 2020 - 2022

Indikator	Satuan	Tahun					
		2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Capaian realisasi bangunan sesuai ijin	%	99,4	99,4	_*	_*	_*	_*
Capaian pengawasan rekomendasi teknis bangunan	%	96	96	_*	_*	_*	_*
Persentase bangunan gedung yang ditangani	%	_*	_*	13,16	15,79	26,32	32,45
Persentase penyedia jasa yang mendapatkan pembinaan	%	_*	_*	42,37	42,37	100	42,37

Ket : \* = Perubahan indikator

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2023.

Kondisi bangunan gedung kantor pemerintahan di Kota Tasikmalaya saat ini masih ada yang belum memadai dan rusak, terkait hal tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.34.  
Kondisi Bangunan Gedung Kantor Pemerintah Tahun 2022

Kondisi Bangunan	OPD	Kecamatan	Kelurahan
Baik / Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
Baik / Memadai	5	0	3
Baik / Kurang Memadai / Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
Baik / Memadai / Konstruksi Dalam Pengerjaan	2	0	0
R. Ringan / Memadai	17	5	52
R. Ringan / Kurang Memadai	2	3	0

Kondisi Bangunan	OPD	Kecamatan	Kelurahan
R. Sedang / Memadai	3	0	11
R. Sedang / Kurang Memadai	6	2	3
Belum memiliki Gedung Definitif	0	0	0
R. Berat / Kurang Memadai	1	0	0
R. Ringan / Memadai / Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
Jumlah	36	10	69

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2023

Infrastruktur permukiman yang menjadi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang mencakup infrastruktur jalan, drainase lingkungan, penyediaan sarana prasarana air minum dan penyediaan sarana prasarana air limbah.

Panjang jalan lingkungan di wilayah Kota Tasikmalaya teridentifikasi sepanjang 1.941,759 Km. Peningkatan jalan lingkungan dan drainase di Kota Tasikmalaya dilakukan setiap tahunnya, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.35.

Kondisi Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan dalam Kondisi Baik Tahun 2020 – 2022

Indikator	Satuan	Tahun					
		2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jalan Lingkungan yang ditangani	Km	419	489	524	549	630	795
Jalan Lingkungan dalam kondisi baik	%	21,6	25,18	27,01	28,26	32,42	40,95
Drainase Lingkungan yang ditangani	m	44.038	46.887	66.725	50.990	89.402	77.150
Drainase Lingkungan dalam kondisi baik	%	47,15	50,2	71,44	54,59	95,72	82,60

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2023.

Capaian indikator kinerja drainase lingkungan dalam kondisi Tahun 2022 tidak memenuhi target, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan drainase lingkungan.

Pengukuran akses SPAL dan air minum mengacu kepada jumlah Kepala Keluarga (KK) pada saat penyusunan RPJMD yaitu 180.442 KK. Akses masyarakat terhadap Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) di Kota Tasikmalaya dari tahun 2020 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.36.  
Capaian Realisasi KK yang berakses SPAL Tahun 2020 – 2022

Indikator	Satuan	Tahun					
		2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Realisasi rumah tangga bersanitasi	KK	109.149	109.242	—*	—*	—*	—*
Persentase rumah tangga bersanitasi	%	60,49	60,54	—*	—*	—*	—*
Realisasi KK berakses SPAL	KK	—*	—*	110.142	110.423	111.134	111.348
Capaian KK berakses SPAL	%	—*	—*	61,04	61,20	61,59	61,71

Ket : \* = Perubahan indikator

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2023.

Seperti halnya capaian akses SPAL, capaian akses air minum juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37.  
Capaian Realisasi KK yang berakses Air Minum Tahun 2020 – 2022

Indikator	Satuan	Tahun					
		2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Realisasi KK berakses Air Minum	KK	97.926	100.290	100.723	101.454	101.174	102.512
Capaian KK berakses Air Minum	%	54,27	55,58	55,82	56,23	56,07	56,81

Ket : \* = Perubahan indikator

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2023

#### 2.1.3.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman secara umum mengalami peningkatan setiap tahunnya. Capaian indikator urusan perumahan dan kawasan permukiman tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.38.  
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 – 2022

Indikator	Satuan	Tahun					
		2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Capaian penanganan rumah tidak layak huni	%	—*	—*	—*	—*	—*	—*
Persentase penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	43,59	47,61	47,59	54,15	51,59	60,38
Persentase penanganan kawasan kumuh	%	98,88	98,88	99,23	99,23	100	100

Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani	Unit	1000	1043	1000	1320	1000	780
Persentase PSU yang diverifikasi	%	22,3	22,68	30,11	28,62	37,55	38,28
Persentase PSU yang diserahterimakan	%	11,15	14,13	17,84	18,58	21,56	24,16
Persentase rumah korban bencana yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100
Persentase fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	20

Ket : \* = Perubahan indikator

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya, 2023.

Dari tabel diatas, seluruh indikator kinerja telah memenuhi dan melampaui target, kecuali indikator jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani tidak memenuhi target di tahun 2022. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ditargetkan pada RPJMD Kota Tasikmalaya 2017 – 2022 sebanyak 5.000 unit rumah, sudah terlampaui sejak tahun 2020 sehingga di tahun 2022 alokasi anggaran RTLH dialihkan untuk prioritas kegiatan lainnya yang masih dibawah target. Realisasi sampai dengan akhir periode RPJMD yaitu Tahun 2022, sebanyak 7.551 unit rumah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.39.  
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2018 – 2022

Kegiatan	Satuan	Jumlah					Total
		2018	2019	2020	2021	2022	
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni	Unit	3.333	1.075	1.043	1320	780	7.551

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya, 2023.

Di Tahun 2022, terdapat RTLH sebanyak 9.081 unit di wilayah Kota Tasikmalaya. Data tersebut diperoleh dari hasil verifikasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap data yang ada di aplikasi e-RTLH (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan pendataan langsung melalui Kelurahan. Dalam pelaksanaan kegiatan, penetapan calon penerima manfaat rehabilitasi RTLH diprioritaskan untuk masyarakat miskin ekstrem sesuai dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Persentase penanganan kawasan kumuh di tahun 2022 sudah 100% terhadap target yang telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 050.13/Kep.374.Bappeda/2014 tentang Penetapan Sasaran Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Kumuh di Kota Tasikmalaya pada Tahun 2014 terdiri dari 18 (delapan belas) lokasi dengan luas total 276,17 hektar. Berdasarkan hasil identifikasi di tahun 2021, terdapat kawasan kumuh seluas 168,49 Hektar yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan Walikota Nomor 648/Kep.733.1-Disperwaskim/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Tasikmalaya. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.40.  
Kawasan Kumuh di Kota Tasikmalaya Berdasarkan SK Walikota Tahun 2021

No.	Nama Lokasi	Kelurahan	Kecamatan	Luas (Ha)
1	ARGASARI	Argasari	Cihideung	3,78
2	CIPALAYUNG	Cipedes-	Cipedes	15,40
3	CIPANYIR	Cipedes-	Cipedes-	16,31
4	INDIHIANG	Indihiang	Indihiang	1,59
5	PARAKANYASA	Parakanyasag	Indihiang	1,31
6	SUKAMAJU	Sukamaju Kaler	Indihiang	2,14
7	TUGURAJA	Tuguraja	Cihideung	3,90
8	CIKALANG	Cikalang	Tawang	2,80
9	PURBARATU	Purbaratu	Purbaratu	9,30
10	SUKAJAYA	Sukajaya	Purbaratu	14,00
11	SUKAMENAK	Sukamenak	Purbaratu	9,23
12	MUGARSARI	Mugarsari	Tamansari	4,73
13	SETIAWARGI	Setiawargi	Tamansari	2,25
14	SUMERANG	Sumelap-Ciherang	Tamansari-	17,00
15	CIAKAR	Ciakar	Cibeureum	11,60
16	KOTABARU	Kotabaru	Cibeureum	6,05
17	SETIAJAYA	Setiajaya	Cibeureum	9,77
18	MARGABAKTI	Margabakti	Cibeureum	4,36
19	BUNGURSARI	Bungursari	Bungursari	3,22
20	SUKAJAYA	Sukajaya	Bungursari	1,22
21	CIBEUTI	Cibeuti	Kawalu	5,00
22	URUG	Urug	Kawalu	11,50
23	LEUWILIANG	Leuwiliang	Kawalu	2,80
24	TANJUNG	Tanjung	Kawalu	3,47
25	CIGANTANG	Cigantang	Mangkubumi	0,45
26	KARIKIL	Karikil	Mangkubumi	5,31
JUMLAH				168,49

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tasikmalaya, 2023.

Jumlah perumahan di wilayah Kota Tasikmalaya sampai dengan tahun 2022 sebanyak 264 perumahan. Verifikasi dan serah terima Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan di Kota Tasikmalaya dari tahun 2018 sampai dengan 2022, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.41.  
Jumlah Perumahan yang Telah Serah dan Verifikasi Terima Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 – 2022

Kegiatan	Satuan	Basis	Jumlah					Total
		Data	2018	2019	2020	2021	2022	
Verifikasi PSU	Unit	0	41	20	0	16	36	113
Serah Terima PSU	Unit	14	5	19	0	12	14	64

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023.

### 2.1.3.1.5. Urusan Keamanan, Ketertiban Umum dan Linmas

Urusan keamanan, ketertiban umum dan Linmas dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Data capaian indikator urusan keamanan, ketertiban umum dan linmas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.42.  
Capaian Indikator Pelayanan Urusan  
Keamanan, Ketertiban Umum dan Linmas  
Tahun 2020 – 2022

No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Capaian kualitas pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara	%	100	100	_*	_*	_*	_*
2	Persentase capaian koordinasi trantibmas dan pencegahan tindak criminal	%	100	100	_*	_*	_*	_*
3	Persentase penyelesaian potensi konflik kerukunan umat beragama	%	100	100	_*	_*	_*	_*
4	Persentase capaian pembinaan kerukunan umat beragama	%	100	100	_*	_*	_*	_*
5	Persentase capaian pembinaan wawasan kebangsaan	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase capaian pendidikan politik bagi masyarakat	%	100	100	100	100	100	100
7	Tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu	%	_**	_**	_**	_**	_**	_**
8	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk (per 10.000)	point	1,15	0,88	1,16	2,27	1,16	1,17
9	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk (per 10.000)	point	56,3	52,23	56,3	53,95	56,5	51,49

No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
10	Persentase Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan (%)	%	29	22,95	30	26,30	31	1.259,4
11	Persentase penanganan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	80	91,83	90	100	90	100
12	Cakupan patroli petugas Satpol PP (%)	%	75	100	80	100	85	100
13	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kota (%)	%	94	100	96	100	100	100
14	Persentase Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Wilayah Kota (%)	%	0,00561	0,00529	0,00563	0,00539	0,00566	0,514
15	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota (%)	%	90	95,87	95	96,1	95	96,1
16	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)	%	85	84,61	85,5	85,71	85,5	85,71
17	Persentase penegakan perda dan perkada	%	85	98,54	85,5	86,13	90	100
18	Persentase pembinaan dalam penegakan peraturan daerah	%	80	100	90	100	100	100
19	Persentase rekomendasi penindakan yang ditangani	%	90	90	95	100	95	100
20	Angka Kriminalitas	Point	3,5	5,88	3	5,88	2,5	2,9
21	Persentase penyelesaian pelanggaran K3	%	94	100	96	100	100	100

No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
22	Persentase penanganan perlindungan masyarakat	%	90	100	95	100	95	100
23	Persentase pelayanan bencana kebakaran kota yang dilayani	%	90	100	95	100	100	100
24	Cakupan patroli petugas Satpol PP	%	75	8,76	80 - 1,5	-8,76	2,1	8,76
25	Persentase ketersediaan anggota linmas per kelurahan sesuai standar (Permendagri)	%	100	100	100	100	100	100
26	Capaian pelatihan anggota linmas	%	38	71,20	48	71,20	58	49,09
27	Capaian pos siskamling aktif per RW	%	70	94,85	85	94,85	85	94,85
28	Capaian penanganan gangguan masyarakat tingkat kelurahan	%	90	100	95	100	100	100
29	Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi kualifikasi	%	30	78,26	30	76,2	30	76,2
30	Persentase aktifitas pencegahan rawan kebakaran yang dilakukan	%	40	100	50	100	50	60
31	Persentase pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang tangani	%	100	100	100	100	100	100

Ket : \* = Perubahan indikator

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, BPBD, KesbangPol, 2023.

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk melebihi target, hal ini disebabkan karena adanya penambahan CPNS sebanyak 30 orang pada tahun 2022.

Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk terealisasi sebesar 51,49 dari target 56,5. Target tidak tercapai karena pada tahun 2022 tidak dilaksanakan pendataan Linmas, sementara angka pembagi yaitu jumlah penduduk tahun



2022 mengalami kenaikan. Selain itu, terdapat beberapa orang anggota Linmas yang meninggal dunia, sehingga target tidak tercapai.

Untuk pelaksanaan penanganan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah telah dilaksanakan dengan penegakan sanksi. Begitu juga dengan penanganan perlindungan masyarakat dan penanganan gangguan masyarakat tingkat kelurahan, kegiatan sudah dilaksanakan selama 24 jam setiap hari, sehingga capaian indikatornya 100%.

Tabel 2.43.  
Kejadian Bencana Tahun 2020-2022

No.	Bencana	Kejadian		
		2020	2021	2022
1.	Angin Putting Beliung	-	3	40
2.	Pohom tumbang	13	43	102
3.	Rumah Roboh	75	94	245
4.	Gempa bumi	2	0	20
5.	Longsor	28	37	97
6.	Banjir	2	6	14
7.	Tersambar petir	6	4	11
8.	Gerakan Tanah	12	3	2
9.	Kekeringan	-	-	-
10.	Pandemi Covid-19	1	1	-
11.	Kebakaran			47
	Jumlah	138	214	578

Sumber :BPBD Kota Tasikmalaya, 2023.

#### 2.1.3.1.6. Urusan Sosial

Capaian layanan urusan sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.44.  
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Sosial Tahun 2020 – 2022

No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	%	74	79,9	77	79,9	77	83
2	Capaian Penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	%	15	15	16	16	16	34

4	Capaian Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Memiliki Komunitas Binaan	%	100	100	100	100	100	68
5	Capaian Pemeliharaan Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan	%	100	100	100	100	100	0

Sumber : Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, 2023.

#### 2.1.3.2.1. Tenaga Kerja

Menurut data Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) BPS Tahun 2022, jumlah penduduk usia kerja di Kota Tasikmalaya sebanyak 525.972 orang. Dari jumlah tersebut yang termasuk dalam Angkatan Kerja sebanyak 347.063 orang 65,98 persen, sedangkan yang Bukan Angkatan Kerja adalah sebanyak 178.909 orang. Data lebih lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.45.  
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kategori Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2022

Kategori	Tahun		
	2020	2021	2022
Angkatan Kerja	343.285	342.585	347.063
1. Bekerja	315.844	316.349	324.099
2. Pengangguran Terbuka	27.441	26.236	22.964
Bukan Angkatan Kerja	172.612	178.418	178.909
Jumlah	515.897	521.003	525.972
Persentase Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	92,01	92,34	93,38
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja	66,54	65,75	65,98
Tingkat Pengangguran Terbuka	7,99	7,66	6,62

Sumber : Data Sakernas BPS Tahun 2022

Merujuk pada Data SAKERNAS Tahun 2022 di atas, total Angkatan Kerja di Kota Tasikmalaya adalah sebanyak 347.063 orang. Dari total angkatan kerja tersebut, sebanyak 324.099 orang atau 93,38 persen merupakan penduduk yang bekerja, sedangkan 22.964 orang merupakan pengangguran, yang artinya bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Tasikmalaya tahun 2022 sebesar 6,62 persen.

Tabel 2.46.

Jumlah dan Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja dan Pengangguran Terbuka di Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2022

Kategori	2020		2021		2022	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Bekerja	315.844	92,01	316. 349	92,34	324.099	93,38
Pengangguran	27.441	7,99	26.236	7,66	22.964	6,62
Angkatan Kerja	343.285	100	342 585	100	347.063	100

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2022

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, antara lain: Pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan); Manufaktur; dan Jasa.

Untuk meningkatkan kapasitas calon tenaga kerja, Pemerintah Kota Tasikmalaya memberikan pelatihan baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Latihan (LPK) yang berjumlah 58 LPK. Berikut capaian pelayanan urusan tenaga kerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.47.

Capaian Indikator Pelayanan Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2020 - 2022

	Indikator	Satuan	Tahun					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,5	7,99	7,72	7,66	7,02	6,62
2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	66,12	66,54	66,50	66,54	66,7	65,98
3	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten	%	60	23,68	100	23	62	83,19
4	Jumlah Wirausaha Baru	Orang	100	0	150	163	150	150
5	Persentase kesempatan kerja yang terpenuhi terhadap permintaan	%	17	18,83	-	-	-	-
6	Persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*
7	Persentase implementasi hubungan industrial dan jaminan sosial terhadap total perusahaan	%	_*	-	_*	_*	_*	_*
8	Persentase perusahaan yang memiliki lembaga ketenagakerjaan	%	15	15,5	20	15,58	20	16,17
9	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	-	-	100	100	100	83,19

	Indikator	Satuan	Tahun					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
10	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	-	-	43,32	24,96	44,3	27

Ket : \* = Perubahan indikator

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya, 2023.

### 2.1.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Gambaran umum pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan anak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.48.  
Capaian Indikator Pelayanan Urusan  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 - 2022

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak	%	100	100	100	100	100	100
2	Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA)	SKOR	n/a	n/a	800	756	-	382,1

Sumber : DPPKBP3A Kota Tasikmalaya, 2023.

### 2.1.3.2.3. Pangan

Tugas pemerintah daerah di bidang pangan adalah mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan melalui meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan, meningkatkan keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, penanganan kerawanan pangan, menjaga stabilitas harga pangan pokok strategis, dan penguatan kelembagaan ketahanan pangan. Penganekaragaman konsumsi pangan penduduk diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang. Implementasi indikator kuantitatif tersebut disebut skor Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama. PPH Kota Tasikmalaya tahun 2022 mencapai 91,3 telah mencapai nilai optimal yaitu nilai skor PPH ideal minimal 90. Kajian ini menyimpulkan bahwa konsumsi pangan masyarakat Kota Tasikmalaya sudah cukup berkualitas. Berikut capaian pelayanan urusan pangan Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.49.  
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Pangan Tahun 2020 - 2022

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	%	85	121,6	_*	_*	_*	_*
2	Penguatan Cadangan Pangan	Ton	98	100,6	_*	_*	_*	_*
3	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	%	88	66,67	_*	_*	_*	_*
4	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*
5	Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*
6	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	81	100	_*	_*	_*	_*
7	Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	49	0	_*	_*	_*	_*
8	Skor Pola Pangan Harapan/PPH Konsumsi (point)	poin	_*	_*	91	91,3	91	91,3
9	Skor Pola Pangan Harapan/PPH Ketersediaan (point)	poin	_*	_*	84	91,5	85	90,8
10	Jumlah Infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang dibangun	unit	_*	_*	3	0	6	-
11	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	%	_*	_*	88	110,6	100	111,7
12	Persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG)	%	_*	_*	71	124,9	100	122,9
13	Persentase kelurahan rentan pangan yang ditangani	%	_*	_*	50	66,67	51	33,33
14	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	_*	_*	79	100	80	100

Ket : \* = Perubahan indikator

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 2023.

2.1.3.2.4.Pertanahan

Capaian layanan urusan pertanahan di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.50.  
Pelayanan Umum Urusan Pertanahan Tahun 2020 - 2022

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase luas lahan bersertifikat	%	33	62,68	_*	_*	_*	_*
2	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	1	100	_*	_*	_*	_*
3	Penyelesaian izin lokasi	%	1	62,68	_*	_*	_*	_*
4	Persentase pengelolaan penatagunaan tanah	%	20	20	60	50	100	100

Ket : \* = Perubahan indikator

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2023.

2.1.3.2.5.Lingkungan Hidup

Perkembangan pelaksanaan urusan Lingkungan Hidup dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.51.  
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup  
Tahun 2020 – 2022

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun					
			2020		2021		2022	
			Target	Target	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Penambahan ruang terbuka hijau (Ha)	Ha	_*	_*	_*	_*		
2	Persentase Timbulan Sampah yang Ditangani	%	_*	_*	_*	_*		
3	Capaian Indeks Kualitas Air dan Udara	Point	IKA = 52,88 (Sedikit Memenuhi)	IKA = 72,37 (Sedang)	IKA = 53,54 (Sedang)	IKA = 65,75	IKA = 53,6	IKA = 35,33
			IKU = 79,00 (Cukup)	IKU = 78,20 (Cukup)	IKU = 79,00 (Baik)	IKU = 83,45	IKU = 79,60	IKU = 82,26
4	Cakupan Pengendalian Lingkungan Hidup	%	_*	_*	_*	_*		
5	Persentase Pengelolaan Sampah	%	76,46	71,45	77,86	73,86	83,45	81,77

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun					
			2020		2021		2022	
			Target	Target	Target	Realisasi	Target	Realisasi
6	Capaian Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Disusun	%	66,67	33,33	100	0	100	100
7	Persentase Luas Lokasi Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*
8	Capaian Pemantauan Kualitas Lingkungan	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*
9	Capaian UKM Berpotensi Pencemaran yang Ditangani	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*
10	Capaian Volume Sampah yang terangkut ke TPA	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*
11	Capaian Pengurangan Sampah	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*
12	Capaian tersedianya Dokumen Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati	Dok	_**	_**	50	50	100	100
13	Capaian Luas RTH yang dikelola	Ha	_**	_**	100	100	100	100
14	Capaian Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan Penanggung jawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Daerah	%	_**	_**	100	100	100	100
15	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	%	_**	_**	100	150	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2023.

\_\* Indikator Lama

\_\*\* Indikator Baru

Pada tabel di atas terlihat bahwa Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2020 dan 2021 melebihi target yang ditentukan, namun pada tahun 2022 nilai IKA tidak mencapai target. Hal ini disebabkan oleh rumus perhitungan IKA terbaru berbeda dengan pada saat penentuan target, yaitu tanpa menyertakan faktor koreksi, sehingga menimbulkan penurunan nilai IKA di tahun 2022. Selain itu juga terdapat 2 sungai yang status mutu airnya cemar berat yaitu Sungai Cikalang Tengah dan Sungai Cimulu Hilir.

Untuk capaian pengelolaan sampah, dari tahun 2020 hingga tahun 2022, juga belum mencapai target yang ditetapkan. Keadaan ini terjadi karena tingkat pengurangan sampah dari sumbernya belum terlaksana secara maksimal.

Ruang lingkup urusan Lingkungan Hidup dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan RTH

Ada beberapa RTH yang berada di bawah pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup, yaitu seperti diperlihatkan pada tabel berikut.

Tabel 2.52.  
Ruang Terbuka Hijau yang Dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

No	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas (Ha)	Persentase terhadap luas kota (%)
1	Tempat Pemakaman Umum (TPU)	12,274994	0,06565
2	Taman	4,51292	0,02413
3	Daerah Resapan Air (Bukit)	10,893	0,05826
	Total	27,680914	0,14804

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2023

Catatan : Luas Kota = 18.698,76 Ha

Dalam rangka menambah luas ruang terbuka hijau di Kota Tasikmalaya, maka Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan pembebasan bukit, dengan rincian penambahan luas ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.53.  
Pembebasan Lahan untuk RTH

No	Nama Bukit	Lokasi		Luas (m2)	Tahun Pembebasan	Ket.
		Kelurahan	Kecamatan			
1	Bukit Kokosan	Cibunigeulis	Bungursari	35.796	2008, 2009, 2011, 2015	Setda, KPLH
2	Bukit Kiara	Bungursari	Bungursari	10.162	2011	KPLH
3	Bukit Tengah	Bungursari	Bungursari	4.555	2013	KPLH
4	Bukit Pondok	Bungursari	Bungursari	5.410	2013, 2014	KPLH
5	Bukit Hanjuang	Cibunigeulis	Bungursari	6.707	2013	KPLH
6	Bukit Bondan	Sukajaya	Bungursari	1.027	2014	KLH
7	Bukit Jambore	Sukalaksana	Bungursari	3.965	2014	KLH



No.	Nama Bukit	Lokasi		Luas (m <sup>2</sup> )	Tahun Pembebasan	Ket.
		Kelurahan	Kecamatan			
8	Bukit Bubut	Cipawitra	Mangkubumi	2.200	2017	DLH
9	Bukit Putri	Cibunigeulis	Bungursari	17.745	2018, 2022	DLH
10	Bukit Cilamajang	Cipawitra	Mangkubumi	20.453	2017, 2018, 2019	DLH
11	Bukit Situ Butak	Mangkubumi	Mangkubumi	910	2022	DLH
Jumlah				108.930		

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2023.

Selain bukit, yang termasuk dalam ruang terbuka hijau adalah Taman Pemakaman Umum (TPU). Berdasarkan hasil survey luas TPU di Kota Tasikmalaya yaitu 101,94 Ha, yang terdiri dari TPU milik masyarakat 89,67 Ha dan TPU milik pemerintah 12,27 Ha (Tabel 2.53.). Sedangkan jumlah dan lokasi taman dapat dilihat pada Tabel 2.54.

Tabel 2.54.  
Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tahun 2022

No.	Nama TPU	Luas (Ha)
1	Aisha Rashida	7,151238
2	Cieunteung	1,556754
3	Cinehel	3,567002
Total		12,274994

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2023

Tabel 2.55.  
Taman Kota Tasikmalaya Tahun 2022

No	Nama	Luas (Ha)
1	Taman Dadaha	0,7
2	Taman Kota	0,5524
3	Taman Alun-Alun	1,2789
4	Taman Warga Cigeureung	0,1596
5	Batas Kota Indihiang	0,061
6	Batas Kota Karangresik	0,0552
7	Median Jalan Wasita Kusumah	0,0372
8	Median Jalan HZ Mustofa	0,482
9	Median Jalan Letnan Harun	0,065
10	Median Brigjen Sutoko	0,132
11	Median Jalan Aji Witono	0,13
12	Median Jalan EZ Mutaqin	0,16
13	Tugu HZ Mustofa	0,048531
14	Tugu Asmaul Husna	0,003997
15	Tugu Canting Batik/Pulau Jalan Wasita Kusumah	0,007992
16	Tugu Simpang Lima	0,004373
17	Pulau Jalan Cibogor	0,013631
18	Pulau Jalan Dewi Sartika	0,0006
19	Pulau Jalan Tanuwijaya-Sutsen	0,009486
20	Pulau Jalan Tanuwijaya-PM	0,007839
21	Pulau Jalan Tarumanagara	0,001726

No	Nama	Luas (Ha)
22	Pulau Jalan HZ Mustofa (Adipura)	0,0143
23	Pulau Jalan Tentara Pelajar (Dadaha)	0,004891
24	Pulau Jalan Cilolohan	0,00262
25	Pulau Jalan Ir. H. Juanda-RE Martadinata (Jati)	0,009398
26	Pulau Jalan Tamansari (Kelom Geulis)	0,006178
27	Pulau Jalan Rancabango	0,084054
28	Huta Kota (Dadaha)	0,48
	Total	4,512916

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2023.

## 2. Pengendalian dan Pengawasan Kualitas Lingkungan

Dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kualitas lingkungan Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan, pemantauan kualitas air dan udara, penanganan pengaduan, pemantauan ijin lingkungan, dan pelaksanaan kampung iklim. Berikut beberapa data dan penjelasan mengenai pengendalian dan pengawasan lingkungan.

### Pemantauan kualitas air dan udara

Pemantauan kualitas air dan udara adalah salah satu kegiatan pengendalian lingkungan, dengan pengambilan contoh air atau udara secara berkala ataupun secara terus menerus untuk keperluan menentukan tingkat pencemaran/radiasi. Aktivitas pemantauan ini adalah salah satu tugas pengawasan lingkungan dalam mendeteksi dan mengevaluasi apabila terjadi perubahan kualitas suatu lingkungan.

Pemantauan kualitas air dan udara ini berfungsi untuk memberikan informasi faktual tentang kondisi (status) kualitas air masa sekarang, kecenderungan masa lalu dan prediksi perubahan lingkungan masa depan. Informasi dasar yang dihasilkan dari kegiatan pemantauan dapat dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan lingkungan, rencana tata ruang, ijin lokasi untuk usaha atau kegiatan, serta penentuan baku mutu air dan air limbah. Tabel 2.55. dan Tabel 2.56. berikut ini memperlihatkan Indeks Kualitas Air dan Udara berdasarkan lokasi sampel di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.56.

Perhitungan Indeks Kualitas Air Berdasarkan Lokasi Sampel Tahun 2022

No.	Lokasi Sampel	Periode Pengukuran	Nilai IPj	Status Mutu Air
1	Sungai Ciloseh Hulu	Periode I	3.909	Ringan
2	Sungai Ciloseh Tengah	Periode I	7.553	Sedang
3	Sungai Ciloseh Hilir	Periode I	6.762	Sedang
4	Sungai Cikalang Hulu	Periode I	8.621	Sedang
5	Sungai Cikalang Tengah	Periode I	9.383	Sedang
6	Sungai Cikalang Hilir	Periode I	7.531	Sedang
7	Sungai Cilamajang Hulu	Periode I	5.739	Sedang
8	Sungai Cilamajang Tengah	Periode I	6,63	Sedang
9	Sungai Cilamajang Hilir	Periode I	2.797	Ringan
10	Sungai Cibangbay Hulu	Periode I	2,95	Ringan
11	Sungai Cibangbay Tengah	Periode I	7.806	Sedang
12	Sungai Cibangbay Hilir	Periode I	7.486	Sedang
13	Sungai Cimulu Hulu	Periode I	3.066	Ringan
14	Sungai Cimulu Tengah	Periode I	7.809	Sedang

No.	Lokasi Sampel	Periode Pengukuran	Nilai IPj	Status Mutu Air
15	Sungai Cimulu Hilir	Periode I	9.296	Sedang
16	Sungai Ciloseh Hulu	Periode II	4.827	Ringan
17	Sungai Ciloseh Tengah	Periode II	6.982	Sedang
18	Sungai Ciloseh Hilir	Periode II	6.575	Sedang
19	Sungai Cikalang Hulu	Periode II	6.443	Sedang
20	Sungai Cikalang Tengah	Periode II	7.805	Sedang
21	Sungai Cikalang Hilir	Periode II	3.358	Ringan
22	Sungai Cilamajang Hulu	Periode II	7,9	Sedang
23	Sungai Cilamajang Tengah	Periode II	6.644	Sedang
24	Sungai Cilamajang Hilir	Periode II	7.818	Sedang
25	Sungai Cibangbay Hulu	Periode II	2.472	Ringan
26	Sungai Cibangbay Tengah	Periode II	4.229	Ringan
27	Sungai Cibangbay Hilir	Periode II	5.014	Sedang
28	Sungai Cimulu Hulu	Periode II	2.271	Ringan
29	Sungai Cimulu Tengah	Periode II	9.355	Sedang
30	Sungai Cimulu Hilir	Periode II	9.284	Sedang
31	Sungai Ciloseh Hulu	Periode III	6.557	Sedang
32	Sungai Ciloseh Tengah	Periode III	9.267	Sedang
33	Sungai Ciloseh Hilir	Periode III	6.593	Sedang
34	Sungai Cikalang Hulu	Periode III	9,28	Sedang
35	Sungai Cikalang Tengah	Periode III	11,97	Berat
36	Sungai Cikalang Hilir	Periode III	6.659	Sedang
37	Sungai Cilamajang Hulu	Periode III	5.706	Sedang
38	Sungai Cilamajang Tengah	Periode III	2.806	Ringan
39	Sungai Cilamajang Hilir	Periode III	2.837	Ringan
40	Sungai Cibangbay Hulu	Periode III	1.887	Ringan
41	Sungai Cibangbay Tengah	Periode III	2.854	Ringan
42	Sungai Cibangbay Hilir	Periode III	2.772	Ringan
43	Sungai Cimulu Hulu	Periode III	1.433	Ringan
44	Sungai Cimulu Tengah	Periode III	9.249	Sedang
45	Sungai Cimulu Hilir	Periode III	10,28	Berat
Nilai IKA				35,332 (Kurang)

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2023

Tabel 2.57.  
Indeks Kualitas Udara Berdasarkan Lokasi Sampel Tahun 2022

Peruntukan	Tahap I Kadar SO <sub>2</sub> (µG/M <sup>3</sup> )	Tahap I Kadar NO <sub>2</sub> (µG/M <sup>3</sup> )	Tahap II Kadar SO <sub>2</sub> (µG/M <sup>3</sup> )	Tahap II Kadar NO <sub>2</sub> (µG/M <sup>3</sup> )	IEU SO <sub>2</sub>	IEU NO <sub>2</sub>	IKU	KETERANGAN
Perumahan	12,0	3,55	9,20	4,82	0,57	0,27	82,26	Sedang
Perumahan	14,83	13,73	6,70	8,24				
Industri	18,0	4,95	7,7	3,94				
Industri	15,43	8,88	10,04	15,40				
Transportasi	9,0	13,0	9,9	7,0				
Transportasi	10,44	13,18	7,64	17,31				
Komersial	15,0	8,13	7,07	6,67				
Komersial	12,42	20,78	9,20	8,57				

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2023.

Indeks kualitas udara pada tabel di atas adalah berdasarkan lokasi sampel perumahan/permukiman, industri, transportasi, dan kawasan komersil. Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) atau Air Quality Indeks (AQI) Kota Tasikmalaya secara umum berada pada nilai 82,26, yang berarti memiliki kualitas sedang.

Pada Tabel 2.57. berikut ini diperlihatkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Tasikmalaya selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.58.  
Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU)  
Kota Tasikmalaya Tahun 2020 - 2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun					
		2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Kualitas Air	52,88 (Sedikit Memenuhi)	72,37	53,54 (Sedang)	65,75	53,60 (Sedang)	35,33
2	Indeks Kualitas Udara	79,00 (Cukup)	78,20	79,00 (Baik)	83,45	79,60 (Baik)	82,26

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2023.

Dari tabel di atas diketahui bahwa selama lima tahun terakhir, IKU di Kota Tasikmalaya berada pada kategori sedang (berdasarkan rentang nilai AQI), hal ini berarti kualitas udara di Kota Tasikmalaya masih cukup baik. Sedangkan untuk kualitas air, Kota Tasikmalaya berada pada kategori rendah, yaitu 35,33 pada tahun 2022, sedangkan target yang ditetapkan adalah 53,60, dan target nasional 55. Keadaan ini menunjukkan bahwa kualitas air di Kota Tasikmalaya sudah menurun, sehingga perlu bersungguh-sungguh dalam pengelolaan air buangan (limbah), baik dari rumah tangga maupun dari industri.

#### Penanganan Pengaduan

Ada beberapa pengaduan permasalahan lingkungan dari masyarakat yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup. Tabel 2.58. berikut ini menunjukkan beberapa pengaduan yang berhasil ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 2.59.  
Penanganan Pengaduan Tahun 2018 - 2022

Penanganan Pengaduan	Tahun					Jumlah
	2018	2019	2020	2021	2022	
	2	11	4	6	6	

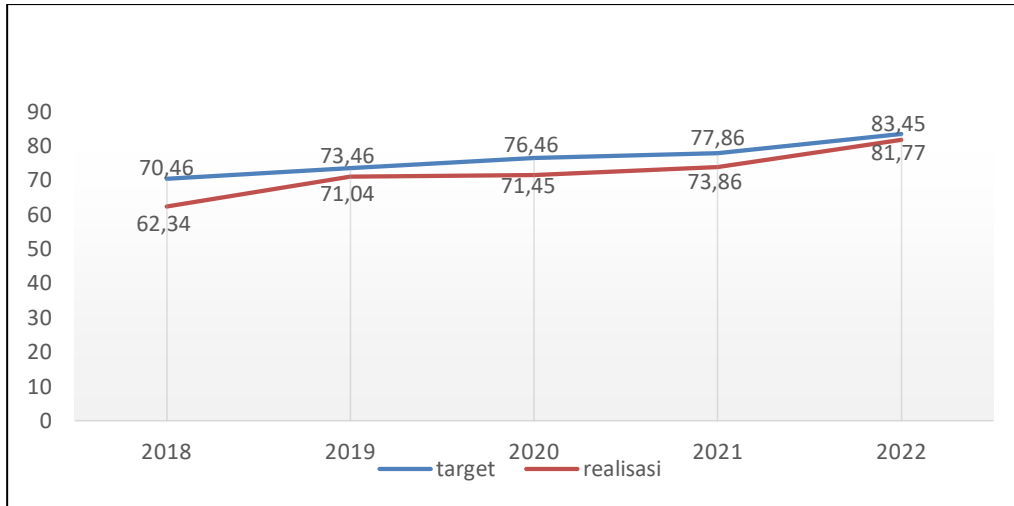
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2023.

### 3. Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan persampahan di Kota Tasikmalaya dilaksanakan melalui dua langkah, yaitu penanganan dan pengurangan sampah. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, maka setiap tahunnya jumlah sampah akan semakin meningkat pula. Timbulan sampah masyarakat Kota Tasikmalaya

pada tahun 2022 adalah 319,11 ton/hari, sedangkan capaian pengelolaan sampah yaitu sebesar 253,18 ton/hari atau 92.411,92 ton/tahun. Dengan demikian capaian pengelolaan sampah baru mencapai 81,77 % dari timbulan sampah keseluruhan pada tahun 2022. Gambar 2.38. Memerlihatkan capaian pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya.

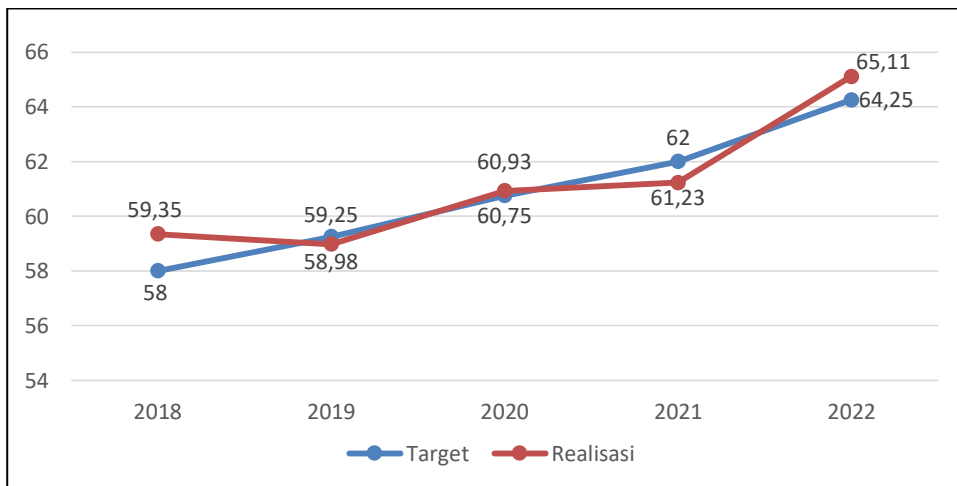
Gambar 2.38.  
Persentase Capaian Pengelolaan Sampah Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2023.

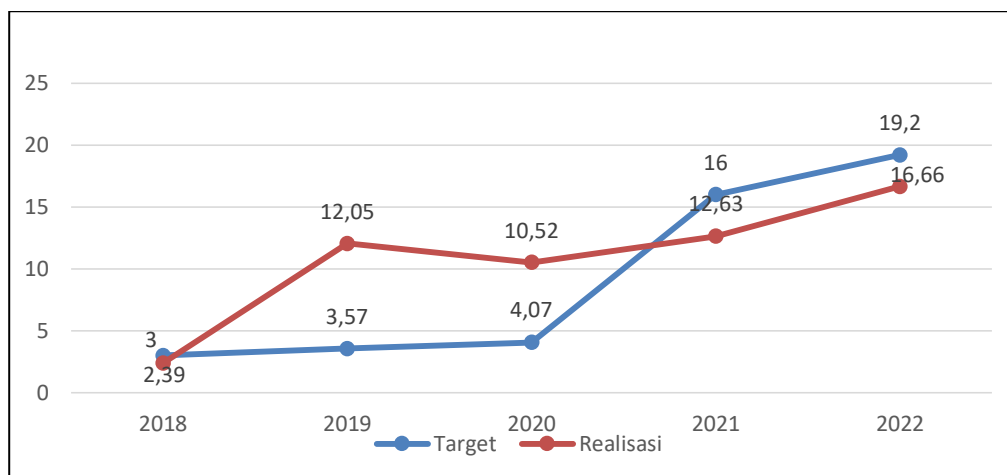
Apabila melihat Gambar 2.38. di atas, capaian pengelolaan sampah selama tahun 2018-2022 menunjukkan trend yang meningkat walaupun masih di bawah target yang ditetapkan. Adapun perkembangan dalam penanganan dan pengurangan sampah selama tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.39.  
Persentase Penanganan Sampah Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2023.

Gambar 2.40.  
Persentase Pengurangan Sampah Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2023.

Jika melihat grafik penanganan sampah di atas, terlihat bahwa selama periode 2018 – 2022 capaian penanganan sampah relatif telah memenuhi target. Sedangkan untuk pengurangan sampah, grafik di atas menunjukkan bahwa capaian pengurangan sampah jauh melebihi target pada tahun 2019 dan 2020, namun kembali menurun di bawah target pada tahun 2021 dan 2022. Hal ini di antaranya karena adanya revisi renstra Dinas Lingkungan Hidup yang merubah target di tahun 2021, sehingga kinerja pengelolaan sampah tidak memenuhi target. Selain itu juga karena terjadinya pandemic Covid 19 pada tahun 2020 dan 2021 yang berdampak terhadap kegiatan pengurangan sampah.

Seperti telah disampaikan bahwa peningkatan jumlah penduduk di Kota Tasikmalaya, diikuti jumlah sampah yang dihasilkan. Hal ini tentunya harus ditunjang dengan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang mendukung supaya tidak terjadi penumpukan sampah. Penyebab kondisi penumpukan sampah pada beberapa wilayah dikarenakan sistem pengangkutan sampah kurang efektif dan efisien. Pada Tabel 2.60. dapat dilihat jenis dan jumlah sarana pengangkutan sampah di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.60.  
Sarana Pengangkutan Persampahan Tahun 2022

No.	Jenis	Kondisi			Jumlah
		Baik	Layak	Tidak Layak/Rusak	
1	Dump Truck	9	6	13	28
2	Arm roll	1	8	4	13
3	Truck Engkel	1	1		2
4	Pick Up		2		2
5	Motor Roda 3	11	6	10	27
6	Kontainer Amroll	8		65	73
Jumlah					143

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2023.

Selain sarana pengangkutan sampah, dalam pengelolaan sampah juga diperlukan sarana alat berat. Berikut sarana alat berat yang dimiliki oleh pemerintah Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.61.  
Sarana Alat Berat Persampahan Tahun 2022

No.	Jenis	Kondisi			Jumlah
		Baik	Layak	Rusak	
1	Buldozer D31			1	1
2	Buldozer D39			1	1
3	Eksavator Liu Gong			1	1
4	Eksavator Pindad		1		1
Jumlah					4

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2023.

Pengelolaan sampah di TPA Ciangir saat ini masih menggunakan open dumping. Keterbatasan SDM dan pelaksanaan SOP yang belum maksimal juga menjadi kendala dalam pelaksanaan operasional TPA.

Sesuai dengan sertifikat, luas lahan di TPA Ciangir yaitu 6,5 Ha. Namun ada perbedaan dengan hasil pengukuran mengikuti patok yang ada di TPA, yaitu seluas 8 Ha. Permasalahan luas lahan ini kiranya perlu diselesaikan dengan tuntas agar luas dan batas kepemilikan lahan TPA Ciangir menjadi jelas. Selain itu, berdasarkan kajian perluasan TPA tahun 2017, pada TPA Ciangir dibutuhkan perluasan hingga 9,9 Ha, karena seringkali di lingkungan sekitar TPA terjadi pencemaran akibat kegiatan di TPA dan volume sampah di TPA sudah melebihi kapasitas. Sampah yang masuk ke TPA Ciangir pada tahun 2022 adalah sebanyak 73.301,03 Ton atau 200,82 Ton/Hari yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan oleh pihak swasta adalah 63,310 Ton atau 0,17 Ton/Hari pada tahun yang sama.

Dalam rangka optimalisasi persampahan telah dikembangkan gerakan 3R dengan melalui kegiatan bank sampah di mulai dari tingkat paling rendah yaitu tingkat RW sampai dengan tingkat kecamatan. Pada Tahun 2018 Kota Tasikmalaya memiliki 10 Bank Sampah Unit, di tahun 2018 di bentuk Bank sampah induk di Komlek Bali Wiwitan. Secara lebih jelas jumlah bank sampah diperlihatkan pada Tabel 2.62.

Tabel 2.62.  
Jumlah Bank Sampah di Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2022

Jenis Bank Sampah	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Bank Sampah Induk			1	1	1
Bank Sampah Unit	15	15	11	16	21
TPS3R	1	1	2	2	2
Jumlah	16	16	14	19	24

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2023.

### 2.1.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Data capaian pelayanan umum urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil tahun 2020-2022 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.63.  
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk (%)	%	97	98,77	97,5	101,1	98	99,56
2	Rasio bayi berakte kelahiran (%)	%	70	96,89	75	101,6	80	97,35
3	Jumlah pasangan yang membuat akte nikah non muslim (buah)	Lembar	200	400	210	471	210	544
4	Kepemilikan KTP (orang)	Orang	501.338	654.423	506.351	538.841	506.351	530.234
5	Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk (per 1.000)	Poin	410,7	398,59	373,2	410,3	373,2	448,6
6	Ketersediaan database kependudukan skala kota		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tidak Ada
7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
8	Capaian IKM Perangkat Daerah	Kategori	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik	Baik	Sangat baik	83,13
9	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	76	97,94	77	87,04	78	84
10	Persentase Kepemilikan Akte Pencatatan Sipil	%	67	98,45	68	100,8	69	99,11
11	Persentase Akurasi Database Kependudukan	%	85	99,6	90	100,8	95	100
12	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	%	60	100	80	100	100	100
13	Persentase Penerbitan Akte Pencatatan Sipil	%	60	100	80	100	80	100
14	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	60	100	80	100	80	100



15	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Administrasi Kependudukan	%	60	100	80	100	80	100
16	Persentase Kerjasama Administrasi Kependudukan	%	75	100	100	100	100	100
17	Persentase Implementasi Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	%	75	100	100	100	100	100
18	Persentase Lembaga Pemanfaat Data Kependudukan	%	75	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, 2023.

Terdapat beberapa capaian indikator urusan kependudukan tahun 2022 yang melebihi target. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya data kependudukan dan pencatatan sipil. Pemerintah Kota Tasikmalaya selama ini berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui Sosialisasi KESA (Kelurahan Sadar Administrasi Kependudukan).

Selanjutnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga menciptakan inovasi, seperti adanya layanan Go-dok kependudukan (Layanan Antar Dokumen Kependudukan secara langsung kepada masyarakat pada saat terjadi pandemic Covid) dan SIDDAKTA (Penyisiran Dokumen dan Data Kependudukan yaitu layanan kepada masyarakat dengan cara *door to door* atau langsung menemui masyarakat yang belum memiliki atau belum melengkapi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil).

Ketersediaan database kependudukan skala kota tidak dapat dilaksanakan karena adanya kebijakan SIAK Terpusat yang merupakan sistem digitalisasi yang digunakan agar pelayanan Dukcapil dapat terkoneksi daring secara nasional.

Salah satu pelayanan administrasi kependudukan adalah pelayanan KTP-elektronik. Sampai dengan tahun 2022 jumlah penduduk yang memiliki KTP Elektronik adalah sebagai berikut:

Tabel 2.64.  
Jumlah Penduduk yang memiliki KTP-Elektronik Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Wajib KTP	Perekaman	Belum Perekaman
		L	P	L+P			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cihideung	37.283	36.708	73.991	55.061	53.482	1.579
2	Cipedes	42.577	41.176	83.753	62.082	60.438	1.644
3	Tawang	32.093	32.129	64.222	48.371	47.117	1.254
4	Indihiang	30.441	28.891	60.332	44.142	42.800	1.342
5	Kawalu	52.017	49.272	101.289	74.249	72.112	2.137
6	Cibeureum	36.415	35.559	71.974	53.459	51.865	1.594
7	Tamansari	41.508	39.802	81.310	58.686	56.933	1.693
8	Mangkubumi	51.060	49.561	100.621	73.833	71.593	2.240
9	Bungursari	32.026	30.931	62.957	45.176	43.692	1.484
10	Purbaratu	23.630	22.631	46.261	34.235	33.363	872
JUMLAH		379.050	367.660	746.710	549.234	533.395	15.839

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, 2023.

#### 2.1.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat di Kota Tasikmalaya dapat dilihat dari data berikut:

Tabel 2.65.  
Pelayanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2020 - 2022

No.	Indikator	Satuan	Tahun		
			2020	2021	2022
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Buah	69	69	69
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Buah	308	276	315
3	Jumlah LSM (buah)	Buah	218	218	218
4	LPM Berprestasi	Persen	-	-	-
5	PKK aktif	Persen	100	100	100
6	Posyandu aktif	Unit	874	890	901
7	Swadaya Masyarakat terhadap Program	Persen	-	-	-
8	Penerima Manfaat dari Program Gema Madani :				
	a. Bidang Infrastruktur	Kelompok/ Paket	-	413	-
	b. Bidang Ekonomi	Orang	-	1.664	1.386
	c. Bidang Sosial	Orang	-	5.227	-

Sumber: Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, Data Diolah, 2023

Adapun untuk capaian indikator urusan pemberdayaan masyarakat tahun 2020 – 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.66.  
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat  
Tahun 2020 – 2022

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	%	-*	-*	100	100	100	100

Ket : \* = Perubahan indikator

Sumber: Setda Kota Tasikmalaya, 2023

#### 2.1.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan, karena penduduk dapat menjadi modal namun juga dapat menjadi masalah bagi pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu penduduk harus dikendalikan salahsatunya melalui program keluarga berencana. Pelaksanaan urusan penengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.67.  
Pelayanan Umum Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Tahun 2020 – 2022

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Cakupan Layanan Keluarga Berencana	%	66	72,36	67	63,60	67	72,98
2	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB Aktif	%	72,50	72,36	67	72,37	72,6	72,98
3	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun	%	1	1,22	1	0,60	-	20,85
4	Persentase Peran serta masyarakat dlm pembangunan kesejahteraan keluarga	%	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
5	Cakupan data mikro keluarga yang akurat	%	100	100	100	96	100	83,63

Sumber : DPPKBP3A Kota Tasikmalaya, 2022.

#### 2.1.3.2.9. Perhubungan

Pelayanan urusan perhubungan berkaitan dengan mobilitas masyarakat baik dalam pengadaan transportasi maupun sarana dan prasarannya. Pelaksanaan urusan perhubungan dalam kurun waktu tahun 2020 - 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.68.  
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perhubungan  
Tahun 2020 - 2022

No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase prasarana lalu lintas dan angkutan jalan kota	%	47,25	65,06	_*	_*	_*	_*
2	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	%	74,23	88,21	_*	_*	_*	_*
3	Capaian ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan sesuai yang ditargetkan	%	60	92	_*	_*	_*	_*
4	Cakupan terlayani angkutan umum	%	88,45	84,41	_*	_*	_*	_*
5	Cakupan Manajemen Angkutan	%	86,96	85,51	_*	_*	_*	_*
6	Cakupan Bina Usaha Angkutan	%	83,92	82,12	_*	_*	_*	_*
7	Cakupan Sarana dan Prasarana Angkutan	%	94,49	85,62	_*	_*	_*	_*
8	Penurunan waktu antrian kendaraan pada jaringan jalan pusat kota	LoS	0,212	0,3	_*	_*	_*	_*

No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
9	Persentase perlengkapan jalan yang berkualitas dan bersinergi dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas di pusat kota	%	83,33	91,67	_*	_*	_*	_*
10	Capaian kualitas layanan lalu lintas pada ruas jalan pusat kota	%	83,33	91,67	_*	_*	_*	_*
11	Persentase kenyamanan berlalulintas dan angkutan umum	%	_*	_*	82,34	88,03	96,48	117,61
12	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan	%	_*	_*	50	53,57	100	55,36
13	Persentase pelayanan andalin	%	_*	_*	100	160	100	140
14	Persentase pemenuhan standar keselamatan angkutan	%	_*	_*	95,25	76,7	100	164,50
15	Persentase Pelayanan angkutan umum	%	_*	_*	84,12	61,84	85,91	110,58

Ket : \* = Perubahan indikator

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2023.

Dari data pada tabel diatas secara umum, capaian indikator pelayanan urusan perhubungan meningkat dalam kurun waktu 2020 – 2022. Walaupun terdapat beberapa yang mengalami penurunan pada capaian, seperti persentase prasarana lalu lintas dan angkutan jalan kota, cakupan terlayani angkutan umum, cakupan bina usaha angkutan dan cakupan sarana dan prasarana angkutan.

Capaian persentase prasarana lalu lintas dan angkutan jalan kota merupakan realisasi ruas jalan memenuhi standar keselamatan/ jumlah ruas jalan sesuai SK.541.3/Kep.136-DIPUPR/2017 dengan tingkat layanan angkutan umum. Data sampai dengan tahun 2020 menunjukkan penurunan yang cukup berarti pada kinerja layanan angkutan umum, meliputi cakupan terlayani angkutan umum yang turun dari 104,11 menjadi 84,41%, kemudian cakupan bina usaha angkutan turun dari 121,78% menjadi 82,12% dan cakupan sarana dan prasarana angkutan turun dari 105,06% menjadi 85,62%. Dengan demikian, persentase prasarana lalu lintas dan angkutan jalan turun dari 69,84% menjadi 65,06%.

Tidak tercapainya indikator di bidang angkutan banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal dengan adanya pandemi covid-19, kegiatan pengendalian penyebaran pendemi covid-19 dan kondisi ekonomi masyarakat yang menurun

yang mana dampak lanjutannya mempengaruhi terhadap capaian indikator di bidang angkutan. Capaian indikator tersebut dipengaruhi oleh:

1. Menurunnya jumlah angkutan kota yang beroperasi, berdampak terhadap disiplin pemilik/awak angkutan kota untuk memperpanjang ijin trayek;
2. Eksistensi kendaraan angkutan penumpang berbasis *online*/ojol;
3. Terdapat kegiatan yang mendukung secara langsung terhadap capaian di bidang angkutan tidak dilaksanakan mengingat kegiatan tidak memungkinkan dilaksanakan pada situasi masa pandemi.

Dari tabel diatas juga terlihat bahwa terdapat perubahan indikator kinerja urusan perhubungan pada tahun 2021-2022 yaitu persentase kenyamanan berlalu lintas dan angkutan umum, persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan, persentase pelayanan andalin, persentase pemenuhan standar keselamatan angkutan, persentase pelayanan angkutan umum. Dari empat indikator tersebut, terdapat satu indikator yang belum mencapai target yaitu persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan dimana target yang ditetapkan yaitu 100% dan realisasi tercatat 55,36%.

Kondisi geografis Kota Tasikmalaya yang terletak di Bagian Tenggara Wilayah Provinsi Jawa Barat dan berjarak ±105 km dari Ibukota Provinsi Jawa Barat yaitu Kota Bandung serta merupakan Pusat Kegiatan Wilayah Priangan Timur, maka untuk menghubungkan antar wilayah tentunya diperlukan prasarana berupa jaringan jalan beserta kelengkapannya. Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas perlu dilakukan pemenuhan terhadap kebutuhan akan perlengkapan jalan sebagai bagian dari prasarana jalan. Kondisi fasilitas kelengkapan jalan secara keseluruhan jalan di Kota Tasikmalaya tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.69.  
Pembangunan Urusan Perhubungan  
Dari Tahun 2020-2022

No.	Uraian	Satuan	Capaian Tahun		
			2020	2021	2022
1	Jumlah Rambu terpasang	Unit	2002	2006	2.036
2	Jumlah Marka Jalan terpasang	M <sup>2</sup>	3.051,2	3.622,2	4.123
3	Jumlah Traffic light terpasang	Lokasi	21	21	21
4	Jumlah Warning Light terpasang	Lokasi	49	49	49
5	Jumlah PJU terpasang	Unit	10.099	11.030	11.624
6	Jumlah Halte/shelter terbangun	Unit	33	33	33
7	Jumlah Guardrail terbangun	m <sup>2</sup>	261	261	261
8	Jumlah ATCS terpasang	Unit	24	24	24
9	Jumlah Terminal terbangun	Buah	5	5	5

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2023.

Rambu-rambu lalu lintas merupakan salah satu fasilitas kelengkapan jalan yang harus tersedia sesuai dengan kebutuhannya. Adapun jumlah dan kondisi rambu-rambu lalu lintas yang terdapat di jaringan jalan Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.70.  
Jumlah dan Kondisi Rambu-Rambu Lalu Lintas  
Tahun 2020-2022

No	Lokasi	Di butuhkan	2020			2021			2022		
			Ter pasang	Kondisi		Ter pasang	Kondisi		Ter pasang	Kondisi	
				Baik	Rusak		Baik	Rusak		Baik	Rusak
1	Jalan Nasional	230	175	120	55	175	120	55	175	110	65
2	Jalan Provinsi	726	256	135	121	256	135	121	256	125	131
3	Jalan Kota	1.750	1.571	787	784	1.575	791	784	1.605	850	755
Jumlah		2.706	2.002	1.042	960	2.006	1.046	960	2.036	1.085	951

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, tahun 2023.

Berdasarkan hasil survey, di Kota Tasikmalaya perlu dipasang rambu-rambu lalu lintas sebanyak 2.706 unit. Pada tahun 2022, telah terpasang sebanyak 2.036 unit di lokasi jalan Nasional, Provinsi dan Kota, dimana 1.085 unit kondisi baik dan 951 unit kondisi dalam kondisi rusak. Dengan demikian untuk memenuhi kebutuhan, rambu-rambu lalu lintas yang belum terpasang sebanyak 991 unit dan 951 diperlukan perbaikan/penggantian.

Fasilitas kelengkapan jalan yang berikutnya adalah marka jalan. Marka jalan merupakan salah satu fasilitas yang penting untuk memberi batas dan mengatur arus kendaraan lalu lintas pada jaringan jalan. Adapun data marka jalan di jaringan jalan Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.71.  
Marka Jalan Menurut Kondisinya Tahun 2021- 2022

No	Lokasi	Dibutuhkan (m <sup>2</sup> )	2021				2022			
			Ter pasang (m <sup>2</sup> )	Kondisi			Ter pasang (m <sup>2</sup> )	Kondisi		
				Baik (%)	Sedang (%)	Pudar (%)		Baik (%)	Sedang (%)	Pudar (%)
1	Jalan Nasional	947,2	807	50	20	30	807	50	20	30
2	Jalan Provinsi	3.654,1	1.543	30	40	30	1.543	30	40	30
3	Jalan Kota	4.022,29	1.272,2	85	20	20	4.000	85	20	20
Jumlah		8.623,59	3.622,2				6.370			

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2023

Kota Tasikmalaya telah membuat marka jalan sepanjang 6.370 m<sup>2</sup>. Marka jalan dalam kondisi baik sebagian besar terletak di Jalan Kota sebanyak 85% dalam kondisi baik, sedangkan kondisi marka yang pudar terletak disekitar jalan nasional dan provinsi sebesar 20%. Kebutuhan marka jalan yang harus dibuat sebesar 8.623,59 m<sup>2</sup> yang tersebar di jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kota, sehingga kekurangan pembangunan marka sepanjang 2.253,59 m<sup>2</sup>.

Fasilitas kelengkapan jalan yang berikutnya adalah Penerangan Jalan Umum (PJU). PJU merupakan salah satu fasilitas yang penting untuk memberikan pencahayaan buatan pagi pengguna jalan dalam mempermudah melihat pada malam hari sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan. Adapun data PJU yang terdapat di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.72.  
Penerangan Jalan Umum (PJU) Menurut Kondisinya Tahun 2021-2022

No	Lokasi	Dibutuhkan (unit)	2021		2022	
			Terpasang (unit)	Berfungsi (unit)	Terpasang (unit)	Berfungsi (unit)
1	Jalan Nasional	552	240	232	150	60
2	Jalan Provinsi	1.844	676	452	200	56
3	Jalan Kota	11.604	10.114	10.087	12.000	11.594
Jumlah		14.000	11.030	10.771	12.350	11.710

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2023

Jumlah PJU dibutuhkan di Kota Tasikmalaya sebanyak 14.000 unit untuk jalan Nasional, Provinsi dan Kota. Adapun PJU yang terpasang sampai dengan tahun 2022 yaitu sebanyak 12.350 unit, dengan 94,8% (11.710 unit) berfungsi. Berdasarkan kebutuhan tersebut, masih dibutuhkan pemasangan PJU sebanyak 1.650 unit.

Fasilitas kelengkapan jalan yang berikutnya adalah fasilitas penyebrangan (*Zebra Cross*). Fasilitas penyebrangan juga merupakan salah satu fasilitas yang penting untuk area penyebrangan pejalan kaki dan penanda bagi pengemudi untuk memperlambat kecepatan saat ada pejalan kaki. Kondisi fasilitas penyebrangan di Kota Tasikmalaya belum sesuai dengan kebutuhan. Adapun jumlah ketersediaan fasilitas penyebrangan di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.73.  
Fasilitas Penyebrangan (*Zebra Cross*) Menurut Kondisinya Tahun 2021-2022

No	Fasilitas	Dibutuhkan (buah)	2021		2022	
			Terpasang (buah)	Berfungsi (buah)	Terpasang (buah)	Berfungsi (buah)
1	Jalan Nasional	30	20	Baik	30	20
2	Jalan Provinsi	70	46	Baik	70	46
3	Jalan Kota	120	86	Baik	461	110
Jumlah		220	152	Baik	561	176

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2023



Berdasarkan hasil survey, di Kota Tasikmalaya dibutuhkan 220 buah, dan telah terpasang sampai tahun 2022 yaitu 176 buah dengan kondisi baik, sehingga masih perlu dilakukan pemasangan *Zebra Cross* sebanyak 44 buah.

Fasilitas kelengkapan jalan yang berikutnya adalah Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL). APILL berfungsi sebagai lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyebrangan, dan tempat arus lalu lintas lainnya. Kondisi APILL di Kota Tasikmalaya sudah terpasang sesuai dengan kebutuhan dan 67% berfungsi dengan baik seperti terlihat pada tabel rincian berikut:

Tabel 2.74.

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Menurut Kondisinya Tahun 2021 - 2022

No	Jenis lokasi	Dibutuhkan (buah)	2021			2022		
			Terpasang (buah)	Kondisi (buah)		Terpasang (buah)	Kondisi (buah)	
				Berfungsi	Tidak		Berfungsi	Tidak
1	Jalan Nasional	8	6	6		8	6	2
2	Jalan Provinsi	7	4	4		7	4	3
3	Jalan Kota	12	8	7	1	12	8	4
Jumlah		27	18	17	1	27	18	9

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2023

Berdasarkan kebutuhan ruas jalan yang berada di Kota Tasikmalaya, diperlukan 27 buah alat pemberi isyarat lalu lintas. Yang telah terpasang sebanyak 27 unit dengan kondisi 18 berfungsi dan 9 tidak berfungsi. Perlu adanya perbaikan terhadap APILL yang tidak berfungsi untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas pada persimpangan.

Fasilitas kelengkapan jalan yang berikutnya adalah *Guard Rail* (Pagar Pengaman). *Guard Rail* (Pagar Pengaman) adalah sistem pengaman orang atau kendaraan yang terbuat dari rail besi atau baja panjang yang berfungsi untuk pelindung kendaraan. Adapun data panjang *Guard Rail* (Pagar Pengaman) di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.75.

Panjang *Guard Rail* (Pagar Pengaman) Tahun 2020 - 2022

No	Lokasi	Dibutuhkan (meter)	Tahun		
			2020	2021	2022
1	Jalan Nasional	-	-	-	-
2	Jalan Provinsi	700	200	200	200
3	Jalan Kota	300	61	61	61
Jumlah		1.000	261	261	261

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2023

Berdasarkan kebutuhan ruas jalan yang berada di Kota Tasikmalaya, diperlukan sepanjang 1.000 m<sup>2</sup> pagar pengaman. Adapun pagar pengaman yang telah terpasang baru sepanjang 261 m<sup>2</sup> sehingga perlu adanya penambahan pemasangan pagar pengaman sepanjang 739 m<sup>2</sup>.

Fasilitas kelengkapan jalan yang berikutnya adalah cermin tikungan. Cermin tikungan merupakan kelengkapan tambahan yang berfungsi untuk menambah jarak pandang pengemudi yang biasanya berada

pada tikungan tajam dan persimpangan. Jumlah cermin tikungan di jaringan jalan Kota Tasikmalaya belum sesuai dengan kebutuhan. Adapun jumlah cermin tikungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.76.  
Cermin Tikungan Menurut Jumlahnya Tahun 2020 - 2022

No	Lokasi	Dibutuhkan (buah)	Tahun		
			2020	2021	2022
1	Jalan Nasional	4	-	0	4
2	Jalan Provinsi	6	-	0	6
3	Jalan Kota	20	2	2	2
Jumlah		30	2	2	12

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2023

Berdasarkan kebutuhan untuk keselamatan jalan, fasilitas cermin tikungan sebanyak 30 buah, yang terpasang baru 2 buah. Sehingga masih diperlukan pemasangan cermin tikungan sebanyak 28 buah yang akan ditempatkan di tikungan yang belum terdapat cermin tikungan.

Fasilitas kelengkapan jalan yang berikutnya adalah pita pengaduh. Pita pengaduh berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, melindungi penyebrang jalan untuk mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Adapun jumlah pita pengaduh yang sudah ada di jaringan jalan Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.77.  
Pita Pengaduh Menurut Kondisinya Tahun 2020 - 2022

No	Lokasi	Dibutuhkan (buah)	Terpasang (buah)		
			2020	2021	2022
1	Jalan Nasional	10	6	6	6
2	Jalan Provinsi	8	4	4	4
3	Jalan Kota	25	12	12	12
Jumlah		43	22	22	22

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2023

Berdasarkan kebutuhan untuk keselamatan jalan, fasilitas pita pengaduh seharusnya terdapat 43 buah. Saat ini di Kota Tasikmalaya terdapat 22 buah pita pengaduh. Sehingga masih diperlukan sejumlah 21 buah pita pengaduh untuk memenuhi kebutuhan.

Fasilitas parkir bertujuan untuk memberikan tempat bagi kendaraan dan menunjang kelancaran lalu lintas. Fasilitas perparkiran menurut jenis dan kondisinya sampai dengan tahun 2022 Ruang Parkir pada badan jalan direncanakan 8,8 km dan telah digunakan 6,4 km. Sehingga hampir keseluruhan telah digunakan (73%).

Tabel 2.78.  
Ruang Parkir Pada Badan Jalan Tahun 2020 - 2022

No	Lokasi	Jml Ruas	Panjang jalan yg terdapat rambu parkir (Km)			Panjang jalan yg digunakan parkir (Km)		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	Jalan Nasional	-	-	-	-	-	-	-
2	Jalan Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
3	Jalan Kota	33	8,80	8,80	8,00	7,83	7,83	6,50
Jumlah		34	33	8,80	8,80	8,00	7,83	7,83

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2023

Selain infrastruktur jalan serta fasilitas kelengkapannya, sarana yang dibutuhkan dalam transportasi adalah adanya alat transportasi baik armada maupun prasarana jalan yang berupa terminal. Kewenangan Kota untuk pengelolaan terminal adalah terminal penumpang tipe C yang saat ini berjumlah 4 terminal serta 1 terminal tipe A yang dikelola oleh pemerintah pusat. Prasarana terminal angkutan penumpang di Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.79.  
Terminal Angkutan Penumpang Tahun 2022

No.	Nama Terminal	Tipe	Luas (Ha)	Instansi Pengelola
1.	Terminal Indihiang	A	7,50	Kementerian PHB
2.	Terminal Pancasila	C	0,30	Dishub
3.	Terminal Padayungan	C	0,23	Dishub
4.	Terminal Cikurubuk	C	0,29	Dishub
5.	Terminal Awipari	C	1,49	Dishub

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2023

Kota Tasikmalaya memiliki 5 terminal, 1 terminal tipe A, dan 4 terminal tipe C. Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2018 - 2022, direncanakan akan dibangun terminal tipe C Batunungku. Namun, sampai dengan tahun 2021 pembangunan terminal Batunungku baru terealisasi 20%.

Untuk pelayanan angkutan penumpang umum khususnya angkutan kota terdapat 16 Tempat Pemberhentian Kendaraan (TPK) yang tersebar berdasarkan jalur/ trayek angkutan kota yaitu:

1. TPK Nyantong
2. TPK Muncang
3. TPK Cikadongdong
4. TPK Leuwidahu
5. TPK Karangresik
6. TPK Cigeureung
7. TPK Gegernoong
8. TPK Cipeusar
9. TPK Awiluar
10. TPK Gobang
11. TPK Cibunigeulis
12. TPK Asta
13. TPK Pamipiran
14. TPK Bumi Resik Panglayungan
15. TPK Sindang Galih
16. TPK Perum Kota Baru

Terkait dengan sarana yang dibutuhkan dalam transportasi yaitu adanya alat transportasi yang baik. pada Kota Tasikmalaya terdapat alat transportasi berupa angkutan umum berupa angkutan kota (angkot), angkutan perbatasan (angtas), angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), serta Angkutan Kota

Antar Provinsi (AKAP). Adapun jumlah trayek angkutan umum di Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.80.  
Jumlah Trayek Angkutan Umum Tahun 2022

No.	Trayek	Jumlah Trayek eksisting	Jumlah Usulan Trayek Baru
1	ANGKOT	21	3
2	ANGTAS	44	1
3	AKDP	43	9
4	AKAP	20	
		128	13

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2023

Dapat terlihat dari tabel diatas jumlah keseluruhan trayek angkutan kota yang ada di Kota Tasikmalaya adalah 128 trayek yang dibagi dalam 4 jenis angkutan yaitu 21 trayek untuk angkot, 44 trayek angkutan perbatasan, 43 trayek AKDP, dan 20 trayek AKAP. Selain itu akan diusulkan trayek baru sebanyak 13 trayek.

Untuk rincian angkutan kota sebanyak 21 trayek dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.81.  
Data Trayek Angkutan Kota Tahun 2021 - 2022

No	No/ kode trayek	Panjang trayek (km)	2021					2022				
			Jumlah armada (unit) Mobil Penumpang Umum					Jumlah armada (unit) Mobil Penumpang Umum				
			Alokasi	Realisasi	Alokasi		Sisa	Alokasi	Realisasi	Status		Sisa
Aktif	Non Aktif	Aktif			Non Aktif							
1	01	27	91	91	49	42	0	91	91	35	56	0
2	02	16	52	49	10	39	3	52	49	8	41	3
3	03	19,5	125	122	50	72	3	125	122	37	85	3
4	04	23	100	92	53	39	8	100	92	48	44	8
5	05	23,5	150	141	59	82	9	150	141	49	92	9
6	06	23	33	21	14	7	12	33	21	12	9	12
7	07	23	70	63	32	31	7	70	63	28	35	7
8	08	23	70	60	11	49	10	70	60	8	52	10
9	09	25	56	27	11	16	29	56	27	10	17	29
10	09 A	30	35	32	21	11	3	35	32	16	16	3
11	010	34,5	71	67	31	36	4	71	67	11	56	4
12	011	16	19	19	10	9	0	19	19	13	6	0
13	012	15	28	23	15	8	5	28	23	14	9	5
14	012 A	20	4	2	0	2	2	4	2	0	2	2
15	013	26	50	47	20	27	3	50	47	11	36	3
16	014	33	20	16	9	7	4	20	16	6	10	4
17	015	44	35	31	11	20	4	35	31	11	20	4
18	016	28	35	21	7	14	14	35	21	1	20	14
19	017	13	35	35	23	12	0	35	35	18	17	0
20	018	19,5	40	25	12	13	15	40	25	9	16	15

No	No/ kode traye k	Panja ng traye k (km)	2021					2022				
			Jumlah armada (unit) Mobil Penumpang Umum					Jumlah armada (unit) Mobil Penumpang Umum				
			Aloka si	Realis asi	Alokasi		Sis a	Aloka si	Realis asi	Status		Sis a
					Aktif	Non Aktif				Aktif	Non Aktif	
21	019	28	19	18	8	10	1	19	18	6	12	1
Jumlah			1.138	1.002	456	546	136	1.138	1.002	351	651	136

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2023

Selain hal-hal yang telah diuraikan, Dinas Perhubungan bertugas pula untuk menguji kendaraan umum bermotor. Sehubungan dengan adanya kebijakan pembatasan mobilitas kendaraan umum untuk mengendalikan pandemi Covid-19 dan kebijakan program Zero ODOL (*Over Dimension Over Load*) Kendaraan Angkutan Barang dari Kementerian Perhubungan R.I, maka realisasi wajib uji dan kendaraan uji lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Adapun rincian data ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.82.  
Data Kendaraan Wajib Uji Tahun 2020 - 2022

TAH UN	MOBIL BARANG						KER ETA GAN DEN GAN		KERET A TEMPE LAN		MOBIL BUS		KHUSU S		MOBIL PENUMP ANG		TOT AL
	KECIL		SEDAN G		BESA R		U	B U	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	
	U	B U	U	B U	U	B U											
202 0	22 40	63 00	15 64	24 11	3 7 9	2 2 2	0	5	2 7	18 2	21 96	23 4	7 2	39	21 8	18	161 07
202 1	23 75	59 90	14 40	22 77	3 8 0	1 9 4	2	4	3 3	19 1	19 38	22 2	6 0	29	18 8	16	153 39
202 2	23 44	56 02	13 71	21 06	4 8 3	2 7 5	1	7	3 6	18 5	18 62	20 8	7 7	23	17 2	10	147 62

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2023

Dapat terlihat dari tabel diatas bahwa jumlah kendaraan wajib uji dari tahun 2020-2022 terus mengalami penurunan kecuali pada beberapa kendaraan seperti mobil barang besar, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus. Dari data-data tersebut setiap tahunnya diwajibkan untuk dilakukan uji. Adapun realisasi jumlah kendaraan yang lulus uji dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.83.  
Realiasi Kegiatan Ijin Trayek Aktif dan Jumlah Kendaraan Lulus uji Dinas Perhubungan 2018-2022

No.	Uraian	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Ijin trayek aktif	Unit	1.123	1.219	794	616	360
2	Jumlah kendaraan lulus uji	Unit	20.515	20.013	16.310	15.339	14.762

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2023

Berdasarkan jumlah kendaraan yang melakukan izin trayek di Kota Tasikmalaya pada tahun 2020-2022 mengalami penurunan dimana kendaraan aktif yang melakukan perpanjangan izin trayek pada tahun 2022 hanya 360 kendaraan. Hal ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan selama 2 tahun berturut dikarenakan menurunnya jumlah angkutan kota yang beroperasi, berdampak terhadap disiplin pemilik/awak angkutan kota untuk memperpanjang izin trayek, dan adanya eksistensi kendaraan angkutan penumpang berbasis online/ojol.

#### 2.1.3.2.10. Komunikasi & Informatika

Pelaksanaan pelayanan umum urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Capaian pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.84.  
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 – 2022

No.	Indikator	Satuan	Realisasi					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah jaringan komunikasi	Unit	-*	-*	-*	-*	-*	-*
2	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	100	-*
3	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	100	100	-*	-*	-*	-*
4	Web site milik pemerintah daerah (ada/tidak)	Ada/tidak	Ada	Ada	-*	-*	-*	-*
5	Capaian Implementasi E-Government	%	-*	-*	-*	-*	-*	-*
6	Capaian penyebarluasan informasi dan komunikasi publik	%	30	37,5	40	41,68	50	54
7	Persentase pelayanan informasi/	%	70	100	80	100	80	-*

No.	Indikator	Satuan	Realisasi					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	dokumentasi dan pengaduan							
8	Capaian pembangunan infrastruktur TIK terhadap target	%	70	94,5	_*	_*	_*	_*
9	Capaian implementasi smart city	%	24	62,66	_*	_*	_*	_*
10	Rasio ketersediaan tenaga TIK terhadap kebutuhan	%	50	88	_*	_*	_*	_*
11	Persentase penyebarluasan informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan	%	100	100	_*	_*	_*	_*
12	Persentase pengelolaan saluran informasi	%	_*	_*	100	100	100	100
14	Persentase domain dan sub domain yang dikelola	%	_*	_*	100	100	100	100
15	Capaian Predikat Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	_*	_*	2,7	2,68	3	2,62
16	Jumlah titik jaringan intranet Pemerintah Daerah	Node	_*	_*	400	400	300	348
17	Persentase penataan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	_*	_*	100	100	100	100
18	Capaian Pengelolaan Pusat Data	Tier	_*	_*	1	1	1	1
19	Jumlah sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah	Sistem	_*	_*	2	2	2	2
20	Jumlah data dan informasi elektronik	Unit	_*	_*	1	1	1	_*
21	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	Aplikasi	_*	_*	2	2	2	2
22	Jumlah Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sistem	_*	_*	7	7	7	7
23	Jumlah Sarana dan Prasarana TIK yang dikelola	Paket	_*	_*	3	3	3	3
24	Capaian Government Chief Information Officer (GCIO)	Level	_*	_*	1	1	1	_*

Ket : \*\* = Perubahan indikator

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya, 2023.

Capaian penyebarluasan informasi dan komunikasi publik adalah salah satu capaian dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, baik kebijakan, program dan kegiatan maupun menjangkau opini dan aspirasi publik. Dinas Komunikasi dan Informatika terus berupaya dalam mengelola konten sebagai bahan informasi yang disajikan melalui beberapa media komunikasi publik, baik yang dikelola oleh internal maupun yang dikerjasamakan dengan pihak eksternal. Selama tahun 2022 terdapat sejumlah 1.890 konten informasi yang disebarluaskan melalui 35 media komunikasi publik.

Indikator penyebarluasan informasi dan komunikasi publik pada tahun 2022 mencapai 54% dari target sebesar 50% sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 108% dan melebihi target. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam tingginya capaian kinerja yang melebihi target untuk indikator ini, salah satunya adalah melaksanakan pelayanan publik dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui SP4N LAPOR dengan efektif dan efisien serta penguatan konten-konten Informasi yang disampaikan ke masyarakat melalui berbagai media.

Pencapaian indikator untuk Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2022, Pemerintah Kota Tasikmalaya mendapatkan Nilai sebesar 2,62 poin (kategori Baik) dari target sebesar 3,00 poin, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 87,33 dan tidak mencapai target. Beberapa permasalahan yang menjadi faktor penyebab indeks SPBE tidak mencapai target dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya disebabkan antara lain:

1. Kebijakan internal pembangunan Aplikasi SPBE belum mengatur proses konsultasi terkait siklus Pembangunan Aplikasi SPBE dengan perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pemerintah Daerah.
2. Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi belum mengatur secara lengkap cakupan MKI (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi).
3. Belum tersedianya dokumen arsitektur SPBE dan dokumen Peta Rencana SPBE.
4. Manajemen SPBE masih rendah dikarenakan beberapa tingkat kematangan penerapan belum dilaksanakan dan belum diterapkan.
5. Beberapa dokumen untuk evidence penilaian domain masih terdapat beberapa kekurangan.

#### Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Dalam upaya melaksanakan amanat pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana, Pemerintah Kota Tasikmalaya pada tahun 2013 membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Penetapan Kebijakan PPID Pemerintah Kota Tasikmalaya di dukung dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 103 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kota Tasikmalaya yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar pelaksanaan tugas operasional PPID Kota Tasikmalaya. Sebelumnya Wali Kota Tasikmalaya membentuk kelembagaan PPID melalui Keputusan Keputusan Wali Kota Nomor 550/kep.119-Kominfo/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan



Dokumentasi di Kota Tasikmalaya. Untuk memperlancar kegiatan PPID di Kota Tasikmalaya, pada tahun 2022 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Selaku PPID Utama mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 473.2/Kep.02/PPID-Utama tentang Penetapan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama.

Dalam meningkatkan Pelayanan informasi, Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui PPID telah membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa media sebagai berikut:

1. Melalui website <http://ppid.tasikmalayakota.go.id>
2. Help desk/layanan langsung/frontdesk
3. Ruang tunggu pelayanan
4. Layanan melalui telepon dan email

Nomor tlp : (0265) 7523616

Email : [ppid@tasikmalayakota.go.id](mailto:ppid@tasikmalayakota.go.id)

Dalam memberikan layanan informasi secara langsung kepada pemohon informasi, PPID menetapkan waktu pelayanan yang dilaksanakan pada hari kerja (Senin sampai dengan Jumat). Adapun pelayanan informasi secara online dapat diakses melalui website PPID ([www.ppid.tasikmalayakota.go.id](http://www.ppid.tasikmalayakota.go.id)). Permohonan informasi publik dari masyarakat pada Tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.85.

Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan dan Ditolak

Tahun	Permohonan dikabulkan seluruhnya	Permohonan dikabulkan sebagian	Permohonan tidak dikabulkan atau ditolak	Jumlah
2022	11	11	1	23

Sumber: Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah melakukan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 kepada pemerintah kabupaten/ kota se-Jawa Barat melalui *Self Assesment Questioner* (SAQ), visitasi dan uji publik. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tersebut, Kota Tasikmalaya menduduki peringkat ke-4 pada kategori Badan Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota yang informatif.

#### 2.1.3.2.11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pengembangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang penting dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut ditunjukkan oleh besarnya potensi koperasi dan UMKM di Kota Tasikmalaya baik dari jumlah koperasi dan pelaku usaha mikro kecil maupun peredaran uang di sektor ini. Berikut adalah keragaan koperasi di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.86.  
Keragaman Koperasi di Kota Tasikmalaya tahun 2022

No.	Nama Koperasi	Jm 1	Koperasi		RAT	Jumlah (orang)				
			Akti f	Tdk Aktif		Anggota	Pengu- rus	Penga- was	Kary- a- wan	Mana- - jer
I	Koperasi Unit Desa (KUD)	9	9	-	3	4.057	27	19	20	-
II	Koperasi Serba Usaha	105	60	45	14	9.358	335	273	163	8
III	Kop. Pondok Pesantren	45	12	33	3	6.121	146	125	11	1
IV	Koperasi Simpan Pinjam									
	4.1 KSP	94	78	16	26	20.325	305	239	172	15
	4.2 KBMT	34	13	21	4	6.185	106	97	68	7
V	Koperasi Konsumsi									
	5.1 KPRI	51	36	15	18	9.485	176	136	52	4
	5.2 KOPKAR	39	18	21	10	5.019	118	98	28	9
	5.3 Koperasi Angkatan Darat	2	2	-	-	1.640	10	6	8	-
	5.4 Koperasi Angkatan Udara	1	1	-	1	173	3	2	3	-
	5.5 Koperasi Kepolisian	1	1	-	1	858	3	3	2	-
	5.6 Koperasi Wanita	10	6	4	2	1.293	32	24	7	1
	5.7 Koperasi Wredatama	6	1	5	-	486	17	17	3	1
	5.8 Koperasi Mahasiswa/Pemuda	2	1	1	-	759	8	6	-	1
	5.9 Koperasi Lainnya									
	5.9.1 Koperasi Warga	102	23	79	3	7.251	285	258	38	2
	5.9.2 POKMAS	41	4	37	1	3.154	127	114	18	-
	5.9.3 PEPABRI	1	1	-	1	394	4	3	2	-
	5.9.4 Kop. Veteran	1	1	-	1	1.228	4	2	1	-
VI	Koperasi Produksi									
	6.1 KOPINKRA / INKRA	26	6	20	3	1.375	84	72	20	-
	6.2 Koperasi Pertanian	9	1	8	-	637	27	27	3	-
VII	Koperasi Pemasaran									
	7.1 Koperasi Pasar	16	8	8	-	1.681	44	35	10	-
VIII	Koperasi Profesi	2	1	1	-	75	6	6	5	
IX	Koperasi Sekunder	6	3	3	2	15.458	19	18	10	-
X	Koperasi Produsen	5	5	-	-	127	19	15	2	-
XI	Koperasi Konsumen	19	14	5	8	2.146	63	48	7	2

No.	Nama Koperasi	Jm 1	Koperasi		RAT	Jumlah (orang)				
			Akti f	Tdk Aktif		Anggota	Pengu -rus	Penga -was	Kary a- wan	Mana - jer
	Jumlah Total	627	305	322	101	99.284	1.968	1.642	653	51

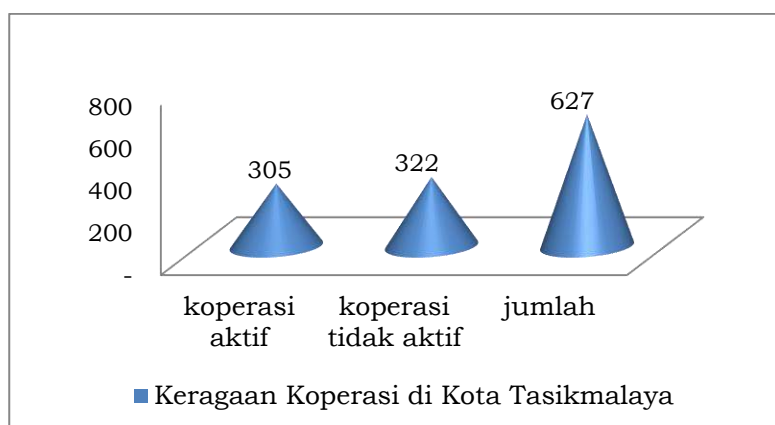
Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2023.

Sampai dengan tahun 2022 jumlah koperasi aktif di Kota Tasikmalaya sebanyak 305 buah koperasi dengan Jumlah anggota koperasi sebanyak 99.284 orang, angka ini bertambah dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 99.013 orang. Modal yang telah terhimpun pada tahun 2022 yang merupakan modal sendiri sebanyak Rp.236,843 milyar, dan berhasil mendapat modal dari luar sebanyak Rp.162,566 milyar. Sementara volume usaha koperasi ini berjumlah Rp.278,911 milyar dengan total aset Rp.398,322 milyar. Secara umum, angka-angka di atas meningkat dari tahun sebelumnya.

Dari seluruh koperasi yang berjumlah 627 pada tahun 2022, hanya 305 unit koperasi yang merupakan koperasi aktif (48%), sisanya sebanyak 322 koperasi merupakan koperasi tidak aktif. Kondisi koperasi di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.41.  
Keragaman Koperasi di Kota Tasikmalaya

1.



Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2023

Sejak bulan Mei 2015, Kementerian Koperasi UKM memberlakukan Nomor Induk Koperasi (NIK) kepada Koperasi Aktif seluruh Indonesia. Dari 305 koperasi aktif pada tahun 2022 baru 197 koperasi (64,6%) yang telah berserifikat NIK dengan sebaran sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.87.  
Data Koperasi Bersertifikat NIK Per-Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Indihiang	19
2	Bungursari	16
3	Mangkubumi	14
4	Cihideung	29
5	Cipedes	19
6	Tawang	38
7	Kawalu	17

No.	Kecamatan	Jumlah
8	Tamansari	15
9	Cibeureum	20
10	Purbaratu	10
	Jumlah	197

Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2023

Usaha ekonomi produktif di Kota Tasikmalaya didominasi oleh jenis usaha mikro. Pada tahun 2022 jumlah usaha mikro di Kota Tasikmalaya yang sudah mendapatkan perizinan mencapai 6.370 pelaku usaha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

2.

Tabel 2.88.  
Jumlah Usaha Mikro di Kota Tasikmalaya  
Berdasarkan Izin Usaha yang Dikeluarkan Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah UKM (Unit Usaha)
1	CIHIDEUNG	648
2	CIPEDES	719
3	TAWANG	866
4	INDIHIANG	869
5	KAWALU	629
6	CIBEUREUM	472
7	TAMANSARI	505
8	MANGKUBUMI	931
9	BUNGURSARI	453
10	PURBARATU	278
	Total	6.370

Sumber: Data OSS 2019-2022 Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2022

Adapun pencapaian kinerja pelayanan umum urusan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagaimana pada table berikut:

Tabel 2.89.  
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah  
Tahun 2020-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Persentase koperasi sehat	%	2	8	24	23,00	24	40
2	Persentase Usaha Mikro yang meningkat menjadi usaha kecil	%	-*	-*	-*	-*	1	0
3	Persentase usaha mikro yang bersertifikat	%	2	0,97	2	17,00	2	2,2

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi		
4	Jumlah Koperasi yang dibina	Buah	550	90	550	182	305	90
5	Jumlah usaha mikro yang terakses dukungan usaha	Buah	650	250	150	1.695	150	1900
6	Persentase wirausaha baru yang dibina	%	-	25	-	-	100	100
7	persentase masyarakat miskin yang dibina	%	100	25	100	100	100	35
8	Persentase koperasi simpan pinjam yang diberi rekomendasi penerbitan izin usaha dan/ atau izin operasional	%	-*	-*	100	100	100	100
9	Persentase koperasi aktif yang diawasi dan diperiksa	%	-*	-*	13,51	36,42	100	29,83
10	Persentase Bina Koperasi yang berkompeten	%	-*	-*	33	40,00	33,3	33,3
11	Persentase koperasi aktif yang dibina	%	-*	-*	100	60,26	13,51	32,79
12	Persentase pemberdayaan usaha mikro	%	-*	-*	65	74,50	65	29,83
13	Jumlah masyarakat miskin yang dibina pada sektor jasa	Orang	-*	-*	100	100	100	35

Ket : \* = Perubahan indikator

Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2023.

#### 2.1.3.2.12. Penanaman modal

Penanaman modal merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu didorong agar kinerja sektor penanaman modal dapat meningkat. Berikut capaian pelayanan urusan penanaman modal.

Tabel 2.90.  
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Penanaman Modal  
Tahun 2020 – 2022

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	M/Rp	200	422,6	250	1.630	700	4.777,36
2	Capaian penerbitan perijinan terpadu sesuai SOP	%	100	100	67	100	100	100
3	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah (ada/tidak)	Ada	Ada	Ada	-*	-*	-*	-*
4	Persentase realisasi RUPM Kota Tasikmalaya		-*	-*	50	0	0	0
5	Persentase pelayanan perijinan sesuai standar pelayanan	%	-*	-*	100	100	100	100
6	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%	-*	-*	5	26,4	2	120
7	Persentase pengelolaan basis data potensi investasi sesuai SOP	%	-*	-*	100	100	100	100
8	Persentase pengelolaan perijinan sesuai SOP	%	-*	-*	100	100	100	100

Ket : \* = Perubahan indikator

Sumber : DPMPTSP Kota Tasikmalaya, 2023.

Pemerintah Kota Tasikmalaya telah memiliki regulasi terkait kemudahan penanaman modal yaitu dengan telah terbitnya Perda Kota Tasikmalaya No. 6 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Dalam meningkatkan investasi atau penanaman modal perlu dukungan infrastruktur dan suprastruktur perekonomian yang memadai. Langkah lainnya untuk meningkatkan investasi di Kota Tasikmalaya, perlu dibuat pemetaan peluang dan potensi penanaman modal di Kota Tasikmalaya, karena meningkatnya penanaman modal akan memberikan pengaruh positif bagi peningkatan laju perekonomian sekaligus pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Pemetaan peluang dan potensi penanaman modal di Kota Tasikmalaya dibuat berdasarkan zonasi, tata ruang atau sentra/klaster produk unggulan kewilayahan. Berdasarkan hal ini di Kota Tasikmalaya terdapat kawasan yang strategis dari sudut perekonomian seperti kawasan perdagangan, hotel dan restoran di pusat kota, Kawasan Peruntukan Industri dan Pergudangan, Kawasan Minapolitan di Kecamatan Indihiang dan Kecamatan Bungursari, dan Kawasan Pendidikan Terpadu di Kecamatan Tamansari.

2.1.3.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga

Pelaksanaan pelayanan umum urusan kepemudaan dan olahrgara di Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.91.  
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Kepemudaan dan Olahraga  
Tahun 2020 -2022

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase OKP yang dibina	%	28	28,57	28	28,57	30	30,77
2	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi	%	75	60	75	60	83	85,71

Ket : \* = Perubahan indikator

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya, 2023.

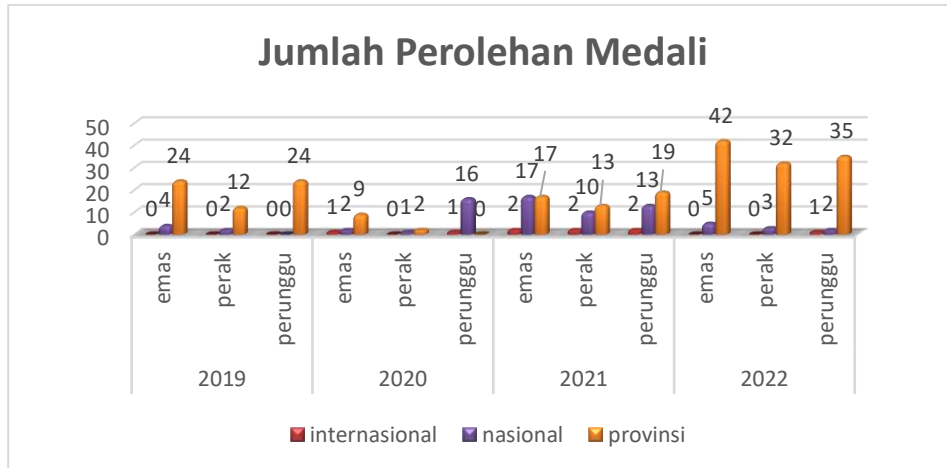
-\* Indikator Lama

-\*\* Indikator Baru

Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di Kota Tasikmalaya tercatat 91 (sembilan puluh satu) OKP, dan pada tahun 2022 OKP yang telah dibina adalah sebanyak 28 (dua puluh delapan) OKP, sedangkan OKP yang berprestasi sebanyak 3 (tiga) OKP. Presentase OKP yang dibina melebihi target karena terdapat penambahan sasaran OKP yang dibina dari 27 (dua puluh tujuh) OKP menjadi 28 (dua puluh delapan) OKP. Presentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi melebihi dari target yang telah ditentukan karena pada tahun 2022 terdapat lebih banyak event olahraga dari tahun sebelumnya karena siklus kejuaraan jatuh pada tahun tersebut, sehingga timbul revenge event dari para atlet yang mengikuti event.

Jumlah cabang olahraga berprestasi pada tahun 2022 sebanyak 30 (tiga puluh) cabang olahraga, yang terdiri dari tingkat internasional sebanyak 1(cabang olahraga) yakni taekwondo, tingkat nasional sebanyak 6 (enam) cabang olahraga yakni catur, tenis meja, angkat berat, renang, judo, tenis meja dari event Paralympic nasional, serta tingkat provinsi sebanyak 30 (tiga puluh) cabang olarga. Data perolehan medali pada cabang olahraga berprestasi tingkat provinsi, nasional, dan internasional tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Gambar 2.42.  
Perolehan Medali Cabang Olahraga Beprestasi  
Kota Tasikmalaya Tahun 2019 - 2022



Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya, 2023.

2.1.3.2.14. Statistik

Pelaksanaan urusan stasistik di Kota Tasikmalaya dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.92.  
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Statistik  
Tahun 2020-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2020		2021		2022	
			Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realisasi
1	Persentase data dan informasi statistik sektoral	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase pengelolaan basis data/Informasi dan statistik terpadu	%	100	100	100	100	100	100

Ket : \* = Perubahan indikator

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya, 2023.

Implementasi optimalisasai dalam pengelolaan data statistik telah dibangun Open Data Kota Tasikmalaya dari kumpulan data dan informasi semua Perangkat Daerah yang telah diolah dan dianalisa dapat diakses oleh masyarakat secara online melalui media sosial.

2.1.3.2.15. Persandian

Pelaksanaan urusan persandian di Kota Tasikmalaya dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya. Urusan persandian ini berkaitan dengan keamanan informasi kedinasan.



Tabel 2.93.  
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Persandian  
Tahun 2020-2022

No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2020		2021		2022	
			T	R	T	R	T	R
1	Capaian penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	%	-*	-*	-*	-*	60	63,64
2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	%	-*	-*	-*	-*	-*	-*
3	Persentase Area Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	-**	-**	50	33,33	60	63,64
4	Jumlah Area Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Area	-**	-**	8	N/A	-*	-*
5	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan/Perwal	-**	-**	2	N/A	-*	-*
6	Jumlah Jenis Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jenis	-**	-**	3	N/A	-*	-*
7	Persentase jumlah Insiden Kemanan Informasi yang tertangani	%	-**	-**	100	100	100	100

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya, 2023.

-\* Target Lama

-\*\*Target Baru

Capaian kinerja indikator penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi adalah capaian yang dihasilkan berdasarkan standar internasional indeks KAMI (Keamanan Informasi) ISO 27001. Capaian penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2022 mendapatkan hasil sebesar 63,64% dari target sebesar 60% sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 106,07%. Hal ini dicapai dari 11 area keamanan informasi dari persyaratan Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang memenuhi syarat dan tercapai penilaiannya adalah 7 area keamanan. 4 (empat) area keamanan informasi yang belum tercapai adalah Manajemen Asset, Pengadaan/Akuisisi, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi, Manajemen Kelangsungan Usaha (*Business Continuity Management*) serta Kepatuhan.

2.1.3.2.16. Kebudayaan

Capaian pelaksanaan urusan kebudayaan pada tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.94.  
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Kebudayaan Tahun 2020 - 2022

No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase Pengembangan Kebudayaan	%	-**	-**	57	57,97	61	63,77
2	Persentase pembinaan dan pengembangan seni budaya	%	-**	-**	20	20,23	20	20,33
3	Persentase sejarah lokal yang dilestarikan	%	-**	-**	50	50	50	50
4	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	-**	-**	34	35,38	40	40

-\* Indikator Lama

-\*\* Indikator Baru

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya, 2023.

Persentase Pengembangan Kebudayaan serta Persentase Pembinaan dan Pengembangan Seni dan Budaya melebihi target yang telah ditentukan karena terdapat penambahan pembinaan pada organisasi kesenian.

Sebagai upaya perlindungan cagar budaya dan seni di Kota Taikmalaya telah dilaksanakan pelestarian dengan capaian sebagai berikut.

Tabel 2.95.  
Data Cagar Budaya dan Kelompok Seni Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2022

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022
1	Jumlah Cagar Budaya Yang Ditetapkan	buah	65	65	65
2	Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan	buah	17	23	26
3	Jumlah Grup Kesenian Yang Dibina	buah	53	35	35

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya, 2023.

Tabel 2.96.  
Data Cagar Budaya Kota Tasikmalaya yang dilestarikan sampai dengan Tahun 2022

No	Nama Benda, Situs & Kawasan Cagar Budaya	Alamat	No dan tanggal Surat Keputusan/Ketetapan Sebagai Benda, Situs & Kawasan Cagar Budaya
1	Tugu Peta	Jl. Veteran	PO2018121300012
2	Tugu 0 Km	Jl.Dr. Sukarjo	PO2018121300009
3	Makam Gn. Subang	Cilamajang Kota Tasikmalaya Jawa Barat	PO2016061000161
4	Komplek Makam Syeh Tubagus Abdullah	Sukaasih	PO2016060900121
5	Mesjid H. Bakri	H. Mustopa	PO2016061000356
6	Makam Gn Saena	Citamiang	PO2018121300019
7	Makam Eyang CakraNingrat	Ciseeng BabaknArsi	PO2018121300015
8	Punden Berundak, Gunung Pa Jahim	Leuwiliang, Kawalu	-
9	Makam H Hasan	Babakan Peundeuy	PO2018121300020
10	Makam Dalem Patuakan	Tanjung Kota Tasikmalaya Jawa Barat	PO2018121300014
11	Makam Eyang Patinggi	Leuwiliang	PO2018121300016
12	Makam Dalem Kutawaringin	Lewiliang	PO2018121300017
13	Lingga Yoni	Lintasan Mangkubumi Indihiang	PO2016061000161
14	Tugu Istiwa	Citamiang	PO2018121300002
15	Makam Nyimas Saena	Tanjung	PO2018121300021
16	Makam Sakarembong	Jl. Bantar, bantarsari Kota tasikmalaya	PO2018121300005
17	Makam Eyang Jiwaraga	Kp Nagrog	PO2018121300024
18	Makam Eyang Prabudilaya	Kota Tasikmalaya Jawa Barat	PO2016060900118
19	Makam Syekh Abdul Gharib	Cibeas Kota Tasikmalaya	PO2016060900195
20	Makam Eyang Cakraningrat	Ciseeng Babakn Arsi Kota Tasikmalaya Jawa Barat	800/80-SK/Bidbud/2021 14 Februari 2021
21	Makam Dalem Darpanangga	Asta Cibeuti, Kec.Kawalu	Belum terdaftar pada Regnas
22	Makam Dalem Kutawaringin	Lewiliang Kota Tasikmalaya Jawa Barat	800/80-SK/Bidbud/2021 14 Februari 2021

No	Nama Benda, Situs & Kawasan Cagar Budaya	Alamat	No dan tanggal Surat Keputusan/Ketetapan Sebagai Benda, Situs & Kawasan Cagar Budaya
23	Makam HM Bakri	Tanjung, Kec. Kawalu	Belum terdaftar pada Regnas

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya, 2023.

#### 2.1.3.2.17. Perpustakaan

Pelaksanaan urusan perpustakaan di Kota Tasikmalaya dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Capaian pelaksanaan urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.97.  
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perpustakaan Tahun 2020 – 2022

No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Kesesuaian dengan Standar Nasional Perpustakaan	%	32	32	35	35,19	37	37,47
2	Persentase peningkatan koleksi buku	%	4	6,86	_*	_*	_*	_*
3	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	%	0	0	14	71,52	17	51,39
4	Persentase pembinaan perpustakaan	%	_**	_**	5,53	5,53	5,53	5,53
5	Persentase naskah kuno yang dilestarikan	%	_**	_**	50	50	50	50

\_\* Indikator Lama

\_\*\_\* Indikator Baru

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tasikmalaya, 2023.

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian indikator urusan perpustakaan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Terdapat realisasi yang cukup besar dari target yang telah ditetapkan pada persentase peningkatan pengunjung perpustakaan karena pada tahun 2022 perpustakaan telah dibuka kembali untuk menerima pengunjung setelah sebelumnya ditutup karena PPKM yang diberlakukan di Kota Tasikmalaya.

### 2.1.3.2.18. Kearsipan

Pelaksanaan urusan kearsipan di Kota Tasikmalaya dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Capaian pelaksanaan urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.98.  
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Kearsipan  
Tahun 2020 – 2022

No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Terjaganya keutuhan dan keautentikan informasi arsip masing-masing OPD	%	60	58,63	_*	_*	_*	_*
2	Pemahaman informasi kearsipan terhadap yang diberikan informasi	kali	2	3	_*	_*	_*	_*
3	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan standar baku kearsipan	%	27	27	_*	_*	_*	_*
4	Kenaikan Nilai Monitoring Tindak lanjut Hasil Pengawasan (MTLHP) Eksternal	poin	2	2	2	0	2	2,47
5	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai pengawasan kearsipan internal minimal kategori cukup	%	62,18	62,18	63,89	63,89	70,27	55,56

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tasikmalaya, 2023.

\_\* Indikator Lama

\*\* Indikator Baru

Capaian indikator pelayanan kearsipan di Kota Tasikmalaya secara umum telah sesuai dengan apa yang ditargetkan. Namun pada dasarnya terdapat berbagai aspek yang harus ditingkatkan, misalnya dalam Penetapan Kebijakan Kearsipan, Pengelolaan Arsip Inaktif, Penyusutan Arsip, dan Sumber Daya Manusia Kearsipan dalam kaitannya dengan audit kearsipan eksternal yang akan mendongkrak Nilai Monitoring Tindak lanjut Hasil Pengawasan (MTLHP) Eksternal yang dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

### 2.1.3.2. Layanan Urusan Pilihan

#### 2.1.3.3.1. Kelautan dan perikanan

Potensi areal perikanan di Kota Tasikmalaya sebesar 692,27 Ha, terdiri dari kolam pembenihan 19,49 Ha, kolam pembesaran 621,23 Ha, sawah irigasi untuk pengembangan minapadi seluas 51,42 Ha dan kolam air deras 0,14 Ha.

Aktivitas ekonomi di sektor perikanan melibatkan 434 kelompok pembudidaya ikan yang terdiri dari 408 pokdakan, 16 poklahsar dan 3 pokmaswas dan 17 kelompok lainnya dengan jumlah anggota kelompok sebanyak 6.117 orang.

Aktivitas di sektor perikanan juga didukung oleh 2 Unit Pelaksana Teknis Dinas dan 1 unit pelayanan yaitu UPTD Balai Benih Ikan (BBI), UPTD Pengembangan Produksi Ikan dan Unit Pelayanan Pengembangan (UPP). Selain itu terdapat 61 Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang mendukung ketersediaan benih ikan di Kota Tasikmalaya.

Menurut kategori teknologi yang digunakan, aktivitas budidaya ikan di Kota Tasikmalaya sebagian besar dilakukan dengan semi intensif (51%), dan menggunakan teknologi yang sederhana (48,7%). Hanya 0,3% yang berbudidaya ikan secara intensif. Teknologi budidaya intensif adalah teknologi yang cukup maju dalam budidaya perairan. Budidaya Semi Intensif merupakan sistem budidaya peralihan, antara budidaya alami (esktensif/sederhana) dan budidaya intensif (buatan/perlakuan khusus). Hal ini sangat mempengaruhi terhadap produksi ikan di Kota Tasikmalaya.

Produksi perikanan dalam kurun waktu tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.99.  
Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan  
Tahun 2020-2022

No.	Komoditas	2020 (Ton)	2021 (Ton)	2022 (Ton)
1	Mas	2.074,63	2004,39	1.850,20
2	Nila	2.113,38	2188,93	2.340,40
3	Nilem	1.232,47	1243,34	1.250,41
4	Mujair	462,34	465,49	467,03
5	Lele	1.479,49	1489,55	1.494,50
6	Gurame	739,74	744,77	747,24
7	Tawes	1109,61	1109,16	1.106,30
8	Tambakan	462,34	465,48	467,02
9	Ikan Lainnya	277,41	279,28	280,21
	Jumlah	9.951,41	9.990,39	10.003,31

*Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2023.*

Pelaksanaan urusan perikanan di Kota Tasikmalaya menjadi wewenang Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Berikut disajikan data pelaksanaan pelayanan umum urusan Perikanan.

Tabel 2.100.  
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Perikanan Tahun 2020 - 2022

No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Wirausaha Baru Sektor Perikanan	Orang	-	0	150	150	150	196
2	Capaian produksi perikanan budidaya	Ton	10.300	9.951,42	10.400	9.990,39	10.000	10.003,31
3	Angka produksi hasil perikanan	Ton	197,24	312,70	199,39	312,78	197	333,1
4	Tingkat pengembangan kawasan budidaya air tawar	%	40	32,65	40	53,88	40	69,28
5	Jumlah masyarakat miskin sektor perikanan yang dibina	Orang	75	80	75	75	75	75

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2023.

#### 2.1.3.3.2. Pariwisata

Pariwisata di Kota Tasikmalaya mempunyai potensi pertumbuhan yang cukup besar. Secara lebih detail data objek wisata dan daya tarik wisata di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.101.  
Data Objek Wisata dan Daya Tarik Wisata di Kota Tasikmalaya

No	Kecamatan	Nama Objek Wisata	Klasifikasi Objek Wisata	Lokasi	Keterangan
1	Kawalu	1. Makam Syekh Abdul Ghorib	Wisata Budaya	Kel. Gunung Gede Kecamatan Kawalu	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		2. Air Tanjung	Wisata Alam	Jl. Air Tanjung-Tasikmalaya	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		3. Bordir Kawalu	Wisata Minat Khusus	Jl. Perintis Kemerdekaan, Karsamenak	Produk Wisata Yang Sudah Dikembangkan
		4. Kampung Salapan ( Hutan Urug) - Gua Sarongge - Curug Sawidak - Puncak Nangela - Cadas Ngampar	Wisata Alam	Jl. Syekh Abdul Muhyi	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		5. Bukit Lestari	Wisata Alam	RT 03 RW 03 Kel. Leuwiliang	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		6. Arung Jeram Sungai Ciwulan	Wisata Alam	Jl. Syekh Abdul Muhyi	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		7. Dalem Patuakan	Wisata Budaya	Tanjung 02/04	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		8. Makam Guning Saena	Wisata Budaya	Citamiang 06/08	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		9. Tugu Istiwa	Wisata Budaya	Citamiang 02/08	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		10. Makam H.M. Bakri	Wisata Budaya	Citamiang 02/08	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		11. Makam Eyang Ciseeng/ Cakraningrat	Wisata Budaya	Babakan Arsi 03/06	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		12. Makam H. Hasan	Wisata Budaya	Babakan Peundeuy 007	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		13. Makam Gn. Subang	Wisata Budaya	Cilamajang, Kawalu	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan



No	Kecamatan	Nama Objek Wisata	Klasifikasi Objek Wisata	Lokasi	Keterangan
		14. Makam Eyang Patinggi	Wisata Budaya	Leuwiliang, Kawalu	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
2	Tamansari	1. Situ Cibeureum	Wisata Alam	Kel. Tamanjaya	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		2. Kelom Gelis	Wisata Minat Khusus	Kp. Gobras Kel. Sukahurip	Produk Wisata Yang Sudah Dikembangkan
		3. Curug Tonjong	Wisata Alam	Kel. Setiawargi	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		4. Situ Malingping	Wisata Alam	Kel. Tamanjaya	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		5. Situ Cipajaran	Wisata Alam	Kel. Mugarsari	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		6. Makam Situ Malingping	Wisata Budaya	Kel. Tamanjaya	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		7. Makam Situ Kasindang	Wisata Budaya	Kel. Tamanjaya	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
3	Cibeureum	1. Petilasan Purbasari	Wisata Budaya	Jl. Letkol Basir Surya	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		2. Pasir Pataya	Wisata Rekreasi	Kel. Ciakar	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		3. Perkebunan Salak	Wisata Minat Khusus	Peundeuy, Kel. Ciakar	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
4	Purbaratu	1. Arung Jeram sungai Citanduy	Wisata Alam	Kel. Sukajaya	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		2. Wisata Edukasi Bambu	Wisata Minat Khusus	Kel. Sukajaya	Produk Wisata potensial yang belum dikembangkan
		3. Makam Syekh Kusumayuda	Wisata Budaya	Kel. Sukajaya	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		4. Makam Tubagus Abdulah	Wisata Budaya	Purbaratu	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		5. Makam Jiwa Raga	Wisata Budaya	Purbaratu	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
		6. Kampung Awi	Wisata Alam		Produk Wisata Potensial dalam tahap pengembangan
		7. Farm House	Wisata Buatan		Produk Wisata Potensial dalam tahap pengembangan
		8. Kerajinan Mendong	Wisata Kriya		Produk Wisata Potensial dalam tahap pengembangan

No	Kecamatan	Nama Objek Wisata	Klasifikasi Objek Wisata	Lokasi	Keterangan
5	Tawang	1. Kuliner Tawang	Wisata Minat Khusus	Jl. BKR, Jl. Kolektoran	Produk Wisata Potensial dalam tahap pengembangan
		2. Titik Nol	Wisata Budaya		Produk Wisata Potensial dalam tahap pengembangan
		3. Mambo Kuliner	Wisata Kuliner	Jl. Mayor Utarya	Produk Wisata Potensial dalam tahap pengembangan
6	Cihideung	1. Pasar Minggu Dadaha	Wisata Minat Khusus	Jl. Dadaha	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		2. Teejay Waterpark	Wisata Rekreasi	Komp. Plaza Asia Jl. KHZ mustofa	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		3. Kolam Renang Asia	Wisata Buatan	Komplek Dadaha	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
7	Mangkubumi	1. Situ Gede	Wisata Alam	Kel. Linggajaya Kecamatan Mangkubumi	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		2. Makam Eyang Prabudilaya	Wisata Budaya	Kel. Batarsari Kecamatan Bungursari	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		3. Mangkubumi Water Park	Wisata Rekreasi	Jl.A.H. Nasution KM. 7	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		4. Kampung Ulin	Wisata Alam	Kel.Linggajaya	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		5. Perkebunan Buah Naga	Wisata Minat Khusus	Jl. Cibeet	Obyek wisata potensial yang belum dikembangkan
8	Indihiang	1. Situs Linggayoni	Wisata Budaya	Kel. Sukamaju Kidul	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		2. Payung Geulis Tasik	Wisata Minat Khusus	Kel. Panyingkiran	Produk Wisata Yang Sudah Dikembangkan
		3. Wisata Ciloseh	Wisata Alam	Kel. Panyingkiran	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		4. Lapang Minisoccer (Indosoccernesia)	Wisata Minat Khusus	Kel. Sukamaju Kidul	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		5. Batu Bangkong	Wisata Alam	Kel. Sirnagalih	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		6. Kawasan Cipanyir (Cipedes Panyingkiran)	Wisata Alam	Kel. Panyingkiran	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		7. Babakan Sanca	Wisata Alam	Kel. Sirnagalih	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan

No	Kecamatan	Nama Objek Wisata	Klasifikasi Objek Wisata	Lokasi	Keterangan
9	Bungursari	1. Makam Eyang Dalem Sakarembong	Wisata Budaya	Kel. Bantarsari	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		2. Ma'arif Garden	Wisata Alam	Jl. Sukarindik No.71, Sukarindik	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		3. Mutiara Aboh	Wisata Tirta	Kel. Sukamulya	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
10	Cipedes	1. Taman Rekreasi Karang Resik	Wisata Rekreasi	Jl. Mohamad Hatta, Sukamanah	Objek Wisata Sudah Dikembangkan
		2. Sentra Batik	Wisata Minat Khusus	Jl. Ciroyom No.20, Nagarasari, Kec. Cipedes	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		3. Tebing Putih	Wisata Alam	Kel. Sukamanah	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		4. Budak Capetang	Wisata Buatan	Kel. Sukamanah	Obyek wisata potensial dalam tahap pengembangan
		5. Pesantren Benda 67	Wisata Minat Khusus	Jl. Cisolak No.15, Benda, Nagarasari	Obyek wisata potensial yang belum kembangkan

*Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya, 2023*

Capaian kinerja urusan pariwisata di Kota Tasikmalaya, yakni jumlah kunjungan wisata ke Kota Tasikmalaya, yang terdiri dari wisatawan domestik dan mancanegara, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terus mengalami peningkatan, yaitu 650.553 orang pada tahun 2018, kemudian 695.647 orang pada tahun 2019. Namun, angka ini menurun pada tahun 2020, yaitu menjadi 344.423 orang. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah kunjungan wisata menjadi 483.569 orang, dan pada tahun 2022 tercatat sebanyak 642.128 orang. Kondisi ini makin membaik seiring dengan meredanya kasus Covid 19 dan berakhirnya PPKM.

Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah kunjungan wisata di Kota Tasikmalaya selama 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel. 2.102.  
Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Tasikmalaya  
Tahun 2018 - 2022

Tahun	Jumlah Wisatawan (Orang)		Jumlah Total
	Mancanegara	Domestik	
2018	221	650.332	650.553
2019	124	695.523	695.647
2020	39	344.384	344.423
2021	6	483.563	483.569
2022	30	642.098	642.128

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya, 2023.

Sarana pendukung untuk kegiatan pariwisata dibutuhkan di Kota Tasikmalaya berupa penginapan seperti hotel, *guest house*, hostel, dan lain sebagainya. Tabel berikut merupakan data sarana penginapan di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.103.  
Data Hotel di Kota Tasikmalaya

No.	Nama Hotel	Alamat	Kecamatan
1	Syariah Permata Sahid Hotel	Jl.Brigen Wasita Kusumah, Indihiang, Indihiang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat 46151	Indihiang
2	Hotel Ramayana	Jl.Re Martadinata No.333, Panyingkiran, Indihiang, Kota Tasikmalaya 46151	Indihiang
3	Aden 2 Syariah	Jl.Re Martadinata No.268, Panyingkiran, Indihiang, Kota Tasikmalaya	Indihiang
4	Fresh Hotel	Jl.Re Martadinata No.191, Panyingkiran, Indihiang, Kota Tasikmalaya	Indihiang
5	Hotel Srikandi	Jl.Re Martadinata No.266, Panyingkiran, Indihiang, Kota Tasikmalaya	Indihiang
6	Crown Hotel	Jl. Re Martadinata No.45	Cipedes
7	Pondok Tasyiq Guest House	Jl.Cigantang, Kel.Cigantang, Kec.Mangkubumi	Mangkubumi
8	Fave Hotel Tasikmalaya	Jl.Re Martadinata 214, Rt.02/07 Kel.Cipedes, Kec.Cipedes Kota Tasikmalaya Kode Pos 46133	Cipedes
9	Harmoni Hotel	Jl.Rd.Ikik Wiradikarta 51 Tasikmalaya	Tawang
10	Hotel Mandalawangi	Jl.Re Martadinata 177, Tasikmalaya	Cipedes

No.	Nama Hotel	Alamat	Kecamatan
11	Hotel Horison	Jl. Yudanagara No.16	Cihideung
12	Hotel Padjadjaran	Jl. Ir.H.Djuanda (By Pass)	Mangkubumi
13	Hotel Setuju	Jl.Cieunteung	Mangkubumi
14	Hotel Wijaya Kusumah	Jl. Ir.H.Djuanda (By Pass)	Bungursari
15	Surya Hotel	Jl.Siliwangi No.39 Tasikmalaya	Tawang
16	Mini Guest House	Jl. Cipedes Ii No.21a	Cipedes
17	Hotel Merdeka	Jl.Tarumanegara No.48	Tawang
18	Hotel Priangan	Jl. Kebon Manggu I, Tasikmalaya	Cihideung
19	Shanrilla Hotel	Jl.Perintis Kemerdekaan No.93, Tasikmalaya	Cihideung
20	Hotel Santika	Jl.Yudanagara, No.57	Cihideung
21	Hotel Sartika	Jl.Perintis Kemerdekaan No.244	Kawalu
22	Hotel Sehat	Jl.Mitrabatik No.73	Cipedes
23	Hotel Selamat	Jl.Empang No.26 Tasikmalaya	Tawang
24	Hotel Tasik	Jl.Komalasari No.27 Rt.01 Rw.02, Empangsari	Tawang
25	Hotel Abadi	Jl.Empang No.58 Tasikmalaya	Tawang
26	Hotel Asri	Jl.Hz.Mustofa No.326 Tasikmalaya	Cihideung
27	Hotel Borobudur	Jl.Mayor Sl.Tobing No.25	Cihideung
28	Hotel City (Airy)	Jl.Sukalaya Barat No.50 Tasikmalaya	Cihideung
29	Hotel Amaris	Jl.Khz.Mustofa, Tugujaya, Cihideung	Cihideung
30	Grand Metro Hotel	Jl.Khz.Mustofa No.263, Nagarawangi	Cihideung
31	Hotel Kencana (Reddoorz Syariah)	JL.YUDANAGARA NO.15 TSM	Cihideung
32	Hotel Mangkubumi	Jl.Jendral Ah.Nasution Km.7 Tsm	Mangkubumi
33	Hotel Flamboyan	Jl.Galunggung No.50	Tawang
34	The Arsy Syariah Tasikmalaya Redpartner	Jl. Siliwangi 200-A	Tawang
35	RedDoorz Syariah @ Boemi Guesthouse Tasikmalaya	Jl. Paseh Gg. Gn. Ceuri I-86 RT.06/08	
36	HZ. Residence Tasikmalaya	Jl. HZ. Mustofa 325	Cihideung
37	Graha Martadinata Syariah	Jl. Martadinata 230	Cihideung
38	Oyo 2682 Bumi Eyang Enin Homestay Syariah	Jl. AH. Nasution	
39	RedDoorz Syariah Plus @ Perintis Guesthouse Tasikmalaya	Jl. Perintis Kemerdekaan 36-A	Kawalu
40	De Nanggela Guest House	Jl. PGRI Timur	Kawalu
41	RedDoorz BKR Residence Near Universitas Siliwangi Tasikmalaya	Jl. BKR Siliwangi 2	Tawang
42	Penginapan Homestay Kota Tasikmalaya	Cibeureum Dekat RM	Cibeureum
43	Villa Grand Venezia	Perum Andalusia	Mangkubumi
44	Oyo 2674 Siliwangi Guest House Syariah	Jl. Siliwangi 54-50	Tawang
45	RedDoorz Syariah Villa Grand Mutiara (VGM)	Jl. Bumi Resik Indah Blok Cikanyere Kl. Sukamanah Kc. Cipedes	Cipedes
46	Askara	Jl. Pasar Cikurubuk	Cihideung
47	RedDoorz Syariah Villa Grand Mutiara (VGM)	Jl. Bumi Resik Indah Blok Cikanyere Kl. Sukamanah Kc. Cipedes	Cipedes
48	D'Exclusive Guest House	Jl. Kol. H. Utuy Sobandi Jl. Cigeureung 27 Kl. Nagarasari Kc. Cipedes	Cipedes

*Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya, 2023.*

Adapun untuk capaian indikator urusan pariwisata dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.104.  
Capaian Indikator Urusan Pariwisata Tahun 2020 - 2022

No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	287.049	344.423	638.000	483.569	642.000	642.128
2	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	%	-*	-*	51	55,1	55	56
3	Jumlah Wirausaha baru sub sektor ekonomi kreatif dan jasa usaha pariwisata	Orang	-	-	150	150	192	192
4	Persentase sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang terampil	%	-*	-*	41	46,15	41	46,15

*Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya, 2023.*

#### 2.1.3.3.3. Pertanian

Sektor pertanian meliputi sektor pertanian tanaman pangan, sektor tanaman hortikultura, sektor tanaman perkebunan dan sektor peternakan. Produktivitas sektor pertanian ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan lahan. Luas lahan pertanian khususnya lahan sawah di Kota Tasikmalaya sejak tahun 2009 sampai dengan 2022 terus mengalami penurunan karena terjadi alih fungsi lahan sawah ke peruntukan lain. Pada tahun 2017 luas sawah sebesar 5.826 Ha, sementara pada tahun 2021 menjadi 5.778 Ha, dan di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2 Ha menjadi 5.776 Ha. Berdasarkan Statistik Pertanian dan Perikanan Perkembangan data luas lahan sawah di Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.105.  
Data Luas Sawah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2022

Tahun	Jumlah	Berkurang (Ha)
2018	5.799	27
2019	5.796	3
2020	5.790	6
2021	5.778	12
2022	5.776	2
Jumlah		50

*Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2023*

Potensi sumberdaya pertanian berbentuk kelompok tani sebanyak 684 kelompok terdiri dari kelompok tani dewasa 452 kelompok, kelompok wanita tani (KWT) 154 kelompok, dan taruna tani 78 kelompok dengan jumlah anggota kelompok tani berjumlah 21.803 orang. Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 terjadi fluktuasi baik dari pembentukan kelompok tani maupun jumlah anggotanya. Berikut disajikan perkembangan kelompok tani di Kota Tasikmalaya.

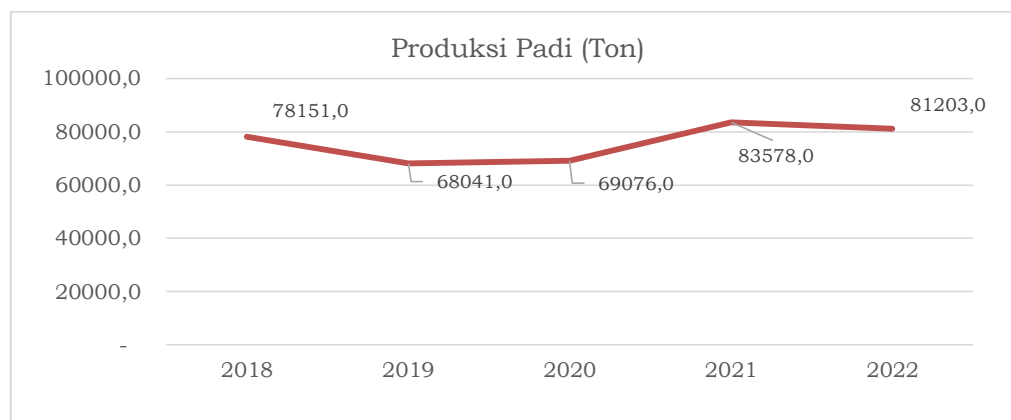
Tabel 2.106.  
Kelompok Tani di Kota Tasikmalaya Tahun 2019 - 2022

Tahun	Kelompok Tani			Jumlah Anggota
	Kelompok Dewasa	KWT	Taruna Tani	
2019	452	129	44	24.782
	625			
2020	451	136	57	27.424
	644			
2021	456	145	64	28.047
	665			
2022	452	154	78	21.803
	684			

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2023

Komoditas yang dihasilkan dari sektor pertanian tanaman pangan terdiri dari padi, palawija serta tanaman sereal lainya. Padi merupakan komoditas pangan utama yang dikonsumsi masyarakat Kota Tasikmalaya. Produksi padi periode 2018-2022 seperti dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.43.  
Produksi Padi Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2023

Produksi padi pada tahun 2022 mencapai 81.203 ton. Jika konversi dari gabah ke beras sebesar 62,74 persen maka produksi beras di Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 sebanyak 50.946 ton turun dari tahun 2021 seiring turunnya produksi padi. Dengan jumlah penduduk Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 sebanyak 733.467 orang, dan diasumsikan kebutuhan beras per kapita/tahun sebanyak 100 kg/kapita/tahun dengan demikian kebutuhan beras seluruh penduduk Kota Tasikmalaya selama satu tahun sebanyak 73.346,7 ton. Sehingga produksi beras di Kota Tasikmalaya belum dapat memenuhi kebutuhan makan

penduduknya. Berdasarkan data tersebut di atas, produksi beras di Kota Tasikmalaya baru memenuhi 69,46 persen dari total kebutuhan. Terdapat defisit beras sebanyak 22.400 ton atau 30,5 persen.

Namun demikian produksi padi ini mendominasi produksi tanaman pangan di Kota Tasikmalaya dibandingkan tanaman pangan lainnya seperti jagung, kedelai, kacang tanah, ubi jalar dan ubi kayu. Penurunan yang sangat tajam pada tanaman pangan lainnya terlihat pada tabel di bawah ini.

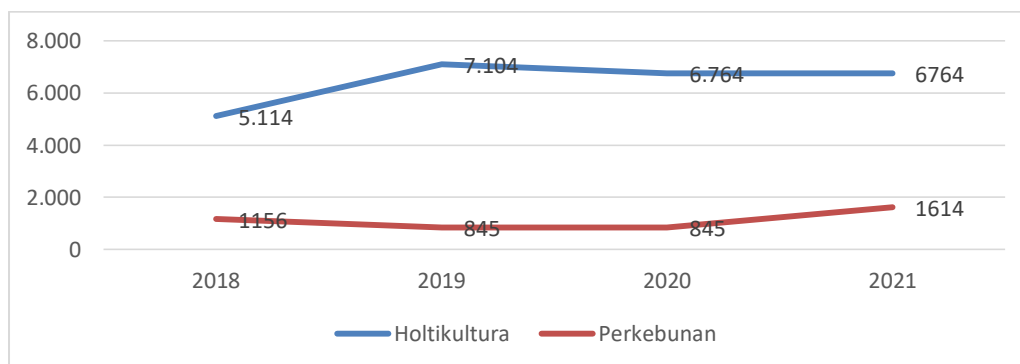
Tabel 2.107.  
Produksi Tanaman Pangan di Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2022

Tanaman Pangan	2018	2019	2020	2021	2022
Produksi Padi (ton)	78.151	68.043	69.076	83.578	81.203
Produksi Jagung (Ton)	656	269	176	160	19
Produksi Kedelai (Ton)	57	-	-	-	126
Produksi Kacang Tanah (Ton)	132	231	406	128	58
Produksi Ubi Jalar (ton)	424	367	151	130	78
Produksi Ubi Kayu (ton)	2.300	3.060	1.119	1.388	535
JUMLAH	81.720	71.970	70.928	85.384	82.019

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2023

Sektor tanaman hortikultura di Kota Tasikmalaya terdiri dari tanaman hortikultura sayuran dan tanaman hortikultura buah-buahan. Komoditas tanaman hortikultura sayuran terdiri dari komoditas cabe besar, cabe rawit, tomat, ketimun, petsai/sawi, dan kacang panjang. Sementara komoditas tanaman hortikultura buah-buahan terdiri dari komoditas salak, pisang, rambutan, mangga, pepaya, durian dan manggis. Selain itu terdapat juga komoditas tanaman perkebunan yang terdiri dari komoditas mendong, kelapa, lada, kakao, pala, kopi dan tembakau. Produksi tanaman hortikultura tertinggi terjadi pada tahun 2020 dan mulai menurun sampai tahun 2021, sementara produksi tanaman perkebunan dari tahun 2018 sampai 2020 mengalami penurunan, namun memasuki tahun 2021 mulai beranjak naik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar. 2.44.  
Produksi Hortikultura dan Perkebunan di Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2021



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2022



Komoditas sektor peternakan terdiri dari ternak besar seperti sapi, kambing dan domba serta unggas seperti ayam, itik dan puyuh. Selain itu terdapat produksi hasil peternakan seperti daging, telur dan susu. Populasi ternak besar dalam 3 tahun terakhir mengalami penurunan walau dengan angka yang kecil. Sementara produksi daging dalam 3 tahun terakhir menunjukkan kondisi yang tidak stabil. Produksi sapi potong dan domba dari tahun 2020 sampai 2022 terus menurun, sedangkan untuk kambing, ayam ras (petelur dan pedaging) dan itik menurun di tahun 2021 tapi kemudian naik kembali pada tahun 2022. Perkembangan populasi ternak serta produksi daging di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

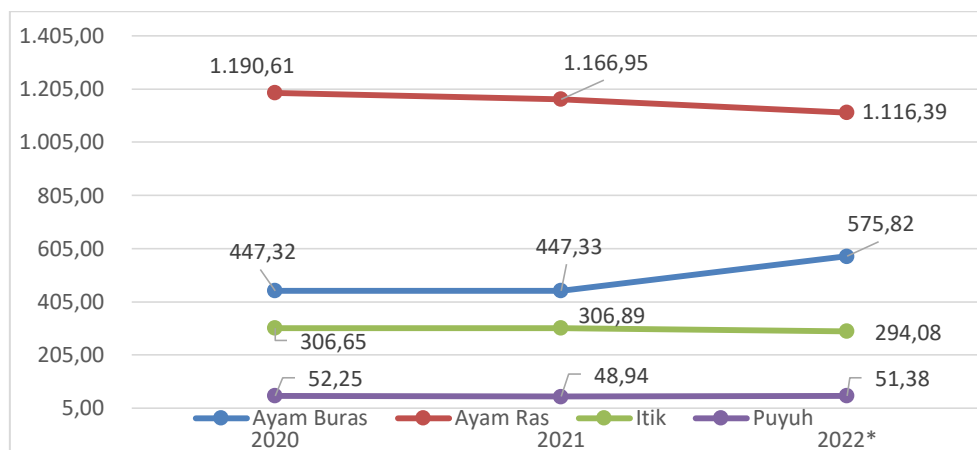
Tabel 2.108.  
Perkembangan populasi ternak serta produksi daging di Kota  
Tasikmalaya  
Tahun 2020 - 2022

Komoditas	Populasi (Ekor)			Produksi Daging (Ton)		
	2020	2021	2022*	2020	2021	2022*
Sapi Potong	2.940	2.911	2.878	3.659,52	3.613	3.606
Sapi Perah	236	212	210	-	-	-
Kerbau	682	680	680	-	-	-
Kuda	445	445	443	-	-	-
Kambing	3.139	3.156	3.304	12,22	9,14	11,09
Domba	12.998	13.119	13.297	20,21	19,62	17,21
Babi	-	-	-	-	-	-
Ayam Buras	729.385	731.221	731.601	675,24	675,25	675,29
Ayam Ras Petelur	129.532	136.080	142.080	69,38	68	131,38
Ayam Ras Pedaging	1.132.052	1.090.762	1.093.762	3.636,15	3.475,05	3.611,35
Itik	46.901	46.729	46.729	29,38	29,4	30,53

*Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2023*

Produksi telur ayam ras pada tahun 2020 mencapai 1.190,61 ton, turun pada tahun 2021 menjadi 1.166,95 ton dan pada tahun 2022 turun kembali menjadi 1.116,39 ton. Untuk produksi telur ayam bukan ras, itik serta puyuh relative stagnan. Perkembangan produksi telur di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.45.  
Produksi Telur Tahun 2020-2022



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2023

Di sektor peternakan, sarana prasarana milik Pemerintah Kota Tasikmalaya yang ada saat ini untuk memenuhi kebutuhan daging hewan adalah Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pasar Hewan. Untuk memenuhi daging yang aman, sehat, utuh dan halal perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana memadai sesuai dengan standar teknis RPH, sehingga masih perlu dilakukan berbagai perbaikan dan pemeliharaan RPH dan Pasar Hewan. Untuk ternak unggas, saat ini Pemerintah Kota Tasikmalaya belum memiliki Rumah Potong Unggas, saat ini pematangan unggas dilakukan tersebar oleh para pedagang unggas di pasar-pasar, dan belum memenuhi kaidah-kaidah keamanan dan kesehatan.

Tabel 2.109.  
Capaian Pelayanan Umum Urusan Pertanian  
Tahun 2020 – 2022

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Capaian produksi tanaman hortikultura	Ton		5.755,3	_*	_*	_*	_*
2	Capaian produksi tanaman perkebunan	Ton		854,01	_*	_*	_*	_*
3	Jumlah petani miskin yang dibina	Orang	300	126	225	225	225	245
4	Angka produktivitas tanaman pangan utama	Ton		62,16	_*	_*	_*	_*

5	Capaian Produksi Tanaman Pangan	Ton	93.000	70.928	73.400	85.384	70.200	82.019
6	Jumlah Gapoktan yang dibina	Gapoktan	64	64	_*	_*	_*	_*
7	Capaian peningkatan omset hasil olahan tanaman pangan	%	5	38,67	_*	_*	_*	_*
8	Pencegahan dan Penanggulangan penyakit ternak	%	100	100	_*	_*	_*	_*
9	Persentase peningkatan populasi ternak	%	2	0,52	1	-1,59	1	0,67
10	Persentase peningkatan hasil produksi peternakan	%	4	1,86	_*	_*	_*	_*
11	Jumlah Wirausaha baru sektor pertanian	Orang	0	0	300	295	365	370
12	Capaian produksi Hortikultura dan perkebunan	Ton	_*	_*	_*	_*	_*	_*
13	Cakupan bina kelompok petani	Kelompok	_*	_*	198	199	120	251
14	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Kwintal/hektar	_*	_*	63	62,9	63	62,68
15	Capaian produksi Hasil peternakan	Ton	_*	_*	8.000	10.347	9.200	10.634
16	Persentase pengendalian kesehatan hewan dan	%	_*	_*	100	100	100	100

	kesehatan masyarakat veteriner							
17	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	%	**	**	30	4,35	30	3,8

Ket : \* = Perubahan indikator

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2023.

#### 2.1.3.3.4. Perdagangan

Perekonomian Kota Tasikmalaya banyak didorong dan didukung oleh kategori perdagangan. Berikut capaian layanan urusan perdagangan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.110.  
Capaian Pelayanan Umum Urusan Perdagangan  
Tahun 2020 - 2022

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase hasil pengawasan metrologi legal dalam kondisi baik	%	*	*	*	*	80	88,9
2	Persentase alat UTTP yang bertera sah	%	70	80.89	88	109	80	88,9
3	Jumlah wirausaha baru sektor perindustrian dan perdagangan yang dibina	Orang		100		-		508
4	Jumlah masyarakat miskin sektor perindustrian dan perdagangan yang dibina	Orang	*	*	*	*	200	35
5	Persentase peningkatan pelaku usaha berorientasi ekspor	%	**	**	3	1	3	0,47
6	Persentase Pelaku usaha yang dibina	%	*	*	*	*	*	*
7	Persentase peningkatan omset pelaku usaha	%	8	*	5	-6,64	5	2,97
8	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	%	*	*	*	*	*	*
9	Persentase Pasar yang dibina	%	*	*	*	*	*	*
10	Nilai ekspor bersih	US\$ (ribuan)	40.000	35.883.71	41.000	31.459.43	42.000	19.854,48
11	Persentase fasilitasi pemenuhan perizinan	%	**	**	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi
	dan pendaftaran perusahaan							
12	Persentase pasar rakyat dalam kondisi baik	%	-**	-**	100	80	100	100
13	Persentase Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang stabil	%	-**	-**	72	54,5	72	34,5
14	Persentase peningkatan pelaku usaha yang berorientasi ekspor	%	-**	-**	3	1	3	1
15	Persentase peningkatan penggunaan produk unggulan kota tasikmalaya	%	-**	-**	88	88,9	88	66,7

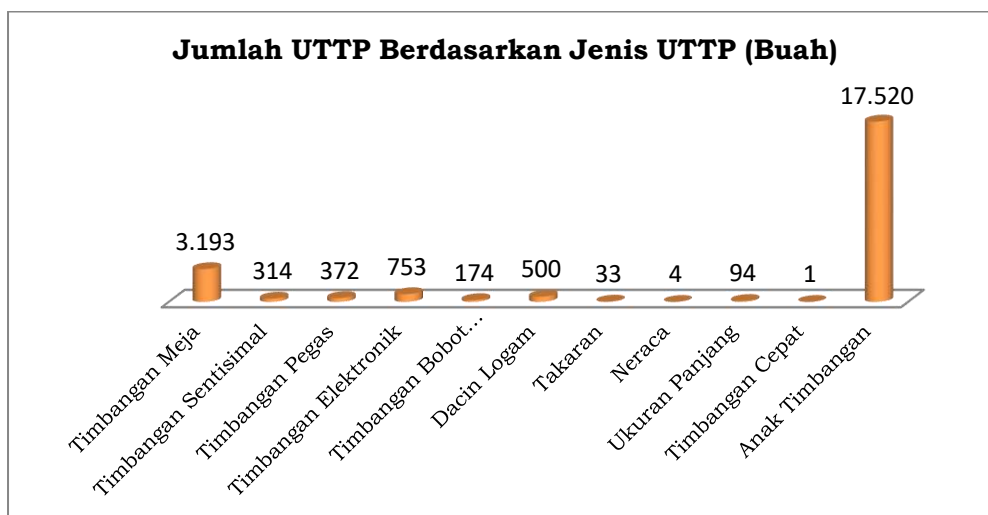
Ket : \* = Perubahan indikator

Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2023.

Sebagai implementasi dari amanat Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib untuk pelaksanaan tera, tera ulang dan pengawasan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertujuan guna melindungi kepentingan umum sehingga mendapatkan kepastian hukum dalam hal kebenaran pengukuran.

Jenis dan jumlah UTTP yang dimiliki pedagang di Pasar Rakyat dan Pasar Swalayan serta yang dimiliki masyarakat di 10 kecamatan Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Total ada 22.958 UTTP dari berbagai jenis yang dimiliki pelaku usaha di Pasar Rakyat dan Pasar Swalayan serta masyarakat di 10 kecamatan.

Gambar 2.46.  
Jumlah UTTP Berdasarkan Jenis UTTP



Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2023

Pemilik UTTP juga tersebar di SPBU, SPBE, Perum Bulog, Perusahaan Ekspedisi, Kantor Pos, Tempat Pelayanan Kesehatan dan perusahaan lainnya dengan jumlah jenis UTTP sebanyak 30 jenis sebanyak 1.059 buah. Ada juga UTTP yang terpasang di Pelanggan Air dan Listrik di 10 kecamatan sebanyak 27.467 meter air dan 220.513 kWh meter.

Pasar rakyat di wilayah Kota Tasikmalaya semakin penting sebagai pusat lalu lintas perdagangan hasil pertanian dan hasil industri kecil menengah dari dan ke berbagai wilayah kabupaten/kota sekitarnya. Saat ini, Pasar Cikurubuk menjadi pasar induk hasil bumi bagi masyarakat di wilayah Priangan Timur, yang mampu memasarkan berbagai produk hasil pertanian paling lengkap, seperti: beras, sayuran, daging, ikan, telur dan lainnya serta hasil industri kecil menengah seperti alas kaki dan bordir.

Tabel 2.111.  
Jumlah Pasar Rakyat Tahun 2022

No.	Nama Pasar	Alamat	Tahun Pembangunan	Luas			Jumlah	
				Tanah (m2)	Bangunan (m2)	Lantai	Los	Kios
1	Pasar Cikurubuk	Jl. Residen Ardiwinangun, Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi	1994	43.120	25.650	1	50	2.772
2	Pasar Pancasila	Jl. Pancasila, Kel. Lengkongsari Kec. Tawang	1995	6.540	4.656	2	60	334
3	Pasar Indihiang	Jl. Letnan Harun, Kel. Sukamaju Kaler Kec. Indihiang	1997	10.622	743	1	0	402
4	Pasar Padayungan	Jl. Perintis Kemerdekaan, Kel. Tugujaya Kec. Cihideung	1995	9.000	1.968	1	0	261
5	Pasar Cibeuti	Jl. Raya Cibeuti Kel. Cibeuti Kec. Kawalu	1990	696	691	1	12	44
6	Pasar Gegernoon g	Jl. Raya Tamansari Kel. Tamanjaya Kec. Tamansari	1999	1.000	538	1	0	91
7	Pasar Burung dan Besi	Jl. Kh. Ez. Mutaqien, Kel. Linggajaya Kec. Mangkubumi	1997	6.407	444	1	0	244
8	Pasar Nyemplong / Sindang Hayu	Setiawargi Kel. Setiawargi Kec. Tamansari	2016	5.650	1.364	1	26	0
9	Pasar Cibeuem	Jl. Kh. Khoer Affandi Kel. Margabakti Kec. Cibeuem	2018	4.630	2.989	1	128	78
10	Pasar Purbaratu	Kp. Ciwasmendi.	2019	938	303	1	18	8

No.	Nama Pasar	Alamat	Tahun Pembangunan	Luas			Jumlah	
				Tanah (m2)	Bangunan (m2)	Lantai	Los	Kios
		Kel. Singkup Ke. Purbaratu						

Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2023.

Meskipun kategori perdagangan sudah cukup baik tetapi masih perlu peningkatan pada sarana dan prasarananya. Pasar-pasar tersebut secara bertahap harus ditingkatkan kebersihan, ketertiban dan kenyamanannya untuk meningkatkan daya saing dengan pasar-pasar modern atau pusat perbelanjaan dan minimart yang ada.

Data lebih lanjut mengenai pelaku usaha perdagangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.112.  
Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan

No.	Jenis	Jumlah
1	Usaha Mikro yang Sudah Terdaftar	120
2	Usaha Mikro Anggota Koperasi LPM	2.332
3	PKL Kojengakang	780
4	PKL sepanjang jalan Kota Tasikmalaya (21 ruas jalan)	1.371
5	PKL Selter Lingkar Dadaha	140
6	Peserta Program Kemiskinan	600
	Jumlah	4.784

Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2023.

Kota Tasikmalaya memiliki banyak potensi kerajinan dan industri kreatif yang tersebar di beberapa sentra-sentra industri Kota Tasikmalaya yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan. Seluruh potensi kerajinan ini perlu didukung dengan fasilitas sarana prasarana promosi dan pemasaran produk industri kreatif dengan membangun tempat pameran khususnya untuk produk industri kreatif sebagai salah satu dari pengembangan pasar melalui promosi.

#### 2.1.3.3.5. Perindustrian

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan salah satu sektor usaha yang mempunyai peranan cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional. Disamping mampu menyerap tenaga kerja dan menyediakan lapangan usaha secara dominan, IKM juga memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat luas. Jika ditinjau dari sisi kualitas dan kuantitas, komoditi IKM ini terus mengalami peningkatan. Berikut ini data potensi komoditi unggulan Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.113.  
Perkembangan Potensi Komoditi Industri Kota Tasikmalaya  
Tahun 2020-2022

N O	KOMODITI INDUSTRI	UNIT USAHA (UU)			TENAGA KERJA (Orang)			NILAI INVESTASI (Rp. 000)			NILAI PRODUKSI/TAHUN (Rp. 000)		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
<b>A. KOMODITI UNGGULAN :</b>													
1	Bordir	1.40 9	1.409	1.44 0	14.16 2	14.16 2	14.397	244.951.44 2	244.951.44 2	248.973.44 2	1.070.072.8 76	1.071.147.8 76	1.071.147.87 6
2	Kerajinan Mendong	174	174	174	174	2.292	2.292	7.131.232	7.131.232	7.131.232	43.203.874	43.203.874	43.203.874
3	Kerajinan Bambu	75	75	99	75	660	836	1.200.038	1.200.038	6.105.038	5.466.606	5.466.606	5.466.606
4	Alas Kaki (Kelom Geulis, Sandal, Sepatu)	531 0	531	572	531	6.275	6.600	51.431.794	51.431.794	55.051.094	401.276.43 0	403.696.430	403.696.430
5	Kayu Olahan (Meubel)	217	217	229	217	1.568	1.602	27.830.699	27.830.699	28.659.699	98.835.245	106.485.245	106.485.245
6	Batik	43	43	46	43	695	734	7.840.576	7.840.576	7.942.576	51.540.682	51.540.682	51.540.682
7	Payung Geulis	7	7	7	7	47	47	45.500	45.500	45.500	636.800	636.800	636.800
8	Makanan Olahan	574	585	1.68 9	574	5.378	9.096	58.809.160	61.108.674	99.255.955	952.037.07 8	953.737.078	953.737.078
<b>JUMLAH</b>		<b>3.03 0</b>	<b>3.041</b>	<b>4.25 6</b>	<b>3.039</b>	<b>31.07 7</b>	<b>35.604</b>	<b>399.240.44 1</b>	<b>401.539.95 6</b>	<b>453.164.53 7</b>	<b>2.623.069.5 91</b>	<b>2.635.914.5 91</b>	<b>2.635.914.59 1</b>
<b>B. KOMODITI LAINNYA :</b>													
1	Bahan Bangunan	326	326	326	326	4.198	4.198	217.454.13 2	217.454.13 2	217.454.13 2	561.840.40 3	561.840.403	561.840.403
2	Pakaian Jadi	120	122	429	120	1.831	3.610	29.076.300	29.155.300	62.996.418	170.268.35 0	170.268.350	170.268.350
3	Percetakan	48	51	97	48	441	628	10.003.500	10.353.625	15.903.537	32.271.116	32.271.116	32.271.116
4	Lain-lain	130	131	148	130	3.508	3.553	75.069.380	84.922.269	85.510.269	422.336.57 6	423.586.576	423.586.576



JUMLAH	624	630	1.00 0	641	9.978	11.989	331.603.31 2	341.885.32 6	381.864.35 6	1.186.716.4 45	1.187.966.4 45	1.187.966.44 5
TOTAL	3.65 4	3.671	5.25 6	3.680	41.05 5	47.593	730.843.75 4	743.425.28 1	835.028.89 2	3.809.786.0 36	3.823.881.0 36	3.823.881.03 6

Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2023.

Tabel 2.114.  
Perkembangan Jumlah Unit Industri Kota Tasikmalaya  
Tahun 2021 – 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH INDUTRI TAHUN 2021			JUMLAH INDUTRI TAHUN 2022			KET
		KECI L	MENENG AH	JUMLA H	KECI L	MENENG AH	JUMLA H	
1	CIHIDEUNG	238	36	274	350	37	387	
2	CIPEDES	343	57	400	536	59	595	
3	TAWANG	157	18	175	328	21	349	
4	INDIHIANG	106	8	114	260	15	275	
5	KAWALU	1.145	160	1.305	1.338	175	1.513	
6	CIBEUREUM	162	26	188	275	34	309	
7	TAMANSARI	417	72	489	553	78	631	
8	MANGKUBUMI	387	76	463	603	84	687	
9	BUNGURSARI	120	20	140	262	26	288	
10	PURBARATU	99	24	123	196	26	222	
JUMLAH TOTAL				3.671			5.256	

Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2023.

Adapun capaian pelaksanaan urusan industri dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.115.  
Capaian Indikator Pelayanan Urusan Industri  
Tahun 2020 - 2022

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase industri kecil menengah berkualitas	%	2	23,54	-*	-*	-*	-*
2	Jumlah IKM yang dibina	IKM	775	1.110	-*	-*	-*	-*
3	Persentase pertumbuhan industry	%	2	3,94	2	9,4	2	43,2
4	Jumlah sentra IKM yang dikembangkan	Buah	3	0	3	3	-	-
5	Persentase capaian sasaran rencana pembangunan industri	%	-*	-*	5	50	92,3	92,3
6	Jumlah wirausaha baru sektor industri	Orang	-*	-*	325	325	253	253
7	Jumlah masyarakat miskin yang dibina pada sektor industri	Orang	-*	-*	550	500	100	0

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
8	Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri	%	-*	-*	100	0	100	100
9	Persentase IKM yang Terdaftar di Sistem Informasi Industri Nasional	%	-*	-*	30	1,6	30	0,8

Ket : \* = Perubahan indikator

Sumber : Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2023.

### 2.1.3.3. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

#### 2.1.3.4.1. Sekretariat Daerah

##### 1) Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah bentuk rangkaian upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah Kota Tasikmalaya. Selain itu, laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya diukur atas dasar penilaian indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan gambaran keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Hasil penilaian dari laporan LKIP Pemerintah Kota Tasikmalaya atau disebut SAKIP mengalami peningkatan, pada Tahun 2020 nilai SAKIP Kota Tasikmalaya adalah 70,84 poin berada pada kriteria BB, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 71,63 poin atau kriteria BB. Pada tahun 2022 terdapat perubahan Pedoman Evaluasi untuk penilaian SAKIP, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa terdapat perubahan komponen penilaian dari 5 komponen (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, Pencapaian Sasaran Kinerja) menjadi 4 komponen (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal), sehingga nilai SAKIP Kota Tasikmalaya Pada tahun 2022 adalah 70,73 poin berada kriteria BB.

Tabel. 2.116.  
Nilai SAKIP Kota Tasikmalaya  
Tahun 2020 – 2022

No	Uraian	Tahun					
		2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Nilai SAKIP	71-80 (BB)	70,84 (BB)	71-80 (BB)	71,63 (BB)	81-90 (A)	70,73 (BB)

Sumber : Setda Kota Tasikmalaya , 2023.

2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada Pemerintah setiap tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan dilakukan evaluasi sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Penetapan Peringkat dan skor LPPD merupakan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD, yang dilakukan secara terukur oleh Kementerian Dalam Negeri untuk memotret kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tabel. 2.117.  
Capaian LPPD Kota Tasikmalaya  
Tahun 2020 – 2022

No	Uraian	Tahun					
		2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Capaian LPPD	3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi)	3,370	3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi)	N/A	3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi)	N/A

Sumber : Setda Kota Tasikmalaya , 2023.

Capaian LPPD Kota Tasikmalaya Tahun 2020 tidak dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri karena terjadinya pandemi covid 2019, sedangkan untuk untuk tahun 2021 masih dalam proses penilaian oleh Kementerian Dalam Negeri.

3) Penggunaan E-Procurement

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah Kota Tasikmalaya diselenggarakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan resmi berdiri tanggal 01 Januari 2019 dan berada pada Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.

BPBJ mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan bahan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan dalam pengadaan barang dan jasa pada pemerintah daerah. BPBJ mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk:

1. Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa dalam hal Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis serta pengelolaan pengadaan barang/jasa;
2. Pengelolaan LPSE, dalam hal melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis serta pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
3. Pembinaan dan Advokasi PBJ, melalui melaksanakan penyiapan bahan bijakan dan petunjuk teknis dan petunjuk teknis serta pelaksanaan pembinaan advokasi pengadaan barang/jasa.

Sumber daya manusia pada Bagian Pengadaan Barang / Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 2.118.  
Sumber Daya Manusia pada BPBJ Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah	Sertifikat	Pokja	JFT PBJ
1	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	1	1	-	-
2	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	12	11	10	4
3	Pembinaan dan advokasi PBJ	3	3	2	2
4	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	5	1	-	-
TOTAL		21	16	12	6

Sumber : Setda Kota Tasikmalaya , 2023.

*Monitoring Center for Prevention* (MCP) merupakan sebuah aplikasi atau *dashboard* yang dikembangkan KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi. Kinerja BPBJ dinilai melalui Capaian MCP Pemerintah Daerah di Jawa Barat, serta kinerja BPBJ pada tahun 2022 sebesar Kota Tasikmalaya berada pada angka 90,32 persen, terdiri dari indikator SDM UKPBJ, pelaksanaan Tupoksi, Perangkat Pendukung, Penayangan SIRUP, serta Pengendalian dan Pengawasan. Berikut disajikan Indikator Kinerja BPBJ pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.119.  
Capaian MCP Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Tasikmalaya

No.	Indikator MCP		Capaian	
			2021	2022
1.	SDM UKPBJ	Ketersediaan SDM (%)	100	100
		Pokja UKPBJ Permanen (%)	100	100
		Ketersediaan Fungsional PBJ	10	19
2.	Pelaksanaan Tupoksi	Advokasi PBJ	100	100
		Evaluasi Kegiatan PBJ	88	100
		Review Perencanaan PBJ	65	100
		Vendor Management system	38	100
3.	Perangkat Pendukung	Kode Etik	100	100
		Standar Opearsional Prosedur	100	100
		TPP Khusus UKPBJ	0	100

No.	Indikator MCP		Capaian	
			2021	2022
4.	Penayangan SiRUP	Persentase Penayanan SiRUP	82	82
5.	Pengendalian dan Pengawasan	Review HPS	60	100
		Review Kinerja UKPBJ & Tindak	85	100

Sumber : Setda Kota Tasikmalaya, 2023.

Pelayanan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dilakukan kepada penyedia, UKPBJ, Auditor dan Intansi. Paket pengadaan barang/jasa melalui LPSE oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 sebanyak 2.154 paket, dengan jumlah paket tender sebanyak 188 paket, dan non tender sebanyak 1.966 paket.

#### 2.1.3.4.2. Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dokumen perencanaan daerah Kota Tasikmalaya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang selanjutnya dijabarkan dalam program kerja dan perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan.

- 1) Tersedianya dokumen RPD tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Wali Kota) RPD Kota Tasikmalaya disusun seiring dengan berakhirnya RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 pada Tahun 2022, seiring dengan berakhirnya masa jabatan Walikota Tasikmalaya. Selain itu, Kebijakan nasional tentang pemilihan kepala daerah Gubernur, Bupati, Walikota akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024. Sehingga pada masa transisi ini, dipandang dari sisi perencanaan, maka rencana pembangunan jangka menengah daerah terjadi “kekosongan”.

Dokumen RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. RPD ini disusun untuk mengisi kekosongan perencanaan daerah jangka menengah. RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2022 pada tanggal 28 April 2022.

- 2) Tersedianya dokumen RKPD telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Wali Kota) Dokumen RKPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kota Tasikmalaya telah ditetapkan dengan peraturan Walikota Tasikmalaya. RKPD tahun 2023 mengacu kepada RPD Kota Tasikmalaya tahun 2023-2026 dan merupakan RKPD tahun pertama dari periode RPD 2023-2026.

3) Persentase Keselarasan Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD  
 Persentase keselarasan penjabaran program RPJMD kedalam RKPD diperoleh dengan memformulasikan jumlah program RKPD tahun bersangkutan dibagi dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Pada tahun 2020, 2021 dan 2022, capaian keselarasan program RPJMD yang dijabarkan ke dalam RKPD realisasinya mencapai 100 persen.

4) Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)  
 Sejak beberapa tahun terakhir Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menggunakan sistem informasi berbasis online dalam proses perencanaan di Provinsi Jawa Barat. Sistem ini memuat perencanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah pusat memberlakukan penggunaan satu sistem perencanaan penganggaran di tingkat nasional yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), sebuah sistem aplikasi elektronik yang terdiri dari sistem informasi pembangunan daerah, sistem informasi keuangan daerah, dan sistem informasi pemerintahan daerah lainnya antara lain untuk data dan informasi pembangunan, merupakan sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, dengan tujuan:

- 1) menyediakan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat;
- 2) menghasilkan layanan informasi berbasis elektronik; serta
- 3) meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.

Perencanaan pembangunan di Kota Tasikmalaya telah menggunakan sistem informasi perencanaan pembangunan. Seiring dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kota Tasikmalaya juga telah menggunakan SIPD yang sebelumnya menggunakan sistem perencanaan mandiri (*E-planning*).

Adapun indikator kinerja penunjang bidang perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.120.  
 Realisasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penunjang Bidang Perencanaan Tahun 2020 - 2022

INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Tahun					
		2020		2021		2022	
		Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi
Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100
Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	100	100	10	100	100	100
Persentase keselarasan Rencana Kerja terhadap RKPD	%	100	100	100	100	100	100
Persentase aspirasi masyarakat yang	%	85	73,53	30	66,06	35	56,72

INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Tahun					
		2020		2021		2022	
		Target	Realiasi	Target	Realiasi	Target	Realiasi
terakomodir dalam perencanaan							
Persentase capaian kinerja indikator kinerja utama daerah	%	100	100	90	67,85	95	51,22
Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	%	100	100	100	100	100	100

Sumber : Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2023.

#### 2.1.3.4.3.Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Berdasarkan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Selanjutnya, rancangan Perda yang telah disetujui diajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi bersama dengan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD. Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi perda dan peraturan Walikota. Namun bila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kota Tasikmalaya tentang APBD dan rancangan peraturan walikota tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD, Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat setiap tahun menetapkan Perda tentang APBD Provinsi Jawa Barat dan Pergub tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Barat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.



Tabel 2.121.  
Realisasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penunjang Bidang  
Keuangan Tahun 2020 – 2022

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun					
		2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase capaian pengelolaan keuangan dan aset daerah	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*
Persentase waktu penetapan Perda APBD Kota Tasikmalaya	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*
Persentase laporan keuangan daerah sesuai SAP	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*
Persentase implementasi teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*
Persentase kesesuaian aset milik daerah dengan nilai aset di neraca	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*
Persentase ketepatan waktu perencanaan keuangan perangkat daerah	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*
Persentase penatausahaan pendapatan dan belanja daerah	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*
Persentase pemanfaatan teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*
Persentase kesesuaian dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun					
		2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya yang bersertifikat	%	_*	_*	_*	_*	_*	_*
Opini BKP atas LKPD Kota Tasikmalaya	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP*
Persentase waktu penetapan Perda APBD Kota Tasikmalaya	%	100	100	100	100	100	100
Persentase laporan keuangan sesuai SAP	%	100	100	100	100	100	100
Persentase waktu penetapan KUA dan PPAS	%	_**	_*	100	100	100	100
Persentase realisasi belanja terhadap target belanja yang ditetapkan	%	100	100	95	96,97	95	90,21
Persentase laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP	%	100	100	100	100	100	100
Persentase inventarisasi asset milik daerah	%	100	100	100	100	100	100
Persentase peningkatan pajak dan retribusi daerah	%	6,49	-0,39	7,01	41,68	-	-
Persentase peningkatan pajak	%	-27,77	-14,60	4,49	14,06	-	-
Persentase peningkatan pajak	%	-5,72	13,44	1,95	59,35	-	-
Persentase objek pajak baru	%	20	97,58	20	209,70	-	-
terhadap yang ditargetkan	%	20	100	15	88,89	-	-
Persentase implementasi	%	20	123,88	20	146,27	-	-
sistem informasi pajak daerah	%	100	112,47	100	103,71	-	-

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun					
		2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase penanganan wajib	%	100	88,31	100	96,68	-	-

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya, 2023.

-\* Target Lama

-\*\* Target Baru

Transparansi Informasi APBD dalam rangka transparansi pengelolaan keuangan merupakan salah satu indikator utama yang ditekankan oleh pemerintah untuk mencegah tindak pidana korupsi serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Government*). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Dalam upaya mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan setiap badan publik menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Guna mendorong keterbukaan informasi publik yang terkait pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyediakan informasi APBD hingga ke level kegiatan yang dapat diakses secara *online* oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat luas melalui *website* di alamat <https://data.tasikmalayakota.go.id/> pada menu badan Pengelola Keuangan Daerah.



2.1.3.4.4.Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pada tahun 2020 - 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.122.  
Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penunjang Bidang Kepegawaian Tahun 2020 - 2022

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun					
		2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	78	52,92	78	63,26	78	46,95
Kesesuaian Kompetensi Aparatur dengan Jabatannya	%	76	76,59	78	78,01	78	76,95
Tingkat disiplin aparatur perangkat daerah	%	99	99,79	99	99,84	99	99,85
Capaian implementasi SIMPEG	%	60	68,33	70	80,37	70	100
Capaian pembinaan disiplin aparatur	%	100	95,00	100	100,00	100	90
Capaian layanan kepegawaian	%	100	94,43	100	114,37	100	100
Capaian pendidikan dan pelatihan aparatur	%	100	100,38	100	100,54	100	101,56

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tasikmalaya, 2023.

Realisasi indikator kinerja indeks profesionalitas ASN pada tahun 2022 sebesar 46,95 dari target 78, atau dengan tingkat capaian 60,19%. Apabila dibandingkan dengan pencapaian mulai tahun 2021, nilai IP ASN 2022 mengalami penurunan. Pada tahun 2021 nilai IP ASN sebesar 63,26 dari target 78, atau dengan tingkat capaian 81,10%.

Permasalahan utama yang menjadi faktor penyebab masih rendahnya capaian IP ASN Kota Tasikmalaya adalah belum terupdate nya data dari BKN yang menjadi sumber perhitungan IP ASN. Karena mulai tahun ini perhitungan IP ASN harus menggunakan data dari SAPK BKN dan tidak dilakukan secara manual. Sehingga permasalahan update data SAPK akan mempengaruhi nilai IP ASN Kota Tasikmalaya. Adapun permasalahan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Nilai dimensi kualifikasi dan kompetensi pegawai masih rendah. Sebagaimana dijelaskan di atas, dimensi kualifikasi mempunyai bobot 25% sedangkan dimensi kompetensi sebesar 40%. Kualifikasi pegawai Pemerintah Kota Tasikmalaya masih banyak yang mempunyai tingkat

pendidikan D3 ke bawah yaitu sebesar 15,24%. Sedangkan pada dimensi kompetensi, yang menjadi permasalahan adalah masih rendahnya jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis 20 JP dan seminar/workshop/magang/kursus dan sejenisnya.

2. Keterbatasan anggaran peningkatan kompetensi. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui diklat, seminar, workshop, magang, kursus, dan sejenisnya. Pada tahun 2022, anggaran peningkatan kompetensi yang ada di BKPSDM hanya mampu membiayai 1.736 orang atau 28,9% dari total pegawai.

Realisasi persentase aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi pada tahun 2022 melebihi target kinerja yang diharapkan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi juga mengalami kenaikan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam tingginya capaian kinerja yang melebihi target untuk indikator Persentase Aparatur yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi, salah satunya adalah mulai berjalannya koordinasi dengan penyelenggara Diklat yang menggunakan dana dari APBN (Metode Rupiah Murni/RM) untuk mengakomodir peserta dari Kota Tasikmalaya.

#### 2.1.3.4.5. Penelitian dan Pengembangan

Indikator kinerja urusan penelitian dan pengembangan pada tahun 2022 menunjukkan capaian yang cukup baik. Capaian indikator kinerja penelitian dan pengembangan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.123.  
Target dan Realisasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020 – 2022

INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Tahun					
		2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	%	100	100	100	100	100	100
Indeks Inovasi Daerah (IID)	Kategori	-*	Kurang Inovatif	-*	Inovatif	Inovatif	Inovatif

Sumber : Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2023.

-\* Belum ada penetapan target

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dapat terelaborasi sebesar 100 persen. Sedangkan untuk indikator Indeks Inovasi Daerah ada perbaikan capaian dari kurang inovatif pada tahun 2020 menjadi Inovatif pada tahun 2021 dan 2022.

2.1.3.4.6. Unsur Pengawasan

Fungsi penunjang terkait pengawasan akan mempunyai kewenangan antara lain: pengawasan terhadap pemerintah daerah dan aparatur, pengawasan atas keuangan dan kekayaan daerah, pengawasan atas pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial. Berikut capaian indikator unsur pengawasan:

Tabel 2.124.  
Target Dan Realisasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penunjang Bidang Pengawasan Tahun 2020 – 2022

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun					
		2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
IKM Perangkat Daerah	Kategori	90	81,5	-*	-*	-*	-*
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti	%	72	70,47	-*	-*	-*	-*
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang dinyatakan selesai ditindak lanjuti	%	80	87	-*	-*	-*	-*
Persentase pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	%	100	100	-*	-*	-*	-*
Persentase tingkat maturitas SPIP Perangkat Daerah	%	100	100	-*	-*	-*	-*
Tingkat capaian kapabilitas APIP	Level	3	2 (plus)	-*	-*	-*	-*
Persentase nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	%	60	70,52	-*	-*	-*	-*
Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	%	80 (BB)	83,31 (A)	-*	-*	-*	-*
Rekomendasi tindaklanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan	%	-**	-**	75	77,85	75	83,33
Nilai SAKIP Kota	%	-**	-**	73	71	73	70,73
Level Maturitas SPIP Kota Tasikmalaya	Level	-**	-**	3	2,83	3	3,081
Skor PMPRB Kota Tasikmalaya	Poin	-**	-**	70	0	70	86,42
Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Predikat WBK/WBBM	Unit	-**	-**	3	0	3	0
Persentase Kepatuhan Pelaporan harta kekayaan aparatur	%	-**	-**	100	100	100	100

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Tahun					
		2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi	%	-**	-**	100	N/A	100	100
Indeks Persepsi korupsi hasil survey eksternal	Poin	-**	-**	3	2,96	3	1,86
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang dinyatakan selesai ditindaklanjuti	%	-**	-**	100	64,01	-	-
Persentase tingkat maturitas SPIP perangkat daerah	%	-**	-**	100	N/A	-	-
Tingkat capaian kapabilitas APIP	%	-**	-**	100	N/A	-	-
Persentase penyelenggaraan pengawasan fungsional APIP	%	-**	-**	100	100	-	-
Persentase tindaklanjut hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat	%	-**	-**	100	95,50	100	100

Sumber : Inspektorat Kota Tasikmalaya, 2023.

-\* Indikator Lama

-\*\* Indikator Baru

Secara umum tabel di atas menggambarkan bahwa capaian urusan pengawasan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun demikian terdapat beberapa indikator baru yang nilai capaiannya belum tersedia dan terdapat pula indikator yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, misalnya Persentase tindaklanjut hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat dan persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang dinyatakan selesai ditindaklanjuti.

#### 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

##### 2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

##### 1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Angka konsumsi Rumah Tangga di Kota Tasikmalaya selama periode 2018-2022 terus meningkat, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.125.

Angka Konsumsi Rumah Tangga di Kota Tasikmalaya Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pengeluaran Rumah Tangga	14.459,94	15.710,37	15.068,46	15.729,30	17.441,15

2.	Jumlah Penduduk	662.723	663.517	716.515	723.920	733.467
3.	Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga perkapita (juta)	21,82	23,68	21,03	21,72	23,78

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2023

## 2. Persentase Konsumsi Rumah Tangga

Persentase konsumsi non pangan perkapita di Kota Tasikmalaya selama periode 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.126.  
Persentase Konsumsi Rumah Tangga  
di Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2022

No	Kelompok Konsumsi	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Makanan dan Minuman Selain Restoran (Pangan)	Juta Rp	7.089.215,22	7.703.573,75	7.887.193,57	8.135.152,20	8.965.934,45
	Persentase	%	35,49	35,42	36,53	35,61	35,90
2.	Pakaian, Alas Kaki, dan Jasa Perawatannya	Juta Rp	970.460,99	1.062.687,29	994.592,63	987.640,62	1.038.950,67
	Persentase	%	4,86	4,89	4,61	4,32	4,16
3.	Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Juta Rp	1.907.565,00	2.005.794,45	1.992.614,55	2.037.556,14	2.218.533,12
	Persentase	%	9,55	9,22	9,23	8,92	8,88
4.	Kesehatan dan Pendidikan	Juta Rp	495.102,07	549.309,97	570.429,61	586.103,39	628.512,43
	Persentase	%	2,48	2,53	2,64	2,57	2,52
5.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	Juta Rp	3.052.813,35	3.312.165,37	3.033.334,86	3.064.735,57	3.388.128,57
	Persentase	%	15,28	15,23	14,05	13,42	13,57
6.	Restoran dan Hotel	Juta Rp	300.719,29	325.077,07	313.097,16	320.490,19	355.247,06
	Persentase	%	1,51	1,49	1,45	1,40	1,42
7.	Lainnya	Juta Rp	687.017,96	751.762,80	768.577,67	783.721,65	845.844,41
	Persentase	%	3,44	3,46	3,56	3,43	3,39

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2023.

### 2.1.4.2. Infrastruktur Kota Tasikmalaya

Kondisi infrastruktur yang memadai sangat mempengaruhi daya saing daerah. Ketersediaan infrastruktur wilayah Kota Tasikmalaya yang dapat



meningkatkan daya saing daerah meliputi : aksesibilitas wilayah, penataan ruang, ketersediaan air bersih, ketersediaan fasilitas listrik dan komunikasi, fasilitas perdagangan dan jasa serta ketersediaan fasilitas lainnya.

Kota Tasikmalaya menjadi pusat untuk wilayah hinterland yang ada disekitarnya (Priangan Timur). Aksesibilitas antara Kota Tasikmalaya dan daerah sekitarnya didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai antara lain:

- a. Jalan di wilayah Kota Tasikmalaya terdiri dari Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kota. Panjang jalan kota sesuai dengan Keputusan Walikota Tasikmalaya nomor 541.03/Kep.136-DPUPR/2017 tentang Penetapan Status Ruas Jalan di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai Jalan Kota adalah 450,742 km, terkoneksi dengan jalan nasional dan jalan provinsi. Kondisi mantap sepanjang 402,406 km (89,28%) dan kondisi tidak mantap sepanjang 48,336 km (10,72%).
- b. Terminal Tipe A Indihiang untuk melayani angkutan bus di dalam kota, antar kota dan antar provinsi.
- c. Stasiun kereta api di Kota Tasikmalaya melayani angkutan penumpang dan barang.
- d. Bandara Wiriadinata melayani penumpang domestik, saat ini sedang diupayakan untuk reaktivasi.

Penataan ruang wilayah Kota Tasikmalaya sebagaimana tertuang dalam RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi : kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat; kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; kawasan lindung geologi; kawasan rawan bencana alam; dan RTH. Sedangkan kawasan budidaya meliputi: kawasan peruntukan perumahan; kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; kawasan peruntukan perkantoran; kawasan peruntukan industri dan pergudangan; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan kegiatan sektor informal; kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan hutan produksi dan hutan rakyat; kawasan peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara; kawasan peruntukan pelayanan umum; dan ruang evakuasi bencana. Dalam perkembangannya, beberapa kawasan tumbuh dengan cepat dan berpotensi ruang yang direncanakan tidak dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat/investor yaitu perdagangan jasa, perumahan dan industri pergudangan. Revisi RTRW Kota Tasikmalaya yang saat ini sedang disusun diharapkan dapat menjawab kebutuhan ruang selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pelayanan terhadap fasilitas air minum di Kota Tasikmalaya dapat dikatakan mengalami perkembangan yang relatif meningkat tiap tahun, meskipun capaian KK berakses air minum Tahun 2022 baru mencapai 56,81%. Pelayanan air minum di Kota Tasikmalaya disediakan oleh Dinas PUTR dan PDAM Tirta Sukapura (milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya).

Kota Tasikmalaya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Priangan Timur dan sebagai kota perdagangan dan jasa dapat dilihat dari fasilitas hotel, restoran/rumah makan, pasar modern dan pasar tradisional. Jumlah fasilitas perdagangan dan jasa mengalami peningkatan. Jumlah hotel tahun 2021 sebanyak 35 unit dengan jumlah kamar tersedia sebanyak 1.515 kamar, tahun 2022 sebanyak 40 unit dengan jumlah kamar tersedia

sebanyak 1.643 kamar. Jumlah restoran/rumah makan tahun 2021 sebanyak 261 unit dan tahun 2022 sebanyak 293 unit. Tahun 2022, jumlah pasar modern sebanyak 9 unit dan pasar tradisional sebanyak 10 unit. Disamping itu juga terdapat fasilitas pendidikan, tempat wisata alam dan buatan. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Tasikmalaya memiliki daya tarik bagi investor untuk investasi dan para wisatawan untuk berkunjung di Kota Tasikmalaya.

#### 2.1.4.3. Iklim Berinvestasi

##### 1. Angka Kriminalitas

Investasi dipengaruhi oleh kondisi keamanan dan ketertiban umum suatu daerah yang salah satu indikatornya adalah jumlah kriminalitas yang terjadi. Jumlah tindakan kriminalitas di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.127.  
Jumlah Kasus Kriminalitas di Kota Tasikmalaya  
Tahun 2018 - 2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kasus Narkoba	0	0	5	87	72
2	Jumlah Kasus Pembunuhan	0	1	3	1	2
3	Jumlah Kejahatan Seksual	35	26	35	32	1
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	57	43	39	4	38
5	Jumlah Kasus Pencurian	108	77	69	70	45
6	Jumlah Kasus Penipuan	132	96	105	67	88
7	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	0	1	0	1	-
8	Jumlah Pidana Lainnya	98	122	120	109	-
	Jumlah Tindak Kriminal selama 1 tahun	430	366	376	327	246

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya, 2023.

##### 2. Jumlah Demonstrasi

Selain tingkat kriminalitas, kondisi keamanan dan ketertiban yang dapat mempengaruhi investasi daerah adalah banyaknya demonstrasi yang terjadi disuatu daerah. Jumlah demonstrasi di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.128.  
Jumlah Demonstrasi di Kota Tasikmalaya  
Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Bidang Politik	1	9	10	6	7
2.	Ekonomi	3	7	19	6	8
3.	Lainnya	9	19	20	8	13
	Jumlah	13	35	49	20	28

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya, 2022.

### 3. Pendapatan Per Kapita (PDRB Per Kapita)

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku di Kota Tasikmalaya tahun 2022 sebesar Rp.34,05 juta mengalami peningkatan sebesar 11,06 persen dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp.31,56 juta. Peningkatan PDRB Perkapita ini merupakan indikasi bahwa pemulihan ekonomi dan kinerja perekonomian di Kota Tasikmalaya semakin membaik pada tahun 2022.

### 4. Kondisi Sarana Prasarana Pendukung

Kondisi sarana prasarana pendukung seperti sarpras transportasi, komunikasi, dan utilitas yang memadai sangat mempengaruhi iklim investasi daerah. Jalan di Kota Tasikmalaya sudah terkoneksi baik dengan jalan nasional maupun provinsi, didukung adanya terminal tipe A, 4 terminal tipe C dan stasiun kereta api yang melayani angkutan penumpang dan barang. Selain itu Pemerintah Kota Tasikmalaya sedang meupayakan reaktivasi Bandara Wiriadinata untuk melayani penumpang domestik.

Sarana komunikasi seperti jaringan internet di Kota Tasikmalaya sudah baik, Pemerintah Kota Tasikmalaya sendiri mengelolan 348 titik jaringan intranet Pemerintah Daerah. Demikian juga dengan sarana prasarana pos sudah baik dengan dukungan 7 kantor pos. Namun dukungan utilitas seperti pelayanan air minum di Kota Tasikmalaya yang disediakan oleh Dinas PUTR dan PDAM Tirta Sukapura (milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya) baru melayani 56,81% kk yang ada di Kota Tasikmalaya pada Tahun 2022. Sementara untuk pengelolaan sampah, pemerintah kota tasikmalaya mempunyai 1 unit TPA di Ciangir didukung 1 Bank Sampah Induk, 21 Bank Sampah Unit dan 2 TPS3R.

### 5. Birokrasi Perijinan

Birokrasi perijinan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi investasi karena birokrasi yang panjang memperbesar biaya bagi investor. Birokrasi yang panjang akan memperbesar biaya bagi pengusaha karena akan memperpanjang waktu berurusan dengan aparat. Pemerintah Kota Tasikmalaya berupaya untuk mengatasi hal ini dengan membangun Mall Pelayanan Publik yang mulai beroperasi pada tanggal 17 Oktober 2021. Jumlah outlet yang ada di MPP berjumlah 21 outlet dengan rincian 10 outlet Instansi yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dan 11 outlet instansi vertikal, BUMD dan Provinsi. Jenis layanan yang akan diselenggarakan di MPP sebanyak 105 Jenis layanan.

Pemerintah Kota Tasikmalaya telah memiliki regulasi terkait kemudahan penanaman modal yaitu dengan telah terbitnya Perda Kota Tasikmalaya No. 6 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

### 6. Kualitas Sumberdaya Manusia

Kualitas sumberdaya manusia di Kota Tasikmalaya masih cukup rendah dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan yang didominasi oleh tamatan Sekolah Dasar dengan persentase sebesar 39,39 persen, Sekolah Menengah Pertama sebesar 21,08 persen, Sekolah Menengah Atas sebesar 31,60 persen, dan Perguruan Tinggi sebesar 7,92 persen pada Tahun 2021. Namun demikian terdapat kenaikan pada jumlah penduduk yang lulus pada tingkat Perguruan Tinggi setiap tahunnya. Untuk meningkatkan kapasitas calon tenaga kerja, Pemerintah Kota Tasikmalaya memberikan pelatihan baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan

Lembaga Pendidikan dan Latihan (LPK) yang berjumlah 58 LPK. Kualitas Sumber Daya Manusia.

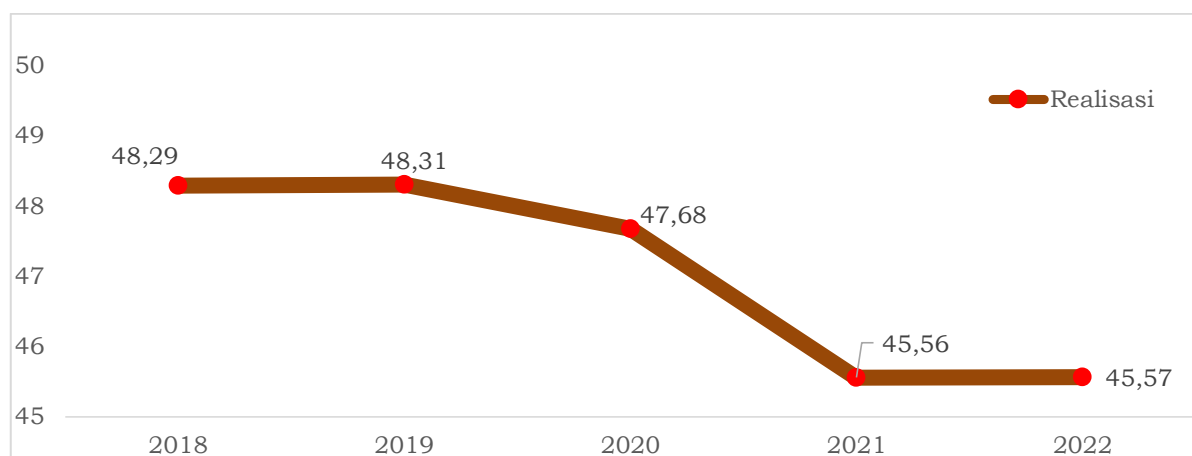
#### 2.1.4.4. Kualitas Sumber Daya Manusia

##### 1. Tingkat Ketergantungan

Tingkat ketergantungan penduduk ditunjukkan dengan angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*). Angka ini menggambarkan berapa besarnya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk usia non produktif. Selain itu, angka ini dijadikan pula sebagai indikator yang dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah, apakah tergolong daerah maju atau sedang berkembang.

Angka Beban Ketergantungan penduduk di Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 sebesar 45,57. Hal ini berarti, bahwa dari 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 45 penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas). Angka ini menyatakan bahwa masih banyak penduduk usia tidak produktif yang ditanggung penduduk usia produktif. Semakin besar angka beban ketergantungan, maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif.

Gambar 2.47.  
Angka Beban Ketergantungan (Dependency Ratio)  
Kota Tasikmalaya 2018-2022



Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2023.

2.2. Evaluasi RKPD TAHUN 2022

Tabel 2.129.  
Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah  
Tahun 2022

No.	Perangkat Daerah	Jumlah			Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (%)		Predikat Kinerja	Predikat Anggaran
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Kinerja	Anggaran (Rp.)		
1	Dinas Pendidikan	6	18	102	624.298.964.564	588.621.737.811	98,02	94,29	ST	ST
2	Dinas Kesehatan	7	73	153	401.225.297.153	380.070.230.147	99,89	94,73	ST	ST
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	12	27	80	278.697.192.471	251.321.256.337	83,33	90,18	T	ST
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4	14	45	19.668.232.698	19.138.262.634	100,00	97,31	ST	ST
5	Satuan Polisi Pamong Praja	2	12	39	13.339.631.794	13.250.318.633	115,58	99,33	ST	ST
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	13	62	8.847.995.209	8.623.618.000	99,07	97,46	ST	ST
7	Dinas Sosial	6	16	51	26.414.445.012	26.275.127.504	98,15	99,47	ST	ST
8	Dinas Tenaga Kerja	6	17	47	7.076.324.837	6.900.532.006	81,11	97,52	T	ST
9	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	14	32	78	41.859.090.718	41.121.272.290	100,00	98,24	ST	ST
10	Dinas Lingkungan Hidup	9	20	51	37.018.512.546	36.633.164.499	99,34	98,96	ST	ST
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	14	44	10.342.821.434	10.220.653.366	100,00	98,82	ST	ST

No.	Perangkat Daerah	Jumlah			Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (%)		Predikat Kinerja	Predikat Anggaran
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Kinerja	Anggaran (Rp.)		
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9	23	65	17.229.769.498	15.112.564.701	96,17	87,71	ST	T
13	Dinas Perhubungan	2	19	66	45.923.556.600	45.355.594.640	90,58	98,76	ST	ST
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	15	50	17.718.072.340	17.609.623.104	100,00	99,39	ST	ST
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	18	36	93	25.068.082.360	23.252.896.542	105,93	92,76	ST	ST
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	15	58	8.372.817.183	7.882.801.146	95,09	94,15	ST	ST
17	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	10	26	56	25.838.854.380	25.534.954.053	100,00	98,82	ST	ST
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	15	49	6.532.867.266	6.417.505.653	99,82	98,23	ST	ST
19	Sekretariat Daerah	3	20	78	85.212.236.054	83.797.661.678	106,09	98,34	ST	ST
20	Sekretariat Dprd	2	18	65	71.341.284.280	68.848.744.861	97,89	96,51	ST	ST

No.	Perangkat Daerah	Jumlah			Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (%)		Predikat Kinerja	Predikat Anggaran
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Kinerja	Anggaran (Rp.)		
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	19	76	14.938.004.685	13.879.067.227	98,96	92,91	ST	ST
22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	13	74	29.400.275.428	26.603.469.058	99,90	90,49	ST	ST
23	Badan Pendapatan Daerah	2	14	55	26.223.459.520	24.264.367.992	98,76	92,53	ST	ST
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	14	49	16.849.317.342	16.197.441.263	115,78	96,13	ST	ST
25	Inspektorat	3	12	44	15.814.046.043	15.570.245.257	98,89	98,46	ST	ST
26	Kecamatan Cihideung	6	27	89	9.784.523.538	9.722.039.200	99,91	99,36	ST	ST
27	Kecamatan Cipedes	7	26	80	9.551.694.791	9.454.939.536	93,77	98,99	ST	ST
28	Kecamatan Tawang	6	25	81	9.276.475.636	9.222.485.231	100,00	99,42	ST	ST
29	Kecamatan Indihiang	6	28	96	10.522.254.522	10.432.384.706	98,82	99,15	ST	ST
30	Kecamatan Kawalu	6	35	128	14.090.716.464	13.994.098.546	99,98	99,31	ST	ST
31	Kecamatan Cibeureum	5	31	118	14.085.002.534	14.010.174.157	100,00	99,47	ST	ST
32	Kecamatan Tamansari	6	31	110	12.224.060.859	12.158.300.030	99,94	99,46	ST	ST
33	Kecamatan Mangkubumi	6	32	109	12.438.868.085	11.929.341.559	100,00	95,90	ST	ST
34	Kecamatan Bungursari	5	29	102	12.503.879.118	12.426.496.601	100,00	99,38	ST	ST
35	Kecamatan Purbaratu	5	27	91	10.188.123.936	10.130.306.627	100,00	99,43	ST	ST
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	14	49	13.515.884.312	11.925.278.284	100,00	88,23	ST	T

No.	Perangkat Daerah	Jumlah			Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (%)		Predikat Kinerja	Predikat Anggaran
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Kinerja	Anggaran (Rp.)		
	<i>JUMLAH</i>	211	820	2683	2.003.432.635.210	1.897.908.954.879	99,19	94,73	ST	ST

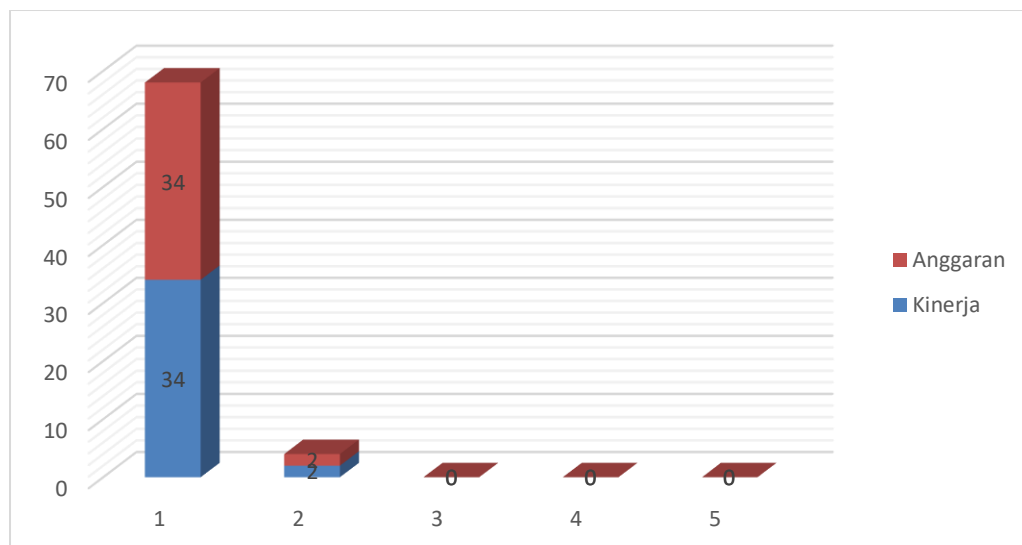
Keterangan : ST = Sangat Tinggi, T = Tinggi, S = Sedang, R = Rendah, SR = Sangat Rendah.

Sumber: *Evaluasi RKPD Tahun 2022, Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2023.*



Rata-rata Realisasi kinerja dan keuangan perangkat daerah di Kota Tasikmalaya dalam predikat sangat tinggi untuk kinerja dan keuangan. Capaian ini mendekati target, dimana capaian kinerja sebesar 99,19% dan capaian keuangan sebesar 93,24%. Adapun sebaran Capaian predikat perangkat daerah dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.48  
Predikat Kinerja dan Keuangan



Sumber: *Evaluasi RKPD Tahun 2022, Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2023*

Berdasarkan grafik tersebut, untuk capaian Anggaran/Keuangan sebanyak 34 PD berpredikat Sangat Tinggi dan 2 PD berpredikat Tinggi. Adapun untuk capaian Kinerja sebanyak 34 PD berpredikat Sangat Tinggi dan 2 PD dengan predikat Tinggi.

Untuk rincian realisasi kinerja dan anggaran masing-masing program dalam RKPD dapat dilihat sebagai berikut.



Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DINAS KESEHATAN								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	81	Kategori (A)	307.078.528.20 5		297.287.313.0 16	100,00	96,81
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar		100%	87.821.407.939		76.498.177.81 7	98,93	87,11
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Prosentase tenaga kesehatan yang tersertifikasi		55%	4.345.569.463		4.342.363.746	100,52	99,93
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Prosentasi ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman		100%	336.300.000		321.926.718	100	95,73
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Prosentase Rumah Tangga ber-PHBS		42%	1.643.491.546		1.620.448.850	99,99	98,60
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	81	Kategori A	13.634.374.811	0	13.446.666.25 8	0	98,62

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase sumber daya air dalam kondisi baik	35,53	%	51.345.957.946	17.873	46.636.757.705	100	90,83
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase KK/RT berakses layanan air minum	56,07	%	10.023.830.014	32	9.732.769.543	100	97,10
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase KK/RT yang berakses SPALD	61,59	%	9.585.053.000	1.243	9.502.175.643	100	99,14
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	15,53		32.154.680.000	6	29.203.685.427	100	90,82
Program Pengembangan Permukiman	Prosentase Infrastruktur Lingkungan dalam Kondisi Baik	64,07	%	75.441.490.000	100	75.107.699.156	100	99,56
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung yang ditangani (jumlah bangunan gedung yang ditangani / jumlah total bangunan gedung yang menjadi kewajiban pemda * 100)	26,32	%	36.562.760.500	448	31.786.497.672	100,00	86,94





Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		152		6.071.085.109	152	5.936.242.669	100,00	97,78
Program Penanggulangan Bencana		442		2.004.885.100	442	1.928.544.931	100,00	96,19
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		12		772.025.000	12	758.830.400	100,00	98,29
DINAS SOSIAL								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		686		7.238.147.505	686	7.134.630.495	800	756
Program Pemberdayaan Sosial		120		2.355.000.000	120	2.338.626.274	100	99
Program Rehabilitasi Sosial		13776		9.596.114.000	13.776	9.578.671.937	200	200
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial		80904		6.197.883.407	80.904	6.197.392.350	100	100
Program Penanganan Bencana		1380		302.806.000	1.380	302.719.100	200	200

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		2		724.494.100	2	723.087.348	100	100
DINAS TENAGA KERJA								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian IKM perangkat daerah;	79	Baik	5.037.074.837	-	4.942.608.221	0	98
	Capaian SAKIP perangkat daerah;	76	BB		76		100,5	
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi;	100	%	1.418.000.000	100	1.354.763.620	100	96
	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat;	100	%		100		100,00	
	Jumlah wirausaha baru sektor ketenagakerjaan;	100	%		100		100,00	
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	44,3	%	321.250.000	27	309.651.050	61	96



Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB);	78	%	300.000.000	72	293.509.115	92	98
	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB);	100	%		117		117	
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1) Capaian SAKIP A (81,00) ; 2) Capaian IKM Perangkat Daerah Baik (85).	268		15.016.691.102	267	14.933.986.35 2	100,00	99,05
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang dibangun melalui poenyusunan Dokumen FS (1 Dokumen)	1		50.000.000	1	49.441.250	100,00	98,88
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1) % Angka Kecukupan Energi (AKE); 2) %	442		820.000.000	289	801.284.095	100,00	94,05

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Angka Kecukupan Protein (AKP) - (100%)							
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kelurahan rentan rawan pangan yang ditangani (50%) - (51%)	520		40.000.000	520	39.830.500	100,00	99,58
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (79%) - (80%)	4		10.000.000	4	9.862.100	100,00	98,62
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1) Jumlah RTS Miskin Perikanan yang dibina (Orang); 2) Jumlah Wirausaha Baru Sektor Perikanan (Orang); 3) Capaian produksi Perikanan Budidaya (Ton); 4) Tingkat pengembangan kawasan budidaya air tawar (%)	428		5.098.400.000	416	5.018.544.292	100,00	98,68
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Capaian Produksi Produk Hasil Perikanan 197 - 199 (Ton)	15		1.383.100.000	15	1.331.351.194	100,00	98,00

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1) Cakupan bina kelompok tani (Orang); 2) Jumlah RTS Miskin Pertanian yang dibina (Orang); 6) Jumlah Wirausaha Baru Sektor Pertanian (Orang)	491		14.289.015.263	491	13.851.703.665	100,00	93,87
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1) Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (Kw/Ha); 2) Capaian produksi hasil peternakan (Ton); 3) Jumlah Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen)	1.014		2.385.000.000	1.014	2.353.829.640	100,00	94,62
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1) Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (%); 2) Jumlah Laporan hasil pengawasan peredaran hewan dan produk hewan (Dokumen).	199		2.198.484.353	199	2.178.721.897	100,00	98,31

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah Laporan pengendalian OPT dan Dampak Perubahan Iklim (Dokumen)	4		80.000.000	4	76.544.800	100,00	95,68
Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah gapoktan yang dibina (Gapoktan)	128		488.400.000	140	476.172.505	100,00	98,02
DINAS LINGKUNGAN HIDUP								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	81	Kategori (poin)	16.978.415.596	71,66	16.853.702.006	88,47	99,27
	Capaian IKM Perangkat Daerah	89	Kategori (poin)	8.000.000	88,58	7.790.000	99,53	97,38
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Hidup	100	%	231.000.000	60,00	221.220.900	100,00	95,77
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Tercapainya Indeks Kualitas Air	53,6	Kategori (poin)	308.630.000	35	299.674.760	65,91	97,10
	Tercapainya Indeks Kualitas Udara	79,6	Kategori (poin)		82		100,00	
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Capaian Luas RTH yang dikelola	100	%	3.560.400.000	100	3.446.278.358	100,00	96,79

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Capaian tersedianya Dokumen Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati	100	%	109.700.000	100	109.362.900	100,00	99,69
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Capaian Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan Penanggung jawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Daerah	100	%	27.500.000	100,00	27.313.040	100,00	99,32
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Capaian Pelatihan, Penyuluhan, dan Kampanye Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100	%	30.000.000	100	29.828.250	100,00	99,43
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Kelompok Masyarakat yang memperoleh Penghargaan	50	%	25.000.000	100	24.899.236	100,00	99,60
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100	%	19.000.000	100	18.592.220	100,00	97,85

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah	83,45	%	11.014.423.375	81,77	10.925.877.110	97,99	99,20
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah di TPA	100	%	4.706.443.575	100	4.668.625.719	100,00	99,20
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	80	%	9.638.664.634	63,88	9.517.956.116	100,00	98,75
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	80	%	297.771.200	100,00	296.938.265	100,00	99,72
Program Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan akta pencatatan sipil	80	%	185.000.000	100,00	184.970.600	100,00	99,98
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan	80	%	221.385.600	100,00	220.788.385	100,00	99,73
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
				17.229.769.498	-	15.112.564.701	96,17	87,71

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana				15.739.329.498	-	13.640.221.936	91,38	86,66
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				5.628.811.498	139	5.450.773.541	99,93	96,84
Program Pengendalian Penduduk				180.305.000	218.590	131.232.572	73,00	72,78
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)				4.545.432.000	2.052	4.157.021.829	99,25	91,45
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)				5.384.781.000	185	3.901.193.994	93,33	72,45
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak				1.490.440.000	1.084	1.472.342.765	100,00	98,79
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan				173.640.000	-	166.269.900	100,00	95,76
Program Perlindungan Perempuan				70.000.000	24	69.689.997	100,00	99,56
Program Peningkatan Kualitas Keluarga				852.280.000	1.030	846.687.030	100,00	99,34
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)				243.760.000	14	239.428.549	100,00	98,22

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Perlindungan Khusus Anak				150.760.000	16	150.267.289	100,00	99,67
DINAS PERHUBUNGAN								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya IKM Perangkat Daerah	Kategori / Nilai	79	22.500.000	79	22.500.000	100,00	100,00
	Tercapainya SAKIP Perangkat Daerah	Kategori / Nilai	82,75/A	38.570.840.300	82,11	38.340.803.110		99,40
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan	%	51,96	6.175.669.800	55,36	5.850.124.417	106,54	94,73
	Persentase pelayanan andalalin	%	100	13.500.000	140,00	13.452.000	140,00	99,64
	Persentase pelayanan angkutan umum	%	100	811.467.500	82,25	808.039.232	82,25	99,58
	Persentase Pemenuhan Standar Keselamatan Angkutan	%	85,91	329.579.000	110,58	320.675.881	128,71	97,30
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								





Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	76	(BB) Kategori	11.746.115.764	77	11.382.310.61 2	101,62	96,90
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif yang diawasi dan/atau diperiksa	13,5	%	110.500.000	33	110.467.441	242,86	99,97
Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase KSP/USP Koperasi sehat	24	%	100.000.000	34	99.938.500	141,67	99,94
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM koperasi yang kompeten	10	%	202.100.000	10	201.686.400	101,60	99,80
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi aktif yang dibina	100	%	155.000.000	100	155.000.000	100,00	100,00
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase pemberdayaan usaha mikro	65	%	155.163.646	65,00	154.822.825	100,00	99,78
	Jumlah masyarakat miskin yang dibina pada sektor jasa	100	Orang		100		100,00	
Program Pengembangan Umkm	Persentase wirausaha baru sektor perdagangan	65	%	407.250.000	65	406.055.243	100,00	99,71

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase fasilitasi pemenuhan perizinan dan pendaftaran perusahaan	100	%	25.000.000	100	24.575.070	100,00	98,30
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar rakyat dalam kondisi baik	80	%	3.900.097.950	80	3.852.086.373	100,00	98,77
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil	72	%	1.190.000.000	72	189.626.920	100,00	15,94
Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan pelaku usaha yang berorientasi ekspor	3	%	480.000.000	3	465.485.722	100,00	96,98
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UTTP yang bertera sah	88	%	488.750.000	151,21	483.981.097	171,83	99,02
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan penggunaan produk unggulan Kota Tasikmalaya	76	%	400.000.000	76	398.132.405	100,00	99,53
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase capaian sasaran rencana pembangunan industri	5	%	5.703.105.000	-	5.323.727.934	0,00	93,35
	Jumlah wirausaha baru sektor industri	325	Orang		325		100,00	

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah masyarakat miskin yang dibina pada sektor industri	100	Orang		150		150,00	
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang terdaftar di sistem informasi industri nasional	30	%	5.000.000	2	5.000.000	6,67	100,00
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU								
Program Penunjang Urusanpemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah			6.412.243.533	-	6.097.478.834	-	95,09
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase realisasi RUPM Kota Tasikmalaya	1	Unit	-		-	0,00	0,00
Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	1	Kali	266.436.000		262.192.680	0,00	98,41
Program Pelayanan Penanaman Modal	Capaian penerbitan perijinan terpadu tepat waktu sesuai SOP	4.672	Dokumen	1.273.366.386		1.115.889.932	0,00	87,63
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	8	Dokumen	369.695.000		359.648.000	200,00	97,28

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Perijinan sesuai SOP	1, 1	Basis Data, Buah	51.076.264		47.591.700	0,00	93,18
DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	75 (BB)	Kategori	6.235.668.380		6.130.255.209		98,31
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda / OKP yang dibina	30	%	2.488.970.000	30	2.480.829.540	100,00	99,67
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi	75	%	11.272.120.000	75	11.217.565.560	100,00	99,52
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase pembinaan dan pengembangan seni budaya	20	%	1.137.095.000	20	1.133.178.922	100,00	99,66
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Kebudayaan	61	%	75.000.000	61	74.657.400	100,00	99,54
Program Pembinaan Sejarah	Persentase sejarah lokal yang dilestarikan	0	%	-	-	-	0	0,00

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	40	%	200.000.000	40	199.537.750	100,00	99,77
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	55	%	403.311.421	55	374.580.297	100,00	92,88
Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisata	589.000	Orang	631.337.000	589.000	590.366.925	100,00	93,51
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang terampil	21	%	3.395.352.579	21	3.333.982.450	100,00	98,19
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian IKM perangkat daerah	83	Poin (Baik)	5.083.408.266	83,69	5.013.322.229	100,83	98,62
	Capaian SAKIP Perangkat daerah	76	Poin (BB) (Kategori)		77,06		101,39	
Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	17	%	1.054.229.000	51,39	1.036.806.137	302,31	98,35
	Persentase pembinaan perpustakaan	5,53	%		5,53		100,00	
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase naskah kuno yang dilestarikan	50	%	24.356.000	50	24.136.350	100,00	99,10

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pengelolaan Arsip	Kenaikan Nilai Monitoring Tindak lanjut Hasil Pengawasan (MTLHP) Eksternal	2	Poin	370.874.000	32,47	343.240.937	1623,50	92,55
	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai pengawasan kearsipan internal minimal kategori cukup	70,27	%		55,56		79,06	
SEKRETARIAT DAERAH								
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	BB (75)	Kategori	26.745.515.056	-	26.052.284.208	156	97
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian IKM Perangkat Daerah	77-88 (Baik)	Kategori	21.068.263.264	-	20.824.003.184	94	99
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja Baik	100	%	4.022.170.584	-	4.021.298.478	100,00	100,00
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Implementasi Koordinasi dan Kebijakan Pemerintahan	100	%	665.279.480	-	654.448.260	100,00	98





Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		1.115.48 7		48.603.616.148	1.120.3 71	47.488.089.63 4	97,43	97,70
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd		134		22.737.668.132	356	21.360.655.22 7	98,34	93,94
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	84		11.396.204.685	83,36	10.913.700.74 1	99,24	95,77
	Capaian IKM Perangkat Daerah	88		-	85,25	-	96,88	
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Prosentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	100		1.415.000.000	100	1.233.515.286	100,00	87,17
	Prosentase keselarasan Rencana Kerja terhadap RKPD	100			100		100,00	
	Persentase aspirasi masyarakat yang	35						

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	terakomodir dalam dokumen perencanaan							
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase keselarasan Rencana Kerja terhadap RKPD lingkup Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	100		1.226.800.000	100	953.583.171	100,00	77,73
	Persentase rata-rata capaian kinerja perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	95			-		-	-
	Prosentase keselarasan Rencana Kerja terhadap RKPD lingkup Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Kewilyahan	100			100		100,00	-
	Persentase rata-rata capaian kinerja perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian dan	95			-		-	-

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Infrastruktur Kewilyahan							
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan	100		900.000.000	1	778.268.029	100%	86,47
	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100						
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian IKM Perangkat Daerah	88	Baik	12.778.785.009, 00	88,59	12.524.941.19 0,00	100,67	98,01
	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	84	A		84,26		100,31	
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan APBD Tepat Waktu	100	%	10.076.374.169, 00	100	7.835.418.412, 00	100,00	77,76
	Persentase realisasi belanja terhadap target	95	%		92,09		96,94	

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	belanja yang telah ditetapkan							
	Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah sesuai SAP	100	%		100		100,00	
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase inventarisasi aset milik daerah	100	%	6.545.116.250,00	100	6.243.109.456,00	100,00	95,39
BADAN PENDAPATAN DAERAH								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		117,11		20.971.484.015	1,89	19.364.480.057	99,31	92,34
	1. Capaian Sakip Perangkat Daerah	A	Kategori					
	2. Capaian IKM Perangkat Daerah	Sangat Baik (88,31)	Kategori (point)					
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				5.251.975.505		4.899.887.935	100	93,30



Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah Capaian IKM perangkat daerah	81 91	A Sangat Baik	10.748.607.342		10.379.485.97 8	96,88	96,57
Program Kepegawaian Daerah	Persentase implementasi SIMPEG Persentase pengadaan ASN sesuai formasi Persentase capaian pembinaan disiplin aparatur Jumlah aparatur yang memenuhi kompetensi jabatan Persentase capaian pelayanan kepegawaian	8010010 0583010 0	Orang%	4.396.310.000		4.114.266.659	163,72	93,58
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase capaian pendidikan dan pelatihan aparatur	100	%	1.704.400.000		1.703.688.626	101,56	99,96
INSPEKTORAT DAERAH								
	Nilai SAKIP Itda	A (85)	Kategori		347,00			98,77

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Skor IKM Itda	77 - 88 (Baik)	Kategori	13.272.703.045		13.109.572.58 1,00		
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan	77	%	1.682.369.100		1.661.397.191		98,75
	Nilai SAKIP Kota	71	Point					
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100	%					
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100	%	858.973.898		799.275.485		93,05
	Skor PMPRB Kota	75	Point					
	Indeks Persepsi Korupsi Hasil Survey Eksternal	3,5	Point					
	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Predikat WBK/WBBM	5	Unit					
	Persentase Kapatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur	100	%					

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Level Maturitas SPIP Kota	3	Level					
KECAMATAN CIHIDEUNG								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat	83	Katagori A	6.849.148.538	99,80	6.820.835.833	99,54	99,59
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	Sangat Baik	79.475.000	100,00	79.075.000	100,00	99,50
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan	90	%	2.761.300.000	100,00	2.735.663.692	100,00	99,07
Kelurahan Yudanegara				320.240.000		311.401.980	100,00	97,24
Kelurahan Argasari				449.940.000		440.900.350	100,00	97,99
Kelurahan Cilembang				518.040.000		517.018.673	100,00	99,80
Kelurahan Nagarawangi				360.740.000		359.782.129	100,00	99,73
Kelurahan Tuguraja				606.640.000		601.204.251	100,00	99,10



Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kelurahan Tugujaya				489.700.000		489.356.309	100,00	99,93
Kecamatan Cihideung								
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Cihideung	100	%	60.600.000	100,00	52.464.875	100,00	86,58
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase capaian pengawasan wawasan kebangsaan Kec Cihideung			34.000.000	100,00	33.999.800	100,00	100,00
KECAMATAN CIPEDES								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase IKM perangkat daerah dengan predikat baik			6.158.204.791	1.532	6.132.568.383	108,99	151,16
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			682.617.000	21	653.201.778	100,00	95,69

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Cipedes			14.000.000	3	13.840.000	100	98,86
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kec. Cipedes			39.413.000	40	37.081.000	100,00	94,08
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan keagamaan Kec. Cipedes			236.000.000	4	234.735.000	100,00	99,46
Kelurahan Panglayungan				580.940.000	7	574.350.125	66,67	4.957,0 1
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Cipedes	90%		580.940.000	7	574.350.125	66,67	4.957,0 1
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				-	-	-	-	-
Kelurahan Cipedes				501.940.000	246	497.389.636	66,67	66,33



Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KECAMATAN TAWANG								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Capaian IKM Perangkat Daerah	A (83,00) Sangat Baik (93,25)	Point	6.577.435.636	-	6.535.647.052	100,00	99,36
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik (93,25)	Point	135.940.000	-	135.498.800	100,00	99,68
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Tawang	95%		5.000.000	-	4.550.000	100,00	91,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kec. Tawang	100%		38.000.000	-	37.995.000	100,00	99,99
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan keagamaan Kec. Tawang	100%		19.000.000	-	17.500.000	100,00	92,11
Kelurahan Tawangsari				348.740.000	-	346.697.501	100,00	99,41
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan	95%		348.740.000	-	346.697.501	100,00	99,41

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	masyarakat kelurahan Kec. Tawang							
Kelurahan Empangsari				363.240.000	-	362.751.750	100,00	99,87
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Tawang	95%		363.240.000	-	362.751.750	100,00	99,87
Kelurahan Lengkongsari				534.440.000	-	532.003.047	100,00	99,54
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Tawang	95%		534.440.000	-	532.003.047	100,00	99,54
Kelurahan Cikalang				521.840.000	-	520.740.025	100,00	99,79
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Tawang	95%		521.840.000	-	520.740.025	100,00	99,79
Kelurahan Kahuripan				732.840.000	-	729.102.056	100,00	99,49

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Tawang	95%		732.840.000	-	729.102.056	100,00	99,49
KECAMATAN INDIHIANG								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Capaian IKM Perangkat Daerah	A (83,00) Sangat Baik (89,50)	Point	7.315.550.682	-	7.264.400.562	98,89	99,30
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik (89,50)	Point	393.878.400	-	391.134.800	100,00	99,30
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Indihiang	95%		10.000.000	-	9.999.800	100,00	100,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kec. Indihiang	100%		53.240.000	-	46.343.000	100,00	87,05
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan	100%		54.845.440	-	48.694.850	100,00	88,79

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	keagamaan Kec. Indihiang							
Kelurahan Indihiang								
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Indihiang	95%		412.940.000	-	402.511.533	100,00	97,07
Kelurahan Sirnagalih				366.840.000	-	365.048.325	100,00	99,68
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Indihiang	95%		366.840.000	-	365.048.325	100,00	99,68
Kelurahan Parakannyasag				494.040.000	-	492.928.016	100,00	99,77
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Indihiang	95%		494.040.000	-	492.928.016	100,00	99,77
Kelurahan Panyingkiran				400.140.000	-	397.737.860	100,00	99,60
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan	95%		400.140.000	-	397.737.860	100,00	99,60

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	masyarakat kelurahan Kec. Indihiang							
Kelurahan Sukamajukaler				536.940.000	-	533.621.980	100,00	97,43
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Indihiang	95%		536.940.000	-	533.621.980	100,00	97,43
Kelurahan Sukamajukidul				483.840.000	-	479.963.980	100,00	99,57
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Indihiang	95%		483.840.000	-	479.963.980	100,00	99,57
KECAMATAN KAWALU								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	CAPAIAN SAKIP PERANGKAT DAERAH	13.081		9.672.731.764	13.077	9.638.048.213	99,97	99,64
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Indeks Kepuasan Kategori Masyarakat (IKM)	181		443.450.500	181	437.736.240	100,00	98,71



Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		90		69.250.000	90	65.954.500	100,00	95,24
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kec. Kawalu	12		17.492.000	12	17.306.000	100,00	98,94
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan keagamaan	69		86.092.200	69	84.658.350	100,00	98,33
Kelurahan Cilamajang				343.740.000		192.776.327		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Kelurahan	688		343.740.000	688	343.201.504	100,00	99,84
Kelurahan Gunung Tandala				416.840.000				
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Kelurahan	1046		416.840.000	1.046	411.498.372	100,00	98,72
Kelurahan Urug				453.440.000				

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Kelurahan	806		453.440.000	806	447.626.830	100,00	98,72
Kelurahan Tanjung				333.540.000				
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Kelurahan	578		333.540.000	578	330.485.000	100,00	99,08
Kelurahan Cibutei				377.640.000				
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Kelurahan	772		377.640.000	772	374.766.500	100,00	99,24
Kelurahan Karanganyar				385.840.000		58.571.525		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Kelurahan	784		385.840.000	784	382.078.975	100,00	99,03
Kelurahan Talagasari				312.240.000				
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Kelurahan	459		312.240.000	459	302.087.470	100,00	96,75

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kelurahan Leuwiliang				330.340.000				
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Kelurahan	342		330.340.000	342	321.597.103	100,00	97,35
Kelurahan Gunung Gede				377.240.000		77.006.750		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Kelurahan	818		377.240.000	817	372.251.290	99,88	98,68
Kelurahan Karsamenak				470.840.000		282.496.615		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Kelurahan	1490		470.840.000	1490	464.802.199	100,00	98,72
KECAMATAN CIBEUREUM								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	82,00	%	9.779.596.234,0 0	99,84	9.743.058.145	100,00	99,63

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85.50	Katagori	799.804.000,00	112,85	798.092.265	100,00	99,79
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	136		3.380.955.000	94,26	3.345.577.747	100,00	98,95
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertban Umum	10		70.643.000	10	70.099.800	100,00	99,23
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase capaian kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan	100	%	54.004.300	6	53.633.200	100,00	99,31
KECAMATAN TAMANSARI								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				7.903.880.859	-	7.878.288.939	100	100
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		20		983.746.050	20	980.084.850	100	99,63
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				18.000.000	1	17.447.500	100	96,93

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				46.513.950	-	46.500.500	100	99,97
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				45.000.000	1	43.685.550	100	97,08
Kelurahan Tamansari				456.740.000		453.320.302		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				456.740.000	-	453.320.302	100	99,25
Kelurahan Mugarsari				323.540.000		319.162.371		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				323.540.000	-	319.162.371	100	98,65
Kelurahan Tamanjaya				416.040.000				
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				416.040.000	-	411.338.698	100	98,87
Kelurahan Sumelap				320.440.000		311.522.323		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				320.440.000	-	311.522.323	100	97,22
Kelurahan Setiawargi				538.240.000		535.020.608		

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				538.240.000	-	535.020.608	100	99,40
Kelurahan Mulyasari				456.640.000		451.732.662		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				456.640.000	-	451.732.662	50	98,93
Kelurahan Sukahurip				354.740.000		353.881.834		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				354.740.000	-	353.881.834	100	99,76
Kelurahan Setiamulya				360.540.000		356.313.893		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				360.540.000	-	356.313.893	100	98,83
KECAMATAN MANGKUBUMI								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase IKM perangkat daerah dengan predikat baik	A (81) 93,25%	Point	8.635.900.385	13.067	8.597.845.594	100,00	99,56

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93,25%	Point	282.353.500	30	275.492.740	100,00	97,57
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Mangkubumi	38		30.000.000	38	29.855.790	100,00	99,52
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum Kec. Mangkubumi	51		52.500.000	51	52.387.200	100,00	99,79
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan keagamaan Kec. Mangkubumi	14		82.994.200	12	71.727.720	100,00	86,42
Kelurahan Mangkubumi		157		471.040.000	157	466.910.348	100,00	99,12
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Mangkubumi	157		471.040.000	157	466.910.348	100,00	99,12
Kelurahan Cigantang		135		404.140.000	135	397.595.803	100,00	98,38

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Mangkubumi	135		404.140.000	135	397.595.803	100,00	98,38
Kelurahan Linggajaya		187		540.440.000	187	125.796.800	100,00	23,28
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Mangkubumi	187		540.440.000	187	539.560.088	100,00	99,84
Kelurahan Karikil		156		387.040.000	156	383.300.907	100,00	99,03
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Mangkubumi	156		387.040.000	156	383.300.907	100,00	99,03
Kelurahan Cipawitra		142		365.540.000	142	364.191.153	100,00	99,63
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Mangkubumi	142		365.540.000	142	364.191.153	100,00	99,63
Kelurahan Sambongpari		125		346.140.000	125	327.899.148	100,00	94,73



Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Mangkubumi	125		346.140.000	125	327.899.148	100,00	94,73
Kelurahan Sambongjaya		167		442.740.000	167	442.046.690	100,00	99,84
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Mangkubumi	167		442.740.000	167	442.046.690	100,00	99,84
Kelurahan Cipari		147		398.040.000	147	394.291.666	100,00	99,06
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Mangkubumi	147		398.040.000	147	394.291.666	100,00	99,06
KECAMATAN BUNGURSARI								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Persentase IKM perangkat daerah dengan predikat baik	A (80) 95%	Point	8.469.489.118	-	8.424.359.772	100,00	99,47

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		%	1.001.649.000	-	994.358.200	100,00	99,27
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Bungursari		%	25.000.000	1	24.999.900	100,00	100,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kec. Bungursari	100	%	43.861.000	-	43.856.750	100,00	99,99
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan keagamaan Kec. Bungursari	100	%	73.000.000	-	72.956.800	100,00	99,94
Kelurahan Sukamulya				358.540.000		354.245.445	100,00	98,80
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Bungursari			358.540.000	4	354.245.445	100,00	98,80
Kelurahan Sukarindik				421.140.000		419.594.800	100,00	99,63

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Bungursari		%	421.140.000	1	419.594.800	100,00	99,63
Kelurahan Bungursari				390.740.000	3	387.319.930	100,00	99,12
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Bungursari		%	390.740.000	3	387.319.930	100,00	99,12
Kelurahan Sukajaya				389.140.000		383.515.678	100,00	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Bungursari		%	389.140.000	6	383.515.678	100,00	98,55
Kelurahan Cibunigeulis				444.240.000		440.979.580	100,00	99,27
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Bungursari		%	444.240.000	2	440.979.580	100,00	99,27
Kelurahan Bantarsari				464.740.000		460.459.000	100,00	99,08

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Bungursari		%	464.740.000	2	460.459.000	100,00	99,08
Kelurahan Sukalaksana				422.340.000		419.850.746	100,00	99,41
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Bungursari		%	422.340.000	-	419.850.746	100,00	99,41
KECAMATAN PURBARATU								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A (81)	Kategori	7.201.008.525	145	7.175.148.559	100,00%	99,64%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik (93.25)	Kategori	269.554.511		254.660.000	100,00%	94,47%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec.Purbaratu	90	%	2.602.061.900		2.588.669.068	100,00%	99,56%
Kelurahan Sukanagara				462.140.000		454.556.834	100,00%	98,36%

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kelurahan Sukamenak				439.940.000		438.902.482	100,00%	99,87%
Kelurahan Sukaasih				381.940.000		380.278.600	100,00%	99,60%
Kelurahan Sukajaya				411.240.000		410.257.680	100,00%	99,81%
Kelurahan Singkup				498.240.000		497.114.180	100,00%	99,61%
Kelurahan Purbaratu				380.940.000		380.170.692	100,00%	99,65%
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kec. Purbaratu	100	%	43.484.000		43.244.000	100,00%	99,45%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase capaian Tasik Bersedekah Kec. Purbaratu	100	%	72.015.000		68.585.000	100,00%	95,24%
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP perangkat daerah	71	%	3.911.612.280		3.761.007.747	100,00	96,15

Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase capaian pembinaan wawasan kebangsaan	100	%	426.789.600	-	388.222.142	100,00	90,96
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase capaian pendidikan politik	100	%	2.345.371.600	530	1.450.756.023	100,00	61,86
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang aktif	71	%	6.250.678.166	-	5.958.155.485	94,52	95,32
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	100	%	141.164.233	-	108.310.550	100,00	76,73
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan konflik sosial	100	%	440.268.433	-	258.826.337	95,73	58,79

Sumber: Evaluasi RKPD Tahun 2022, Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2023.

## 2.2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Berdasarkan uraian capaian program tersebut di atas, dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambatnya. Faktor pendorong pencapaian kinerja dan anggaran antara lain:

- 1) Kapasitas aparatur pelaksana kegiatan.
- 2) Pemanfaatan Teknologi Informasi.
- 3) Sarana dan prasarana penunjang.

Adapun faktor penghambat dalam pencapaian kinerja dan anggaran program dan kegiatan pada tahun 2022 ini adalah:

- 1) Pelaksana Pekerjaan tidak komitmen terhadap jadwal kegiatan yang telah ditetapkan.
- 2) Ketersediaan barang pada e-katalog yang tidak ada sesuai dengan kebutuhan sehingga pengadaan tidak dapat dilaksanakan.
- 3) Kurangnya pemahaman dalam proses perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan.
- 4) Banyak SDM yang juga masih belum terampil dalam mengolah data dan menyusun laporan Evaluasi Hasil Renja dan RKPD lingkup Kab/Kota.
- 5) Tahapan dan proses pencairan dana sering mengalami keterlambatan.

## 2.3. Kendala yang dihadapi

Tingkat capaian kinerja dan keuangan yang dicapai pada Tahun 2022, tidak terlepas dari faktor pendorong dan faktor penghambat/kendala yang dihadapi. Adapun faktor penghambat atau kendala yang dihadapi antara lain:

1. Adanya refocusing dan realokasi anggaran dalam rangka penanganan akibat inflasi;
2. Adanya perubahan kebijakan Bantuan Keuangan Provinsi mengalami perubahan sehingga harus direncanakan kembali kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi tersebut;
3. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
4. Ketersediaan barang pada e-katalog yang tidak ada sesuai dengan kebutuhan sehingga pengadaan tidak dapat dilaksanakan.

## 2.4. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang dijadikan ukuran pencapaian pelaksanaan pembangunan. Berikut capaian IKU Kota Tasikmalaya pada tahun 2022.

Tabel 2.131.  
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Tahun 2022		KET
		Target	Realisasi	
Misi 1: Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal				
T1 : Terwujudnya tata nilai kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius	Capaian implementasi tata nilai kehidupan masyarakat yang religius (%)	87	87	Sekretariat Daerah

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Tahun 2022		KET
		Target	Realisasi	
S1 : Meningkatnya kerukunan dan karakter masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	Jumlah isu/potensi konflik SARA (kasus) yang ditangani	0	0	Badan Kesbangpol
P1 : Program Magrib Mengaji	Persentase jumlah siswa jenjang pendidikan dasar yang mengikuti Program Magrib Mengaji (%)	90	90	Sekretariat Daerah
P2 : Program Tasik Berkarakter	Persentase siswa jenjang pendidikan dasar yang mengikuti pendidikan karakter (%)	100	100	Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan
	Persentase masyarakat yang mengikuti kegiatan berwawasan kebangsaan (%)	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan hari besar keagamaan (%)	75	75	Sekretariat Daerah
T2 : Terwujudnya pelestarian kebudayaan daerah	Persentase budaya daerah yang dilestarikan (%)	61	63,77	Dinas Porabudpar
S2 : Meningkatnya apresiasi terhadap kesenian dan kebudayaan daerah	Persentase kelompok seni budaya aktif (%)	80	80,92	Dinas Porabudpar
P3 : Program Tasik Berbudaya	Cakupan pembinaan seni dan budaya daerah (%)	61	63,77	Dinas Porabudpar
	Persentase pagelaran kesenian dan kebudayaan daerah tingkat kota (%)	100	100	Dinas Porabudpar
Misi 2: Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat				
T3 : Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Angka Kemiskinan (%)	11,50	12,72	BPS
S3 : Meningkatnya perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Penanganan PMKS (%)	89,51	83,00	Dinsos



Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Tahun 2022		KET
		Target	Realisasi	
	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	100	100	Dinsos
P4 : Program Jaminan dan Perlindungan Sosial Masyarakat	Persentase rumah tangga miskin yang terlayani	100	100	Dinas Sosial
P5 : Program Tasik Bersedekah	Jumlah sedekah yang terkumpul (milyar rupiah)	3,4	3,5	Sekretariat Daerah
P6 : Program Gema Madani (Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing dan Inovatif)	Jumlah sasaran penerima Program Gema Madani (kelompok/orang )	5.000	1.386	Sekretariat Daerah
P7 : Program Peningkatan Pendapatan Keluarga Berbasis Komunitas (P3KK)	Jumlah keluarga miskin yang mendapat program P3KK	600	435	Dinas KUMKM dan Perindag (200),
				Dinas Sosial (100),
				DKP3 (300)
T4 : Memperkuat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,00	5.01	BPS Kota Tasikmalaya
	PDRB a.d.h Berlaku (triliun rupiah)	23,61	24,97	BPS Kota Tasikmalaya
	PDRB Perkapita a.d.h Berlaku (juta rupiah)	31,04	34,05	BPS Kota Tasikmalaya
	Pengeluaran Perkapita (juta rupiah)	9,86	10,57	BPS Kota Tasikmalaya
	Inflasi daerah (%)	2,0	6,65	BPS Kota Tasikmalaya
	Indeks Gini (point)	0,390	0,405	BPS Kota Tasikmalaya
S4 : Meningkatkan peranan koperasi, usaha mikro kecil, industri perdagangan dan jasa	Indeks Daya Beli (point)	59,63	71,85	BPS Kota Tasikmalaya
	Pertumbuhan PDRB kategori Industri Pengolahan (%)	5,74	1,91	BPS Kota Tasikmalaya
	Pertumbuhan PDRB kategori Perdagangan Besar dan Eceran (%)	6,97	2,97	BPS Kota Tasikmalaya

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Tahun 2022		KET
		Target	Realisasi	
	Pertumbuhan PDRB kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	5,83	2,39	BPS Kota Tasikmalaya
	Nilai investasi daerah (milyar rupiah)	300	4.777,36	DPMPTSP
	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	642.000	642.128	Dinas Porabudpar
P8 : Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi Daerah	Persentase Koperasi sehat (%)	24	40	Dinas KUMKM dan Perindag
	Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil (%)	1	0	Dinas KUMKM dan Perindag
	Persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang meningkat omsetnya (%)	3	0	Dinas KUMKM dan Perindag
	Persentase Industri Kecil Menengah berkualitas (%)	3	15	Dinas KUMKM dan Perindag
	Capaian penerbitan Perizinan Terpadu tepat waktu sesuai SOP (%)	100	100	DPMPTSP
S5 : Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,02	6,62	Dinas Tenaga Kerja dan BPS Kota Tasikmalaya
	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	66,75	65,98	
P9 : Program Pencetakan Wirausaha Baru	Jumlah Wirausaha Baru (orang)	1.516	1.516	Dinas KUKM Perindag
				DKP3
				Dinas Tenaga Kerja
				Dinas Pendidikan
				Dinas Porabudpar
P10 : Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	Prosentase Tenaga Kerja yang Kompeten (%)	62	83,19	Dinas Tenaga Kerja / data sementara

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Tahun 2022		KET
		Target	Realisasi	
S6 : Meningkatnya pertanian dan ketahanan pangan daerah	Pertumbuhan PDRB kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	0,10	4,54	BPS Kota Tasikmalaya
	Skor Pola Pangan Harapan/PPH Konsumsi (point)	92	91,3	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
P11 : Program Peningkatan Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Pertanian (%)	0,10	-4,18	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
	Skor Pola Pangan Harapan/PPH Ketersediaan (point)	85	90,8	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
Misi 3: Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan				
T5 : Tersedianya infrastruktur dasar yang berkualitas, aman, nyaman, inklusif dan berkelanjutan	Persentase infrastruktur dasar perkotaan yang berkualitas (%)	77,75	68,14	DPUTR, Disperwaskim, Dishub dan DLH
S7 : Meningkatnya layanan infrastruktur dasar perkotaan yang aman, nyaman dan inklusif	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (%)	97,00	90,76	DPUTR dan Dishub
	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100	100	DPUTR
P12 : Program Pemantapan Infrastruktur Dasar Perkotaan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (%)	83	90,76	DPUTR, dan Dishub
	Rasio Jaringan Irigasi (point)	0,0742	0,071	DPUTR
S8 : Meningkatnya kawasan permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat	Persentase KK/RT yang berakses SPALD	61,59	61,71	DPUTR, Disperwaskim dan Dinas Kesehatan
	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat	100	60	Disperwaskim

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Tahun 2022		KET
		Target	Realisasi	
P13 : Program Gema Manasik (Gerakan Bersama Menata Kota Tasikmalaya)	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani (%)	100	100	Disperwaskim
S9 : Meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (point)	74,40	51,94	DLH
P14 : Program Tasik Resik	Penambahan ruang terbuka hijau (Ha)	13,34	27,68	DLH
	Indeks Kualitas Air	53,60	35,33	DLH
	Indeks Kualitas Udara	79,60	82,26	DLH
	Persentase Penanganan Sampah (%)	83,45	65,11	DLH
Misi 4: Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia				
T6 : Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Indek Pembangunan Manusia (point)	73,95	73,83	BPS Kota Tasikmalaya
S10 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan (point)	68,50	69,18	BPS Kota Tasikmalaya
	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	100	84,53	Dinas Pendidikan
P15 : Program Tasik Cerdas	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,70	9,53	BPS Kota Tasikmalaya
	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,54	13,47	BPS Kota Tasikmalaya
S11 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indek Kesehatan (point)	81,65	80,97	BPS Kota Tasikmalaya
	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	100,00	81,59	Dinas Kesehatan
P16 : Program Tasik Sehat	Usia Harapan Hidup (tahun)	73,15	72,63	BPS Kota Tasikmalaya
	Angka Kematian Ibu (per 100.000)	125,09	180,15	Dinas Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (per 1.000)	5,29	7,67	Dinas Kesehatan
	Prevalensi Stunting (%)	18,10	12,62	Dinas Kesehatan
S12 : Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga (%)	14	17,59	Dinas Porabudpar

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Tahun 2022		KET
		Target	Realisasi	
P17 : Program Tasik Muda Berprestasi	Jumlah prestasi bidang kepemudaan (buah)	3	3	Dinas Porabudpar
	Persentase peningkatan nomor cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi tingkat Jawa Barat (%)	5	5	Dinas Porabudpar
S13 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas (point)	2,5	2,9	Satpol PP
	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	100	98,47	Satpol PP dan BPBD
	Persentase Penanganan Bencana Daerah (%)	100	100	BPBD
P18 : Program Tasik Siaga (Siap, Aman Terjaga)	Persentase penegakan Peraturan Daerah (%)	90	84,78	Satpol PP
	Persentase penanganan bencana daerah (%)	100	100	BPBD
T7 : Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan pengarusutamaan gender	Persentase Keluarga Sejahtera (%)	87	80,61	DPPKBP3A
	Indeks Pembangunan Gender/IPG (point)	91,54	91,87	BPS Kota Tasikmalaya
	Indeks Pemberdayaan Gender/IDG (point)	62,96	Belum Rilis	BPS Kota Tasikmalaya
S14 : Meningkatnya keluarga berencana dan pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,20	1,32	BPS Kota Tasikmalaya
	Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (point)	2,04	2,01	DPPKBP3A

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Capaian Kinerja Tahun 2022		KET
		Target	Realisasi	
P19 : Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT yang tertangani (%)	100	100	DPPKBP3A
	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (%)	72,70	72,98	DPPKBP3A
Misi 5: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih				
T8 : Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi (kategori)	61-70 (B)	61,70 (B)	Sekretariat Daerah
S15. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (kategori)	77-88 (Baik)	83,32 (baik)	Sekretariat Daerah
	Capaian Predikat Indeks SPBE	Sangat Baik (3,0)	Baik (2,62)	Diskominfo
P20 : Program Tasik Layanan Prima (Profesional, Responsif, Inovatif Memuaskan dan Akuntabel)	Cakupan IKM Perangkat Daerah (%)	95	97,22	Semua Perangkat Daerah
S16 : Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (opini)	WTP	WTP*	BPKAD, Bapenda, Inspektorat, Sekretariat Daerah,
	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (%)	21,79	41,68	BPKAD, BAPENDA
	Nilai Evaluasi SAKIP (kategori)	71-80 (BB)	70,73 (BB)*	Sekretariat Daerah
	Nilai Evaluasi LPPD (kategori)	3,1 - 4,0 (Sangat Tinggi)	3,37 (Sangat Tinggi)	Sekretariat Daerah
	Tingkat Maturitas SPIP (level)	3	3	Inspektorat
P21 : Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Aparatur	Cakupan Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (%)	75	91,67	Semua Perangkat Daerah
	Cakupan nilai maturitas SPIP Perangkat Daerah (%)	70	100	Semua Perangkat Daerah

Sumber : LKPJ Wali Kota Tasikmalaya Tahun 2022.

### 2.3. Capaian Janji Politik

#### A. Pencetakan 5.000 wirausaha baru

Program Wirausaha Baru (WUB) merupakan program pembangunan ekonomi strategis yang diselenggarakan Pemerintah Kota Tasikmalaya selama periode RPJMD 2017-2022 dengan target sebanyak 5000 orang wiraushabaru. Program WUB bertujuan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka melalui penyiapan pelaku usaha, kegiatan fasilitas pembiayaan modal usaha dan kegiatan fasilitasi subsidi kredit/margin modal usaha. Program WUB dilaksanakan oleh 5 Perangkat Daerah dengan target 1000 orang/ tahun sehingga bisa diselesaikan jangka waktu 5 tahun. Sisa target program WUB untuk tahun 2022 sebanyak 1.516 Orang.

Berikut ini perkembangan Program Pencetakan WUB yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, sebagai berikut:

#### 1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan

Program WUB yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya pada Tahun Anggaran 2022 adalah melalui 2 (dua) kegiatan yaitu:

- a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Rp. 250.000.000,00 melalui Pelatihan Kewirausahaan, Pelatihan Teknis dan Permagangan sektor home industri alas kaki, rajutan, konveksi dan makanan olahan. Realisasi anggaran sebesar Rp.232.225.000,00 atau 92,89 persen. Realisasi kinerja yaitu peserta yang mendapat sertifikat sebanyak 253 orang.
- b. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil dengan sub kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi Rp. 205.150.000,00 melalui Pelatihan Kewirausahaan, Pelatihan Teknis dan Permagangan sektor jasa perdagangan (digital marketing). Realisasi anggaran sebesar Rp.196.574.730,00 atau sebesar 95,82 persen dan realisasi fisik yaitu peserta yang mendapat sertifikat sebanyak 255 orang.

#### 2) Dinas Pertanian dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya pada Tahun Anggaran 2022 telah melaksanakan Program WUB melalui Program Pencetakan Wirausaha Baru Sektor Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Peterakan, dan Perikanan dengan total anggaran sebesar Rp.870.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pencetakan Wirausaha Baru Sektor Pertanian dengan pagu anggaran sebesar Rp.450.000.000,- dengan target pencetakan WUB sebanyak 300 orang yang dilaksanakan melalui 2 kegiatan yaitu:
  - Pencetakan Wirausaha Baru Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan melalui kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, Sub Kegiatan Pendampingan

Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian dengan pagu anggaran Rp. 420.000.000,00 dengan target 270 orang. Realisasi anggaran sebesar Rp.415.113.850,- atau sebesar 98,84 persen. Realisasi target pencetakan wirausaha baru pada sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, dengan Pelatihan Kewirausahaan, Pelatihan Teknis dan Pemagangan sektor budidaya dan pengolahan hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dari target sebanyak 270 orang terealisasi sebanyak 270 orang atau tercapai 100 persen;

- Pencetakan Wirausaha Baru Sektor Peternakan melalui kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, Sub Kegiatan Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan, melalui Pelatihan Kewirausahaan, Pelatihan Teknis dan Permagangan sektor budidaya dan pengolahan hasil Peternakan dengan pagu anggaran Rp.150.000.000,00 dengan target 100 orang. Realisasi anggaran sebesar Rp.141.396.745.000,- atau 94,26 persen dan realisasi fisik sebesar 100 persen. Target peserta pencetakan wirausaha Baru Sektor Peternakan terealisasi sebesar 100 persen atau sebanyak 100 orang;

2. Program Pencetakan Wirausaha Baru Sektor Perikanan melalui kegiatan Pemebedayaan Pembudi Daya Ikan Kecil, Sub Kegiatan Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan melalui Pelatihan Kewirausahaan, Pelatihan Teknis dan Permagangan sektor budidaya dan pengolahan hasil Perikanan dengan pagu anggaran sebesar Rp 300.000.000,- dengan target pencetakan WUB sebanyak 196 orang. Realisasi anggaran sebesar Rp. 295.839.675,- atau 98,61 persen dan realisasi fisik sebesar 100%. Target capaian pencetakan Wirausaha baru pada sektor perikanan dari target sebanyak 196 orang terealisasi sebanyak 196 orang atau sebesar 100 persen.

3) Dinas Pendidikan.

Program WUB pada Dinas Pendidikan dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non formal/ Kesetaraan, sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan dengan target jumlah warga masyarakat yang dibina menjadi wirausaha baru sebanyak 100 orang dan alokasi anggaran sebesar Rp.178.820.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 171.734.950,00 realisasi kinerja yaitu yang mendapat sertifikat 100 orang. Sektor usaha yang dikembangkan meliputi, tata busana sebanyak 30 orang, desain grafis sebanyak 35 orang dan tata boga sebanyak 35 orang.

4) Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2022 melaksanakan Program WUB melalui Program Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi, sub Kegiatan kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, dengan target 150 WUB dan pagu anggaran sebesar Rp. 255.000.000,00. Sektor usaha yang dikembangkan meliputi tata boga, tata busana, tata kecantikan dan tata rias. Realisasi anggaran sebesar Rp. 247.010.500,00 atau 96,87 persen, realisasi kinerja yaitu orang yang mendapat sertifikat sebanyak 150 orang.



5) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Program WUB pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dilaksanakan oleh Bidang Pariwisata melalui Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sub kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif, dengan target 192 orang dan alokasi anggaran sebesar Rp. 330.000.000,00. Pelatihan yang dilaksanakan adalah peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia untuk sector pariwisata agar bisa mandiri, yakni pelatihan Kawan lokal sebanyak 82 orang, Kawan Event sebanyak 20 orang, dan Kawan Ekraf sebanyak 90 orang. Realisasi anggaran sebesar Rp. 328.910.650,00 atau 99,67 persen realisasi kinerja sebanyak 192 orang atau sebesar 100 persen.

Realisasi program WUB sampai dengan akhir periode RPJMD tahun 2022 yang dilaksanakan oleh 5 Perangkat Daerah mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebanyak 5.000 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.132.  
Realisasi Program Wirausaha Baru berdasarkan Perangkat Daerah  
Tahun 2018 – 2022

No	Perangkat Daerah	2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
1	Dinas Pendidikan	95	100	105	100	100	500
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	87	100	0	163	150	500
3	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	58	100	0	150	192	500
4	Dinas Pertanian dan Perikanan	189	300	0	445	566	1500
5	Dinas KUMKM Perindag	328	354	60	750	508	2.000
Jumlah		757	954	165	1.608	1.516	5.000

Sumber : Bappelitbangda, Data diolah, 2023

B. Rehabilitasi 5.000 rumah tidak layak huni

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) selama periode RPJMD Tahun 2017-2022 ditargetkan sebanyak 5.000 unit. Capaian RTLH pada Tahun 2022 adalah sebanyak 780 unit, sehingga sampai dengan tahun 2022 target RTLH yang sudah direhabilitasi telah melampaui target RPJMD yaitu sebanyak 7.551 unit. Sebaran lokasi rehabilitasi RTLH sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.131.  
Daftar Lokasi Bantuan Rumah Tidak Layak Huni  
Di Kota Tasikmalaya Tahun 2022

NO.	KECAMATAN	NO.	KELURAHAN	BSPS	PROV	KOTA	JUMLAH
1	CIHIDEUNG	1	YUDANEGARA		40		40
		2	NAGARAWANGI				0
		3	CILEMBANG	1		1	2
		4	ARGASARI				0

NO.	KECAMATAN	NO.	KELURAHAN	BSPS	PROV	KOTA	JUMLAH
		5	TUGUJAYA	1			1
		6	TUGURAJA			2	2
2	CIPEDES	7	CIPEDES	21			21
		8	NAGARASARI				0
		9	PANGLAYUNGAN				0
		10	SUKAMANAH	2			2
3	TAWANG	11	TAWANGSARI	20	20		40
		12	EMPANGSARI	9	20	1	30
		13	LENGKONGSARI	20	40		60
		14	CIKALANG	9			9
		15	KAHURIPAN				0
4	INDIHIANG	16	INDIHIANG				0
		17	SIRNAGALIH	20			20
		18	PARAKANNYASAG				0
		19	PANYINGKIRAN	20	40		60
		20	SUKAMAJUKALER	20	40		60
		21	SUKAMAJUKIDUL		40		40
5	KAWALU	22	KARSAMENAK			2	2
		23	CILAMAJANG		20		20
		24	GUNUNGTANDALA				0
		25	URUG	20			20
		26	TANJUNG				0
		27	CIBEUTI		40		40
		28	KARANGANYAR			1	1
		29	TALAGASARI				0
		30	LEUWILIANG	20			20
		31	GUNUNGGEDE				0
6	CIBEUREUM	32	SETIARATU				0
		33	CIHERANG				0
		34	KERSANAGARA	26			26
		35	KOTABARU				0
		36	AWIPARI				0
		37	SETIANAGARA	21			21
		38	CIAKAR				0
		39	MARGABAKTI				0
		40	SETIAJAYA				0
7	TAMANSARI	41	TAMANSARI	28			28
		42	MULYASARI				0
		43	MUGARSARI				0
		44	TAMANJAYA				0
		45	SUKAHURIP	22			22
		46	SUMELAP				0
		47	SETIAWARGI				0
		48	SETIAMULYA				0
8	MANGKUBUMI	49	MANGKUBUMI	29			29
		50	CIGANTANG				0
		51	KARIKIL	1			1
		52	CIPARI				0
		53	LINGGAJAYA	28			28
		54	CIPAWITRA				0
		55	SAMBONGPARI	1		1	2
		56	SAMBONGJAYA				0
9	BUNGURSARI	57	SUKAMULYA	7		1	8
		58	SUKARINDIK	4			4

NO.	KECAMATAN	NO.	KELURAHAN	BSPS	PROV	KOTA	JUMLAH
		59	BUNGURSARI				0
		60	SUKAJAYA				0
		61	CIBUNIGEULIS	2			2
		62	BANTARSARI				0
		63	SUKALAKSANA	20			20
10	PURBARATU	64	SUKANAGARA				0
		65	SUKAMENAK	20			20
		66	PURBARATU	1		2	3
		67	SUKAASIH			1	1
		68	SUKAJAYA	34	40		74
		69	SINGKUP			1	1
JUMLAH				427	340	13	780

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023

C. Pembangunan Jalan Lingkar Utara Dan Perintisan Jalan Lingkar Selatan.

Pembangunan Jalan Lingkar Utara sepanjang kurang lebih 3,81 km yang menghubungkan persimpangan Lanud Wiriadinata sampai dengan Jalan Mohamad Hatta. Sampai dengan tahun 2022, realisasi pembangunan Jalan Lingkar Utara sudah mencapai 84,2%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembangunan jalan dan bangunan pelengkap jalan, Progres: 71%.
2. Pembangunan Jembatan Fly Over Rel Kereta Api, Progres: 100%.
3. Pembangunan Jembatan Cikalang, Progres: 50%.
4. Pembangunan Jembatan Ciloseh, Progres: 100%.
5. Pembangunan Jembatan Dalem Suba, Progres: 100%.

Penyelesaian Jembatan Cikalang (poin 1), pembangunan jalan dan pelengkap jalan segmen Jalan Tubagus Abdullah – Jalan Moh. Hatta (poin 2) diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp. 47.892.000.000,-. Sampai saat ini, kebutuhan anggaran tersebut belum dapat diakomodir oleh APBD Kota. Sebagai upaya mendapatkan alternatif pendanaan, penyelesaian pembangunan Jalan Lingkar Utara telah diusulkan ke Kementerian PUPR dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya untuk perintisan lingkaran selatan belum ada tindak lanjut setelah penyusunan Feasibility Study (FS) dan DED pada tahun 2017. Hal ini dikarenakan, pembangunan masih diprioritaskan untuk penyelesaian Jalan Lingkar Utara yang terkendala keterbatasan APBD Kota.

D. Pembangunan Pusdai / *Tasikmalaya Islamic Center*

Penyusunan Detail Engineering Design (DED) untuk Pembangunan Pusdai/Tasikmalaya Islamic Center telah disusun pada tahun 2017 kemudian dilanjutkan pembangunan pagar batas tanah dan pematangan lahan di tahun 2018. Pada saat pelaksanaan penyusunan DED dan pekerjaan tersebut, terkendala terkait surat izin dari Bupati Tasikmalaya. Selain itu, pembangunan Pusdai/Tasikmalaya Islamic Center masih belum terlaksana karena masih belum ada tindak lanjut terkait kendala status kepemilikan lahan sejak tahun 2021.

E. Pembangunan Pusat Promosi Dan Pemasaran Produk Unggulan/ Industri Kreatif (LKPJ)

Pembangunan gedung pusat promosi dan pemasaran produk unggulan/industri kreatif telah dibangun pada tahun 2021 berbarengan dengan gedung area produksi dan gedung klinik bisnis dan diresmikan oleh Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga. Gedung pusat promosi dan pemasaran produk unggulan/industri kreatif ini berlokasi di Pusat Pengembangan Industri Kerajinan (PPIK) yang merupakan sentra industri kreatif di Kota Tasikmalaya. Gedung Pusat Promosi dan Pemasaran ditujukan sebagai sarana untuk mempromosikan dan memasarkan produk unggulan Kota Tasikmalaya seperti bordir, batik, alas kaki, meubel, kerajinan mendong dan kerajinan bambu. Gedung Pusat Promosi dan Pemasaran juga sebagai sarana fashion show, pelatihan, seminar, diseminasi dan intermediasi.

F. Mengurangi kemiskinan sebesar 5 persen

Persentase penduduk miskin di Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 tercatat 12,72 persen, terjadi penurunan sebesar 0,41 persen jika dibandingkan dengan angka kemiskinan tahun 2021 tercatat 13,13 persen. Hal ini diakibatkan oleh struktur perekonomian Kota Tasikmalaya yang meningkat dari sisi PDRB dengan melihat struktur pendapatan perkapita yang naik serta kontribusi PDRB secara total juga yang meningkat ditambah tingkat pengangguran yang terjadi cukup menurun, serta kasus covid-19 yang tertangani dengan baik secara keseluruhan kondisi tersebut dapat menurunkan angka kemiskinan diatas.

G. Beasiswa Sarjana bagi masyarakat miskin berprestasi dan dokter Spesialis

Bantuan beasiswa sarjana bagi masyarakat miskin berprestasi yang disalurkan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 453.300.000,00 bagi 94 orang mahasiswa, yang terdiri dari 66 orang mahasiswa dari perguruan tinggi swasta, dan 28 orang mahasiswa dari perguruan tinggi negeri di Kota Tasikmalaya. Selanjutnya, beasiswa dokter spesialis dilaksanakan di RSUD dr. Soekardjo sebanyak 1 orang.

H. Peningkatan bantuan operasional/insentif dan sarana prasarana Posyandu

Bantuan operasional posyandu yang disalurkan pada tahun 2022 sebesar Rp.818.400.000,00 untuk 5.456 kader posyandu se-Kota Tasikmalaya atau Rp.150.000,00 per Orang.

I. Peningkatan bantuan operasional/insentif RT dan RW

Bantuan operasional/ insentif RT dan RW yang disalurkan pada tahun 2022 sebesar Rp. 8.399.100.000 dengan rincian untuk insentif RW sebesar Rp. 175.000/ bulan, dan RT sebesar Rp. 150.000/ bulan.

J. Peningkatan bantuan bidang keagamaan

Bantuan bidang keagamaan Pemerintah Kota Tasikmalaya terdiri dari:

1. Pemberian Insentif Guru Madrasah Diniyah

Insentif guru madrasah diniyah yang disalurkan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 3.240.000.000 dengan jumlah penerima insentif sebanyak 5.400 orang atau masing-masing sebesar Rp.600.000/orang.

2. Realisasi bantuan hibah sarana keagamaan tahun 2022 sebesar Rp.19.406.700.000,00 untuk 133 lembaga.

K. Revitalisasi Pasar Rakyat

Sebagai persiapan revitalisasi pasar rakyat pada tahun 2022 pemerintah Kota Tasikmalaya telah menyusun Master Plan dan DED Pasar Rakyat. Selain itu, pada tahun 2022 telah diresmikan Pasar Rakyat Cibeureum yang dibangun pada tahun 2018. Sehingga sejak tahun 2018 pemerintah Kota Tasikmalaya telah melakukan revitalisasi pasar rakyat sebanyak 5 pasar yaitu Pasar Indihiang, Pasar Cibeuti, Pasar Cibeureum, Pasar Purbaratu dan Pasar Pancasila.

L. Implementasi e-government

Implementasi e-government di Kota Tasikmalaya tahun 2022 dibuktikan dengan capaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Indeks SPBE Kota Tasikmalaya untuk tahun 2022 mencapai 2,62 poin dengan predikat baik, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu mencapai 2,68 poin. Indeks SPBE ini meliputi:

1. Kebijakan internal SPBE, yaitu diterbitkannya Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 101 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
2. Tata kelola SPBE, dengan adanya arsitektur dan peta rencana SPBE dalam dokumen masterplan dan enterprise arsitektur smart city; tersedianya pusat data dan jaringan intra pemerintah yang terhubung ke seluruh OPD dan kelurahan, Puskesmas dan Pustu, SD dan SMP, serta area publik dengan jumlah total 414 titik; dan penggunaan Sistem Penghubung Layanan untuk integrasi aplikasi.
3. Penerapan manajemen SPBE, yang meliputi penerapan manajemen risiko, keamanan informasi, data, asset TIK, kompetensi SDM, pengetahuan, perubahan, dan layanan SPBE.
4. Audit TIK yang meliputi audit infrastruktur, audit aplikasi dan audit keamanan SPBE.
5. Layanan SPBE, yang terdiri dari:
  - a. Layanan administrasi, yang meliputi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan keuangan, layanan pengadaan barang dan jasa, layanan kepegawaian, layanan kearsipan dinamis, layanan pengelolaan barang milik daerah, layanan pengawasan internal pemerintah, layanan akuntabilitas kinerja organisasi, dan layanan kinerja organisasi.
  - b. Layanan publik yang meliputi layanan pengaduan pelayanan publik, layanan data terbuka, layanan JDIH, layanan bidang pendidikan, layanan bidang komunikasi dan layanan administrasi kelurahan.

2.4. Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan pelaksanaan atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa

SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak konstitusional rakyat untuk mendapatkannya. Pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah terdiri dari 6 pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Keamanan dan Ketertiban Umum, dan Sosial. Berikut capaian Standar Pelayanan Minimal Kota Tasikmalaya pada tahun 2022.

Tabel 2.134.  
Capaian Standar Pelayanan Minimal Kota Tasikmalaya  
Tahun 2022

No.	Bidang Layanan	Satuan	Pencapaian SPM	
			Target	Capaian
1.	SPM Bidang Pendidikan	%	100	84,53
2.	SPM Bidang Kesehatan	%	100	81,59
3.	SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	100	100
4.	SPM Bidang Perumahan Rakyat	%	100	60
5.	SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	%	100	86,67
6.	SPM Bidang Sosial	%	100	94,18

*Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Tasikmalaya Tahun 2022.*

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 6 (enam) SPM yang harus dipenuhi dengan target 100 persen, hanya SPM Bidang Pekerjaan Umum yang dapat mencapainya. Berbagai kendala dalam penerapan SPM di Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. Penerapan SPM Bidang Pendidikan masih terkendala oleh kurangnya pemahaman sumber daya manusia terkait teknis pelaksanaan SPM sehingga Kesulitan dalam menentukan sasaran. Selain itu, kurangnya tenaga kependidikan yang mengakibatkan kurang optimalnya pelayanan terhadap peserta didik;
2. Penerapan SPM Bidang Kesehatan terkendala oleh belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan, misalnya pada layanan ibu melahirkan belum seluruh puskesmas dapat melayani persalinan dan perlunya peningkatan kualitas *home care*. Kemudian pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar belum maksimal, pelayanan kesehatan pada usia produktif misalnya kader Posbindu PTM belum semua mendapatkan pelatihan terutama di tingkat RW, dan lain sebagainya;
3. Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum meskipun pencapaiannya sudah 100 persen tetapi masih terdapat kendala keterbatasan lahan untuk pembangunan infrastruktur air minum dan air limbah serta belum adanya lembaga operator pengelola penyediaan air minum;
4. Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat masih terkendala oleh kegiatan yang mendukung SPM belum menjadi prioritas pada Perangkat Daerah bersangkutan;
5. Penerapan SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat masih terkendala terbatasnya tenaga PPNS dalam penyelesaian penegakan perda. Selain itu belum optimalnya

kelembagaan, ketatalaksanaan, maupun sumber daya manusia serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana daerah;

6. Penerapan SPM Bidang Sosial masih terkendala oleh sarana dan prasarana dalam pelaksanaan SPM belum maksimal serta tidak semua PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) masuk ke dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

#### 2.5. Evaluasi Capaian Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau *"No-one Left Behind"*. SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015 lalu. Capaian implemmentasi SDGs/TPB di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.135.

#### Capaian SDGs/TPB Kota Tasikmalaya Tahun 2022

Tujuan Pembangunan 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun							
Target	Kode	Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2021)	Target SDGs	Capaian SDGs
						2022	2022
1.2	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	Persentase	13,13	11,50	12,72
1.3	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	DINKES	Persentase	80,31	100	95,42
	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	DISNAKER	Persentase	10,95		
	1.3.1(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	DINSOS	Jiwa	35.820		76.200
1.4	1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	Dinkes, DPUTR Disperkimtan, Dishub	Persentase	PM	PM	

	1.4.1* - 2	Persentase Penduduk dengan Layanan Air Minum	DPUTR	Persentase	83,8	56,07	56,81
	1.4.1* - 3	Persentase Penduduk dengan Layanan Sanitasi	DPUTR	Persentase	89,99		99,96
	1.4.1* - 7	Indeks akses pada fasilitas penyehatan dasar	DINKES	Persentase	100,00		
	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	DINKES	Persentase	18,43		
	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	DPPKBP3A	Persentase	72,37	72,70	72,98
	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	DISPERAWA SKIM	Persentase	54,15		
1.5	1.51.*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Orang			5.375
	1.5.1* - 1	Korban Meninggal	BPBD	Orang	2	PM	1
	1.5.1* - 2	Korban Hilang	BPBD	Orang	0	PM	0
	1.5.1* - 3	Korban Terluka	BPBD	Orang	5	PM	9
	1.5.1* - 4	Korban Mengungsi	BPBD	Orang	57	PM	225 kk
	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	Dokumen	1	1	1
Tujuan Pembangunan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan							
	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	DINKES	Persentase	5.87	0	0,52
	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	DINKES	Persentase	14.81	18,10	12,62
	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan	DKP3	Persentase	91,30	91,00	91,30



		tingkat konsumsi ikan.					
2.4	2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	DKP3	Persentase	4,64		4,64
Tujuan Pembangunan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Seluruh Usia							
3.1	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).*	DINKES	Kematian Per 100000 Kelahiran Hidup	303.87	145,18	180,15
3.2	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	DINKES	Kematian Per 1000 Kelahiran Hidup	1,74	5,29	7,67
	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	DINKES	Kematian Per 1000 Kelahiran Hidup	7.2	4,44	4,87
	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	DINKES	Kematian Per 1000 Kelahiran Hidup	8,5	5,29	7,67
3.3	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	DINKES	Kasus Baru per 1000 penduduk tidak terinfeksi	0,09		
	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	DINKES	Kasus Baru per 10000 penduduk	149		
	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang.	DINKES	API/1000 Penduduk	0,01		
3.4	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	DINKES	Persentase	51,38		75,59
3.7	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia	DPPKBP3A	Persentase	72,37		61.10

		Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.					
	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	DPPKBP3A	Persentase	2,03	3,04	2,01
	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	DINKES	Persentase	79,40		76,20
3.b	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	DINKES	Persentase	66,6		
Tujuan Pembangunan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua							
4.1	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	DISDIK	Persentase	97,91		97,53
	4.1.1.(b)*	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	DISDIK	Persentase	93,38		83,69
4.5	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.	BPS/DISDIK	Breakdown Indikator	Breakdown Indikator	Breakdown Indikator	Breakdown Indikator
	4.5.1* - 1b	Rasio APM SD pedesaan/ perkotaan	BPS/DISDIK	Persentase	90,31	89,78	89,86
	4.5.1* - 2b	Rasio APK SMP pedesaan/ perkotaan	BPS/DISDIK	Persentase	86,85	78,64	84,44
Tujuan Pembangunan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan							
5.1	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	DPPKBP3A	Dokumen	1	1	1

	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	DPPKBP3A	Persentase	100	100,00	100
	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	DPPKBP3A	Persentase	100	100	100
5.5	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.	SETWAN	Persentase	6,67	19.32	7,14
Tujuan Pembangunan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua							
6.1	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	DPUTR	Persentase	56,23	56,07	56,81
6.2	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	DPUTR	Persentase	61,20		
	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	DPUTR	Persentase	61,20	61,59	61,71
	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	DPUTR	Persentase	15,44	PM	1,68
Tujuan Pembangunan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua							
8.1	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita. (ADHK)	BPS	Persentase	3,57	5,00	5,01
	8.1.1.(a)	PDRB per kapita. (ADHB)	BPS	Juta Rupiah	22,85	5,00	5,01
	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	DISNAKER/BPS	Persentase	46,71	31,64	34,05
	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	DISNAKER/BPS	Persentase	5,50	N/A	5,48
	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis Jenis kelompok Umur	DISNAKER/BPS	Persentase	7,66		4,36
Tujuan Pembangunan 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi							

9.2	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan Perkapita	BPS	Persentase	13,83		13,82
	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	BPS	Persentase	1,91		-16,90
Tujuan Pembangunan 10 Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara							
10.1	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS/DINSOS	Persentase	13,13	11,50	12,72
10.3	10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	SETDA	Kasus/Aduan	34		
10.4	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	DISNAKER	Persentase	62,92	51,04	71,93
Tujuan Pembangunan 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan							
11.5	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Jiwa			5.375
	11.5.1*-1	Korban Meninggal	BPBD	Orang	2	PM	1
	11.5.1*-2	Korban Hilang	BPBD	Orang	0	PM	0
	11.5.1*-3	Korban Terluka	BPBD	Orang	5	PM	9
	11.5.1*-4	Korban Mengungsi	BPBD	Orang	57	PM	225 kk
11.6	11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	DLH	Persentase	71,45	76	1
Tujuan Pembangunan 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan							
12.4	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	DLH	Persentase	73,86	83,45	81,77
	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	DLH	Persentase	25		

Tujuan Pembangunan 15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati							
15.1	15.1.1. (a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	DLH	INDEKS	23,35		
16.3	16.3.1. (b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	SETDA	Perkara	34	N/A	25
16.6	16.6.1. (a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten / Kota).	BPKAD	WTP	WTP	WTP	WTP
	16.6.1. (b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP > B	INSPEKTOR AT	Persentase	33,33	73	71,63
	16.6.1. (c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB > B	INSPEKTOR AT	Nilai (Kategori)	58,33	70%	86,42%
	16.7.1. (a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	SETWAN	Persentase	6,67	19.32	7,14
	16.7.1. (b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKPSDM	Persentase	6,45		0,027
16.9	16.9.1. (b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	DISDUKCAP IL	Persentase	58,33	69,00	99,11
Tujuan Pembangunan 17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan							
17.1	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BPKAD	Persentase	10,61		7,619

	17.1.1. (a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Bapenda	Persentase	2,91		0,637
--	----------------	--------------------------------------	---------	------------	------	--	-------

## 2.6. Evaluasi Capaian Kemiskinan Ekstrem

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan nomor 25 tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2022-2024, Kota Tasikmalaya menjadi lokasi prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2022. Data yang menunjukkan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya cukup menggembirakan dengan penurunan kemiskinan ekstrim di Kota Tasikmalaya sebesar 3.290 orang atau sekitar 12,11 persen jika dibandingkan dengan tahun 2021, tentunya penurunan tersebut merupakan pengaruh positif dari program dan kegiatan yang telah dijalankan untuk pengentasan kemiskinan serta kondisi yang baik dari sisi status pengendalian covid 19 yang telah dilaksanakan.

## 2.7. Permasalahan Pembangunan

### 2.8.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Permasalahan daerah yang dianggap memiliki nilai prioritas yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPD di tahun rencana serta prioritas lain diantaranya yaitu:

1. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran;
2. Belum optimalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar;
3. Belum optimalnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, daya beli masyarakat serta pengendalian inflasi;
4. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur perkotaan, permukiman dan pengelolaan lingkungan hidup;
5. Belum optimalnya reformasi birokrasi diantaranya pelayanan publik dan kinerja aparatur.

### 2.8.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

#### a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

##### 1) Pendidikan

- a. Belum optimalnya capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS);
- b. Masih terdapat anak usia pendidikan dasar yang belum bersekolah pada jenjang SMP;
- c. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai;
- d. Masih rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan.

##### 2) Kesehatan

- a. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
- b. Masih terdapat masyarakat miskin yang belum mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan nasional;
- c. Belum optimalnya ketersediaan obat dan pelayanan kefarmasian sesuai standar;
- d. Masih terdapatnya balita dengan kondisi gizi buruk;

- e. Masih tingginya prevalensi stunting;
  - f. Belum optimalnya kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
  - g. Belum optimalnya sarana dan prasarana kesehatan yang sesuai standar;
  - h. Belum optimalnya kesehatan keluarga, penanganan penyakit menular dan tidak menular;
  - i. Masih kurangnya tenaga kesehatan dengan kompetensi tertentu antara lain sub spesialis dan spesialis tertentu.
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a. Belum optimalnya pemeliharaan serta peningkatan jalan, jembatan dan drainase;
  - b. Masih terdapat jalan yang belum dilengkapi bangunan pelengkap jalan;
  - c. Belum optimalnya capaian Kepala Keluarga yang dapat mengakses air minum, dan memiliki akses terhadap sarana pengelolaan air limbah domestik;
  - d. Belum optimalnya kualitas jaringan irigasi;
  - e. Masih ada gedung kantor perangkat daerah yang belum representatif dan sesuai dengan standar.
- 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- a. Terdapat kawasan kumuh seluas 168,49 Hektar berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 648/Kep.733.1-Disperwaskim/2021;
  - b. Masih terdapat rumah tidak layak huni;
  - c. Masih terdapat Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan formal yang belum diserahterimakan oleh pengembang kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- 5) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
- a. Masih terdapat masyarakat yang kurang patuh terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. Belum optimalnya penegakan peraturan daerah;
  - c. Belum optimalnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
- 6) Sosial
- a. Belum optimalnya pengelolaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
  - b. Belum optimalnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
  - c. Belum optimalnya pemberdayaan fakir miskin dan PPKS.
- b. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar
- 1) Tenaga Kerja
- a. Masih tingginya angka pengangguran;
  - b. Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja;
  - c. Belum adanya sarana Balai Latihan Kerja (BLK);
  - b. Kurang optimalnya hubungan industrial, pengantar kerja dan instruktur pelatihan ketenagakerjaan;
  - c. Belum optimalnya peran lembaga ketenagakerjaan;
  - d. Belum optimalnya *link and match* antara dunia pendidikan dan pelatihan dengan dunia usaha;
  - e. Belum optimalnya penempatan kerja bagi pencari kerja terdaftar.

- 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - a. Belum optimalnya capaian Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender.
  - b. Belum optimalnya pencapaian Kota Layak Anak.
- 3) Pangan
  - a. Belum optimalnya implementasi konsumsi keragaman pangan dan gizi;
  - b. Belum optimalnya pengelolaan pangan dan gizi;
  - c. Belum optimalnya pengelolaan distribusi pangan;
  - d. Belum optimalnya infrastruktur ketahanan pangan;
  - e. Belum optimalnya ketahanan pangan daerah.
- 4) Lingkungan Hidup
  - a. Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan penanganan kerusakan lingkungan;
  - b. Belum optimalnya pengelolaan sampah dari hulu sampai ke hilir secara komprehensif;
  - c. Belum tercapainya proporsi Ruang Terbuka Hijau.
- 5) Kependudukan dan Catatan Sipil

Kurangnya kesadaran penduduk akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- 6) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - a. Belum optimalnya layanan keluarga berencana;
  - b. Belum optimalnya capaian Total Fertility Rate ( TFR );
  - c. Masih rendahnya partisipasi keluarga dalam kegiatan BKB;
  - d. Masih kurangnya wawasan reproduksi bagi remaja.
- 7) Perhubungan
  - a. Belum optimalnya ketersediaan ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. Belum optimalnya penyediaan fasilitas perlengkapan jalan;
  - c. Masih adanya ruas jalan yang digunakan selain untuk kepentingan lalu lintas yang dapat menimbulkan kemacetan khususnya di pusat kota;
  - d. Belum optimalnya pengelolaan parkir;
  - e. Belum optimalnya pengelolaan terminal tipe C.
- 8) Komunikasi dan Informatika
  - a. Belum optimalnya penyebarluasan informasi dan komunikasi publik;
  - b. Belum optimalnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
  - c. Belum memadainya sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi.
- 9) Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
  - a. Masih rendahnya jumlah koperasi sehat;
  - b. Belum optimalnya pembinaan koperasi;
  - c. Masih rendahnya daya saing Usaha Mikro Kecil (UMK) baik dari kapasitas SDM, maupun standarisasi dan mutu produk.
- 10) Penanaman Modal
  - a. Belum tersedianya rencana umum penanaman modal;



- b. Belum optimalnya pengendalian penanaman modal.
- 11) Kepemudaan dan Olahraga
  - a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga sehingga pencapaian prestasi kepemudaan dan olahraga belum optimal;
  - b. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan.
- 12) Kebudayaan
  - a. Belum optimalnya pembinaan seni dan budaya tradisional;
  - b. Belum optimalnya pelestarian terhadap nilai sejarah, seni dan budaya daerah seperti pelestarian terhadap benda, situs dan cagar budaya.
- 13) Perpustakaan
  - Belum optimalnya layanan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan.
- 14) Kearsipan
  - a. Belum tersedianya Depo Arsip yang memenuhi standar baku;
  - b. Belum optimalnya penerapan standar baku kearsipan pada perangkat daerah.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan
  - 1) Kelautan dan Perikanan
    - Belum optimalnya pemanfaatan minapolitan.
  - 2) Pariwisata
    - Belum tersedianya dokumen perencanaan kepariwisataan yang terintegrasi.
  - 3) Pertanian
    - a. Belum optimalnya produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya;
    - b. Belum optimalnya kenaikan kelas kelompok tani.
  - 4) Perdagangan
    - a. Belum optimalnya pengelolaan pasar rakyat dan terbatasnya jumlah pasar rakyat;
    - b. Belum optimalnya pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
    - c. Rendahnya kesadaran para pedagang dalam melakukan tera ulang alat ukur;
    - d. Belum optimalnya penataan, pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
  - 5) Perindustrian
    - a. Masih minimnya Industri Kecil Menengah yang terdaftar di Sistem Informasi Industri Nasional;
    - b. Belum optimalnya pengendalian izin usaha industri.
- d. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
  - 1) Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
    - a. Belum optimalnya capaian Indeks Inovasi Daerah (IID);
    - b. Belum optimalnya pengelolaan data perencanaan pembangunan.
  - 2) Keuangan
    - Belum optimalnya penatausahaan barang dan aset daerah.

- 3) Kepegawaian
  - a. Belum optimalnya merit sistem;
  - b. Belum optimalnya kompetensi ASN.
- e. Urusan Pemerintahan Umum
  - 1) Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri
    - Belum optimalnya pembinaan ideologi pancasila.

### BAB III

#### KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; khususnya Pasal 156 dinyatakan bahwa: (i) Analisis keuangan Daerah dirumuskan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD; (ii) Analisis keuangan Daerah dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan Daerah; serta (iii) Kapasitas riil keuangan Daerah, diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan.

Menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur APBD. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah, dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada masa 1 tahun mendatang. Dasar yuridis pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya mengacu pada batasan pengelolaan keuangan daerah yang tercantum dalam:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

Peraturan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, adil, patut, dan bermanfaat. Kerangka pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya secara garis besar terdiri dari penyusunan anggaran daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban, yang kesemuanya mengacu pada tujuan tersebut di atas.

Untuk memahami kemampuan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya, perlu dicermati kondisi kinerja keuangannya, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan di masa yang akan datang.

Rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2024 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2024. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Tasikmalaya baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan keuangan daerah menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2024.

Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja. Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi tahun 2024 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kota Tasikmalaya.

### 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

#### 3.1.1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Tantangan dan prospek perekonomian Kota Tasikmalaya tentunya tidak terlepas dari pengaruh perekonomian global, nasional, regional Jawa Barat maupun kondisi lokal Kota Tasikmalaya.

##### 1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Global dan Nasional

Berdasarkan Laporan Perekonomian Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, disebutkan bahwa risiko perekonomian global yang kembali meningkat pada 2022 memberikan tantangan bagi upaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Risiko global tersebut dipicu oleh perang antara Rusia dan Ukraina yang kembali meningkatkan situasi politik dan ekonomi dunia. Secara umum terdapat 5 (lima) permasalahan yang mengemuka dan saling berkaitan sehingga perlu diwaspadai karena dapat memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Pertama,

pertumbuhan ekonomi dunia menurun sejalan dengan kenaikan situasi politik dan ekonomi dunia tersebut, bahkan dengan risiko resesi di Amerika Serikat (AS) dan Eropa yang makin meningkat (*"slow growth"*). Kedua, inflasi meningkat sangat tinggi di negara-negara maju akibat gangguan pasokan komoditas energi dan pangan (*"high inflation"*). Ketiga, suku bunga acuan kebijakan moneter global meningkat tajam dan diperkirakan terjadi dalam periode yang lama sebagai respons atas kenaikan tajam inflasi tersebut, seperti yang terjadi pada Fed Funds Rate (FFR)-(*"higher for longer"*). Keempat, mata uang dolar AS menguat tajam seiring dengan kenaikan FFR dan ketidakpastian pasar keuangan global, sehingga memberikan tekanan pada banyak mata uang dunia, termasuk Rupiah (*"strong dollar"*). Kelima, fenomena *"cash is the king"* juga terjadi sejalan dengan persepsi risiko investor global yang tinggi dan membuat investor menarik dananya dari negara berkembang, termasuk Indonesia, ke instrumen investasi yang dipandang likuid dan mendekati cash. Berbagai perkembangan ini sangat perlu dicermati dan direspons dengan tepat karena bila terus berlanjut berisiko memicu stagflasi bahkan resesi dan inflasi tinggi (resflasi).

Ekonomi Indonesia tahun 2022 mampu tumbuh sebesar 5,3% (c-to-c), menunjukkan pertumbuhan yang kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Tingkat pertumbuhan ini jauh melampaui pertumbuhan tahun 2021 yang tercatat sebesar 3,7% (c-to-c). Sedangkan PDB triwulan IV 2022 tumbuh sebesar 5,01% (yoy) atau tumbuh 0,4% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya.

Efektivitas kebijakan penanganan pandemi Covid-19 berperan besar dalam menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi. Akselerasi program vaksinasi dan pendekatan yang tepat dalam penerapan pembatasan sosial masyarakat yang adaptif secara efektif mengendalikan penularan Covid-19 sekaligus menjaga aktivitas ekonomi untuk dapat pulih lebih cepat. Berbagai program pemulihan ekonomi melalui Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang didukung oleh kebijakan moneter dan sektor keuangan yang akomodatif telah memberikan dorongan besar bagi akselerasi pemulihan ekonomi nasional di tahun 2022.

Di tengah eskalasi gejolak global di tahun 2022, peran APBN sebagai shock absorber menjadi demikian krusial. Disrupsi di sisi suplai akibat meningkatnya optimisme perbaikan ekonomi di sejumlah negara maju yang belum diikuti dengan perbaikan sisi produksi telah menyebabkan naiknya tekanan inflasi. Perang di Ukraina kemudian mengakibatkan gangguan pasokan sehingga harga komoditas, khususnya pangan dan energi, melonjak tajam. Akibatnya, banyak negara menghadapi tekanan inflasi yang sangat tinggi. Inflasi di sejumlah negara maju, seperti Amerika Serikat dan negara-negara di kawasan Eropa, mencatatkan rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Transmisi global dampak inflasi tinggi ke domestik dapat ditekan dengan mengoptimalkan fungsi APBN sebagai shock absorber. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, penambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi, penambahan BLT terkait penyesuaian harga BBM, bantuan subsidi upah, serta penguatan dana transfer ke daerah untuk pengendalian inflasi digulirkan oleh Pemerintah. Inflasi domestik terkendali pada level yang moderat, hanya 5,5% di tahun 2022, sehingga daya beli masyarakat dan keberlanjutan pemulihan ekonomi terjaga.

### Outlook Perekonomian 2023

Prospek pemulihan ekonomi Indonesia diperkirakan berlanjut dalam jangka pendek dan terus menguat dalam jangka menengah. Pada 2023, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berlanjut, meskipun sedikit melambat ke titik tengah kisaran 4,5-5,3%, sejalan dengan menurunnya prospek pertumbuhan ekonomi global. Stabilitas eksternal tetap terjaga ditopang oleh kinerja NPI yang tetap sehat. Inflasi juga kembali terkendali ke sasarannya 3,0±1%. Sementara itu, stabilitas sistem keuangan tetap baik. Dalam jangka menengah, perekonomian Indonesia terus meningkat dan kembali berada di lintasan menuju Indonesia Maju. Prospek ini didukung oleh pemulihan perekonomian global yang berlanjut serta peningkatan perekonomian domestik yang juga didorong oleh kenaikan investasi dan produktivitas seiring dengan implementasi kebijakan reformasi struktural baik di sektor riil maupun akselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional. Bank Indonesia memprakirakan dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus meningkat hingga berada pada kisaran 5,0-5,8% pada 2027. Inflasi diperkirakan tetap terjaga pada kisaran 1,5-3,5%, didukung oleh peningkatan efisiensi dan produktivitas perekonomian. Defisit transaksi berjalan diperkirakan juga tetap terkendali pada level yang sehat dalam kisaran 1,2-2,0% dari PDB, sehingga menopang ketahanan sektor eksternal Indonesia. Secara keseluruhan, dengan lintasan prospek tersebut, Indonesia diperkirakan mampu menjadi negara maju berpendapatan tinggi pada 2047.

Pemerintah optimis bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 masih akan tetap kuat meskipun dihadapkan pada prospek melambatnya perekonomian global. Laju pemulihan yang sangat kuat di tahun 2022 menjadi pijakan yang kokoh bagi perekonomian nasional untuk menghadapi tantangan jangka pendek sekaligus untuk melanjutkan agenda pembangunan jangka menengah-panjang. Indikator perekonomian terkini juga terus menunjukkan tren ekspansif, termasuk indeks PMI manufaktur Indonesia yang pada bulan Januari 2023 meningkat cukup signifikan.

Namun demikian, Pemerintah tetap akan terus memantau risiko perekonomian dunia saat ini. Risiko ketidakpastian masih cukup tinggi, meskipun risiko perlambatan ekonomi dunia diindikasikan mulai melunak. Dalam World Economic Outlook terbitan Januari 2023, IMF memprediksi pertumbuhan global tahun 2022 dan 2023 sebesar 3,4% dan 2,9%, atau lebih tinggi 0,2 p.p. dibanding proyeksi sebelumnya pada Oktober 2022. Revisi ke atas ini didorong penguatan kinerja di beberapa negara besar sejak akhir 2022 dan mulai meredanya tekanan inflasi dunia yang diprediksi melambat secara gradual di tahun 2023.

Keberlanjutan agenda reformasi struktural untuk mempercepat transformasi ekonomi akan terus dijaga guna memperkuat struktur dan akselerasi kinerja ekonomi nasional. APBN 2023 juga telah dipersiapkan agar senantiasa waspada namun optimis kepada potensi perekonomian ke depan. Kesehatan fiskal tetap menjadi perhatian penting agar mampu secara cepat dan tepat dalam menysasar isu-isu kritical, termasuk dalam pengendalian inflasi, stabilitas perbaikan kesejahteraan masyarakat, dan perbaikan investasi yang lebih kuat. “Berkat kerja keras APBN sebagai peredam tekanan global, Indonesia masih menjadi negara dengan predikat *“The Bright Spot”* di tengah guncangan global saat ini.

## 2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Regional Jawa Barat

### Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat pada tahun 2022 (Gambar 3.1) menunjukkan pertumbuhan positif menuju tingkat keseimbangan pertumbuhan sebelum pandemi COVID-19, yang didorong oleh penormalan konsumsi masyarakat seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tersebut didorong oleh komponen ekspor yang tumbuh bersamaan dengan pulihnya transaksi perekonomian dengan negara mitra dagang. Selain itu, permintaan domestik juga menunjukkan perbaikan, terutama dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi bersumber dari komponen konsumsi rumah tangga dan ekspor. Pertumbuhan yang cukup tinggi pada konsumsi rumah tangga sejalan dengan berbagai aktivitas seperti sekolah tatap muka, work from office, dan leisure yang kembali bergairah dimana berbagai destinasi wisata mulai ramai dikunjungi, baik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Adapun dari sisi eksternal, ekspor masih tumbuh positif meskipun pertumbuhannya melambat sehubungan dengan permintaan negara mitra yang mulai menurun sebagai dampak dari penurunan kondisi ekonomi global.

Gambar 3.1  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Tahun 2022



Sumber : Data BPS, Diolah, 2023

Dari sisi sektor lapangan usaha, sektor industri pengolahan, perdagangan dan sektor pertanian masih menjadi 3 (tiga) kelompok lapangan usaha terbesar yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Jawa Barat tahun 2022 dengan pertumbuhan positif masing-masing sebesar 7 persen, 4.22 persen serta 4.41 persen.

### Keuangan Pemerintah

Anggaran belanja Jawa Barat pada tahun 2022 secara keseluruhan mencapai Rp170,67 triliun atau meningkat sebesar 0,50% apabila dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai Rp169,82 triliun. Peningkatan anggaran belanja pada tahun 2022 dikontribusikan oleh total APBD 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang tercatat tumbuh sebesar 11,69% (yoy).

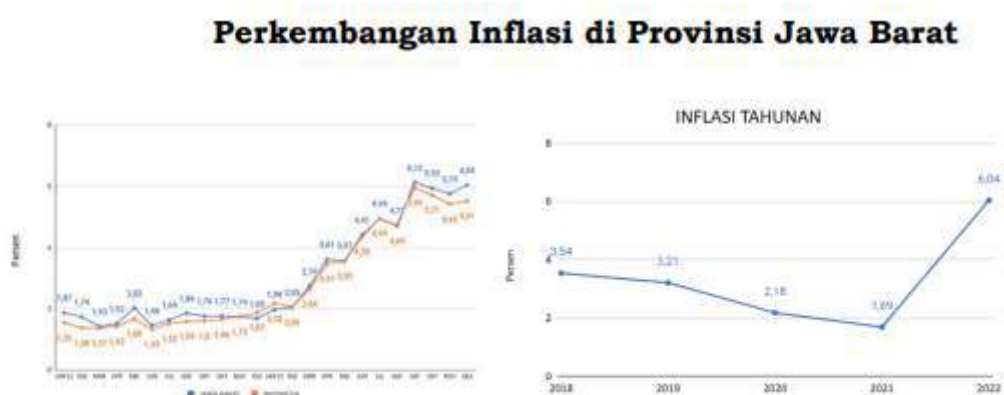
Pada 2022, nilai defisit anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat (APBD) mengalami penurunan menjadi Rp4,2 miliar. Penurunan defisit disebabkan penurunan belanja yang lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan pendapatan.

Pada triwulan III 2022, realisasi belanja APBN di Jawa Barat tercatat 64,41% dari alokasi anggaran. Realisasi serapan belanja tersebut lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021, akibat penurunan realisasi belanja modal. Di sisi lain, realisasi tertinggi tercatat untuk belanja pegawai yang didominasi pembayaran gaji dan belanja bantuan sosial.

### Perkembangan Inflasi

Perkembangan inflasi sepanjang tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding periode tahun 2021. Komoditas penyumbang inflasi meliputi komoditas pangan seperti beras, minyak goreng, telur, cabai merah, bawang merah serta komoditas energi (BBM, bahan bakar rumah tangga), tarif air minum PAM dan angkutan dalam kota.

Gambar 3.2



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Januari 2023

Keterangan: Menggunakan IHK Tahun Dasar 2018=100

Program dan kegiatan prioritas pengendalian inflasi daerah pada tahun 2023 dari sisi produksi, distribusi dan ketersediaan diharapkan dapat dapat mengendalikan harga-harga di tingkat konsumen serta menurunkan inflasi pada tingkat yang terkendali (2.5+1%).

### Stabilitas Keuangan Daerah & Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Stabilitas sistem keuangan Jawa Barat pada triwulan III 2022 tetap terjaga dengan stabilnya penyaluran kredit yang diiringi perbaikan NPL gross. Pada triwulan III 2022, kredit/pembiayaan dengan lokasi proyek di Jawa Barat relatif stabil pada laju 9,21% (yoy) walaupun sedikit menurun dibandingkan periode sebelumnya yang mampu tumbuh 9,25% (yoy). Tingginya pertumbuhan pembiayaan di Jawa Barat sejalan dengan kinerja perekonomian di triwulan III 2022 yang tercatat tumbuh lebih tinggi ditengah berbagai tantangan global.

Melambatnya penyaluran kredit terjadi pada kredit modal kerja (KMK) dan kredit investasi (KI), sedangkan kredit konsumsi tumbuh lebih kuat. Perbaikan permintaan domestik secara umum berhasil mendorong perekonomian dimana perbankan memiliki rasa optimis terhadap prospek kinerja mayoritas lapangan usaha.

### Perkembangan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah



Pada triwulan III 2022, aliran uang kartal yang keluar (outflow) sebesar Rp9,5 triliun, lebih rendah dari Triwulan II 2022 sebesar Rp19,12 triliun. Penurunan ini lebih dalam dibandingkan penurunan aliran uang kartal masuk (inflow) dari Rp26,4 triliun pada Triwulan II 2022 menjadi Rp19,9 triliun. Dengan demikian terjadi peningkatan net-inflow sebesar Rp10,4 triliun. Penurunan ini terjadi sebagai dampak normalisasi HBKN Lebaran, serta akibat tren kenaikan suku bunga.

Di sisi lain, perkembangan transaksi non tunai melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) mengalami perbaikan nilai kontraksi menjadi 6,55% (yoy) yang disinyalir terjadi akibat kebijakan khusus menyambut hari kemerdekaan berupa penurunan biaya transfer menjadi Rp2,500. Sedangkan, Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) tumbuh melambat menjadi 6,67% (yoy) yang disinyalir terjadi akibat normalisasi HBKN Lebaran.

Normalisasi pasca HBKN Idul Fitri juga mempengaruhi penggunaan APMK menggunakan Kartu ATM Debit yang tercatat kontraksi pada Triwulan III 2022, sementara Kartu Kredit tercatat mengalami peningkatan seiring adanya kebijakan relaksasi telat dan minimum bayar Kartu Kredit.

### Perkembangan Ketenagakerjaan Dan Kesejahteraan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Kinerja TPT dihitung 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu periode Februari dan Agustus. TPT Agustus cenderung lebih tinggi dibanding Februari, hal ini disebabkan meningkatnya jumlah pencari kerja baru yang baru lulus sekolah di Bulan Juli. Selain itu, pada periode Bulan Januari-Februari umumnya sektor pertanian memasuki masa tanam, sehingga jumlah pekerja di sektor pertanian lebih banyak dan berkontribusi dalam menurunkan TPT. TPT periode Agustus 2022 sebesar 8,31 persen, menurun 1,51 persen dibanding keadaan Agustus 2021 sebesar 9,82 persen. Penurunan TPT pada Agustus 2022 menunjukkan lapangan kerja di Jawa Barat sudah membaik. Hal ini didukung oleh kondisi pandemi COVID-19 yang mulai terkendali dan meningkatnya penyerapan pekerja pada sektor perdagangan, industri pengolahan, dan pertanian.

Gambar 3.3



Berdasarkan tingkat pendidikan, angka TPT Jawa Barat disumbang oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 14,63 persen. Hal ini lebih tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya. Dengan kata lain, terdapat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan SMK. Sedangkan jika ditinjau berdasarkan daerah

tempat tinggal, TPT Perkotaan turun sebesar 1,65 persen poin dan TPT Perdesaan turun sebesar 1,03 persen poin pada Agustus 2021. TPT Perdesaan mengalami penurunan lebih tinggi daripada TPT Perkotaan.

Selama Agustus 2021 – Agustus 2022, lapangan usaha yang berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja diantaranya sektor perdagangan mampu menambah serapan tenaga kerja sebanyak 0,26 juta orang, sementara lapangan pekerjaan industri pengolahan mampu menambah 200 ribu tenaga kerja.

#### Prakiraan Perekonomian Ke Depan

Kondisi perekonomian Jawa Barat ke depan tidak terlepas dari perkembangan kasus pandemi COVID-19 serta upaya pemulihan dampak pada sektor-sektor penggerak ekonomi seperti sektor industri, pengolahan, Perdagangan, jasa konstruksi, serta akomodasi dan perhotelan. Eskalasi tensi geopolitik global (konflik Rusia-Ukraina) berpotensi mempengaruhi perekonomian Jawa Barat melalui 3 (tiga) jalur yaitu jalur perdagangan, jalur komoditas dan jalur keuangan. Pada jalur perdagangan akan mempengaruhi permintaan global dan volume perdagangan. Pada jalur komoditas akan mempengaruhi inflasi global yang berpengaruh pada harga komoditas dan volume perdagangan. Pada jalur keuangan akan mempengaruhi likuiditas global yang berpengaruh pada risiko pasar dan percepatan kebijakan politik. Dampak langsung konflik Rusia Ukraina melalui jalur perdagangan ke Jawa Barat relatif rendah, mengingat nilai perdagangan Jawa Barat dengan Rusia dan Ukraina relatif kecil. Baik secara nasional maupun Jawa Barat, kinerja ekspor ke Rusia pada Januari 2022 secara berturut-turut sebesar 0,97 persen dan 0,88 persen dari total ekspor secara keseluruhan. Adapun ekspor terbesar Jawa Barat ke Rusia berasal dari industri mesin dan alat listrik. Pada Januari 2022 kegiatan perdagangan dengan Ukraina juga menunjukkan proporsi yang relatif kecil dibandingkan dengan negara lain. Adapun ekspor terbesar Jawa Barat berasal dari Industri plastik/karet.

Tantangan perekonomian Jawa Barat pada tahun 2024 meliputi:

1. Penormalan kinerja perekonomian dari dampak dinamika perekonomian global;
2. Akselerasi produktivitas sektor kunci PDRB Jawa Barat melalui percepatan realisasi investasi;
3. Digitalisasi ekonomi dan industri yang berbasis high tech, dan industri kecil menengah dan UMKM;
4. Penguatan konektivitas dan inklusivitas ekonomi Jawa Barat, khususnya UMKM, IKM serta pariwisata; dan
5. Pencapaian kemandirian pangan berkelanjutan.

Secara sektoral, tantangan di atas digambarkan sebagai berikut:

1. Tantangan pada sektor investasi: a. Implementasi *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSSRBA) pada seluruh sektor perizinan; b. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing kawasan industri dalam menarik investasi; c. Memperkuat fungsi kelembagaan dalam promosi, business matching, market sounding, link and match investor industri kecil dan industri besar; dan d. Formalisasi Usaha Mikro Kecil (UMK) pada OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Tantangan pada sektor industri: a. Perwujudan kawasan industri pada Kawasan Peruntukan Industri; b. Substitusi bahan baku impor; c.

- Kemitraan industri besar dan IKM; dan d. Pemanfaatan tingkat komponen dalam negeri 40 persen.
3. Tantangan pada sektor UMKM: a. Memperkuat ekosistem digital UMKM dari hulu ke hilir; dan b. Meningkatkan kontribusi sektor UMKM dalam perekonomian Jawa Barat melalui wirausaha baru dan UMKM naik kelas.
  4. Tantangan pada sektor pariwisata: a. Operasionalisasi dan optimalisasi destinasi wisata; b. Pengembangan Desa Wisata; c. Pengembangan destinasi pariwisata berstandar nasional dan internasional; dan d. Percepatan Sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE).
  5. Tantangan pada sektor perdagangan: a. Perdagangan berorientasi ekspor ke luar negeri maupun antar provinsi; b. Standarisasi pasar rakyat ber-SNI; c. Ketersediaan komoditas dan harga-harga bahan pokok yang terjangkau melalui Pusat Distribusi Provinsi; d. Market intelligence untuk penetrasi pasar regional dan ekspor; e. Promosi dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan f. Penyediaan komoditas perdagangan yang kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya terjaga.
  6. Tantangan pada sektor pertanian dan pangan: a. Ketersediaan pangan yang terjangkau; b. Perlindungan harga ditingkat produsen; c. Peningkatan produksi komoditas substitusi bahan pangan dan hortikultura impor; dan d. Ketersediaan pangan berkualitas.
  7. Tantangan pada sektor ketenagakerjaan: a. Kompetensi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; b. Penempatan calon tenaga kerja Jawa Barat; c. Penguatan Balai Pelatihan Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; d. Pengangguran baru sebagai dampak dari relokasi industri ke luar wilayah Jawa Barat; dan e. penciptaan lapangan pekerjaan melalui usaha mandiri.

Memperhatikan kondisi saat ini serta tuntutan dan tantangan yang akan dihadapi ke depan maka proyeksi kinerja ekonomi tahun 2023 dan 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1.  
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat  
Tahun 2022-2024

NO	Indikator	Realisasi 2022 <sup>1)</sup>	Target	
			2023 <sup>2)</sup>	2024 <sup>3)</sup>
1	Nilai PDRB <sub>ADHB</sub> (triliun rupiah)	2.422,78	2.641,42- 2.706,48	2.961,28
2	Laju Pertumbuhan PDRB (persen)	5,45	4,35	5,42
3	Inflasi (persen)	6,04	3,00	2,50
4	Pendapatan per Kapita (juta rupiah) <sup>2)</sup>	48,32	49,29	57,28
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	8,31	9,69	8,01
6	Persentase Penduduk Miskin (persen)	7,98	7,54	7,31
7	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHB (triliun rupiah)	576,89	531,87	...

Sumber: 1) BPS Provinsi Jawa Barat 2023 (C to C)

2) RKPD Tahun 2023 Provinsi Jawa Barat dan

3) Hasil Hitungan Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2023.

Kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2024 diharapkan telah memasuki fase pemantapan dan stabilisasi pertumbuhan menuju penormalan ekonomi. Tiga sektor lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Jawa Barat yaitu Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan akan didorong untuk tetap tumbuh positif seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi nasional. Sektor-sektor lainnya seperti sektor Informasi dan Komunikasi, Real Estate dan Jasa Perusahaan juga diperkirakan menjadi sektor yang tumbuh positif pada tahun 2024.

### 3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kota di Jawa Barat yang memiliki perekonomian yang cukup berkembang. Sebagai pusat perekonomian di priangan timur, Kota Tasikmalaya memiliki potensi dan tantangan ekonomi yang dinamis.

Sektor perdagangan masih menjadi sektor yang dominan dalam perekonomian kota Tasikmalaya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pasar tradisional dan modern yang tersebar di seluruh wilayah kota. Selain perdagangan, sektor industri dan jasa juga mulai berkembang di Kota Tasikmalaya. Sektor industri yang berkembang adalah industri kecil dan menengah, seperti industri kerajinan tangan, pakaian, dan makanan.

Sektor Pertanian masih menjadi sektor penting dalam perekonomian Kota Tasikmalaya, terutama pada sektor tanaman pangan seperti padi, jagung, dan ubi kayu. Selain itu, pertanian juga mencakup tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan. Potensi sektor pariwisata di kota Tasikmalaya masih belum sepenuhnya dimanfaatkan, diantaranya objek wisata alam, sejarah, dan kuliner yang menarik untuk dikunjungi. Selain itu, ketersediaan sarana akomodasi terutama Hotel yang berlevel nasional di Kota Tasikmalaya dapat mendorong kunjungan wisatawan ke Kota Tasikmalaya.

Sebagai Kota yang terus berkembang, memiliki daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di kota Tasikmalaya dengan tersedianya tenaga kerja yang relative murah, dukungan kawasan investasi serta pelayanan perijinan yang baik melalui Mall Pelayanan Publik. Hal ini memungkinkan terciptanya lapangan kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Tantangan perekonomian kota Tasikmalaya pada tahun 2024, diantaranya adalah:

1. Penormalan kinerja perekonomian dari dampak dinamika perekonomian global;
2. Ketergantungan pada sektor perdagangan: Perekonomian Kota Tasikmalaya masih sangat bergantung pada sektor perdagangan dan distribusi, sehingga rentan terhadap fluktuasi ekonomi yang terjadi di sektor tersebut;
3. Kurangnya kualitas sumber daya manusia terutama dalam hal keahlian dan keterampilan yang diperlukan dalam sektor-sektor baru. Hal ini salah satu penyebab masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Tasikmalaya;
4. Akselerasi produktivitas sektor kunci PDRB Kota Tasikmalaya;
5. Digitalisasi ekonomi dan industri kecil menengah dan UMKM;
6. Pencapaian kemandirian pangan berkelanjutan.

Oleh karena itu, pemerintah Kota Tasikmalaya perlu mengambil langkah strategis untuk mengatasi tantangan tersebut dan memperkuat

sektor-sektor lain dalam perekonomian kota. Prospek perekonomian kota Tasikmalaya pada tahun 2024, diantaranya adalah:

1. Potensi sektor pariwisata: Kota Tasikmalaya memiliki potensi wisata yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, seperti wisata alam, sejarah, dan kuliner. Pengembangan sektor pariwisata dapat membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi kota Tasikmalaya.
2. Pertumbuhan sektor industri: Meskipun masih terbatas, sektor industri di Kota Tasikmalaya memiliki potensi untuk berkembang. Keberadaan sumber daya alam dan tenaga kerja yang murah dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di kota ini.
3. Diversifikasi sektor ekonomi: Diversifikasi sektor ekonomi dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sektor perdagangan dan distribusi. Pengembangan sektor-sektor seperti pertanian dan perikanan, serta sektor teknologi informasi dan komunikasi, dapat membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi kota Tasikmalaya.

Perekonomian di Kota Tasikmalaya selama 2 (dua) tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang positif, setelah sebelumnya pada tahun 2021 mengalami kontraksi pada angka -2,01 persen. Berikut capaian indikator makro tahun 2021-2022.

Tabel 3.2.  
Indikator Pembangunan Ekonomi Tahun 2021 - 2022

Indikator Pembangunan	2021	2022
Indeks Pembangunan Manusia (Point)	73,31	73,83
Angka Kemiskinan (%)	13,13	12,72
Penduduk Miskin (ribu orang)	89,46	87,13
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,66	6,62
Jumlah Pengangguran Terbuka (Orang)	26.236	22.964
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,57	5,01
Inflasi (%)	1,17	6,65
PDRB per Kapita ADH Berlaku (Juta Rupiah)	31,56	34,05
PDRB per Kapita ADH Konstan (Juta Rupiah)	22,08	22,88
PDRB ADH Berlaku (Triliun)	22,85	24,97
Indeks Gini (indeks)	0,414	0,405

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, data diolah, 2023.

Disamping kondisi tersebut diatas, keadaan yang tidak menguntungkan diharapkan menjadi pendorong kekuatan dalam pembangunan perekonomian Kota Tasikmalaya, demikian pula dengan kendala dan tantangan yang tentunya harus diminimalisir oleh pemerintah daerah, salah satunya seperti terbatasnya sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang berkualitas, daya beli yang masih rendah, tingkat kemiskinan yang masih tinggi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kesenjangan dan faktor lainnya.

### 3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

RKP Tahun 2024 bertema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Sebagai RKP tahun kelima dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, RKP 2024 dijabarkan dalam 8 Arah Kebijakan yang terdiri dari:

- 1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- 2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
- 3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- 4) penguatan daya saing
- 5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
- 6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
- 7) percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)
- 8) pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024, RKP 2024 tetap melanjutkan pelaksanaan tujuh Prioritas Nasional (PN).

Tujuh Prioritas Nasional (PN) dalam RKP 2024, yakni PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, PN 6 Membangun Lingkungan Hidup: Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, serta PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

RKP 2024 menetapkan sejumlah sasaran pembangunan, yakni sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3.  
Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Indikator Pembangunan	Target 2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,7
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,0 - 5,7
Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 – 7,5
Nilai Tukar Nelayan	107-110
Rasio Gini (indeks)	0,374 – 0,377
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,99 – 74,02
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%) *menuju target 29% di 2030 (Paris Agreement)	27,27 %
Nilai Tukar Petani	105-108

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2024.

Arah kebijakan tahun 2024 difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengejar sasaran pembangunan jangka menengah serta mengembalikan *trajectory* jangka panjang. Arah kebijakan tersebut akan mendorong penguatan pondasi ekonomi pada tahun selanjutnya untuk menjadi tahun dasar pelaksanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045.

Arah kebijakan ekonomi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Fokus kebijakan makro tahun 2024 terdiri dari percepatan transformasi ekonomi, pembangunan inklusif, pembangunan berkelanjutan dan mewujudkan stabilitas ekonomi.

- 2) Mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi pada target 5,3-5,7 persen.
- 3) Stabilitas eksternal yaitu dengan menjaga kinerja neraca pembayaran Indonesia (NPI) yang di topang dengan dukungan kebijakan hilirisasi komoditas serta perluasan negara tujuan ekspor.
- 4) Arah kebijakan fiskal melalui fostur makro fiskal yang diarahkan konsolidatif, namun tetap fleksibel untuk memberi ruang bagi pencapaian prioritas pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan produktivitas guna mengakselerasi pelaksanaan transformasi ekonomi dengan mempertimbangkan (i) penyelesaian agenda pembangunan, *major project* dan janji presiden sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara serta penyelenggaraan pemilihan presiden RI (pelaksanaan tahun politik).
- 5) Stabilitas moneter melalui kebijakan pengendalian inflasi yang diarahkan pada upaya dan langkah strategis untuk menjaga inflasi pada rentang sasaran 1,50 – 3,50 persen (yoy).
- 6) Stabilitas sistem keuangan difokuskan pada upaya percepatan pendalaman sektor keuangan melalui pelaksanaan pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- 7) Pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan dengan indikator tingkat pengangguran terbuka pada kisaran 5,0-5,7 persen, tingkat kemiskinan dikisaran 6,5–7,5 persen, rasio gini pada kisaran 0,374–0,377 poin, indeks pembangunan manusia ditargetkan 73,99 – 74,02 poin, ekonomi hijau dan rendah karbon melalui penurunan emisi GRK sebesar 27,27 persen, NPT pada kisaran 105-108, NTN pada kisaran 107-110 serta pemerataan pembangunan terutama wilayah kawasan timur Indonesia.

Arah kebijakan nasional dalam pengembangan wilayah Tahun 2024 yaitu:

- 1) mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19 dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan gaya hidup sehat dan berkelanjutan;
- 2) mempercepat transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah;
- 3) mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah; dan
- 4) mempercepat pemerataan kualitas hidup antarwilayah.

Strategi nasional dalam pengembangan wilayah Tahun 2024 yaitu:

- 1) strategi pertumbuhan dengan mendorong pengembangan kawasan strategis seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), destinasi pariwisata, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan prioritas nasional, kawasan transmigrasi serta Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) perbatasan negara; dan
- 2) strategi pemerataan dengan mempercepat penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, kawasan perbatasan pulau-pulau kecil terluar dan terdepan serta kawasan rawan bencana.

Sasaran nasional dalam pengembangan wilayah Tahun 2024 yaitu:

- 1) mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan daerah;

- 2) mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali, dan
- 3) meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah.

Prioritas pengembangan wilayah nasional Tahun 2024 adalah investasi, industri pengolahan dan pariwisata. Arah kebijakan investasi yaitu: percepatan investasi industri, pariwisata dan infrastruktur; penyiapan peta potensi investasi daerah; fasilitasi relokasi investasi swasta dari luar negeri; penuntasan penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko; dan deregulasi serta integrasi perijinan investasi. Arah kebijakan industri manufaktur yaitu: re-skilling dan up-skilling industri pengolahan; pengamanan pasokan bahan baku dan peningkatan penggunaan produksi lokal; substitusi impor dan TKDN; peningkatan ekspor hasil industri; percepatan operasionalisasi Kawasan Industri dan KEK; serta inovasi dan adaptasi teknologi. Arah kebijakan industri pariwisata yaitu: reaktivasi pasar wisatawan domestik dan mancanegara; reorientasi pada pariwisata berkualitas dan massal; penerapan standar kebersihan dan keselamatan; serta *re-skilling* dan *up-skilling* pariwisata.

Setiap wilayah dikembangkan sesuai dengan keunggulannya. Untuk wilayah Jawa-Bali fokus pengembangannya adalah:

- 1) industrialisasi berbasis pasar, memproduksi barang konsumsi, dan memanfaatkan keunggulan aglomerasi;
- 2) simpul pengolahan dalam rantai nilai domestik antar wilayah;
- 3) berpartisipasi dalam Global Value Chains;
- 4) pusat jasa modern nasional;
- 5) pintu gerbang internasional pariwisata nasional; dan
- 6) lumbung pangan nasional.

### 3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2022 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Tahun 2018-2023, hasil identifikasi permasalahan di tingkat regional dan nasional serta memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang tertera pada RPD Tahun 2024-2026, maka tema atau fokus pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 adalah "*Melanjutkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat*". Tema tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2024 diarahkan untuk mencapai kemandirian setelah menghadapi pandemi COVID-19.

Pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2024 diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, membuka kesempatan kerja yang luas serta menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan. Arah pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2024 tersebut dicapai melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi dan diferensiasi produk di sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, dengan arah kebijakan:



- a. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian serta kelautan dan perikanan;
  - b. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian;
  - c. Penerapan sistem pertanian tanaman terpadu, dan intensifikasi pertanian;
  - d. Peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan petani;
  - e. Pemenuhan kebutuhan bahan baku industri kelautan dan perikanan, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan;
  - f. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - g. Pengembangan sentra pertanian dan perikanan yang terpadu untuk meningkatkan produksi dan produktivitas;
  - h. Penerapan prinsip UMKM hijau terutama yang mengembangkan potensi unggulan daerah;
  - i. Peningkatan perhutanan sosial.
2. Pengembangan ketahanan pangan berkelanjutan, dengan arah kebijakan:
    - a. Perbaiki tata kelola pangan, dengan memperhatikan akses, ketersediaan dan pemanfaatan pangan;
    - b. Integrasi Kultur (Budaya) dalam Peningkatan Daya Saing Pangan Lokal;
    - c. Pengembangan Smart Fishing dan Sustainable Aquaculture.
  3. Peningkatan Daya Saing Produk Industri dan Perdagangan, dengan arah kebijakan:
    - a. Penerapan link and match industri kecil-industri besar;
    - b. Pengembangan IKM dan industri hijau;
    - c. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur industri serta pengembangan sentra industri terpadu;
    - d. Optimalisasi perdagangan dalam negeri dan luar negeri, serta perdagangan digital;
    - e. Peningkatan diversifikasi produk ekspor dan pasar tujuan ekspor;
    - f. Penguatan jaringan distribusi serta pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok.
  4. Peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal, transformasi perluasan kesempatan kerja, dengan arah kebijakan:
    - a. Peningkatan kemudahan berusaha dan berinvestasi;
    - b. Promosi dan peningkatan layanan investasi;
    - c. Modernisasi Koperasi dan Penciptaan UMKM Naik Kelas
    - d. Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global;
    - e. Peningkatan keterampilan angkatan kerja;
    - f. Pengembangan pendidikan vokasional sesuai dengan kebutuhan kerja;
    - g. Pendampingan dan penguatan kewirausahaan;
    - h. pembentukan wirausaha baru;
    - i. Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha kecil.
  5. Peningkatan daya saing pariwisata, dengan arah kebijakan:

- a. Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang bernilai tambah dan berdaya saing;
- b. Peningkatan dan perluasan promosi dan pemasaran pariwisata dan produk ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis;
- c. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. Pengembangan budaya lokal yang mendukung pengembangan pariwisata.

#### 3.1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Tasikmalaya

Berdasarkan RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 dan memperhatikan arah kebijakan dan kondisi ekonomi nasional dan regional, maka sasaran dan target pembangunan ekonomi makro daerah Kota Tasikmalaya tahun 2024 adalah:

Tabel 3.4  
Target Indikator Pembangunan Ekonomi Tahun 2024

Indikator Pembangunan	2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,69
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,77
Tingkat Kemiskinan (%)	11,33
Rasio Gini (indeks)	0,380
Inflasi (%)	2,65
PDRB (Triliun)	25,21
PDRB per Kapita Adh Berlaku (Juta Rupiah)	34,35
PDRB per Kapita Adh Konstan (Juta Rupiah)	24,11
Indeks Pembangunan Manusia (Point)	74,28

*Sumber: RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026*

Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi tahun 2024 sebagaimana dengan prioritas Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, maka disusun strategi dan arah kebijakan perekonomian pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian inflasi daerah, dengan arah kebijakan:
  - a. Peningkatan ketersediaan pasokan bahan pokok;
  - b. Peningkatan kemandirian pangan masyarakat;
  - c. Peningkatan pengawasan kebutuhan bahan pokok.
2. Peningkatan iklim usaha dan inventasi yang berdaya saing, dengan arah kebijakan:
  - a. Peningkatan pelayanan penanaman modal yang mudah, cepat, dan transparan;
  - b. Peningkatan promosi, pengembangan iklim dan pengendalian penanaman modal.

3. Peningkatan kompetensi pencari kerja dan optimalisasi *link and match* dunia kerja, dengan arah kebijakan:
  - a. Peningkatan pelatihan kompetensi bagi angkatan kerja;
  - b. Peningkatan pembinaan hubungan industrial dan memberikan jaminan perlindungan bagi tenaga kerja.
4. Peningkatan dan pengembangan UMKM, dengan arah kebijakan Peningkatan kualitas dan produktivitas usaha mikro dan kecil.
5. Peningkatan dan pengembangan pertanian dan perikanan dengan arah kebijakan Peningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian dan perikanan yang ditunjang oleh pengelolaan sumber daya air yang memadai;
6. Peningkatan dan pengembangan pariwisata dengan arah kebijakan Peningkatan pembinaan dan fasilitasi bagi pelaku usaha sektor pariwisata perkotaan dan ekonomi kreatif;
7. Peningkatan dan pengembangan perdagangan dengan arah kebijakan Peningkatan revitalisasi pasar rakyat dan fasilitasi perdagangan dan jasa;
8. Peningkatan dan pengembangan industri berbasis sumber daya lokal dengan arah kebijakan Peningkatan kualitas dan produktivitas industri mikro, kecil dan menengah.

### 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pada bagian ini menyajikan mengenai kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah selama satu tahun yang didukung oleh kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

Kebijakan keuangan tersebut memberikan gambaran tentang anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2024 dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah dan APBD. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Optimalisasi penerimaan dan pembiayaan daerah serta efisiensi dan efektifitas belanja daerah menjadi upaya prioritas dalam arah kebijakan keuangan daerah kedepan. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya.

Penganggaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 disusun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2023-2026. Selain pendanaan yang bersumber dari APBD, dukungan APBD Provinsi dan APBN serta pendanaan non APBD seperti dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

(TJSLP)/ *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan potensi yang dapat menunjang pendanaan pembangunan di Kota Tasikmalaya.

Berikut ini disajikan realisasi dan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.5.  
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Tasikmalaya  
Tahun Anggaran 2020 – 2024

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
4.	PENDAPATAN	1.760.907.421.698,25	2.029.687.967.700,9 2	1.902.443. 766.698.35	1.567.135.095.499 ,00	1.538.101.710.499 ,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	314.307.017.302,25	445.403.761.863,92	341.362.213.700,35	323.076.594.900,0 0	332.536.260.900,0 0
4.1.01	Pajak Daerah	122.595.847.691,00	139.830.453.627,00	159.043.569.254,00	156.708.275.900,0 0	156.708.275.900,0 0
4.1.02	Retribusi Daerah	10.008.826.528,00	9.302.738.040,00	11.877.941.377,00	17.482.117.000,00	27.047.197.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.458.363.839,00	6.221.179.774,00	6.867.125.110,00	6.405.414.000,00	7.300.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	175.243.979.244,25	290.049.390.422,92	163.573.577.959,35	142.480.788.000,0 0	141.480.788.000,0 0
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.376.288.904.396,00	1.514.206.250.837,0 0	1.475.175.680.746, 00	1.244.058.500.599 ,00	1.205.565.449.599 ,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.091.272.112.424,00	1.123.833.404.816,0 0	1.063.555.008.009, 00	1.112.017.601.000 ,00	1.073.524.550.000 ,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.083.301.230.424,00	1.104.792.686.816,0 0	1.036.787.557.009, 00	1.112.017.601.000 ,00	1.073.524.550.000 ,00
4.2.01.01.01	<i>Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH</i>	<i>843.976.429.187,00</i>	<i>847.402.128.072,00</i>	<i>825.247.528.188,00</i>	<i>825.707.467.000,0 0</i>	<i>825.707.467.000,0 0</i>
4.2.01.01.03	<i>Dana Transfer Khusus</i>	<i>239.324.801.237,00</i>	<i>257.390.558.744,00</i>	<i>211.540.028.821,00</i>	<i>286.310.134.000,0 0</i>	<i>247.817.083.000,0 0</i>
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah		19.040.718.000,00	26.767.451.000,00		
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	7.970.882.000,00				

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
	<i>Dana Penyesuaian</i>	<i>7.970.882.000,00</i>				
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	285.016.791.972,00	390.372.846.021,00	411.620.672.737,00	132.040.899.599,0 0	132.040.899.599,0 0
4.2.02.01	<i>Pendapatan Bagi Hasil</i>	<i>107.126.150.296,00</i>	<i>109.356.089.659,00</i>	<i>134.992.856.376,00</i>	<i>132.040.899.599,0</i> 0	<i>132.040.899.599,0</i> 0
4.2.02.02	<i>Bantuan Keuangan</i>	<i>177.890.641.676,00</i>	<i>281.016.756.362,00</i>	<i>276.627.816.361,00</i>		
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	70.311.500.000,00	70.077.955.000,00	85.905.872.252,00		
4.3.01.	Pendapatan Hibah	70.311.500.000,00	70.077.955.000,00			
4.3.02	Dana darurat					
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan			85.905.872.252,00		

*Sumber: RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026, LRA Tahun 2022, APBD Tahun 2023*

Tabel 3.6.  
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Tasikmalaya  
Tahun Anggaran 2020 – 2024

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
5	BELANJA DAERAH	1.743.157.214.090,00	1.942.803.908.023,00	1.912.385.803.148,68	1.645.296.638.856,00	1.577.367.211.645,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.372.725.283.236,00	1.544.299.528.302,00	1.530.875.397.474,68	1.508.809.118.363,00	1.527.480.162.811,00
5.1.01	Belanja Pegawai	755.420.130.459,00	781.454.927.968,00	789.777.565.972,00	833.261.340.578,00	840.973.975.851,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	579.136.136.658,00	683.637.096.308,00	648.183.496.775,00	581.644.915.007,00	506.579.020.711,00
5.1.03	Belanja Bunga	435.748.720,00	443.405.362,00	20.996.181,68	1.000.000.000,00	
5.1.04	Belanja Subsidi	25.552.600,00	41.906.200,00	142.670.000,00	1.250.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	35.005.833.200,00	75.572.192.464,00	92.053.368.546,00	87.167.362.778,00	177.287.166.249,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.701.881.599,00	3.150.000.000,00	697.300.000,00	4.485.500.000,00	2.640.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	321.922.174.799,00	373.887.020.203,00	378.644.240.783,00	116.029.970.493,00	34.887.048.834,00
5.2.01	Belanja Tanah	768.153.000,00	2.505.755.160,00	5.317.869.890,00	1.699.400.000,00	1.113.024.300,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.266.893.889,00	80.891.195.217,00	137.898.409.970,00	36.303.567.550,00	9.172.614.500,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	108.042.766.208,00	67.619.037.887,00	49.533.882.034,00	40.703.505.249,00	17.133.751.942,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	158.063.079.655,00	221.987.373.959,00	184.606.475.689,00	36.522.794.794,00	7.296.548.092,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.585.696.548,00	883.657.980,00	1.287.603.200,00	800.702.900,00	171.110.000,00
	Belanja Modal BLUD	7.195.585.499,00				
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	47.267.443.525,00	24.617.359.518,00	2.866.164.891,00	20.457.550.000,00	15.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	47.267.443.525,00	24.617.359.518,00	2.866.164.891,00	20.457.550.000,00	15.000.000.000,00

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
5.4	BELANJA TRANSFER	1.242.312.530,00				

*Sumber: RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026, LRA Tahun 2022, APBD Tahun 2023*



Tabel 3.7.  
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Tasikmalaya  
Tahun Anggaran 2020 – 2024

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
	SURPLUS/DEFISIT	17.750.207.608,2 5	86.884.059.677,9 2	(9.942.036.450,3 3)	(78.161.543.357, 00)	(39.265.501.146, 00)
					(4,99)	(2,55)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	14.048.311.867,2 3	32.530.576.485,4 8	32.472.811.509,4 0	78.161.543.357,0 0	39.265.501.146,0 0
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	77.418.838.521,2 3	76.516.452.975,4 8	58.034.818.129,4 0	99.661.543.357,0 0	49.265.501.146,0 0
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	35.397.875.408,2 3	31.798.519.475,4 8	49.967.311.129,4 0	89.661.543.357,0 0	39.265.501.146,0 0
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	42.020.963.113,0 0	42.485.876.490,0 0	8.062.007.000,00	10.000.000.000,0 0	10.000.000.000,0 0
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		2.232.057.010,00	5.500.000,00		
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	63.370.526.654,0 0	43.985.876.490,0 0	25.562.006.620,0 0	21.500.000.000,0 0	10.000.000.000,0 0
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan			10.000.000.000,0 0	10.000.000.000,0 0	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	7.499.999.620,00	1.500.000.000,00	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	61.870.526.654,0 0	42.485.876.490,0 0	8.062.007.000,00	10.000.000.000,0 0	10.000.000.000,0 0
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	31.798.519.475,4 8	119.414.636.163, 40	22.530.775.059,0 7	0,00	0,00

Sumber: RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026, LRA Tahun 2022, APBD Tahun 2023

Asumsi-asumsi yang mendasari proyeksi APBD tersebut diantaranya:

A. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan setiap tahun antara lain disebabkan:
  - a. Bertambahnya objek dan wajib pajak dan retribusi
  - b. Adanya peningkatan tarif untuk beberapa ayat pajak dan retribusi
  - c. Adanya peningkatan nilai jual objek pajak (NJOP) pada subjek dan objek PBB-P2 dan BPHTB
2. Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari pemerintah pusat dan kejadian luar biasa, diasumsikan adanya kenaikan dana transfer setiap tahun, dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Adanya kenaikan penerimaan dana bagi hasil pajak/bukan pajak seiring peningkatan penerimaan negara
  - b. Adanya kenaikan DAU, terutama adanya kebijakan penambahan penerimaan pegawai baru dan kenaikan gaji pegawai;
  - c. Adanya kenaikan DAK baik fisik maupun non fisik untuk membantu percepatan pembangunan daerah
  - d. Adanya kenaikan penerimaan dana bagi hasil pajak provinsi seiring peningkatan penerimaan provinsi
  - e. Adanya kenaikan bantuan keuangan untuk membantu percepatan pembangunan kabupaten/kota
3. Peningkatan lain-lain pendapatan daerah yang sah diantaranya adanya kenaikan bantuan hibah untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seiring dengan meningkatnya jumlah siswa dan kenaikan harga satuan pendidikan dana BOS.

B. Belanja Daerah

1. Besaran belanja pegawai paling tinggi sebesar 30% dari APBD tidak termasuk tunjangan guru, yang dilaksanakan secara bertahap selama 5 tahun kedepan, sehingga dimungkinkan pertumbuhan pegawai tidak ada penambahan (*zero growth*);
2. Besaran belanja infrastruktur pelayanan publik paling sedikit sebesar 40% dari APBD di luar transfer ke daerah bawahannya;
3. Belanja subsidi untuk pembayaran jasa bagi hasil pinjaman modal kerja dari lanjutan program pencetakan wirausaha baru;
4. Belanja hibah dan bantuan sosial dialokasikan untuk membantu penyelenggaraan pembangunan daerah;
5. Kebutuhan belanja publik yang semakin meningkat untuk mendanai program prioritas daerah;
6. Pemenuhan belanja yang bersumber dari DAU ditentukan;
7. Alokasi belanja untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024;
8. Penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan belanja.

C. Pembiayaan Daerah

1. Penganggaran defisit sesuai peraturan perundang-undangan
2. Proyeksi penerimaan SiLPA dan pencairan dana cadangan
3. Penambahan penyertaan modal untuk PT. BPRS Al-Madinah dan Bank Jabar Banten
4. Pembayaran Pokok Utang pada pinjaman yang dilakukan oleh BLUD.

### 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantaranya adalah:

- 1) Penggalian dan peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan (intensifikasi dan ekstensifikasi) terutama bagi sumber pendapatan pajak dan retribusi yang potensial;
- 2) Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan Perangkat Daerah penghasil;
- 3) Optimalisasi penggunaan Teknologi dan Sistem Informasi untuk pengelolaan pendapatan daerah;
- 4) Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah Penghasil, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan;
- 5) Meningkatkan penyertaan modal pada BUMD dan Perusahaan Daerah untuk peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden);
- 6) Meningkatkan pendayagunaan aset dan keuangan daerah.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah:

- 1) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penghasilan dana bagi hasil baik dari pajak maupun bukan pajak lainnya;
- 2) Meningkatkan akurasi data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan Dana Transfer;
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

Berdasarkan arah kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut di atas, untuk dapat merealisasikan proyeksi penerimaan pendapatan daerah diperlukan strategi pencapaiannya, antara lain:

Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, dapat ditempuh melalui:

- 1) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
- 2) Optimalisasi pemungutan atas pajak dan retribusi serta pengembangan sistem penagihan atas wajib pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
- 3) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah
- 4) Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
- 5) Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak, seperti pengembangan gerai/outlet, dan kerjasama dengan pihak perbankan;
- 6) Meningkatkan penyertaan modal untuk BUMD dan Perusahaan Daerah guna peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden);
- 7) Revitalisasi Perusahaan Daerah (PD) melalui berbagai upaya, antara lain: pengelolaan PD secara profesional, peningkatan sarana/prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta

mengoptimalkan peran Badan Pengawas agar PD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari publik/perbankan;

- 8) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- 9) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah, terutama dengan perbankan sehingga mempermudah pelayanan pembayaran pajak daerah melalui layanan perbankan secara langsung;
- 10) Mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan perangkat daerah penghasil.

Strategi pencapaian target Dana Perimbangan, dapat ditempuh melalui:

- 1) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak penghasilan dan Pajak lainnya yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Tasikmalaya, serta bukan pajak lainnya;
- 2) Meningkatkan akurasi data-data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan Dana Perimbangan;
- 3) Sosialisasi mengenai pungutan pajak dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
- 4) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengupayakan peningkatan Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak).

Strategi pencapaian target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dapat ditempuh melalui:

1. Sosialisasi mengenai pungutan pajak yang dikelola oleh provinsi seperti pajak kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, dan pajak metrologi, dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
2. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bantuan Keuangan.

### 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang efektif, efisien, proporsional, fokus, transparan dan akuntabel, terutama untuk belanja daerah yang prioritas seperti:

1. Pemenuhan belanja pegawai yang meliputi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai;
2. Pemenuhan alokasi anggaran untuk pelayanan dan operasional kantor perangkat daerah;
3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan bidang sosial;

4. Pemenuhan alokasi anggaran untuk urusan dan bidang tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*Mandatory Spending*);
5. Pemenuhan alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi sebagai dampak Pandemi Covid-19 terutama sektor kesehatan dan pangan;
6. Penganggaran belanja kegiatan dan program prioritas secara proporsional, rasional, efektif dan efisien berbasis program prioritas (*Money Follow Programs, Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial*);
7. Pemenuhan alokasi belanja untuk kegiatan prioritas yang menjadi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kunjungan kerja pimpinan daerah dan anggota DPRD pada saat pelaksanaan reses;
8. Pemenuhan belanja untuk program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pemenuhan target kinerja dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
9. Alokasi Belanja untuk pemilukada
10. Alokasi belanja untuk mendukung program dan kegiatan prioritas pemerintah pusat dan provinsi Jawa Barat.

### 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada:

1. Optimalisasi penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
2. Penyertaan Modal atau Investasi Daerah kepada perusahaan daerah;
3. Pengelolaan hutang terutama untuk menjaga arus kas pada BLUD.

### 3.2.4. Arah Kebijakan Pendanaan Pembangunan Daerah Lainnya

1. Dana Belanja DIPA Kementerian/Lembaga (Tugas Pembantuan dan Satker) di Daerah.

Salah satu sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk menunjang program Pembangunan di Daerah, yaitu dengan memanfaatkan dana DIPA Kementerian/Lembaga, berupa dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan dana Satker melalui Kementerian/Lembaga yang ada di daerah.

Dana Tugas Pembantuan (TP) adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Prinsip Pengelolaan Dana TP antara lain (1) Pendanaan Dekon dan Tugas Pembantuan hanya dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat di daerah (PP 38/2007), (2) Pendanaan Dekon/TP seluruhnya bersumber dari APBN, (3) Kementerian/Lembaga tidak diperkenankan meminta Daerah menyediakan dana pendamping (*cost sharing*), (4) Kegiatan Dekon/TP yang didanai mengacu pada RKP dan Prioritas Nasional (5) Pendanaan Dekon/TP memperhatikan keseimbangan pendanaan di daerah dan kebutuhan pembangunan daerah agar tepat sasaran dan tidak terkonsentrasi pada daerah tertentu (6) K/L wajib memberitahukan kegiatan Dekon/TP kepada Gubernur/Bupati/Walikota sebelum pelimpahan/penugasan dalam rangka

mendukung terwujudnya sinergisitas pusat dan daerah (7) Pengelolaan Dana Dekon/TP dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel guna mewujudkan LKPP yang Wajar Tanpa Pengecualian.

Karakteristik Kegiatan Tugas Pembantuan Sifat kegiatan fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang menambah nilai aset pemerintah, antara lain pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta dapat berupa kegiatan yang bersifat fisik lainnya, Kegiatan bersifat fisik lainnya antara lain pengadaan barang habis pakai, seperti obat-obatan, vaksin, pengadaan bibit dan pupuk, atau sejenisnya yang diserahkan kepada pemerintah daerah serta Pengadaan aset Belanja Barang Fisik Lainnya.

Sedangkan Dana Satker (Satuan Kerja) di daerah terbagi kedalam 2 (dua) Jenis Satker, Yaitu Satker Pusat, adalah satker yang kewenangan dan tanggung jawabnya melakukan kegiatan pengelolaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor pusat Kementerian Negara/Lembaga yang lokasinya dapat berada di pusat dan atau di daerah serta Satker/Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Negara/Lembaga, yaitu instansi vertikal di daerah yang kewenangan dan tanggung jawabnya melakukan kegiatan pengelolaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berasal dari kantor pusat.

Satker dibentuk untuk menyelenggarakan fungsi tertentu pemerintahan. Untuk membiayai pelaksanaan fungsi tersebut, pemerintah menyediakan alokasi dana melalui mekanisme penganggaran Satker yang ada di Daerah. Peran Koordinasi Pemerintah Daerah mutlak diperlukan dalam rangka koordinasi memberikan input menyusun rencana kerja dan anggaran satker secara jelas, terencana dan berkesinambungan (expenditure framework) dalam menghasilkan layanan bagi masyarakat (public services) di daerah.

## 2. Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR)

Sumber alternatif lainnya yang dapat digunakan dalam membiayai pembangunan daerah adalah melibatkan pihak swasta melalui penggunaan Dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR).

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah membentuk regulasi berupa Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Di Kota Tasikmalaya

TJSL dan PKBL diarahkan untuk melaksanakan program pembangunan sebagai berikut:

- a) Sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- b) Lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan;
- c) Kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah Kota Tasikmalaya dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi upaya kesehatan; pembiayaan kesehatan; sumberdaya kesehatan; sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; serta pemberdayaan masyarakat;

- d) Pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal;
- e) Peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, agribisnis, perikanan, dan pasar rakyat;
- f) Infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan;
- g) Sarana dan prasarana keagamaan; dan
- h) Program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dengan Pemerintah Daerah

Dalam rangka terus mendorong minat pihak swasta untuk berkerjasama dalam pembangunan daerah melalui Program TJSL dan PKBL dilakukan melalui upaya-upaya:

- a) Sosialisasi program Program TJSL dan PKBL kepada pihak swasta dan perusahaan yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya;
- b) Meningkatkan koordinasi dan sinergi program pembangunan dengan perusahaan-perusahaan yang telah bermitra dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- c) Memberikan penghargaan bagi pihak swasta dan perusahaan yang telah berkerjasama dan melaksanakan program Program TJSL dan PKBL;
- d) Mengoptimalkan peran dan fungsi tim fasilitasi Program TJSL dan PKBL dalam meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dan perusahaan.

### 3. Pemanfaatan Dana Umat.

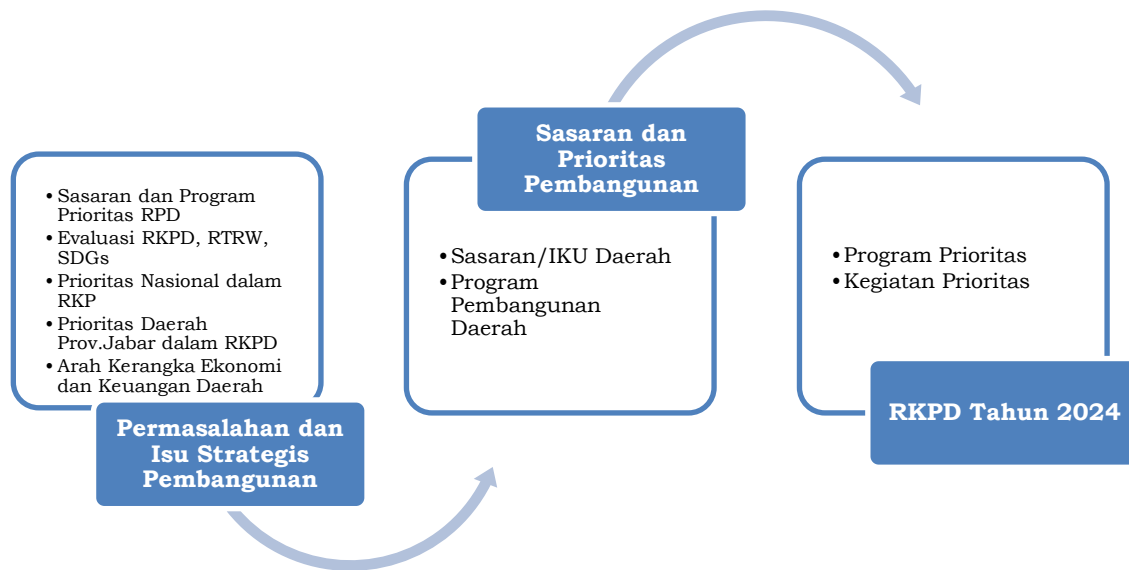
Pemanfaatan dana umat yang himpun oleh lembaga-lembaga keuangan non pemerintah seperti LAZNAS, yayasan untuk mendukung pembangunan melalui cara mengsinergikan sasaran program lembaga tersebut dengan sasaran pembangunan kota.

## BAB IV

### SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rumusan perencanaan pembangunan Tahun 2024 disajikan dalam bentuk kerangka pikir perencanaan pembangunan RPKD Daerah Kota Tahun 2024, seperti terlihat pada Gambar 4.1 berikut:

Gambar 4.1  
Kerangka Pikir Rumusan RPKD Daerah Kota



Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota tahun 2024 merupakan tahun kedua dari RPD Tahun 2023-2026. Sesuai dengan arah kebijakan RPD Daerah Kota Tahun 2023-2026, tema atau fokus pembangunan Daerah Kota pada tahun 2024 adalah “Stabilitas Keamanan dan Peningkatan Daya Saing untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat”. Tema ini menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPKD) Daerah Kota Tahun 2024.

Perencanaan pembangunan Kota Tasikm Daerah Kota pada tahun 2024 diimplementasikan dengan: (1) tetap menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 5 (lima) prioritas pembangunan daerah, dengan 5 (lima) tujuan, dan 11 (sebelas) sasaran pembangunan daerah yang ada di dalam RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026; (2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan kota dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*), serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2024;

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah Kota pada tahun 2024 mengacu pada (1) Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan RPD Daerah Kota Tahun 2023 - 2026, (2) hasil evaluasi pelaksanaan RPKD tahun sebelumnya, (3) RTRW 2011-2031, (4) SDGs dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD Daerah Kota Tahun 2023 - 2026, (5) Prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rancangan Awal RKP (6) Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rancangan RPKD Provinsi Jawa Barat (7) identifikasi permasalahan pembangunan dan mempertimbangkan rancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah.



Guna mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan. Hasil pengendalian dan evaluasi memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di Daerah Kota. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis, yang akan dijadikan sebagai salah satu masukan dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan pembangunan nasional tahun 2024, amanat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs, dan dokumen perencanaan strategis lainnya, serta kondisi sosial dan ekonomi pasca pandemi COVID-19 di Daerah Kota.

Dalam rangka percepatan pemulihan pasca pandemi COVID-19, pemerintah bersama dengan seluruh pemerintah daerah melakukan berbagai upaya, baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu efisiensi anggaran diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi, penanganan kesehatan, dan penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net).

Untuk memulihkan turunnya indikator makro pembangunan daerah, sejalan dengan prioritas pemulihan ekonomi nasional, maka konsentrasi prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2024 tetap bertumpu pada pemulihan ekonomi. Demikian juga untuk mendorong pemulihan perekonomian daerah, pada tahun 2024 pemulihan ekonomi akan dikonsentrasikan pada pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengurangi kemiskinan, peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, peningkatan kualitas dan produksi industri, usaha mikro serta koperasi, revitalisasi pasar rakyat dan fasilitasi perdagangan, dan pemulihan kepercayaan investasi dengan memperluas stimulus kemudahan perijinan.

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan dari upaya-upaya dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan ini merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

##### 4.1.1. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian**

***Berlandaskan Gotong Royong***". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia  
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur  
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi  
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi  
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi;
5. Transformasi Ekonomi  
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedang isu strategis yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan:
  - a) Keberlanjutan Sumber Daya Alam;
  - b) Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi;
  - c) Transformasi Struktural Berjalan Lambat;
  - d) Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan:
  - a) Tingginya angka kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI);
  - b) Masih adanya ketimpangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio Gini perdesaan dan perkotaan;
  - c) Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa;
  - d) Terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan;
  - e) Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing:
  - a) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
  - b) Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk;
  - c) Pemenuhan Layanan Dasar;
  - d) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
  - e) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan:
  - a) Melemahnya Ideologi Pancasila dan Ketahanan Budaya Bangsa;
  - b) Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia;
  - c) Belum Mantapnya Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti;
  - d) Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Ajaran Agama;
  - e) Belum Kukuhnya Moderasi Beragama untuk Memperkuat Toleransi dan Kerukunan;
  - f) Belum Optimalnya Peran Keluarga;
  - g) Rendahnya Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar:
  - a) Infrastruktur Pelayanan Dasar;
  - b) Infrastruktur Ekonomi;
  - c) Infrastruktur Perkotaan;
  - d) Energi dan Ketenagalistrikan;
  - e) Transformasi Digital.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim:
  - a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
  - b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
  - c) Pembangunan Rendah Karbon.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik:
  - a) Konsolidasi Demokrasi;
  - b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
  - c) Penegakan Hukum Nasional;
  - d) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
  - e) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Adapun agenda pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Selain hal tersebut, dalam RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2022, evaluasi kebijakan tahun 2023, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, sasaran RPJMN 2020–2024, dan isu strategis yang menjadi perhatian.

Tema RKP Tahun 2024 juga disusun sebagai respons terhadap momentum keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2022. Capaian tersebut sangat fundamental dan signifikan setelah beberapa tahun sebelumnya indikator pembangunan mengalami kontraksi akibat pandemi covid-19.

Ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 19,87 persen. Capaian ini cukup baik mengingat pertumbuhan ekonomi nasional terkontraksi sebesar -2,07 persen pada tahun 2020.

Transformasi ekonomi Indonesia akan sangat bergantung pada kebijakan peningkatan produktivitas, terutama dalam meningkatkan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, serta melakukan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang.

Redesain transformasi ekonomi juga untuk menjawab tantangan perubahan situasi dan peradaban dunia yang begitu cepat dan sistematis di berbagai bidang seperti sistem kesehatan, otomasi dan digitalisasi, *artificial intelligence (AI)* dan big data, disrupti rantai pasok global, dan pergeseran pola kerja menjadi telework. Selain itu, paradigma pembangunan beralih kepada ekonomi hijau.

Secara umum, perekonomian domestik akan mengalami tekanan pada tahun 2023, seiring dengan tingginya ketidakpastian yang sedang dihadapi oleh perekonomian global yang berdampak pada:

- a. Melemahnya konsumsi rumah tangga seiring dengan tekanan inflasi;
- b. Melambatnya ekspor barang seiring dengan normalisasi harga komoditas;
- c. Windfall yang berkurang menyebabkan penerimaan negara berkurang dan belanja yang berkurang seiring dengan kembalinya defisit fiskal ke 3 persen.

Sementara di tahun 2024, aktivitas ekonomi diperkirakan akan meningkat dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 5,4 – 5,7 persen, yang didorong oleh:

- a. Meningkatnya konsumsi rumah tangga seiring dengan inflasi yang terkendali;
- b. Meningkatnya investasi seiring dengan terjaganya stabilitas ekonomi.

Investasi memiliki kecenderungan mengalami perlambatan pada tahun politik yang berakibat pada melambatnya pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu untuk menjaga kestabilan politik untuk mengurangi ketidakpastian.

Agenda tahun 2024 antara lain Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak, Jajaran Pemerintahan Baru (Legislatif, Presiden, dan Kepala Daerah) dan Pemindahan IKN Tahap Awal dan Keberlanjutan Pembangunan.

#### *Highlight* Isu Strategis dalam Pengembangan Wilayah:

1. Pengembangan kawasan strategis (KI, KEK, KPBPB, KSPN/DPP) dengan meningkatkan peran badan memanfaatkan pengelola kawasan dalam peluang investasi dan promosi, serta peningkatan kualitas dan daya saing SDM kawasan.
2. Mewujudkan komoditas unggulan sebagai pengungkit ekonomi wilayah dan kawasan dengan risiko kerentanan pada kondisi eksternal seperti bencana alam dan kondisi iklim.
3. Penguatan pengaturan kawasan perkotaan yang lebih holistik dan trans-sektoral.
4. Penyelesaian rencana tata ruang untuk mendukung kepastian investasi dan pelaksanaan berbasis elektronik, peningkatan hukum hak atas tanah, perizinan kepastian peningkatan serta pelayanan pertanahan modern berbasis digital.
5. Pengembangan kawasan transmigrasi, tertinggal, perdesaan, dan perbatasan melalui pembangunan infrastruktur dan upaya peningkatan aksesibilitas, kapasitas SDM sebagai ketimpangan antarwilayah.
6. Peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan dan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien untuk penyediaan pelayanan dasar.

Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Pada RKP Tahun 2023 pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi dan indikator makro lainnya pada kondisi prapandemi covid-19. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, RKP Tahun 2023 mendorong transformasi ekonomi sebagai *game changer* menuju Indonesia Maju. Transformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antarsektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Peningkatan produktivitas

juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan.

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2023-2024, maka tema pembangunan RKP Tahun 2024 ditetapkan yaitu "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui:

1. Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, aksentuasi indikator pembangunan tahun 2024 diarahkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Lebih lanjut, target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2024 sebagai berikut.

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,70-6,0
2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%) sebesar 27,3
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) sebesar 3,6 – 4,3
4. Rasio Gini (nilai) 0,360 – 0,374
5. IPM 75,54 poin
6. Tingkat Kemiskinan 6,0-7,0

#### 4.1.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (RPD 2024-2026)

RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2024 merupakan RKPD tahun pertama yang mengacu pada RPD Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026. Isu strategis RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 yaitu:

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan;
3. Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang berkelanjutan;
4. Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah

Sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPD 2024-2026, Pembangunan Provinsi Jawa Barat memiliki tema "Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat". Untuk mewujudkan tema tersebut maka dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat. Adapun tujuan dan sasaran RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1, Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat;
4. Meningkatnya Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Pembangunan Pemuda;

5. Terkendalinya Pertumbuhan dan Distribusi Penduduk.

Tujuan 2, Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Daerah, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian dan Perdagangan
2. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Daerah;
3. Meningkatnya Nilai Investasi dan Kualitas Usaha serta Meningkatnya Daya Saing dan Penempatan Tenaga Kerja;
4. Meningkatnya Kinerja Pariwisata Berkelas Dunia dan Ekonomi Kreatif.

Tujuan 3, Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan Hidup, dengan sasaran:

1. Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan;
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
3. Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah.

Tujuan 4, Meningkatkan Kualitas Demokrasi dan Birokrasi yang Didukung oleh Inovasi Daerah, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi;
2. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
3. Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2024 merupakan RKPD tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya 2023-2026. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, penentuan tujuan dan sasaran pada RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026 didasarkan pada visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahap keempat dan isu strategis yang aktual.

Visi yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Darah Kota Tasikmalaya (RPJPD) tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

***“DENGAN IMAN DAN TAKWA KOTA TASIKMALAYA SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN INDUSTRI TERMAJU DI JAWA BARAT”***

Visi tersebut mengandung makna:

1. Visi Kota Tasikmalaya tersebut merupakan arah dan gambaran masa depan (2025) yang akan dituju oleh segenap masyarakat guna mensejahterakan dirinya melalui fungsi dan kegiatan-kegiatan perdagangan dan industri dengan modal nilai-nilai iman dan taqwa.
2. Dipilihnya aktivitas perdagangan dan industri sebagai aktivitas utama Kota Tasikmalaya tidak terlepas dari karakteristik masyarakat

Kota Tasikmalaya yang dikenal sebagai pedagang dan pelaku industri (khususnya perdagangan dan industri kecil) yang tangguh.

3. Yang dimaksud dengan “pusat” pada pernyataan visi di atas adalah suatu kawasan yang melayani wilayah lain.
4. “Termaju di Jawa Barat” pada pernyataan visi di atas mengandung arti bahwa Kota Tasikmalaya termasuk salah satu kota/kabupaten termaju di Jawa Barat pada sektor perdagangan dan industri.

Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan Kota Tasikmalaya sebagai kota bernuansa agamis, demokratis dan taat hukum.
2. Mempertahankan Kota Tasikmalaya sebagai kota yang berbudaya dan berwawasan global.
3. Menghasilkan pelaku-pelaku bisnis di sektor ekonomi khususnya industri, perdagangan, jasa dan pertanian yang mempunyai daya saing tinggi serta meningkatkan produktivitas dan iklim hubungan industri yang sehat.
4. Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas yang mampu menciptakan keberkelanjutan pembangunan di sektor industri, perdagangan, jasa dan pertanian sehingga mampu mendorong tumbuh kembangnya sektor pariwisata di Kota Tasikmalaya.
5. Menciptakan dan memelihara pelayanan publik yang berbasis pada good governance dengan berlandaskan pada prinsip government entrepreneurship sehingga mampu menghasilkan iklim mandiri dan partisipatif pada semua lapisan masyarakat di Kota Tasikmalaya.
6. Menciptakan pembangunan Kota Tasikmalaya yang berbasis pada pengembangan sektor-sektor unggulan dengan mengoptimalkan prasarana dan sarana kota secara berkelanjutan.
7. Mewujudkan Kota Tasikmalaya yang sehat, nyaman dan berwawasan lingkungan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Tasikmalaya sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1: Meningkatnya kesejahteraan sosial, dengan 1 (satu) sasaran yaitu:

S1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan;

Tujuan 2: Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas berbasis kearifan lokal, yang terdiri dari 5 (lima) sasaran yaitu:

S2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat;

S3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;

S4. Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender;

S5. Meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah;

S6. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib.

Tujuan 3: Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas, yang terdiri dari 2 (dua) sasaran yaitu:

S7. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan;



S8. Meningkatnya iklim penanaman modal untuk membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Tujuan 4: Terwujudnya infrastruktur dan penataan ruang yang mendukung kota nyaman huni berwawasan lingkungan, yang terdiri dari 2 (dua) sasaran yaitu:

S9. Meningkatnya layanan infratraktur kota yang berkualitas;

S10. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Tujuan 5: Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi, yang terdiri dari 1 (satu) sasaran yaitu:

S11. Meningkatnya kualitas Pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang inovatif berbasis teknologi informasi.

Sasaran pembangunan jangka menengah Kota Tasikmalaya ditujukan untuk mewujudkan tujuan setiap misi. Sasaran pembangunan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020-2024. Keterkaitan sasaran pembangunan daerah dalam RPD 2023-2026 dengan sasaran RPJMN Tahun 2020-2024.

Tabel 4.1.  
Keselarasan Sasaran RPD Kota Tasikmalaya  
2023-2026 dengan Sasaran RPJMN 2020-2024

Sasaran RPJMN 2020-2024	Sasaran RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026
Sasaran nasional 1: "Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan"	S7. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan;
	S8. Meningkatnya iklim penanaman modal untuk membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha
Sasaran nasional 2: "Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian"	S7. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan;
	S8. Meningkatnya iklim penanaman modal untuk membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha
Sasaran nasional 3: "Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera"	S7. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan;
	S8. Meningkatnya iklim penanaman modal untuk membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha
	S1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan
Sasaran nasional 4: "Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan"	S4. Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender;
Sasaran nasional 5: "Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk"	S1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan
Sasaran nasional 6: "Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan"	S3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
Sasaran nasional 7: "Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda"	S4. Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender;
Sasaran nasional 8: "Terwujudnya pengentasan kemiskinan"	S1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Sasaran RPJMN 2020-2024	Sasaran RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026
Sasaran nasional 9: “Meningkatnya produktivitas dan daya saing”	S7. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan;
Sasaran nasional 10: “Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya”	S5. Meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah
Sasaran nasional 11: “Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan”	S5. Meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah
Sasaran nasional 12: “Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial”	S6. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib.
Sasaran nasional 13: “Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat”	S6. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib.
Sasaran nasional 14: “Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa”	S6. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib.
Sasaran nasional 15: “Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif”	S2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat
Sasaran nasional 16: “Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar”	S2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat
Sasaran nasional 17: “Meningkatnya konektivitas wilayah”	S9. Meningkatnya layanan infrastruktur kota yang berkualitas
Sasaran nasional 18: “Meningkatnya layanan angkutan umum masal di 6 (enam) kota metropolitan”	S9. Meningkatnya layanan infrastruktur kota yang berkualitas
Sasaran nasional 19: “Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien”	S9. Meningkatnya layanan infrastruktur kota yang berkualitas
Sasaran nasional 20: “Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi	S9. Meningkatnya layanan infrastruktur kota yang berkualitas
Sasaran nasional 21: “Peningkatan kualitas lingkungan hidup”	S10. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
Sasaran nasional 22: “Peningkatan ketahanan bencana dan iklim”	S10. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
Sasaran nasional 23: “Pembangunan rendah karbon”	S10. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
Sasaran nasional 24: “Menguatnya stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik”	S6. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib.

Tujuan dan sasaran pembangunan RKP Kota Tasikmalaya Tahun 2024 mengacu kepada tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan tujuan dan sasaran RKP Tahun 2024 dan RKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2024. Tujuan dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2.  
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Realisasi		Target Capaian	
					2021	2022	2023	2024
1	T1. Meningkatnya kesejahteraan sosial		<b>IT.1. Angka kemiskinan</b>	<b>(%)</b>	<b>13,13</b>	<b>12,72</b>	<b>12,33</b>	<b>11,33</b>
		S1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan	IS.1. Angka kemiskinan	(%)	13,13	12,72	12,33	11,33
			IS.2. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	(%)	100	94,18	90	90
2	T2. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas berbasis kearifan lokal		<b>IT.2. Indeks Pembangunan Manusia</b>	<b>Poin</b>	<b>73,31</b>	<b>73,83</b>	<b>73,95</b>	<b>74,28</b>
		S2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat	IS.3. Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,52	9,53	9,76	9,89
			IS.4. Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,46	13,47	13,50	13,52
			IS.5. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	%	69,12	84,53	72	75
		S3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	IS.6. Usia Harapan Hidup	Tahun	72,34	72,63	72,57	72,69
			IS.7. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	%	48,09	81,59	75	80
		S4. Meningkatkan pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender	IS.8. Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,81	1,32	0,71	0,61
			IS.9. Indeks Pemberdayaan Gender	poin	59,51	Belum Rilis	60,00	60,10
			IS.10. Indeks Pembangunan Gender	poin	91,74	91,87	91,84	91,94
		S5. Meningkatkan pembinaan dan apresiasi terhadap	IS.11. Persentase Capaian Prestasi Kepemudaan tingkat provinsi	%	-	-	2,20	3,30
			IS.12. Persentase Capaian Prestasi Olahraga tingkat provinsi	%	60	60	34,15	36,59

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Realisasi		Target Capaian	
					2021	2022	2023	2024
		pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah						
			IS.13. Persentase Pelesetarian Kebudayaan	%	-	-	63,73	68,63
		S6. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	IS.14. Indeks Pencapaian SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum	Poin	98,47	86,67	100	100
			IS.15. Indeks Resiko Bencana	Poin	Sedang (117,37)	-	Sedang (117,15)	Sedang (117,15)
<b>3</b>	<b>T.3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang berkualitas</b>		<b>IT.3. PDRB adh Berlaku</b>	<b>Triliun</b>	<b>22,85</b>	<b>24,97</b>	<b>24,40</b>	<b>25,21</b>
		S7. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	IS.16. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,57	5,01	5,15	5,69
			IS.17. PDRB Perkapita	Juta / Tahun/Kapita	31,56	34,05	33,40	34,35
			IS.18. Pengeluaran Per Kapita	Juta / Tahun/Kapita	10,213	10,57	10,424	10,531
			IS.19. Indeks Gini	Poin	0,414	0,405	0,390	0,380
			IS.20. Inflasi	%	1,17	6,65	2,47	2,65
		S8. Meningkatnya iklim penanaman modal dan kesempatan kerja	IS.21. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,66	6,62	7,35	5,77
			IS.22. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adh Berlaku	(milyar)	7.573,28	8.072,08	8.002,90	8.283,45
<b>4</b>	<b>T.4. Terwujudnya Infrastruktur dan</b>		<b>IT.4. Indeks kualitas infrastruktur dan Lingkungan Hidup</b>	<b>Poin</b>	-	-	70,53	74,48

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Realisasi		Target Capaian		
					2021	2022	2023	2024	
	<b>Penataan Ruang yang mendukung Kota Nyaman Huni berwawasan Lingkungan</b>	S9. Meningkatnya layanan infratraktur kota yang berkualitas	IS.23. Indeks Persentase kemantapan jalan	poin	-	-	59,23	62,05	
			IS.24. Indeks kawasan permukiman layak huni	poin	-	-	15,88	31,77	
			IS.25. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	58,71	100	91,07	94,74	
			IS.26. Indeks Pencapaian Minimal Bidang Perumahan dan Permukiman	%	100	60	100	100	
		S10. Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;	IS.27. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	-	51,94	57,93	58,15	
			IS. 28. Persentase Pengelolaan sampah	%	77,86	81,77	99	99	
			IS.29. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	-	97,02	90	80	
<b>5</b>	<b>T5. Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi</b>		<b>IT.5. Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>Kategori/Poin</b>	(CC) 57,58	(B) 61,70	CC (57,58-60,00)	CC (57,58-60,00)	
			S11. Meningkatkan kualitas layanan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang inovatif dan berbasis teknologi informasi;	IS.30. Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori/Poin	Baik (83,32)	Baik (83,32)	Baik (83,32 - 85,80)	Baik (83,32 - 85,80)
			IS.31. Indeks Inovasi Daerah	Kategori/Poin	Inovatif (36,43)	Inovatif (38,70)	Inovatif (46,43)	Inovatif (52,43)	
			IS.32. Indeks SPBE	Kategori/Poin	Baik (2,68)	Baik (2,62)	Baik (2,9)	Baik (3,0)	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Realisasi		Target Capaian	
					2021	2022	2023	2024
			IS.33. Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah	(Opini)	WTP	WTP*	WTP	WTP
			IS.34. Nilai Evaluasi SAKIP	Kategori/Poin	BB (70,81)	BB (70,73)	BB (72,50- 75,00)	BB (72,50- 75,00)
			IS.35. Nilai Evaluasi LPPD	Kategori	3,37 (sangat tinggi)	3,37 (sangat tinggi)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
			IS.36. Tingkat Maturitas SPIP	Level	2,83	3	3	3

Sumber: RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026

Dalam pelaksanaannya, sasaran pembangunan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan sasaran utama pembangunan nasional yang ditetapkan pemerintah sebanyak 24 (dua puluh empat) sasaran. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui sinergi dengan mengerahkan seluruh sumberdaya yang ada, baik dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, serta dengan mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi.

#### 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

##### 7.2.1. Telaahan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP tahun 2024, ditetapkan 8 (delapan) arah kebijakan yakni:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, dilaksanakan melalui strategi: memanfaatkan dan memutakhirkan data registrasi sosial ekonomi (Regsosek) untuk meningkatkan akurasi program perlindungan sosial; konvergensi pelaksanaan program-program perlindungan sosial; intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan; peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan; peningkatan kualitas konsumsi pangan.
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, dilaksanakan melalui strategi: memperkuat penyelenggaraan tat kelola kependudukan; reformasi sistem perlindungan sosial; meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas; meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda; meningkatkan produktivitas dan daya saing.
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, dilaksanakan melalui strategi: meningkatkan daya saing dan kompleksitas industri yang didukung percepatan hilirisasi dan penguatan rantai pasok; menyediakan iklim yang kondusif dalam penyusunan riset nasional.
4. Penguatan daya saing usaha, dilaksanakan melalui strategi: meningkatkan kualitas teknologi informasi; meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi; mewujudkan investasi yang berkualitas melalui penciptaan iklim investasi yang ramah dan kondusif; meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi; meningkatkan modernisasi dan penerapan korporasi untuk daya saing pertanian dan kelautan perikanan.
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi, dilakukan melalui strategi: melaksanakan pembangunan rendah karbon di lima sektor prioritas (energi berkelanjutan, industri hijau,

pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular, serta karbon biru dan pesisir); konservasi lahan produktif; menguatkan transisi energi melalui pemerataan akses energi berkeadilan; meningkatkan layanan tenaga listrik yang merata, berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan, serta perluasan pemanfaatan.

6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, dilakukan melalui strategi: meningkatkan akses rumah tangga terhadap perumahan dan permukiman layak huni dan aman, dalam konteks pencegahan maupun pengentasan permukiman kumuh; meningkatkan ketahanan air ditingkat wilayah sungai melalui penerapan pendekatan simpan air, jaga air, dan hemat air; meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air dengan berbagai agenda pembangunan ekonomi dan meningkatkan ketahanan kebencanaan di setiap wilayah; meningkatkan SDM, sarana dan prasarana layanan keselamatan dan keamanan transportasi; meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan aksesibilitas menuju pusat pelayanan dasar dan daerah 3TP (Tertinggal, Terluar, Terdepan, dan Perbatasan).
7. Percepatan pembangunan ibu kota nusantara, dilakukan melalui strategi: membangun gedung pemerintahan dan hunian; membangun infrastruktur utama.
8. Pelaksanaan pemilu 2024, dilakukan melalui strategi: mendorong terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal; meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan; mengamankan penyelenggaraan pemilu tahun 2024; mendukung penyelenggaraan pemilu di luar negeri.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2024 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Berikut ini merupakan 7 (tujuh) PN dan sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2024, antara lain:

1. PN 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;  
Sasaran PN 1 adalah sebagai berikut:
  - 1) Terwujudnya transisi energi dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi sebagai pendukung pembangunan yang berkelanjutan.
  - 2) Terwujudnya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui upaya revitalisasi industri dan penguatan daya saing usaha, dan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
2. PN 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan.  
Sasaran PN 2 adalah sebagai berikut:
  - 1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
  - 2) Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI).



3. PN 3, Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sasaran PN 3 adalah sebagai berikut:

- 1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan.
- 2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk.
- 3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan.
- 4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda.
- 5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan.
- 6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing.

4. PN 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Sasaran PN 4 adalah sebagai berikut:

- 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya.
- 2) Meingkatkan pemaajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan.
- 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial.
- 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat.
- 5) Meningkatkan ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa.
- 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif.

5. PN 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Sasaran PN 5 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar.
- 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar.
- 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan.
- 4) Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

6. PN 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Sasaran PN 6 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup.
- 2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim.
- 3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap *baseline*.

7. PN 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankan dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sasaran PN 7 adalah sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpelihara kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal.
- 2) Optimalnya kebijakan luar negeri.
- 3) Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap.
- 4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

- 5) Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 7.2.2. Telaahan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahunan untuk perwujudan misi pembangunan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Tema pembangunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, yakni: “Melanjutkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”.

Prioritas pembangunan daerah merupakan implementasi arah kebijakan pembangunan dalam RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Prioritas Pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 meliputi:

1. Prioritas 1, yaitu Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan, serta Pengembangan Pariwisata;
2. Prioritas 2, yaitu Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama;
3. Prioritas 3, yaitu Penguatan Sistem Kesehatan Daerah;
4. Prioritas 4, yaitu Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
5. Prioritas 5, yaitu Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa;
6. Prioritas 6, yaitu Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.

Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 disusun berdasarkan arah kebijakan pada RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026, permasalahan dan isu strategis pembangunan tahun 2024, serta mempertimbangkan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2024. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 juga ditetapkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional tahun 2024.

Tabel 4.3.

Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024
Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	P2 Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama
	P3 Penguatan Sistem Kesehatan Daerah
Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan	P1 Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan, serta Pengembangan Pariwisata
Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan	P5 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa
	P4 Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana
Reformasi birokrasi dan Inovasi Daerah	P6 Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 diimplementasikan melalui langkah-langkah, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pembangunan Jawa Barat.

#### 4.2.4.3. Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031. RTRW ini harus menjadi acuan dan sejalan dengan rencana pembangunan daerah.

##### 1. Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Dengan mengacu kepada UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 3, maka tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Tujuan perwujudan tersebut diterjemahkan lebih lanjut dengan:

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Secara lebih operasional dalam PP No.26/2008 tentang RTRWN, khususnya Pasal 2 dikemukakan bahwa penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- b. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- c. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- d. Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
- f. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- g. Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah;
- h. Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan
- i. Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Selanjutnya dengan merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka perumusan tujuan harus mempertimbangkan visi dan misi pembangunan kota bersangkutan. Dengan memperhatikan visi pembangunan jangka panjang Kota Tasikmalaya adalah "Dengan Iman dan Takwa Kota Tasikmalaya menjadi Pusat Perdagangan dan Industri

Maju di Jawa Barat”, maka tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut : *Mewujudkan ruang wilayah Kota Tasikmalaya, sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Priangan Timur - Pangandaran, yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya Kota Tasikmalaya sebagai pusat perdagangan, jasa, dan industri kreatif termaju di Jawa Barat.* Pusat industri dan perdagangan termaju disini adalah Industri Kreatif yang berbasis kerajinan (Handycraft).

## 2. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

Berdasarkan pada perumusan tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya, maka rumusan kebijakan penataan ruang bagi Kota Tasikmalaya sebagai berikut.

### a. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang

Kebijakan pengembangan struktur ruang Kota Tasikmalaya meliputi:

- 1) pemantapan fungsi pusat pelayanan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa
- 2) peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan
- 3) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana, sarana dan utilitas umum

Strategi pengembangan struktur ruang Kota Tasikmalaya meliputi:

- 1) strategi pemantapan fungsi pusat pelayanan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa meliputi: penetapan hierarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang dan mengembangkan pusat perdagangan modern dan tradisional berskala regional
- 2) strategi peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan meliputi: peningkatan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar pusat-pusat pelayanan, penembangan jalan lingkaran dalam dan jalan lingkaran luar, peningkatan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat pelayanan, pengembangan sistem transportasi massal, peningkatan fungsi terminal angkutan umum, dan peningkatan integrasi sistem antar moda transportasi.
- 3) strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana, sarana dan utilitas umum melalui pendistribusian sarana lingkungan di setiap pusat pelayanan sesuai fungsi dan hierarki pelayanan, pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi pada kawasan pertumbuhan ekonomi, pengembangan prasarana sumber daya air, peningkatan sistem pengelolaan persampahan yang berwawasan lingkungan, peningkatan prasarana pengelolaan air limbah, dan pengembangan sistem prasarana drainase secara terpadu.

### b. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Kota Tasikmalaya

Kebijakan pengembangan pola ruang Kota Tasikmalaya meliputi:

- 1) Kebijakan pengelolaan kawasan lindung; dan
- 2) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya

Adapun kebijakan pengelolaan kawasan lindung meliputi:

- (1) Kebijakan pengelolaan kawasan lindung, dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
  - a) Penetapan kawasan yang berfungsi lindung
  - b) Mengembalikan fungsi kawasan yang berfungsi lindung yang telah menurun

- c) Meningkatkan konservasi kawasan yang berfungsi lindung
- (2) Kebijakan pelestarian kawasan cagar budaya, dengan strategi sebagai berikut:
  - a) Penetapan kawasan yang memiliki nilai sejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi sebagai kawasan cagar budaya
  - b) Memelihara kelestarian kawasan cagar budaya
- (3) Kebijakan penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kota dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
  - a) mempertahankan fungsi dan menata RTH yang telah ada;
  - b) menetapkan persyaratan penyediaan RTH pada setiap fungsi kegiatan;
  - c) mengembalikan RTH yang telah beralih fungsi; dan
  - d) mengembangkan pola-pola kemitraan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan masyarakat/swasta dalam penyediaan dan pengelolaan RTH.

Sedangkan kebijakan pengembangan kawasan budidaya meliputi:

- (1) pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, yang dilaksanakan melalui strategi:
  - a) mengarahkan kawasan terbangun kepadatan rendah di kawasan pinggiran pusat kota; dan
  - b) mengoptimalkan pengembangan kawasan pusat kota.
- (2) pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien, dilaksanakan dengan strategi:
  - a) mengembangkan kawasan budidaya terbangun secara vertikal di kawasan pusat kota; dan
  - b) menerapkan insentif dan disinsentif.

#### c. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis

Kawasan strategis dalam dokumen RTRW Kota Tasikmalaya 2011-2031 adalah kawasan-kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan yang meliputi:

- 1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
- 2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup;
- 3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek pertahanan keamanan negara

Kebijakan pengembangan kawasan strategis di Kota Tasikmalaya meliputi:

- (1) pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, yang dilaksanakan melalui strategi:
  - a) menetapkan kawasan pusat kota sebagai kawasan bisnis dengan kegiatan utama perdagangan jasa skala regional
  - b) pengembangan kawasan industri dan pergudangan skala regional
  - c) pengembangan sentra bisnis baru
  - d) pengembangan dan penataan sentra-sentra produksi pertanian dan industri kecil dan menengah. Antara lain yaitu pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Indihiang dan Kecamatan Bungursari, Kawasan pendidikan terpadu di Kecamatan Tamansari
- (2) pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup yang dilaksanakan melalui strategi:

- a) mengatur pemanfaatan kawasan konservasi dengan memadukan perlindungan lingkungan hidup dan pengembangan kawasan, yaitu di Kawasan Situ Gede; dan
  - b) mengintegrasikan fungsi pelestarian lingkungan hidup dengan fungsi-fungsi lainnya tanpa mengganggu fungsi utama kawasan, yaitu di Kawasan Wisata Alam Urug.
- (3) pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
- a) menetapkan kawasan strategis pendidikan; dan
  - b) mengintegrasikan kegiatan sosial budaya dengan fungsifungsi penunjangnya dan/atau fungsi-fungsi lain yang terkait.
- (4) pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara, dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
- a) menata kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
  - b) mengoptimalkan fungsi kawasan dengan mengintegrasikan fungsi pertahanan dan keamanan negara dengan fungsi komersial tanpa mengganggu fungsi utama sebagai kawasan pertahanan dan keamanan negara, yaitu di kawasan Pangkalan Udara Wiriadinata.

Indikasi Program Utama RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031, pada Tahap III (2021-2025) adalah sebagai berikut:

#### A. Perwujudan Struktur Ruang

1. Perwujudan Pusat Pelayanan Kegiatan Kota
  - 1.1. Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah Priatim-Pangandaran (PKW)
    - a. Pengembangan Pasar Induk Cikurubuk sebagai Pasar Induk Komoditi Regional.
    - b. Pengembangan TPPAS Ciangir.
  - 1.2. Pengembangan Pusat Pelayanan Kota (PPK)
    - a. Pengembangan Pusat pelayanan pemerintahan Kota Tasikmalaya.
    - b. Pengembangan Pusat pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa.
  - 1.3. Pengembangan Subpusat Pelayanan Kota (SPK), Penyediaan Sarana Pelayanan
  - 1.4. Pengembangan Pusat Lingkungan (PL), Penyediaan Sarana Pelayanan
2. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Kota
  - 2.1. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Di Wilayah Kota
    - 2.1.1. Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Raya
      - a. Pembangunan jaringan jalan arteri sekunder
      - b. Peningkatan jaringan jalan kolektor
      - c. Pembangunan jaringan jalan kolektor
      - d. Pengembangan Flyover atau Interchange, dan atau Underpass

- e. Peningkatan Ruas Jalan Ibukota Kecamatan
  - f. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
  - g. Pengembangan Sistem Perparkiran Di Luar Ruang Milik Jalan (Off Street)
  - h. Pembangunan Halte/ Shelter
  - i. Pembangunan Jembatan Penyebrangan
- 2.1.2. Pengembangan Angkutan Umum
- a. Pengembangan Angkutan Umum Trayek
  - b. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal
- 2.2. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal
- a. Pengembangan BTS Terpadu
  - b. Pengembangan Sistem Informasi
  - c. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Tasikmalaya
  - d. Penyediaan Database Kota Tasikmalaya
  - e. Pembentukan dan Pembinaan Komunitas Informasi Masyarakat
  - f. Pengelolaan Website Pemerintah Kota Tasikmalaya
  - g. Pembinaan Pengelolaan Website OPD
  - h. Penyediaan Akses Internet di Ruang Publik
- 2.3. Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air
- 2.3.1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
- a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kota Tasikmalaya
  - b. Peningkatan Jaringan Irigasi Kota Tasikmalaya
- 2.3.2. Program Penanggulangan Banjir
- a. Pengembangan Sistem Pengendali Banjir S. Cikalang-Cidongkol
  - b. Pengembangan Sistem Pengendali Banjir S. Cicantel
  - c. Pengembangan Sistem Pengendali Banjir Irigasi Bengkok - S. Closeh
  - d. Pengembangan Sistem Pengendali Banjir S. Cihideung- S. Ciromban
  - e. Penanggulangan Sungai Kota Tasikmalaya
- 2.4. Rencana Sistem Infrastruktur
- 2.4.1. Sistem Penyediaan Air Minum
- a. Pengembangan pelayanan air minum
  - b. Perlindungan dan pemanfaatan mata air
- 2.4.2. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Air Limbah
- a. Pembuatan Tangki Septik Komunal/ SANIMAS
  - b. Rehabilitasi IPLT
  - c. Pembuatan IPAL

- d. Pemasangan perpipaan SPAL
  - e. Pengembangan Kawasan Permukiman
  - f. Pengembangan IPAL industri di Kawasan Peruntukan Industri dan Pergudangan
- 2.4.3. Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
- a. Pengadaan Pewadahan Sampah
  - b. Pengadaan Alat Transportasi dan Kendaraan operasional
  - c. Koordinasi Penilaian Kota / Adipura
  - d. Pemeliharaan TPS Mini, Bak Sampah, Transfer depo, Container, Roda Sampah
  - e. Pengadaan Pakaian Kerja
- 2.4.4. Sistem Jaringan Drainase
- a. Pengembangan sistem jaringan drainase sekunder (drainase pengumpul) pada setiap sisi jalan utama dengan menggunakan lapis perkerasan (lining)
  - b. Pembuatan sistem saluran drainase tersier
  - c. Lanjutan Pembuatan Trotoar dan drainase
  - d. Pemeliharaan Trotoar dan drainase Kota Tasikmalaya
- 2.4.5. Pengembangan Sistem Evakuasi Bencana
- a. Pengadaan Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran
  - b. Pengadaan Alat-alat Pemadam Kebakaran
- B. Perwujudan Pola Ruang
1. Perwujudan Kawasan Lindung
- a. Pengembangan Kawasan Perlindungan Setempat
    - i. Pengembangan Sempadan Sungai
      - a. Rehabilitasi reboisasi dan konservasi kawasan sempadan sungai
      - b. Pengawasan dan penertiban kawasan sempadan sungai
    - ii. Pengembangan Sempadan Danau
      - a. Rehabilitasi, reboisasi dan konservasi kawasan sempadan danau
      - b. Pengawasan dan penertiban kawasan sempadan danau
    - iii. Pengembangan Sempadan Mata Air
      - a. Rehabilitasi, reboisasi dan konservasi kawasan sempadan mata air
      - b. Pengawasan dan penertiban kawasan sempadan mata air
  - b. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau
    - i. Pengembangan RTH jalur Hijau Jalan
      - a. Rencana Jalan Lingkar Utara
  - c. Pengembangan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)



## 2. Perwujudan Kawasan Budi Daya

- a. Pengembangan kawasan permukiman
- b. Pengembangan Kawasan Perdagangan dan jasa
  - a). Pengembangan Kawasan Perdagangan dan jasa skala Perumahan
  - b). Pengembangan Kawasan Perdagangan dan jasa skala Lingkungan/ Kelurahan
  - c). Pengembangan Kawasan Perdagangan dan jasa skala Kecamatan
  - d). Pengembangan Kawasan Perdagangan dan jasa skala SWK
  - e). Pengembangan Kawasan Perdagangan dan jasa skala Kota / Regional
  - f). Pengembangan Pasar Induk Agribisnis
- c. Pengembangan Perkantoran
  - a). Bantuan Pengelolaan Teknis Bangunan Gedung
  - b). Pembangunan /Rehabilitasi Gedung Dinas Badan Lembaga Kantor (Dibaleka) Pemerintah Kota Tasikmalaya
- d. Pengembangan Industri, Penataan kawasan peruntukan industri dan pergudangan
- e. Pengembangan Kawasan Pariwisata, Pengembangan wisata belanja
- f. Pengembangan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
  - a). Pengembangan RTNH pada Sub-Kawasan
  - b). Pengembangan RTNH pada Wilayah Kota
  - c). Pengembangan RTNH pada Fungsi Tertentu
  - d). Pengembangan dan Penyediaan Lahan Parkir
- g. Pengembangan Ruang Peruntukan Sektor Informal, Pengawasan dan penertiban Ruang Peruntukan Sektor Informal
- h. Pengembangan Kawasan Pertanian
  - a). Penetapan kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan
  - b). Pengembangan pertanian tanaman pangan
  - c). Pengembangan kawasan pertanian hortikultura
  - d). Pengembangan kawasan perkebunan
  - e). Pengembangan Kawasan Perikanan
  - f). Pengembangan Kawasan Peternakan.

### 7.2.3. Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Penyusunan RKPD harus memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yaitu penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Tasikmalaya Tahun 2022 merupakan pelaksanaan fungsi DPRD dalam menegajawantahkan kewajibannya sebagai representasi masyarakat Kota Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, demikian pula halnya ketentuan yang diatur pada Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kota Tasikmalaya, bahwa DPRD mempunyai kewajiban untuk menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat/konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Kegiatan dalam rangka penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Tasikmalaya dilakukan berdasarkan hasil kegiatan reses 45 Anggota DPRD, hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Mitra kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya dan hasil kunjungan kerja dalam daerah alat-alat kelengkapan DPRD Kota Tasikmalaya.

#### 1. Kegiatan Reses

Kegiatan reses dilaksanakan dilaksanakan dalam 3 kali masa reses yang disesuaikan dengan 3 kali masa sidang. Dimasa reses ini para anggota DPRD mendapatkan kesempatan melakukan kunjungan kerja ke Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing sambil menyerap informasi dan aspirasi rakyat yang diwakilinya sebagai bahan penyusunan laporan reses dan kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna.

Lokasi Wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) anggota dewan terdiri dari 4 lokasi yaitu:

- a. Wilayah Dapil I meliputi: Kecamatan Cihideung; Kecamatan Tawang; dan Kecamatan Bungursari.
- b. Wilayah Dapil II meliputi: Kecamatan Cipedes; dan Kecamatan Indihiang.
- c. Wilayah Dapil III meliputi: Kecamatan Cibeureum; Kecamatan Tamansari; dan Kecamatan Purbaratu
- d. Wilayah Dapil IV meliputi: Kecamatan Mangkubumi; dan Kecamatan Kawalu.

Tujuan pelaksanaan kegiatan reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Proses pelaksanaannya dilakukan dengan mengundang peserta reses yaitu para penerima dampak langsung dari kelompok masyarakat kemudian oleh anggota dewan memfasilitasi berbagai kebutuhan dan keinginan dalam bentuk masalah dan usulan kegiatan menjadi rekomendasi sebagai laporan reses setiap anggota dewan, disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna, sebagaimana dalam penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD.

#### 2. Rapat Dengar Pendapat

Rapat Dengan Pendapat (RDP) dilakukan dengan mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan penyerapan aspirasi yang harus segera diselesaikan secara politis, pesertanya adalah kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi, OPD yang terkait

dan Komisi DPRD yang menjadi mitra kerjanya, serta pihak-pihak yang terkait yang dapat menyelaian masalah yang yang tersampaikan melalui selama proses rapat dengan pendapat. Lapornya adalah hasil risalah rapat dengan kesimpulannya disajikan bahan rekomendasi dalam penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

### 3. Kunjungan Kerja

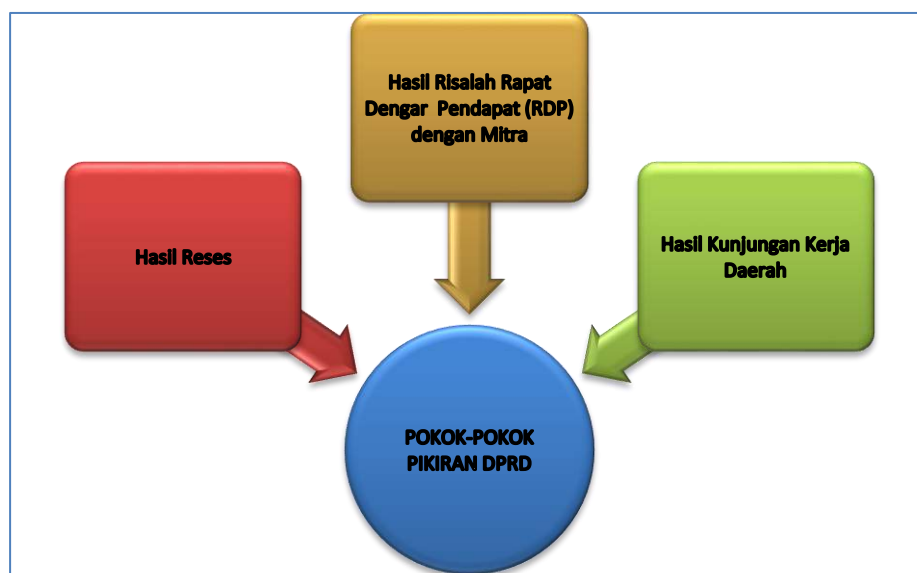
Kunjungan Kerja DPRD adalah kegiatan selain kegiatan reses anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas Anggota Dewan di dapil dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen yang lebih ditekankan pada pelaksanaan fungsi pengawasan. Kunjungan kerja ini bisa dilakukan oleh Anggota Dewan secara perseorangan maupun secara berkelompok.

Proses kunjungan kerja dilakukan dengan komunikasi dua arah dengan konstituen secara berkala, dengan melibatkan OPD mitra kerja Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai bentuk perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan, membuat laporan sebagai bahan dalam penyusunan pokok-pokok pikiran dalam hubungan dengan pengawasan pembangunan.

Dokumen penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD diperoleh dari hasil sidang paripurna DPRD, hasil dengar pendapat, hasil audiensi, hasil reses atau penjaringan aspirasi masyarakat langsung yang dilakukan oleh anggota DPRD, yang diperoleh dari DPRD melalui sekretariat DPRD. DPRD telah menyampaikan dokumen pokok-pokok pikiran DPRD kepada Walikota yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Nomor: 170/ Kep.01/DPRD 2022 tentang Pokok - Pokok Pikiran DPRD Kota Tasikmalaya Tahun 2023.

Gambar 4.2.

Skema sumber data Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Tasikmalaya Tahun 2022



Beberapa pokok pikiran DPRD antara lain adalah:

1. Mengoptimalkan pelayanan bidang pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan dan peran pendidikan agama serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik;
2. Mengoptimalkan pelayanan bidang kesehatan terutama jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, penanganan stunting, peningkatan

- pelayanan RS dan Puskesmas, peningkatan sarana dan prasarana posyandu dan fasilitas kesehatan milik Pemerintah pada umumnya;
3. Mengoptimalkan pelayanan bidang pekerjaan umum dan permukiman seperti penanganan banjir, pembangunan drainase terintegrasi, penyediaan infrastruktur sanitasi, RTLH, Jalan, jalan lingkungan yang dilengkapi dengan PJU, TPT, penataan TPU; serta rehabilitasi gedung kantor kelurahan;
  4. Meningkatkan penciptaan keamanan dan ketertiban umum melalui menguatkan kelembagaan SatpolPP, sosialisasi, dan operasi penegakan keamanan dan ketertiban umum;
  5. Meningkatkan ketersediaan data penduduk miskin, optimalisasi TKPKD, penyediaan fasilitas pelayanan dan pembinaan serta penyediaan rumah singgah;
  6. Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja, peningkatan pelatihan khususnya sektor ekonomi kreatif, penempatan kerja, serta mengadakan bursa kerja.
  7. Perlu peningkatan pelayanan persampahan melalui penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. Selain itu perlu juga adanya penambahan ruang terbuka hijau;
  8. Pemerintah Kota Tasikmalaya membuka akses bantuan modal, bantuan bahan baku dan yang terpenting adalah bantuan pemasaran yang berdaya saing;
  9. Pemerintah Kota Tasikmalaya memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan guru pendidikan keagamaan, pondok pesantren serta implementasi perda tata nilai.
  10. Pemerintah Kota Tasikmalaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,
  11. Pemerintah Kota Tasikmalaya meningkatkan penerapan merit system dan optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

#### **7.2.4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024**

##### **7.2.4.1. Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Tasikmalaya**

Perumusan isu strategis Kota Tasikmalaya tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, kondisi tahun 2023, arah kebijakan dari RPD, arah kebijakan RKP dan arah kebijakan RKPD Provinsi Jawa Barat serta memperhatikan dinamika isu strategis global dan nasional seperti ancaman resesi global. Secara umum permasalahan pembangunan daerah dapat dikelompokkan pada:

##### **1. Kemiskinan dan permasalahan sosial**

Angka Kemiskinan pada tahun 2022 adalah sebesar 12,72 persen, capaian ini lebih baik dari capaian tahun 2020 dan tahun 2021 yaitu pada angka 12,97 persen dan 13,13 persen. Meskipun terjadi penurunan, namun kemiskinan masih menjadi permasalahan krusial di Kota Tasikmalaya. Kemiskinan ini disebabkan diantaranya oleh masih rendahnya akses terhadap pelayanan dasar, akses ekonomi, sanitasi dan pola hidup masyarakat serta rendahnya daya beli masyarakat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Kemiskinan berkaitan erat dengan kesempatan kerja dan berusaha. Adapun untuk penduduk miskin ekstrem sebanyak 23,88 ribu orang menurun dari tahun 2022 sebanyak 27,17 ribu orang.

Selain kemiskinan, permasalahan sosial lainnya diantaranya masih banyaknya anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar, korban penyalahgunaan Napza, dan keluarga berumah tak layak huni.

## 2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 yang mencapai 733.467 jiwa menunjukkan adanya potensi yang besar dalam pengembangan SDM. Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Kota Tasikmalaya mampu bersaing secara regional, dan nasional. Namun saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan terkait perkembangan SDM antara lain belum optimalnya pelayanan pendidikan yang ditunjukkan oleh capaian rata-rata lama sekolah yang baru mencapai 9,53 tahun dan harapan lama sekolah yang baru mencapai 13,47 tahun.

Selain permasalahan pelayanan pendidikan, permasalahan pelayanan kesehatan di Kota Tasikmalaya pada saat ini menunjukkan belum optimalnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan indeks kesehatan yang masih perlu ditingkatkan, masih tingginya prevalensi stunting, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang masih tinggi, pengidap HIV Aids, Tuberculosis dan Malaria. Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, serta kinerja pelayanan kesehatan yang rendah. Disamping itu, permasalahan gizi kurang di masyarakat cenderung masih tinggi yang ditunjukkan dengan masih tingginya prevalensi stunting.

Pemberdayaan perempuan di Kota Tasikmalaya saat ini masih perlu ditingkatkan. Peran aktif perempuan dalam sektor ekonomi, politik, hukum, dan sosial diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan. Penguatan industri rumahan dan UKM bagi perempuan memiliki peran positif terhadap perbaikan indikator ketenagakerjaan perempuan. Dari perspektif pembangunan, strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan berkelanjutan perlu dioptimalisasi guna mengetahui permasalahan kesenjangan di Kota Tasikmalaya sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan daya saing perempuan Kota Tasikmalaya.

Pembangunan dalam bidang kepemudaan, olahraga dan kebudayaan masih kurang optimal. Prestasi bidang kepemudaan dan olahraga baik ditingkat Provinsi maupun nasional masih kurang optimal, selain itu ketersediaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang masih kurang serta sarana dan prasarana kebudayaan seperti gedung kesenian dan kegiatan seni budaya masih sedikit.

Sebagai sebuah kota yang cukup heterogen, kerukunan hidup masyarakat menjadi permasalahan yang harus diperhatikan sehingga tercipta masyarakat yang dapat hidup berdampingan dengan damai yang ditunjang oleh keamanan dan keteriban umum sehingga dapat tercipta masyarakat yang aman dan tertib.

## 3. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya mengalami perlambatan selama beberapa tahun terakhir. Dengan adanya pandemi COVID-19, maka semakin berdampak terhadap perekonomian Kota

Tasikmalaya. Hal ini ditandai dengan terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yaitu sebesar -2,01 persen. Seiring dengan berakhirnya pandemic Covid-19, secara perlahan ekonomi Kota Tasikmalaya mulai bangkit yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi di angka 3,57 persen pada tahun 2021 dan 5,01 persen pada tahun 2022. Namun, capaian ini masih belum optimal, sehingga diharapkan ekonomi kota Tasikmalaya dapat terus meningkat di masa yang akan datang.

Fenomena fluktuasi harga komoditas di Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 tercatat 6,65 persen. Hal ini merupakan Inflasi yang cukup tinggi dibandingkan dengan inflasi beberapa tahun sebelumnya, sehingga program pengendalian inflasi di Kota Tasikmalaya harus dilaksanakan secara optimal guna menjaga kestabilan harga dan mempertahankan tingkat daya beli masyarakat Kota Tasikmalaya.

Beberapa permasalahan perekonomian Kota Tasikmalaya diantaranya belum optimalnya perkembangan UMKM, khususnya pada akses permodalan, pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi berbasis digital literacy, belum meratanya penerapan standar produk usaha mikro dan kecil. Belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi yang ditunjukkan dengan masih cukup tingginya persentase jumlah koperasi tidak aktif.

Belum optimalnya iklim penanaman modal yang disebabkan oleh belum optimalnya pelayanan perijinan, ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang investasi belum merata, dinamika sosial mempengaruhi kepastian dan keamanan berusaha, belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal.

Pada sektor pertanian terjadi beberapa permasalahan yang ditandai dengan masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian, terganggunya ekosistem pertanian dan menurunnya luas lahan pertanian. Hal tersebut disebabkan oleh intensitas pembangunan sektor non-pertanian sangat tinggi, rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian, serta rendahnya regenerasi petani dan rendahnya akses permodalan dan akses pasar, SDM petani masih terbatas, teknologi digital belum banyak digunakan di sektor pertanian kota Tasikmalaya.

Sementara pada sektor perdagangan terdapat beberapa permasalahan yang ditandai oleh kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok, distribusi dan sarana prasarana perdagangan.

Lebih lanjut, pada sektor industri ditemui masalah pokok yaitu masih rendahnya pertumbuhan sektor industri. Hal tersebut disebabkan oleh produk industri memiliki daya saing rendah akibat biaya ekonomi tinggi. Kondisi ini dipicu oleh infrastruktur kawasan industri belum terintegrasi yang mengakibatkan tingginya biaya logistik, peranan IKM masih kecil dalam rantai pasok industri, dan belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan bersertifikasi.

Selain permasalahan di atas, permasalahan lainnya dalam bidang ekonomi adalah tingginya inflasi yang mencapai angka 6,56 persen. Tingginya inflasi ini disebabkan oleh naiknya beberapa komoditi terutama telur, beras dan BBM. Kondisi ini semakin memperberat daya

beli masyarakat, sehingga harus ada penanganan dan pengendalian terhadap inflasi ini.

#### 4. Infrastruktur dan penataan ruang

Pembangunan infrastruktur masih perlu dilaksanakan terutama dalam mendukung infrastruktur sanitasi, air minum, pengelolaan limbah dan pengelolaan sampah dari hulu sampai ke hilir secara komprehensif. Selain itu, pembangunan infrastruktur lanjutan periode sebelumnya mendapatkan prioritas untuk dilaksanakan seperti penyelesaian lingkaran utara Kota Tasikmalaya.

Penataan ruang di Kota Tasikmalaya untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang telah sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan perencanaan penataan ruang. Seiring dengan perkembangan pembangunan dan penyesuaian regulasi penataan ruang, perlu adanya penyesuaian rencana tata ruang dan wilayah yang saat ini sedang dalam tahap penyusunan.

Permasalahan lainnya adalah pengelolaan sampah, dimana Kota Tasikmalaya menghasilkan timbunan sampah sebanyak 315 ton/hari. Dengan kondisi TPS ciangir yang kapasitasnya semakin mengecil harus ada upaya untuk mengurangi sampah yang dikirim ke TPS Ciangir. Apabila sampah tidak tertangani maka akan berakibat pada permasalahan lingkungan lainnya seperti kepada kesehatan masyarakat. Beberapa program yang telah dilaksanakan diantaranya melalui pembangunan bank sampah, pengelolaan sampah 3R dan pembudidayaan maggot dalam pengurangan sampah organik.

#### 5. Reformasi Birokrasi

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Tasikmalaya masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian terutama dalam pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi yaitu: manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan organisasi, penataan SDM apartur, Deregulasi kebijakan, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, dan peningkatan pelayanan publik.

Beberapa permasalahan yang dihadapi antarlain masih perlu ditingkatkan profesionalisme aparatur, belum optimalnya pengelolaan aset/kekayaan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, belum optimalnya pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Selain itu dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi memberikan dampak dalam pengelolaan kepegawaian baik pengembangan karir maupun pembiayaannya. Sesuai dengan ketentuan Kemenpan bahwa Reformasi Birokrasi pada tahun 2024 dibagi menjadi 2 (dua) yaitu RB tematik dan RB regular.

Selain itu, identifikasi permasalahan pembangunan diuraikan melalui pendekatan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum yang menggambarkan permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya serta aspek daya saing. Hal ini dimaksudkan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Berdasarkan permasalahan yang perlu penanganan prioritas dan memperhatikan isu strategis di provinsi, nasional serta internasional, analisis gambaran umum dan capaian kinerja pembangunan RPD tahun 2023-2026, maka isu strategis pembangunan daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin
2. Kualitas SDM yang berdaya saing
3. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan
4. Infrastruktur Perkotaan dan Permukiman
5. Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi

Berdasarkan isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2024, maka perlu ditetapkannya strategi dan kebijakan pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2024 guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Tahun 2024, mengacu pada strategi dan arah kebijakan RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023 - 2026. Adapun strategi dan arah kebijakan yang dipilih untuk pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2024 adalah sebagai berikut.



Tabel 4.4.  
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan  
Kota Tasikmalaya Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>T.1. Meningkatnya kesejahteraan sosial</p>	<p>S1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan Data Penduduk miskin secara akurat dan terpadu</li> <li>2. Meningkatkan sistem jaminan, perlindungan dan rehabilitasi sosial,</li> <li>3. Pemberdayaan masyarakat miskin,</li> <li>4. Sinergitas dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Data Kemiskinan dan Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) serta Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya.</li> <li>2. Peningkatan program penanggulangan kemiskinan pada sektor sosial, kesehatan, pendidikan, perumahan, usaha dan industri serta perdagangan mikro kecil, pertanian, perikanan dan sektor lainnya,</li> </ol>
<p>T.2. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas berbasis kearifan local</p>	<p>S2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat</p>	<p>Peningkatan kualitas pelayanan dan aksesibilitas pendidikan berbasis teknologi informasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang memenuhi standar</li> <li>2. Peningkatan jumlah dan mutu tenaga pendidik dan kependidikan,</li> <li>3. Peningkatan kurikulum /metode pembelajaran dan pengelolaan pendidikan yang berkarakter, efektif, efisien, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi</li> <li>4. Peningkatan pengelolaan perpustakaan</li> </ol>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			dan minat baca masyarakat
	S3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan sinergitas dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan	1. Peningkatan sinergitas lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan
	S4. Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender	Meningkatkan pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender serta memperkuat ketahanan dan pemberdayaan keluarga	1. Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga. 2. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak
	S5. Meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah	Meningkatkan pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah	1. Peningkatan pembinaan, pemberdayaan, penggalan potensi pemuda dan olahraga. 2. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemuda, olahraga, seni dan budaya
	S6. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan penegakan perda dengan melibatkan sinergitas dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pelayanan kebencanaan	1. Peningkatan pembinaan, pengawasan dan penegakan perda secara humanis dan komprehensif, 2. Peningkatan sinergitas dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pelayanan kebencanaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>T.3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang berkualitas</p>	<p>S7. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas koperasi, usaha dan industri mikro kecil.</li> <li>2. Revitalisasi pasar rakyat dan fasilitasi perdagangan dan jasa.</li> <li>3. Meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian dan perikanan yang ditunjang oleh pengelolaan sumber daya air yang memadai untuk mendukung ketahanan pangan daerah.</li> <li>4. Meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta guna mendorong peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta mendorong geliat sektor pariwisata perkotaan dan ekonomi kreatif</li> <li>5. Meningkatkan pengendalian pasokan, distribusi, harga komoditas barang untuk menjaga stabilitas inflasi daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi bagi koperasi, usaha mikro dan industri kecil menengah</li> <li>2. Peningkatan revitalisasi pasar rakyat dan fasilitasi perdagangan dan jasa.</li> <li>3. Peningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian dan perikanan yang ditunjang oleh pengelolaan sumber daya air yang memadai untuk mendukung ketahanan pangan daerah.</li> <li>4. Peningkatan kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta guna mendorong peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.</li> <li>5. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi bagi pelaku usaha sektor pariwisata perkotaan dan ekonomi kreatif</li> </ol>
	<p>S8. Meningkatkan iklim penanaman</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pelayanan, pengembangan, promosi dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pelayanan penanaman modal yang mudah,</li> </ol>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	modal dan kesempatan kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>pengendalian penanaman modal</li> <li>2. Meningkatkan kompetensi angkatan kerja</li> <li>3. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan terhadap tenaga kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>cepat, dan transparan.</li> <li>2. Peningkatan promosi, pengembangan iklim dan pengendalian penanaman modal.</li> <li>3. Peningkatan pelatihan kompetensi bagi angkatan kerja.</li> <li>4. Peningkatan pembinaan hubungan industrial dan memberikan jaminan perlindungan bagi tenaga kerja</li> </ul>
T.4. Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang yang mendukung Kota Nyaman Huni berwawasan Lingkungan	S9. Meningkatkan layanan infrastruktur kota yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar perkotaan dan pelayanan sanitasi</li> <li>2. Meningkatkan penataan perumahan dan kawasan permukiman layak huni yang nyaman dan sehat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang menunjang keselamatan berlalulintas.</li> <li>2. Peningkatan pelayanan akses sanitasi rumah tangga terutama air minum dan air limbah yang layak.</li> <li>3. Peningkatan penataan perumahan dan kawasan permukiman layak huni yang nyaman dan sehat</li> </ul>
	S10. Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan optimalisasi pemanfaatan tata ruang kota yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Peningkatan pengendalian dan pengawasan kualitas lingkungan hidup.</li> <li>3. Penataan RTRW yang komprehensif dan mendukung pembangunan daerah</li> </ul>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
T.5. Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi	S11.Meningkatnya kualitas layanan publik yang inovatif dan berbasis teknologi informasi;	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, profesional dan inovatif berbasis teknologi informasi serta Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan yang diimbangi dengan peningkatan pendapatan daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang ditunjang oleh penyediaan sarana prasarana yang memadai.</li> <li>2. Percepatan penerapan sistem dan teknologi informasi pada semua pelayanan publik dan penunjang kerja perangkat daerah</li> <li>3. Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan.</li> <li>4. Peningkatan pendapatan daerah untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah</li> </ol>

Berdasarkan arah kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, fokus pembangunan Kota Tasikmalaya atau Tema Pembangunan Tahun 2024 adalah:

**“Stabilitas Keamanan dan Peningkatan Daya Saing untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Kesejahteraan Masyarakat”**

**7.2.4.2. Prioritas Pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2024**

Penetapan prioritas dan sasaran pembangunan daerah bertujuan untuk mengutamakan dan memfokuskan rencana pembangunan dalam rangka percepatan mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta indikator kinerja pembangunan. Prioritas pembangunan daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 disusun berdasarkan isu strategis serta memuat pokok-pokok pikiran tahunan DPRD Tahun 2023 dan prioritas pembangunan dan arah kebijakan RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026.

Perumusan prioritas pembangunan disajikan dengan tetap menjaga keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan, isu strategis, dan pokok-pokok pikiran tahunan DPRD. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Berdasarkan isu strategis pembangunan, pembangunan daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 difokuskan pada prioritas pembangunan daerah, yaitu:

1. Pelayanan dan pemberdayaan masyarakat miskin, yang meliputi:
  - a. Bantuan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin;
  - b. Beasiswa mahasiswa bagi masyarakat miskin berprestasi;
  - c. Peningkatan pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
  - d. Pemberdayaan masyarakat miskin;
  - e. Bantuan pangan;
  - f. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
2. Kualitas SDM yang berdaya saing, melalui:
  - a. Peningkatan akses pelayanan pendidikan;
  - b. Peningkatan akses pelayanan kesehatan;
  - c. Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga;
  - d. Peningkatan pelayanan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - e. Peningkatan stabilitas ketentraman dan ketertiban daerah.
3. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, melalui:
  - a. Pengendalian inflasi daerah;
  - b. Peningkatan iklim usaha dan inventasi yang berdaya saing;
  - c. Peningkatan kompetensi pencari kerja dan optimalisasi *link and match* dunia kerja;
  - d. Peningkatan dan pengembangan UMKM;
  - e. Peningkatan dan pengembangan perikanan dan pertanian;
  - f. Peningkatan dan pengembangan pariwisata;
  - g. Peningkatan dan pengembangan perdagangan;
  - h. Peningkatan dan pengembangan industri berbasis sumber daya lokal.
4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman, melalui:
  - a. Penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
  - b. Peningkatan pengelolaan persampahan;
  - c. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
  - d. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana konektivitas daerah;
  - e. Peningkatan sarana dan prasarana sumber daya air;
  - f. Optimalisasi pemanfaatan ruang;
  - g. Peningkatan kualitas bangunan gedung.
5. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak serta percepatan implementasi reformasi birokrasi, melalui:
  - a. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak;
  - b. Optimalisasi kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien, lincah, dinamis dan profesional;
  - c. Peningkatan inovasi daerah;
  - d. Penataan peraturan perundang-undangan daerah.

Prioritas pembangunan daerah tahun 2024 sesuai dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5  
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Arah Kebijakan RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

<b>Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2024</b>	<b>Arah Kebijakan RPD Tahun 2023-2026</b>
1. Pelayanan dan pemberdayaan masyarakat miskin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) serta Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya.</li> <li>2. Peningkatan program penanggulangan kemiskinan pada sektor sosial, kesehatan, pendidikan, perumahan, usaha dan industri serta perdagangan mikro kecil, pertanian, perikanan dan sektor lainnya,</li> </ol>
2. Kualitas SDM yang berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang memenuhi standar</li> <li>2. Peningkatan jumlah dan mutu tenaga pendidik dan kependidikan,</li> <li>3. Peningkatan kurikulum/metode pembelajaran dan pengelolaan pendidikan yang berkarakter, efektif, efisien, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi</li> <li>4. Peningkatan pengelolaan perpustakaan dan minat baca masyarakat</li> <li>5. Peningkatan sinergitas lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan</li> <li>6. Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga.</li> <li>7. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak</li> <li>8. Peningkatan pembinaan, pemberdayaan, penggalan potensi pemuda dan olahraga.</li> </ol>

Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2024	Arah Kebijakan RPD Tahun 2023-2026
	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemuda, olahraga, seni dan budaya</li> <li>10. Peningkatan pembinaan, pengawasan dan penegakan perda secara humanis dan komprehensif</li> <li>11. Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pelayanan kebencanaan</li> </ol>
<p>3. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi bagi koperasi, usaha mikro dan industri kecil menengah</li> <li>2. Peningkatan revitalisasi pasar rakyat dan fasilitasi perdagangan dan jasa.</li> <li>3. Peningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian dan perikanan yang ditunjang oleh pengelolaan sumber daya air yang memadai untuk mendukung ketahanan pangan daerah.</li> <li>4. Peningkatan kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta guna mendorong peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.</li> <li>5. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi bagi pelaku usaha sektor pariwisata perkotaan dan ekonomi kreatif</li> <li>6. Peningkatan pelayanan penanaman modal yang mudah, cepat, dan transparan</li> <li>7. Peningkatan promosi, pengembangan iklim dan pengendalian penanaman modal.</li> <li>8. Peningkatan pelatihan kompetensi bagi angkatan kerja.</li> <li>9. Peningkatan pembinaan hubungan industrial dan memberikan jaminan perlindungan bagi tenaga kerja</li> </ol>
<p>4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang</li> </ol>



<b>Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2024</b>	<b>Arah Kebijakan RPD Tahun 2023-2026</b>
	<p>menunjang keselamatan berlalulintas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peningkatan pelayanan akses sanitasi rumah tangga terutama ari minum dan air limbah yang layak.</li> <li>3. Peningkatan penataan perumahan dan kawasan permukiman layak huni yang nyaman dan sehat</li> <li>4. Peningkatan pengendalian dan pengawasan kualitas lingkungan hidup.</li> <li>5. Penataan RTRW yang komprehensif dan mendukung pembangunan daerah</li> </ol>
<p>5. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak serta percepatan implementasi reformasi birokrasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang ditunjang oleh penyediaan sarana prasarana yang memadai.</li> <li>2. Percepatan penerapan sistem dan teknologi informasi pada semua pelayanan publik dan penunjang kerja perangkat daerah</li> <li>3. Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan</li> <li>4. Peningkatan pendapatan daerah untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah</li> </ol>

*Sumber: hasil analisa Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2023.*

Prioritas pembangunan tahun 2024 disusun untuk menjawab isu strategis pembangunan sesuai dengan permasalahan pembangunan daerah. Berikut keterkaitan prioritas pembangunan dengan isu strategis pembangunan tahun 2024.

Tabel 4.6.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Isu Strategis

<b>Isu Strategis</b>	<b>Prioritas Pembangunan</b>
1. Pelayanan dan pemberdayaan masyarakat miskin	Pelayanan dan pemberdayaan masyarakat miskin
2. Kualitas SDM yang berdaya saing	Kualitas SDM yang berdaya saing

<b>Isu Strategis</b>	<b>Prioritas Pembangunan</b>
3. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif	Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman	Infrastruktur perkotaan dan permukiman
5. Percepatan implementasi reformasi birokrasi	Penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak serta percepatan implementasi reformasi birokrasi

*Sumber: hasil analisa Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2023.*

Selain berkaitan dengan isu strategis pembangunan, prioritas pembangunan tahun 2024 juga memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Tasikmalaya sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 4.7

Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

<b>Pokok-Pokok Pikiran DPRD</b>	<b>Prioritas Pembangunan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan pelayanan bidang kesehatan terutama jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, penanganan stunting, peningkatan pelayanan RS dan Puskesmas, peningkatan sarana dan prasarana posyandu dan fasilitas kesehatan milik Pemerintah pada umumnya;</li> <li>2. Mengoptimalkan pelayanan bidang pekerjaan umum dan permukiman seperti penanganan banjir, pembangunan drainase terintegrasi, penyediaan infrastruktur sanitasi, RTLH, Jalan, jalan lingkungan yang dilengkapi dengan PJU, TPT, penataan TPU; serta rehabilitasi gedung kantor kelurahan;</li> <li>3. Meningkatkan ketersediaan data penduduk miskin, optimalisasi TKPKD, penyediaan fasilitas pelayanan dan pembinaan serta penyediaan rumah singgah;</li> <li>4. Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja, peningkatan pelatihan khususnya sektor ekonomi kreatif, penempatan kerja, serta mengadakan bursa kerja.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan dan pemberdayaan masyarakat miskin</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan pelayanan bidang pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan dan peran pendidikan agama serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik;</li> <li>2. Mengoptimalkan pelayanan bidang kesehatan terutama jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, penanganan stunting, peningkatan pelayanan RS dan Puskesmas, peningkatan sarana dan prasarana posyandu dan fasilitas kesehatan milik Pemerintah pada umumnya;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kualitas SDM yang berdaya saing</li> </ol>

Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Prioritas Pembangunan
<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Meningkatkan penciptaan keamanan dan ketertiban umum melalui menguatkan kelembagaan SatpolPP, sosialisasi, dan operasi penegakan keamanan dan ketertiban umum;</li> <li>4. Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja, peningkatan pelatihan khususnya sektor ekonomi kreatif, penempatan kerja, serta mengadakan bursa kerja.</li> <li>5. Pemerintah Kota Tasikmalaya memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan guru pendidikan keagamaan, pondok pesantren serta implementasi perda tata nilai.</li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan ketersediaan data penduduk miskin, optimalisasi TKPKD, penyediaan fasilitas pelayanan dan pembinaan serta penyediaan rumah singgah;</li> <li>2. Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja, peningkatan pelatihan khususnya sektor ekonomi kreatif, penempatan kerja, serta mengadakan bursa kerja.</li> <li>3. Pemerintah Kota Tasikmalaya membuka akses bantuan modal, bantuan bahan baku dan yang terpenting adalah bantuan pemasaran yang berdaya saing;</li> <li>4. Pemerintah Kota Tasikmalaya memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan guru pendidikan keagamaan, pondok pesantren serta implementasi perda tata nilai.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan pelayanan bidang pekerjaan umum dan permukiman seperti penanganan banjir, pembangunan drainase terintegrasi, penyediaan infrastruktur sanitasi, RTLH, Jalan, jalan lingkungan yang dilengkapi dengan PJU, TPT, penataan TPU; serta rehabilitasi gedung kantor kelurahan;</li> <li>2. Perlu peningkatan pelayanan persampahan melalui penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. Selain itu perlu juga adanya penambahan ruang terbuka hijau;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Kota Tasikmalaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,</li> <li>2. Pemerintah Kota Tasikmalaya meningkatkan penerapan merit system dan optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak serta percepatan implementasi reformasi birokrasi</li> </ol>

*Sumber: hasil analisa Bappelitbangda, 2023.*

Prioritas pembangunan tahun 2024 selanjutnya diimplementasikan melalui program prioritas pembangunan daerah yang dalam operasionalnya dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui program-program perangkat daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Tabel 4.8.  
Prioritas Pembangunan Daerah, Sasaran dan Program Prioritas

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah	
<b>1</b>	<b>Pelayanan dan pemberdayaan masyarakat miskin</b>										
	a	Pemberdayaan masyarakat miskin	S1: Menurunnya Tingkat Kemiskinan	IS.1. Angka kemiskinan	(%)	11,33	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS Aktif	%	100	Dinas Sosial
	b	Bantuan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin		IS.2. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	(%)	90	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	%	100	Dinas Sosial
	c	Peningkatan pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)					Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	100	Dinas Sosial
	d	Beasiswa mahasiswa bagi masyarakat miskin berprestasi					Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana Alam dan Sosial	%	100	Dinas Sosial

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
	e	Bantuan pangan				Program pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	100	Dinas Sosial
						Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pencapaian Jaminan Kesehatan Semesta (UHC)	%	84	Dinas Kesehatan
						Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	%	2,63	Disperwas kim
						Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil,	Persentase pemberdayaan usaha mikro	%	2	Dinas KUMKM Perindag

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
						Dan Usaha Mikro (UMKM)				
						Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kelurahan rentan rawan pangan yang ditangani	%	15	DKP-3
						Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka konsumsi ikan	Kg/Kap / Tahun	22,5	DKP-3
							Produksi produk hasil olahan perikanan	Ton	310	DKP-3
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan populasi ternak	%	1	DKP-3
							Produksi Hortikultura dan perkebunan	Ton	6.000	DKP-3
							Produksi Tanaman Pangan	Ton	86.000	DKP-3

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
<b>2</b>	<b>Kualitas SDM yang berdaya saing</b>									
	a	Peningkatan akses pelayanan pendidikan	S.2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat		9,89	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Non Formal/Kesetaraan Terakreditasi B	%	51,90	Disdik
							Persentase PAUD Terakreditasi B	%	35,79	Disdik
							Persentase Sarana Prasarana dalam kondisi baik	%	67,45	Disdik
							Persentase SD Terakreditasi A	%	60,32	Disdik
							Persentase SMP Terakreditasi A	%	58,25	Disdik
			IS.4. Harapan Lama Sekolah (Tahun)		13,52	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase capaian pengembangan kurikulum	%	100	Disdik



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
			IS.5. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (%)		75	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Capaian Kualitas Pendidik PAUD dan Pendidikan Dasar	%	51,50	Disdik
						Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase Siswa Prestasi yang dicapai ke Tingkat Provinsi jenjang Pendidikan Dasar	%	25,05	Disdik
						Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pembinaan perpustakaan	%	4,42	Dispupda
							Persentase kesesuaian penyelenggaraan perpustakaan umum daerah dengan standar nasional perpustakaan	%	39	Dispupda

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah			
						Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	%	26,19	Dispusipda			
	b	Peningkatan akses pelayanan kesehatan	S3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			IS.6. Usia Harapan Hidup (Tahun)	%	72,69	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Faskes dengan SIK terinterasi	%	100	Dinkes
									Cakupan Kinerja Layanan P2P	%	100	Dinkes	
									Cakupan Kinerja Pelayanan Kesehatan	%	78	Dinkes	
									Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat	%	34,6	Dinkes	

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
							Cakupan penelitian kesehatan	%	100	Dinkes
							Cakupan Rumah Sakit Kelas C, D dan Faskes Tk. Kota yang diberi ijin	%	100	Dinkes
							Capaian Penyelenggaraan Operasional Puskesmas laboratorium dan gudang farmasi	%	100	Dinkes
							Indeks Keluarga Sehat	poin	0	Dinkes
							Indeks Pencapaian SPM kesehatan masyarakat	%	100	Dinkes
							Pencapaian Jaminan Kesehatan Semesta (UHC)	%	84	Dinkes

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
							Rasio Faskes terhadap penduduk	%	1,1	Dinkes
			IS.7. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (%)	%	80	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang tersertifikasi	%	94	Dinkes
						Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana kefarmasian dan Makanan Minuman Sesuai Standar	%	80	Dinkes
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan GERMAS	%	50	Dinkes

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah	
	c	Peningkatan pelayanan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	S4. Meningkatkan pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender	IS.8. Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	%	0,61	Program Pengendalian Penduduk	Jumlah Dokumen Laporan Pemutakhiran Data Kependudukan	dok	1	DPPKBP3 A
				IS.9. Indeks Pemberdayaan Gender (poin)	Poin	60,10	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kepesertaan KB MKJP	%	100	DPPKBP3 A
							Persentase Kepesertaan Unmet Need	%	13,25	DPPKBP3 A	
				IS.10. Indeks Pembangunan Gender (poin)	Poin	91,94	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Anggota BKB yang ber-KB	%	82,03	DPPKBP3 A
							Cakupan Anggota BKL yang ber KB	%	75,47	DPPKBP3 A	

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
							Cakupan Anggota BKR yang ber KB	%	77,11	
						Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Cakupan Sistem Data Gender dan Anak	%	100	DPPKBP3 A
						Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase capaian PUG SKPD yang Responsif Gender	%	100	DPPKBP3 A
						Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Pembinaan Peningkatan Kualitas Keluarga	%	100	DPPKBP3 A
						Program Perlindungan Perempuan	Persentase penanganan kasus	%	100	DPPKBP3 A
						Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pembinaan Lembaga yang Peduli dalam	%	100	DPPKBP3 A

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
							Pemenuhan Hak Anak (PHA)			
						Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penanganan kasus anak	%	100	DPPKBP3A
	d	Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	S5. Meningkatkan pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda / OKP yang dibina	%	30,77	Disporabudpar
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi	%	36,59	Disporabudpar

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah				
			IS.13. Persentase Pelesetarian Kebudayaan (%)	%	68,63	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Kebudayaan	%	68,63	Disporabudpar				
						Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kesenian Tradisional	%	25	Disporabudpar				
						Program Pembinaan Sejarah	Persentase Sejarah Lokal yang Dilestarikan	%	25	Disporabudpar				
						Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	53,85	Disporabudpar				
	e	Peningkatan stabilitas ketentraman dan ketertiban daerah	S6. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib			IS.14. Indeks Pencapaian SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum (%)	%	100		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pengawasan dan penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	94	SatPolPP



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
							Presentase PPNS Yang di Bina	%	81	SatPolPP
							Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan, Keindahan)	%	100	SatPolPP
			IS.15. Indeks Resiko Bencana (Kategori/poin)	Poin	Sedang (117, 15)	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Masyarakat yang Memperoleh Informasi Layanan Bencana,	%	100	BPBD
							Persentase Masyarakat yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana,	%	100	BPBD
							Persentase Penanganan	%	100	BPBD

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
							Bencana dan warga negara korban bencana			
						Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	86	BPBD
						Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase capaian pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	100	Bakesbangpol
						Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase capaian pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	%	100	Bakesbangpol

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
						Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan konflik sosial	%	100	Bakesbangpol
						Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partai politik yang dibina	%	100	Bakesbangpol
						Program Pemberdayaan Dan Pengawasan	Persentase Ormas yang dibina	%	71	Bakesbangpol

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah	
						Organisasi Kemasyarakatan					
<b>3</b>	<b>Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan</b>										
	a	Pengendalian inflasi daerah	S7. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	IS.16. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	%	5,69	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi simpan pinjam yang diberi rekomendasi penerbitan izin usaha dan/ atau izin operasional	%	100	Dinas Sosial
	b	Peningkatan dan pengembangan UMKM		IS.17. PDRB Perkapita (Juta rupiah)	%	34,35	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	persentase koperasi aktif	%	1	Dinas KUMKM Perindag
	c	Peningkatan dan pengembangan perikanan dan pertanian;		IS.18. Pengeluaran Per Kapita (Juta rupiah)	Juta Rupiah	10,531	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	%	6	Dinas KUMKM Perindag

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah	
	d	Peningkatan dan pengembangan perdagangan		IS.19. Indeks Gini (Poin)	Poin	0,380	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM koperasi yang kompeten	%	25	Dinas KUMKM Perindag
	e	Peningkatan dan pengembangan pariwisata		IS.20. Inflasi (%)	%	2,65	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi aktif yang diberdayakan	%	25	Dinas KUMKM Perindag
	f	Peningkatan dan pengembangan industri berbasis sumber daya lokal				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase pemberdayaan usaha mikro	%	2	Dinas KUMKM Perindag	
						Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang dibina	%	5	Dinas KUMKM Perindag	
						Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi				Dinas KUMKM Perindag	

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
						Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase fasilitasi pemenuhan perizinan dan pendaftaran perusahaan	%	100 %	Dinas KUMKM Perindag
						Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar rakyat dalam kondisi baik	%	70 %	Dinas KUMKM Perindag
						Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil	%	40 %	Dinas KUMKM Perindag
						Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan pelaku usaha yang berorientasi ekspor	%	1 %	Dinas KUMKM Perindag

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
						Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UTTP yang bertera sah	%	80 %	Dinas KUMKM Perindag
						Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan penggunaan produk unggulan Kota Tasikmalaya	%	10 %	Dinas KUMKM Perindag
						Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase implementasi pencapaian sasaran rencana pembangunan industri	%	5	Dinas KUMKM Perindag
						Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kot a	Persentase pengendalian Izin Usaha Industri	%	100	Dinas KUMKM Perindag

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
						Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang terdaftar di sistem informasi industri nasional	%	5	Dinas KUMKM Perindag
						Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang dibangun	Unit	2	DKP-3
						Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	%	110,8	DKP-3



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
							Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP)	%	125,5	DKP-3
						Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kelurahan rentan rawan pangan yang ditangani	%	15	DKP-3
						Program pengawasan Keamanan pangan	Persentase pengawasan keamanan pangan	%	100	DKP-3
						Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	10.100	DKP-3
						Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka konsumsi ikan	Kg/Kap / Tahun	22,5	DKP-3
							Produksi produk hasil olahan perikanan	Ton	310	DKP-3

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan populasi ternak	%	1	DKP-3
							Produksi Hortikultura dan perkebunan	Ton	6.000	DKP-3
							Produksi Tanaman Pangan	Ton	86.000	DKP-3
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Angka Produksi Hasil peternakan	Ton	10.400	DKP-3
							Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Kw/ Ha	63	DKP-3
						Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan	Persentase penanganan kejadian kasus	%	100	DKP-3

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
						Kesehatan Masyarakat Veteriner	penyakit hewan menular			
						Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian	%	75	DKP-3
						Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	ijin	3	DKP-3
						Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	%	5	DKP-3
						Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	%	61,22	Disporabudpar
						Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	542.625	Disporabudpar

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah	
						Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	56,67	Disporabudpar	
	g	Peningkatan iklim usaha dan inventasi yang berdaya saing	S8. Meningkatkan iklim penanaman modal dan kesempatan kerja	IS.21. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	7,18	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan dengan mengacu ke rencana tenaga kerja	%	5	Dinas Tenaga Kerja
		Peningkatan kompetensi pencari kerja dan optimalisasi <i>link and match</i> dunia kerja		IS.22. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adh Berlaku (Milyar Rupiah)	Milyar Rupiah	8.283,45	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	6	Dinas Tenaga Kerja
						Program Penempatan Tenaga Kerja	persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme	Persen	29	Dinas Tenaga Kerja	

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
							layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota			
						Program Hubungan Industrial	persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	Orang	54,50	Dinas Tenaga Kerja
						Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase realisasi RUPM Kota Tasikmalaya	%	20	DPMPTSP
						Program Promosi Penanaman Modal	Nilai penanaman modal daerah dari PMA dan PMDN yang masuk	Milyar	1.369	DPMPTSP

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
						Program Pelayanan Penanaman Modal	Capaian penerbitan perijinan terpadu tepat waktu sesuai SOP	%	100	DPMPTSP
						Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%	100	DPMPTSP
						Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pengelolaan basis data potensi Penanaman Modal sesuai SOP	%	25	DPMPTSP
							Persentase pengelolaan data perijinan sesuai SOP	%	100	DPMPTSP
<b>4</b>	<b>Infrastruktur perkotaan dan permukiman</b>									
a	Penanganan kawasan	S9. Meningkatny	IS.23. Indeks Persentase	%	62,05	Program Pengelolaan	Presentase Sumber Daya Air	%	25	Dinas PUTR

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
	kumuh dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman	a layanan infratraktur kota yang berkualitas	kemantapan jalan (poin)			Sumber Daya Air (SDA)	Dalam Kondisi Baik			
	b Peningkatan kualitas sarana dan prasarana konektivitas daerah		IS.24. Indeks kawasan permukiman layak huni (Poin)	%	31,77	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Jalan dalam kondisi baik	%	19,19	Dinas PUTR
	c Peningkatan sarana dan prasarana sumber daya air		IS.25. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (%)	Poin	94,74	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan dan jembatan yang dibangun, direhabilitasi dan direkonstruksi	%	68,08	Dinas PUTR
	d Peningkatan kualitas bangunan gedung		IS.26. Indeks Pencapaian Minimal Bidang Perumahan dan Permukiman (%)	Poin	100	Program Penataan Bangunan Gedung	Prosentase bangunan gedung kewenangan pemda yang ditangani	%	49,12	Dinas PUTR

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
						Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	80	Dinas PUTR
						Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Kawasan/ Lingkungan Yang di Tingkatkan Sesuai dengan RTBL nya	%	50,00	Dinas PUTR
						Program Pengembangan Jasa Konstruksi	persentase jumlah penyedia jasa yang mendapatkan pembinaan	%	42,37	Dinas PUTR
						Program Pengembangan Permukiman	Persentase sistem jaringan sarana prasarana permukiman dalam kondisi baik	%	50	Dinas PUTR
						Program Pengelolaan Dan	Prosentase KK/RT yang Berakses	%	57,26	Dinas PUTR



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
						Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Layanan Air Minum			
						Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Prosentase KK/RT Yang berakses SPLD	%	62,05	Dinas PUTR
						Program Penatagunaan Tanah	Persentase Pengelolaan dan Penatagunaan Tanah	%	100	Dinas PUTR
						Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah korban bencana yang ditangani	%	100	Disperwas kim
							Persentase rumah korban relokasi program kabupaten/kota yang ditangani	%	100	Disperwas kim

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
						Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Pengelolaan PSU Perumahan	%	50	Disperwas kim
						Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	%	40	Disperwas kim
							Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	%	17,24	Disperwas kim
						Program Perumahan Dan Kawasan	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di Luar Kawasan	%	2,63	Disperwas kim

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah	
						Permukiman Kumuh	Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				
						Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase layanan angkutan berkeselamatan	%	78,32	Dishub	
							Persentase layanan lalu lintas berkeselamatan	%	58,93	Dishub	
	e	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	S10.Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;	IS.27. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	Poin	58,15	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	%	40	Disperwas kim
	f	Optimalisasi pemanfaatan ruang					Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di Kawasan	%	17,24	Disperwas kim	

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
							Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
	g	Peningkatan pengelolaan persampahan	IS. 28. Persentase Pengelolaan sampah (%)	%	99	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah;	%	28	Dinas LH
							Persentase Penanganan Sampah	%	71	Dinas LH
						Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Pemenuhan Dokumen Lingkungan Hidup	%	100	Dinas LH
			IS.29. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%)	%	98,5	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air;	Poin	53,75	Dinas LH

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
							Indeks Kualitas Udara	Poin	80,50	Dinas LH
						Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH yang dikelola;	%	100	Dinas LH
							Indeks Kualitas Lahan	Poin	24,36	Dinas LH
						Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pelaporan Pengendalian B3 dan LB3	%	100	Dinas LH
						Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan	Persentase Peningkatan Dokumen Lingkungan yang dinilai dan	%	100	Dinas LH

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
						Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	diawasi Implementasinya			
						Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Capaian Pelatihan, Penyuluhan, dan Kampanye Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	%	100	Dinas LH
						Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Capaian Perolehan Penghargaan Lingkungan Hidup oleh Masyarakat	%	100	Dinas LH
						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	%	100	Dinas LH

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
						Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	80	Dinas PUTR
<b>5</b>	<b>Penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak serta percepatan implementasi reformasi birokrasi</b>									
a	Optimalisasi kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien, lincah, dinamis dan profesional	S11. Meningkatkan kualitas layanan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang inovatif dan berbasis teknologi informasi;	IS.30. Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin/Kategori)	Poin	Baik (83,32 - 85,80)	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi RKPD terhadap RPD/ RPJMD	%	100	Bappelitbangda
b	Peningkatan inovasi daerah		IS.31. Indeks Inovasi Daerah (Poin/Kategori)	Poin	Inovatif (52,43)	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan	Persentase Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	%	83	Bappelitbangda

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
						Pembangunan Daerah	berpredikat minimal baik			
	c	Penataan peraturan perundang-undangan daerah					Prosentase keselarasan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap RKPD	%	100	Bappelitb angda
	d	Penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak	IS.32. Indeks SPBE (Kategori/Poin)	Poin	Baik (3,0)	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Jumlah inovasi daerah yang dilaporkan dan terverifikasi dalam Inovation Government Award (IGA)	bua h	11	Bappelitb angda
							Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang direkomendasikan	%	90	Bappelitb angda
			IS.33. Opini atas laporan keuangan	Opini	WTP	Program Informasi Dan	Persentase Layanan Informasi dan	%	Infor mati f	Diskominfo



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
			pemerintah daerah (Opini)			Komunikasi Publik	Komunikasi Publik		(81%)	
							Persentase Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik	%	100	Diskominfo
			IS.34. Nilai Evaluasi SAKIP (Kategori/Poin)	Kategori	BB) (72,50-75,00)	Program Aplikasi Informatika	Persentase Layanan SPBE yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	65	Diskominfo
			IS.35. Nilai Evaluasi LPPD (kategori)	Kategori	Sangat Tinggi	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	Diskominfo

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
			IS.36. Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase tingkat keamanan informasi Pemerintah Daerah	%	41,50	Diskominfo
						Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	%	98,5	Disdukcapil
						Program Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	%	95	Disdukcapil
						Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	100	Disdukcapil
						Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	Disdukcapil
						Program Pengelolaan Arsip	Persentase kesesuaian kinerja kearsipan	%	47,24	Dispupda

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
							pada Lembaga Kearsipan Daerah			
							Persentase Perangkat Daerah dengan nilai pengawasan kearsipan internal minimal kategori cukup	%	86,11	Dispusipda
						Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100	BPKAD
						Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Standar	%	100	BPKAD
						Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Capaian PAD bukan pajak daerah	%	100	Bapenda
							Capaian Pajak Daerah	%	100	Bapenda

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
						Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Hukum Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Meningkatkan	%	100	Setda
							Persentase Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja Baik	%	100	Setda
							Persentase Produk Hukum Daerah yang Diundangkan	%	100	Setda
						Program Perekonomian Dan Pembangunan	Indek Kematangan UKPBJ	Level 1	4	Setda
							Persentase Indikator Kinerja Kunci (IKK)	%	100	Setda

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
							Bidang Bidang Perekonomian dan Pembangunan			
							Persentase Optimalisasi Percepatan Pembangunan Daerah	%	100	Setda
						Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi anggaran DPRD	%	100	Set.DPRD
							Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi legislasi DPRD	%	100	Set.DPRD

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
							Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi pengawasan DPRD	%	100	Set.DPRD
							Persentase fasilitasi dukungan terhadap penyelenggaraan tugas dan wewenang DPRD	%	100	Set.DPRD
						Program Penyelenggaraan Pengawasan	Level Pemenuhan Elemen Praktek Akuntabilitas Manajemen Kinerja	level	2	Inspektoraat
							Level Pemenuhan Elemen Praktek Budaya dan	level	2	Inspektoraat

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
							hubungan Organisasi			
							Level Pemenuhan Elemen praktek Pengelolaan SDM	level	2	Inspektoral
							Level Pemenuhan Elemen Praktek Peran Dan Layanan	level	2	Inspektoral
							Level Pemenuhan Elemen Praktek Profesional	level	2	Inspektoral
							Level Pemenuhan Elemen Praktek Struktur Tata Kelola	level	2	Inspektoral
							% Penanganan kasus	%	100	Inspektoral
						Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	persentase pemenuhan kebijakan teknis bidang pengawasan	%	100	Inspektoral

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
							Skor Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	level	3	Inspektorat
						Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang diangkat sesuai dengan formasi	%	100	BKPSDM
							Persentase capaian pelayanan kepegawaian	%	100	BKPSDM
							Persentase penyelesaian evaluasi kinerja dan penanganan disiplin	%	100	BKPSDM
							Persentase PNS yang terpetakan kompetensinya	%	12	BKPSDM
						Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	%	18	BKPSDM



NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
						Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik	%	100	Kecamatan
						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	Kecamatan
						Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	%	100	Kecamatan
						Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	Kecamatan
						Program Penunjang Urusan	Persentase pemenuhan kebutuhan	%	100	Seluruh PD

NO	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Perangkat Daerah
						Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	penunjang perangkat daerah			

Sumber: RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026; Hasil Analisis Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2023.

#### 4.2.5. Keselarasan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan provinsi Jawa Barat menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Keselarasan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Kota Tasikmalaya, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2024 dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.9.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2024

dengan Prioritas Nasional RKP Tahun 2024

<b>Prioritas Pembangunan Nasional</b>	<b>Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat</b>	<b>Prioritas Pembangunan Kota Tasikmalaya</b>
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan, serta Pengembangan Pariwisata	3. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	5. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	1. Pelayanan dan pemberdayaan masyarakat miskin
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	2. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama 3. Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	2. Kualitas SDM yang berdaya saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama 6. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	2. Kualitas SDM yang berdaya saing
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan	5. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman

<b>Prioritas Pembangunan Nasional</b>	<b>Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat</b>	<b>Prioritas Pembangunan Kota Tasikmalaya</b>
Ekonomi dan Pelayanan Dasar	serta Gerakan Membangun Desa	
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	4. Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana 5. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	4. Infrastruktur perkotaan dan permukiman
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	5. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak serta percepatan implementasi reformasi birokrasi

*Sumber: hasil analisis Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, Tahun 2023.*

Keterkaitan sasaran pembangunan Kota Tasikmalaya tahun 2024, sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dengan sasaran pembangunan nasional Tahun 2024 disajikan pada tabel 4.10. Selain itu dukungan program prioritas daerah Kota Tasikmalaya tahun 2024 terhadap prioritas nasional yang dilaksanakan melalui kegiatan prioritas nasional Tahun 2024 disajikan dalam tabel 4.11 dibawah ini.

Tabel 4.10

Keselarasan antara Sasaran Prioritas Nasional RKP Tahun 2024, Sasaran Prioritas Daerah RKPD Jawa Barat Tahun 2024 dengan Sasaran Prioritas Daerah RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024

Sasaran RKP Tahun 2024	Sasaran RKPD Jawa Barat Tahun 2024	Sasaran RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024	Indikator Sasaran RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024
<b>PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan</b>			
<b>S1</b> Terwujudnya transisi energi dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi sebagai pendukung pembangunan berkelanjutan	S7 Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Daerah	S7 Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	IS 16 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
		S8 Meningkatkan iklim penanaman modal dan kesempatan kerja	IS 17 PDRB Per Kapita (Juta/Tahun/Kapita)
			IS 21 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
		IS 22 Pembentukan Modal Tetap Bruto ADH Berlaku (Triliun)	
<b>S2</b> Terwujudnya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui upaya revitalisasi industri dan penguatan daya saing usaha dan	S6 Meningkatkan pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	S7 Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	IS 16 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
			IS 17 PDRB Per Kapita (Juta/Tahun/Kapita)
			IS 18 Pengeluaran Per Kapita (Juta/Tahun/Kapita)
			IS 19 Indeks Gini (Point)
			IS 20 Inflasi (%)
	S8	S8	IS 21 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Sasaran RKP Tahun 2024	Sasaran RKPD Jawa Barat Tahun 2024	Sasaran RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024	Indikator Sasaran RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024
penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif	Meningkatnya iklim penanaman modal dan kesempatan kerja	IS 22 Pembentukan Modal Tetap Bruto ADH Berlaku (Triliun)
<b>PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</b>			
<b>S1</b> Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)	-	-	-
<b>S2</b> Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)	S6 Meningkatkan pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	S7 Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	IS 17 PDRB Per Kapita (Juta/Tahun/Kapita)
<b>PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing</b>			
<b>S1</b> Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata	S5 Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk	S4 Meningkatkan pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender	IS 8 Laju Pertumbuhan Penduduk (%)

Sasaran RKP Tahun 2024	Sasaran RKPD Jawa Barat Tahun 2024	Sasaran RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024	Indikator Sasaran RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024
kelola kependudukan			
<b>S2</b> Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk		S1 Menurunnya Tingkat Kemiskinan	IS 1 Angka Kemiskinan (%) IS 2 Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial (%)
<b>S3</b> Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	S1 Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	S2 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat	IS 3 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
			IS 4 Harapan Lama Sekolah (Tahun)
			IS 5 Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (%)
	S2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	S3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	IS 6 Usia Harapan Hidup (Tahun)
			IS 7 Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (%)
S3 Meningkatnya standar hidup layak masyarakat	S1 Menurunnya Tingkat Kemiskinan	IS 2 Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial (%)	
		S2 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat	IS 5 Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (%)

Sasaran RKP Tahun 2024	Sasaran RKPD Jawa Barat Tahun 2024	Sasaran RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024	Indikator Sasaran RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024
		S3 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	IS 6 Usia Harapan Hidup (Tahun) IS 7 Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (%)
		S9 Meningkatkan layanan infrastruktur kota yang berkualitas	IS 24 Persentase kawasan permukiman layak huni IS 26 Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan dan Permukiman
<b>S4</b> Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda	S4 Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan pemuda	S4 Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender	IS 9 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Point) IS 10 Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Point)
		S5 Meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah	IS 11 Persentase Capaian Prestasi Kepemudaan (%) IS 12 Persentase Capaian Prestasi Olahraga (%) IS 13 Persentase Pelestarian Kebudayaan (%)
<b>S5</b> Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	S10 Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian	S1 Menurunnya tingkat kemiskinan	IS 1 Angka Kemiskinan (%) IS 2 Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial (%)



Sasaran RKP Tahun 2024	Sasaran RKPD Jawa Barat Tahun 2024	Sasaran RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024	Indikator Sasaran RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024
	dan meminimalkan kantong kemiskinan		
<b>S6</b> Meningkatnya produktivitas dan daya saing	S9 Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha serta meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	S8 Meningkatnya iklim penanaman modal dan kesempatan kerja	IS 21 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) IS 22 Pembentukan Modal Tetap Bruto ADH Berlaku (Triliun)
<b>PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</b>			
<b>S1</b> Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	S12 Meningkatnya Kebebasan, Kesetaraan, Dan Kapasitas Lembaga Demokrasi	S5 Meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah	IS 11 Persentase Capaian Prestasi Kepemudaan (%) IS 12 Persentase Capaian Prestasi Olahraga (%) IS 13 Persentase Pelestarian Kebudayaan (%)
<b>S2</b> Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	S4 Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan pemuda	S5 Meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah	IS 13 Persentase Pelestarian Kebudayaan (%)
<b>S3</b> Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	S3 Meningkatnya standar hidup layak masyarakat	S1 Menurunnya Tingkat Kemiskinan	IS 2 Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial (%)

Sasaran RKP Tahun 2024	Sasaran RKPD Jawa Barat Tahun 2024	Sasaran RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024	Indikator Sasaran RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024			
<b>S4</b> Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat						
<b>S5</b> Meningkatkan ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa	S4	Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan pemuda	S4	Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender	IS 9	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Point)
				IS 10	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Point)	
<b>S6</b> Meningkatkan budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif	S15	Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan	S11	Meningkatnya kualitas layanan publik dan sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang inovatif dan berbasis teknologi informasi	IS 31	Indeks Inovasi Daerah (Kategori)
<b>PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</b>						
<b>S1</b> Meningkatkan penyediaan infrastruktur layanan dasar	S10	Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian	S9	Meningkatnya layanan infrastruktur kota yang berkualitas	IS 23	Persentase Kemantapan Jalan (%)

<b>Sasaran RKP Tahun 2024</b>	<b>Sasaran RKPD Jawa Barat Tahun 2024</b>	<b>Sasaran RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024</b>	<b>Indikator Sasaran RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024</b>
<b>S2</b> Meningkatnya konvektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	dan meminimalkan kantong kemiskinan		IS 24 Persentase Kawasan Permukiman Layak Huni (%)
<b>S3</b> Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan			IS 25 Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (%)
<b>S4</b> Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan			
<b>S5</b> Meningkatnya layanan infrastruktur TIK			IS 26 Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan dan Permukiman (%)
<b>PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim</b>			
<b>S1</b> Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	S11 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	S10 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	IS 27 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Point)
			IS 28 Persentase Pengelolaan Sampah (%)
			IS 29 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%)

Sasaran RKP Tahun 2024	Sasaran RKPD Jawa Barat Tahun 2024	Sasaran RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024	Indikator Sasaran RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024
<b>S2</b> Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim	S12 Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah	S6 Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	IS 15 Indeks Resiko Bencana (Point)
<b>S3</b> Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline			
<b>PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</b>			
<b>S1</b> Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara secara Optimal	S13 Meningkatnya Kebebasan, Kesetaraan, Dan Kapasitas Lembaga Demokrasi	S6 Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	IS 14 Persentase Capaian SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum (%)

Sasaran RKP Tahun 2024	Sasaran RKPD Jawa Barat Tahun 2024	Sasaran RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024	Indikator Sasaran RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024
<b>S2</b> Optimalnya Kebijakan Luar Negeri	-	-	-
<b>S3</b> Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap	S13 Meningkatnya Kebebasan, Kesetaraan, Dan Kapasitas Lembaga Demokrasi	S6 Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	IS 14 Persentase Capaian SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum (%)
<b>S4</b> Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	S14 Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	S11 Meningkatnya kualitas layanan publik dan sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang inovatif dan berbasis teknologi informasi	IS 30 Indeks Kepuasan Masyarakat (Kategori)
			IS 31 Indeks Inovasi Daerah (Kategori)
			IS 32 Indeks SPBE (Point)
			IS 33 Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini)
			IS 34 Nilai Evaluasi SAKIP (Kategori)
			IS 35 Nilai Evaluasi LPPD (Kategori)
<b>S5</b> Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	S13 Meningkatnya Kebebasan, Kesetaraan, Dan Kapasitas Lembaga Demokrasi	S6 Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	IS 36 Tingkat Maturitas SPIP (Level)
			IS 14 Persentase Capaian SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum (%)

Sumber: hasil analisis Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, Tahun 2023

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, oleh karena itu pembangunan daerah harus mendukung pembangunan nasional. Prioritas pembangunan daerah harus dapat mendukung program prioritas nasional dan kegiatan prioritas nasional sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 4.11

Tingkat Dukungan Program Prioritas Daerah Terhadap Masing-Masing Kegiatan Prioritas pada Prioritas Nasional Tahun 2024

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
<b>PN.01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan</b>				
1	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	1. Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan 2. Peningkatan pasokan bahan bakar nabati 3. Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi 4. Peningkatan Pelaksanaan Konservasi dan Efisiensi Energi 5. Peningkatan pemenuhan energi domestik 6. Pengembangan industri pendukung EBT		
2	Peningkatan kuantitas/ ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	1. Penyediaan air untuk pertanian 2. Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif Optimalisasi Infrastruktur dan penataan ruang yang	1. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
			berwawasan Lingkungan	
		3. Pemeliharaan, pemulihan dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau		
		4. Pengembangan waduk multiguna		1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
3	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	1. Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		2. Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		3. Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar		2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		4. Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian dan digitalisasi pertanian		1. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
		5. Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional		1. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
				1. Program Penyuluhan Pertanian

<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS NASIONAL</b>	<b>KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS DAERAH</b>	<b>DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
4	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	1. Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		2. Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya		1. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
		3. Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan		1. Program Penyuluhan Pertanian
5	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah (UMKM), dan koperasi	1. Peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
				2. Program Pengembangan UMKM
		2. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
				2. Program Pengembangan UMKM
		3. Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
				2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		



NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
				4. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
				5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
		4. Peningkatan penciptaan <i>start-up</i> dan peluang usaha	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
				2. Program Pengembangan UMKM
				3. Program Promosi Penanaman Modal
				4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
				5. Program Pelayanan Penanaman Modal
				6. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		5. Peningkatan nilai tambah usaha sosial	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
				2. Program Pengembangan UMKM
6	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sector riil, dan industrialisasi	1. Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		2. Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam,	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
				2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
		yang didukung penguatan rantai pasok		3. Program Pemasaran Pariwisata 4. Program Pengembangan Kebudayaan 5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
		3. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM 3. Program Promosi Penanaman Modal 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 5. Program Pelayanan Penanaman Modal 6. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 7. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 8. Program Penempatan Tenaga Kerja
		4. Perbaiki iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM
		5. Pengembangan industri halal	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM 3. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS NASIONAL</b>	<b>KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS DAERAH</b>	<b>DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
7	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)	1. Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Program Pengembangan Ekspor
		2. Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor		2. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
		3. Pengelolaan impor	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
		4. Peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif		2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		5. Peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
		6. Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan desinasi branding, dan produk kreatif		1. Program Pengembangan Ekspor
				2. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
				3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
				4. Program Pengembangan UMKM
				1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
				2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				3. Program Pemasaran Pariwisata

<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS NASIONAL</b>	<b>KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS DAERAH</b>	<b>DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
8	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	<p>1. Peningkatan pendalaman sektor keuangan</p> <p>2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0</p> <p>3. Peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga</p> <p>4. Peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata</p>	<p>Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif</p> <p>Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif</p> <p>Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif</p>	<p>1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)</p> <p>2. Program Pengembangan UMKM</p> <p>3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</p> <p>4. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</p> <p>1. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</p> <p>2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</p> <p>3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting</p> <p>1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)</p> <p>2. Program Pengembangan UMKM</p> <p>3. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</p>
<b>PN.02 Membangun Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</b>				
1	Pembangunan Wilayah Sumatera			
2	Pengembangan Wilayah Jawa-Bali	1. Pengembangan Kawasan strategis		1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
			Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	2. Program Pemasaran Pariwisata 3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 4. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 5. Program Pengendalian Izin Usaha Industri 6. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
		2. Pengembangan sektor unggulan	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri 3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 5. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 6. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 7. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		3. Pengembangan Kawasan perkotaan (khusus penilaian provinsi)		
		4. Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan,		

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
		dan transmigrasi (khusus penilaian provinsi dan kabupaten)		
		5. Kelembagaan dan keuangan daerah	Percepatan implementasi birokrasi	1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 4. Program Informasi Dan Komunikasi Publik 5. Program Aplikasi Informatika 6. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 7. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 8. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 9. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 10. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 11. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 12. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 13. Program Penataan Organisasi

<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS NASIONAL</b>	<b>KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS DAERAH</b>	<b>DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
				14. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 15. Program Penatagunaan Tanah
3	Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara			
4	Pembangunan Wilayah Kalimantan			
5	Pembangunan Wilayah Sulawesi			
6	Pembangunan Wilayah Maluku			
7	Pengembangan Wilayah Papua			
<b>PN.03 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing</b>				
1	Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan	1. Percepatan cakupan administrasi kependudukan	Percepatan implementasi birokrasi	1. Program Pendaftaran Penduduk
		2. Integrasi sistem administrasi kependudukan	Percepatan implementasi birokrasi	1. Program Pencatatan Sipil 2. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		3. Pendampingan layanan terpadu		
		4. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk		

<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS NASIONAL</b>	<b>KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS DAERAH</b>	<b>DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
2	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	1. Sistem jaminan sosial nasional 2. Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran 3. Perlindungan sosial adaptif 4. Kesejahteraan sosial	Kemiskinan dan Permasalahan Sosial	1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 2. Program Rehabilitasi Sosial
3	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi 2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat 3. Peningkatan pengendalian penyakit 4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Gernas) 5. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan	Kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
4	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran 2. Pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun 3. Peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan	Kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3. Program Pengembangan Kurikulum



<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS NASIONAL</b>	<b>KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS DAERAH</b>	<b>DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		4. Penjaminan mutu pendidikan		4. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
		5. Peningkatan tata kelola pendidikan		
5	Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	1. Pemenuhan hak dan perlindungan anak		
		2. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan		
		3. Kualitas pemuda		
6	Pengentasan kemiskinan	1. Akselerasi penguatan ekonomi keluarga	Kemiskinan dan Permasalahan Sosial	1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		2. Keperantaraan usaha dan dampak sosial		2. Program Rehabilitasi Sosial
		3. Reformasi agraria		
		4. Perhutanan sosial		
7	Peningkatan produktivitas dan daya saing	1. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri	Kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing	1. Program Pengelolaan Pendidikan
				2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
				3. Program Pengembangan Kurikulum
				4. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra
		2. Prestasi olahraga		
<b>PN.04 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</b>				

<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS NASIONAL</b>	<b>KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS DAERAH</b>	<b>DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	<p>1. Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti</p> <p>2. Revolusi mental dalam tata kelola</p> <p>3. Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter</p> <p>4. Pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila</p> <p>5. Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme</p>		
2	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan	<p>1. Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal</p> <p>2. Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat</p>	Peningkatan Kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing	<p>1. Program Pengembangan Kebudayaan</p> <p>2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional</p>

<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS NASIONAL</b>	<b>KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS DAERAH</b>	<b>DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia	3. Perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif 4. Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan		3. Program Pengembangan Sejarah 4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
3	Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter	1. Peningkatan budaya literasi 2. Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah serta sastra 3. Pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta 4. Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi	Peningkatan Kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing	1. Program Pengelolaan Perpustakaan 1. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra 1. Program Pengelolaan Pendidikan 1. Program Pembinaan Perpustakaan
<b>PN.05 Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</b>				
1	Infrastruktur pelayanan dasar	1. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau 2. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman	Pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1. Program Kawasan Permukiman 2. Program Pengembangan Perumahan 3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) 4. Program Pengelolaan Persampahan 1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS NASIONAL</b>	<b>KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS DAERAH</b>	<b>DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
			Pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	2. Program Pengelolaan Persampahan 3. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
		3. Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan	Pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air.
		4. Keselamatan dan keamanan transportasi	Pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		5. Ketahanan kebencanaan infrastruktur	Pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1. Program Penanggulangan Bencana
		6. Waduk multipurpose dan modernisasi irigasi	Pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA)
2	Infrastruktur ekonomi	1. Konektivitas jalan	Pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		2. Konektivitas darat	Pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3	Infrastruktur perkotaan	1. Transportasi perkotaan	Pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
		2. Infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan		
		3. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman di perkotaan	Pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1. Program Kawasan Permukiman
		4. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan	Pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1. Program Kawasan Permukiman
				2. Program Pengembangan Perumahan
				3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU)
4	Transformasi digital	1. Penuntasan infrastruktur TIK		
		2. Pemanfaatan infrastruktur TIK		
		2. Fasilitas pendukung transformasi digital		
<b>PN.06 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim</b>				
1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	1. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Optimalisasi Infrastruktur dan penataan ruang yang berwawasan Lingkungan	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
				2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
				4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
				5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH
1	2	3	4	5
		2. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Optimalisasi Infrastruktur dan penataan ruang yang berwawasan Lingkungan	<p>6. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</p> <p>1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup</p> <p>2. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)</p> <p>3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</p> <p>4. Program Pengelolaan Persampahan</p> <p>5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</p>
		3. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Optimalisasi Infrastruktur dan penataan ruang yang berwawasan Lingkungan	<p>1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup</p> <p>2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <p>3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</p> <p>4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</p>
		4. Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Optimalisasi Infrastruktur dan penataan ruang yang berwawasan Lingkungan	<p>1. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</p> <p>2. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</p> <p>3. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</p>

<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS NASIONAL</b>	<b>KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS DAERAH</b>	<b>DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
				4. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	1. Penanggulangan bencana	Kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing	1. Program Penanggulangan Bencana
		2. Peningkatan ketahanan iklim	Kualitas SDM yang berkarakter dan berdaya saing	2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
3	Pembangunan rendah karbon	1. Pembangunan energi berkelanjutan	Optimalisasi Infrastruktur dan penataan ruang yang berwawasan Lingkungan	1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
		2. Pemulihan lahan berkelanjutan	Optimalisasi Infrastruktur dan penataan ruang yang berwawasan Lingkungan	1. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
		3. Pengelolaan limbah	Optimalisasi Infrastruktur dan penataan ruang yang berwawasan Lingkungan	2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
				1. Program Pengelolaan Persampahan 2. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS NASIONAL</b>	<b>KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS DAERAH</b>	<b>DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		4. Pengembangan industri hijau		
<b>PN.07 Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik</b>				
1	Konsolidasi Demokrasi	1. Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	Percepatan Implementasi Reformasi birokrasi	1. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		2. Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Percepatan Implementasi Reformasi birokrasi	1. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		3. Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Percepatan Implementasi Reformasi birokrasi	1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
				2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 3. Program Aplikasi Informatika 4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
2	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	1. Penguatan Integrasi NKRI dan Perlindungan WNI di luar Negeri		
		2. Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional		
		3. Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global		
3		1. Penataan Regulasi		



<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS NASIONAL</b>	<b>KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS DAERAH</b>	<b>DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	Penegakan Hukum Nasional	2. Perbaiki Sistem Hukum dan Perdata		
		3. Penguatan Sistem Anti Korupsi		
		4. Peningkatan Akses Terhadap Keadilan		
4	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	1. Penguatan Implementasi Manajemen ASN	Percepatan Implementasi Reformasi birokrasi	1. Program Kepegawaian Daerah 2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		2. Transformasi Pelayanan	Percepatan Implementasi Reformasi birokrasi	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		3. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis	Percepatan Implementasi Reformasi birokrasi	1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
				2. Program Pengelolaan Arsip
				3. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
				4. Program penelitian dan pengembangan daerah
		5. Program pengembangan sumber daya manusia		
		4. Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Percepatan Implementasi Reformasi birokrasi	1. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Program penyelenggaraan pengawasan

<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS NASIONAL</b>	<b>KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL</b>	<b>PRIORITAS DAERAH</b>	<b>DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
5	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	1. Penguatan Keamanan Dalam Negeri	Percepatan Implementasi Reformasi birokrasi	1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
				2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
				3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
				4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
		2. Penguatan Kemampuan Pertahanan dibarengi <i>Confidence Building Measures (CBM)</i>		
		3. Penguatan Keamanan Laut		
		4. Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		
		5. Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber		

Sumber: hasil analisis Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, Tahun 2023

#### **4.2.5.3. Standar Pelayanan Minimal**

Prioritas pembangunan selanjutnya adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, ada 6 (enam) jenis SPM yang terdiri dari:

1. SPM Pendidikan

Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar; dan
- c. pendidikan kesetaraan.

2. SPM Kesehatan;

Jenis pelayanan dasar pada SPM kesehatan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. pelayanan kesehatan balita;
- e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

3. SPM Pekerjaan umum

Jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

4. SPM Perumahan rakyat

Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

5. SPM Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;

Jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. pelayanan informasi rawan bencana;
- c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

6. SPM Sosial

Jenis pelayanan dasar pada SPM sosial daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian SPM:

1. Dalam rangka pencapaian pencapaian SPM Pendidikan dialokasikan anggaran khusus yang dialokasikan untuk pemenuhan indikator SPM bidang pendidikan. pemenuhan capaian SPM melalui program kegiatan yang memuat indikator serta sasaran yang bertujuan untuk PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan pemenuhan standar pendidikan yang telah ditetapkan yaitu pemenuhan sarana dan prasarana peserta didik jenjang PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan. Selain itu juga dilakukan peningkatan kualitas data sasaran SPM bidang pendidikan.
2. Untuk pemenuhan SPM bidang kesehatan, Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan anggaran dalam pemenuhan pelayanan terhadap 12 kelompok penerima layanan kesehatan;
3. Untuk pemenuhan SPM bidang perumahan Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan anggaran dalam penyediaan infrastruktur perumahan korban bencana dan program pemerintah;
4. Untuk pemenuhan SPM bidang Pekerjaan umum, Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan anggaran dalam peningkatan penyediaan infrastruktur air minum dan air limbah domestik;
5. Peningkatan pelayanan keamanan dan ketertiban umum Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan anggaran melalui peningkatan sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban umum. Adapun untuk pemenuhan dalam sub bidang kebencanaan dilaksanakan melalui peningkatan ketersediaan informasi pengurangan risiko bencana pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
6. Peningkatan Pemenuhan SPM bidang Sosial, Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan anggaran yang dilaksanakan melalui rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti; rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota.

#### **4.2.5.4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)**

Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang

terlewatkan atau “*No-one Left Behind*”. SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015 lalu.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran SDGs berkomitmen untuk melaksanakan Agenda 2030 dengan tujuan untuk menggalakkan upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian SDGs, perlu adanya penyelerasan dengan RPJPN, RPJMN, RPJPD dan RPJMD.

Keselarasan pelaksanaan SDGs ke dalam RKPD Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4.12  
Keterkaitan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs

SDGs	RKPD 2024				
	Program	Indikator	Target	PD	
<b>Tujuan 1.</b> Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun	Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100%	Dinas Sosial	
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Prosentase Penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	Dinas Sosial	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase KK berakses layanan air minum	57,26 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan permukiman kumuh yang ditangani	31,77 %		
	Program Pengelolaan Pendidikan		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	25,79 %	Dinas Pendidikan
			Angka Partisipasi Murni	89,80 %	

SDGs	RKPD 2024			
	Program	Indikator	Target	PD
		(APM) SD/MI/Paket A		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	78,66 %	
	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	95%	Disdukcapil
	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial	100 %	Dinas Sosial
	Program Penanggulangan Bencana	Prosentase Peran Serta Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	100 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Prosentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100 %	
		Prosentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	100 %	
<b>Tujuan 2</b> Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	98 Kg/kap / Tahun	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kelurahan rentan rawan pangan yang ditangani	15%	
<b>Tujuan 3</b> Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya	Prosentase penduduk memiliki jaminan kesehatan	86%	Dinas Kesehatan

SDGs	RKPD 2024			
	Program	Indikator	Target	PD
kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Kesehatan Masyarakat			
<b>Tujuan 4</b> Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini	25,79 %	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	89,80 %	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	78,66 %	
<b>Tujuan 5</b> Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perangkat Daerah Yang Responsif Gender	60,10 Poin	Dinas PPKBP3A
<b>Tujuan 6</b> Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase KK/RT berakses layanan air minum	57,26 %	Dinas PUTR
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Tercapainya Indeks Kualitas Air	53,75 Poin	Dinas LH
<b>Tujuan 7</b> Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua	-	-		-
<b>Tujuan 8</b>	Program Pelatihan Kerja Dan	Persentase tenaga kerja yang	5,56%	

SDGs	RKPD 2024			
	Program	Indikator	Target	PD
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	Produktivitas Tenaga Kerja	mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi		Dinas Tenaga Kerja
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	29%	
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang terampil	56,67 %	Disporab udpar
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang terampil	56,67 %	
		Jumlah usaha pariwisata dan sub sektor ekonomi kreatif yang dibina/jumlah Jumlah usaha pariwisata dan sub sektor ekonomi kreatif	56,67 %	
<b>Tujuan 9</b> Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang dibangun	2 Unit	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri	100 %	Dinas KUMKM Perindag
	Program Pengelolaan Sistem Informasi	Persentase IKM yang Terdaftar di Sistem Informasi Industri Nasional	100 %	



SDGs	RKPD 2024			
	Program	Indikator	Target	PD
	Industri Nasional			
<b>Tujuan 10</b> Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara	-	-		-
<b>Tujuan 11</b> Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	Program Pengembangan Permukiman	Persentase jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik	57,34 %	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	persentase drainase pemukiman dalam kondisi baik	19,19 %	Dinas PUTR
	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan permukiman kumuh yang ditangani	4,84 %	
<b>Tujuan 12</b> Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	86.000 Ton	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		Capaian Produksi hasil peternakan	10.400 Ton	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Capaian Produksi Perikanan Budidaya	10.100 Ton	
		Tingkat pengembangan kawasan budidaya air tawar	20 Unit	
	Program Pengolahan Dan Pemasaran	Capaian produksi hasil perikanan	10.100 Ton	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian

SDGs	RKPD 2024			
	Program	Indikator	Target	PD
	Hasil Perikanan			dan Perikanan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	persentase peningkatan populasi ternak	1%	
		Capaian Produksi Tanaman Pangan	86.000 Ton	
		Capaian produksi hortikultura dan perkebunan	6.000 Ton	
<b>Tujuan 13</b> Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	-	-		-
<b>Tujuan 14</b> Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	-	-		-
<b>Tujuan 15</b> Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Capaian tersedianya dokumen pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati	-	Dinas LH
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Lokasi taman yang ditangani	100 %	Dinas LH

SDGs	RKPD 2024			
	Program	Indikator	Target	PD
<b>Tujuan 16</b> Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100 %	Badan Kesbang
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik Sosial.	65 %	
<b>Tujuan 17</b> Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pajak daerah	7,82 %	Badan Pendapatan Daerah
		Persentase peningkatan PAD bukan pajak daerah	- 1,06%	
		Capaian Pajak Daerah	100 %	
		Capaian PAD bukan pajak daerah	100 %	
	Program Informasi Dan Komunikasi/ Publik	Persentase Pengelolaan Saluran Informasi	81 %	Dinas Kominfo

Sumber: hasil analisis Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, Tahun 2023

### 4.3. Inovasi Pembangunan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi. Tepatnya pada pasal 386 yang menyatakan bahwa “dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi”. Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Inovasi pembangunan daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah.

Untuk itu inovasi di daerah perlu terus didorong dan dikembangkan karena inovasi di daerah akan menunjang peningkatan daya saing daerah. Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan Daya Saing Daerah. Selain itu, inovasi daerah diharapkan dapat menjawab isu strategis daerah dan tantangan yang dihadapi.

Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berpedoman pada prinsip-prinsip:

1. Peningkatan Efisiensi;
2. Perbaikan efektifitas;
3. Perbaikan kualitas pelayanan;
4. Tidak ada konflik kepentingan;
5. Berorientasi pada kepentingan umum;
6. Dilakukan secara terbuka;
7. Memenuhi nilai-nilai kepatutan;
8. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri.

Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam bentuk:

1. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah; meliputi inovasi tata laksana internal dalam fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen seperti e-planning, e-budgetting dsb.
2. Inovasi Pelayanan Publik; meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat; seperti pelayanan perijinan, pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Pelayanan social dsb.
3. Inovasi Daerah Lainnya; meliputi inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya, seperti; urusan pekerjaan umum, lingkungan hidup, pertanian dsb.

Pada pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, disebutkan bahwa Menteri melakukan penilaian terhadap Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari Kepala Daerah. Penilaian terhadap penerapan hasil Inovasi Daerah untuk

memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah. Adapun penilaian Inovasi Daerah yang dilaksanakan antara lain:

- 1) Inovation Government Award (IGA);
- 2) Indeks Daya Saing Daerah (IDSD);
- 3) Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik), dan
- 4) Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB).

Pada Tahun 2021 Hasil Penilaian Indeks Inovasi Daerah pada *Inovation Government Award* (IGA) yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021), Kota Tasikmalaya berada pada peringkat 64 dari 93 Kota di Indonesia dengan skor 36,43 dengan kategori INOVATIF. Secara kategori terjadi peningkatan dari semula Kurang Inovatif pd tahun 2020.

Untuk tahun 2022 Hasil Penilaian Indeks Inovasi Daerah pada *Inovation Government Award* (IGA) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6301.A Tahun 2022 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2022 Kota Tasikmalaya berada pada peringkat 81 dari 93 Kota di Indonesia dengan skor 38,70 dengan kategori INOVATIF.

Sebagai wujud kepedulian terhadap Inovasi Daerah, Pemerintah Kota Tasikmalaya melakukan terobosan baru dengan memberikan suatu apresiasi dan penganugerahan terhadap pelaku inovasi yang ada di Kota Tasikmalaya dengan melaksanakan *Lomba Inovasi dan Teknologi Kota Tasikmalaya*, yang akan dilaksanakan setiap tahun.

Maksud dari penyelenggaraan Lomba Inovasi dan Teknologi Kota Tasikmalaya setiap tahun adalah sebagai upaya mendorong peningkatan pelayanan publik, percepatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah dengan memberdayakan semaksimal mungkin sumber daya IPTEK yang ada di Kota Tasikmalaya sehingga mampu memberikan kontribusi dalam mengurangi masalah-masalah yang dihadapi daerah dan sekaligus membantu pengembangan potensi daerah.

Dalam perkembangannya Inovasi yang lahir dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Kota Tasikmalaya masih memerlukan dukungan dan pembinaan, karena secara kuantitas masih sangat kurang jumlahnya dan inovasi yang dihasilkan belum berkualitas dan masih belum matang. Inovasi yang diciptakan banyak yang belum didukung oleh data data yang memadai. Dan ini menjadi tanggung jawab semua pihak untuk berkomitmen memperbaiki dan meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasinya. Dengan semakin banyak jenis inovasi dari perangkat daerah dengan kualitas inovasi yang matang, akan meningkatkan Indeks Inovasi Daerah.

Komitmen Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam rangka meningkatkan Indeks Inovasi Daerah adalah:

1. Agar setiap Perangkat Daerah minimal mempunyai satu inovasi sesuai urusannya atau One Agent One Innovation;
2. Menetapkan Indeks Inovasi Daerah sebagai target kinerja dalam RPD Tahun 2023 – 2026.

Berbagai inovasi telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dikembangkan Tahun 2021-2022 dengan total jumlah 15 inovasi. Berikut inovasi yang telah dikembangkan untuk menjawab isu strategi Tahun 2024:

#### **A. INOVASI DAERAH UNTUK KEMISKINAN DAN PERMASALAHAN SOSIAL**

Tabel 4.13  
Inovasi Daerah berkaitan dengan Kemiskinan  
dan Permasalahan Sosial

<b>No.</b>	<b>Judul Inovasi</b>	<b>Inventor</b>	<b>Tahun</b>
1	LAYAR KUSUMAH (Layanan Antar Sampai ke Rumah)	Dinas Sosial Kota Tasikmalaya	2021
2	KAKAREN KARAMAT (Kampung KB dan Kampung Ramah Anak Terpadu)	DPPKBP3A Kota Tasikmalaya	2021
3	BERANDA SAKOTA (Terbebas Dari Asap Rokok Di Semua Area Kota Tasikmalaya)	Dinas Kesehatan	2021

Sumber: Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, Data Diolah Tahun 2023

##### **1. LAYAR KUSUMAH (Layanan Antar Sampai ke Rumah)**

Inovasi LAYAR KUSUMAH (Layanan Antar Sampai ke Rumah) dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dan telah berjalan sejak Maret 2021. Inovasi Layar Kusumah dibuat untuk membantu meringankan beban para Pemerlu Layanan Permasalahan Sosial dalam kelangsungan hidupnya.

Inovasi ini dilatarbelakngi oleh tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Tasikmalaya perlu mendapatkan perhatian khusus baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah Masyarakat Miskin, Penyandang Disabilitas dan Orang Terlantar. Permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat miskin dan penyandang disabilitas adalah kesulitan dalam mendapatkan pelayanan jaminan sosial di bidang kesehatan dengan biaya yang terjangkau. Sedangkan permasalahan yang sering dihadapi oleh orang terlantar adalah sulitnya mendapatkan pelayanan transportasi gratis. Kenyataan dilapangan saat ini masyarakat miskin dan penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelayanan jaminan sosial di bidang kesehatan selalu menggunakan jasa orang lain karena beranggapan bahwa untuk mendapatkan pelayanan sangatlah susah. Hal ini terjadi disebabkan masyarakat miskin buta informasi dan transportasi sehingga oknum para penyedia jasa sangat mudah memanipulasi informasi.

Untuk penanganan terhadap ketiga permasalahan maka dikeluarkanlah Program Inovasi LAYAR KUSUMAH (Layanan Antar Sampai ke Rumah) yang menjadi solusi dalam penanganan masalah yang terjadi dan meminimalisir oknum para penyedia jasa.

Tujuan dari Inovasi LAYAR KUSUMAH bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial serta terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat miskin, penyandang disabilitas dan orang terlantar. Inovasi

dalam memberikan pelayanan sosial bagi warga miskin yang memerlukan bantuan pelayanan, baik layanan sosial maupun layanan kesehatan, dan kebutuhan transportasi berupa layanan antar jemput masyarakat kurang mampu yang membutuhkan.

Regulasi yang harus dikeluarkan untuk mendukung pelaksanaan inovasi ini adalah:

- 1) Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor: 460/kep.17.1-Dinsos/2021 tentang Bantuan Sosial Kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di Kota Tasikmalaya;
- 2) Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Nomor: 460/Kep-149 Dinsos/2020 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Untuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Tasikmalaya;
- 3) Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Nomor: 520/036/Sekre tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya;
- 4) Perjanjian Kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya 460/ /Dinsos/2021;
- 5) Perjanjian Kerjasama dengan Palang Merah Indonesia Kota Tasikmalaya Nomor: 460/440/Dinsos/2021 tentang Peminjaman Kendaraan Ambulance dan Fasilitasi Donor Darah;
- 6) Perjanjian kerjasama dengan Rumah Singgah Al-Fatih Nomor: 460/441/Dinsos/2021 tentang Fasilitasi Pasien Rujukan Ke Rumah sakit Bandung.

Bentuk Inovasi LAYAR KUSUMAH termasuk pada inovasi pelayanan publik. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung inovasi ini adalah alat tulis kantor, perangkat komputer, kendaraan roda dua untuk verifikasi kelayakan, roda empat ambulance untuk rujukan, kendaraan roda 4 untuk penjemputan, handphone, kamera digital untuk visualisasi dan media pengaduan masyarakat.

Untuk Inovasi LAYAR KUSUMAH telah dialokasikan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 303 Orang yang terdiri dari Tim Reaksi Cepat (TRC) 40 orang, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 69 orang, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 10 orang, Karang Taruna sebanyak 69 orang dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) 115 orang. Proses pelaksanaan kegiatan dimulai dari adanya laporan langsung dari masyarakat atau adanya usulan pemerlu layanan dari kelurahan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna, TKSK dan pendamping PKH untuk diusulkan ke Dinas Sosial Kota Tasikmalaya. Setelah proses usulan selesai Tim Reaksi Cepat (TRC) memverifikasi kelayakan calon penerima layanan, setelah diketahui kondisi dan kebutuhannya serta dianggap layak untuk menjadi penerima bantuan maka masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan sosial kesehatan, penyandang disabilitas yang memerlukan terapi dan orang terlantar yang memerlukan bantuan, pelayanan pertama yang diberikan adalah bantuan transportasi dengan cara menjemput dari rumah atau lokasi kejadian dan didampingi hingga pemerlu layanan sampai kembali ke rumah. Tidak hanya sampai disitu tim yang terlibat dalam Program Inovasi LAYAR KUSUMAH juga membantu mengurus administrasi yang diperlukan sehingga penerima

layanan tidak memikirkan masalah administrasi, biaya, termasuk tidak memikirkan untuk membayar para penyedia jasa.

Keluaran dari inovasi ini adalah:

- 1) Masyarakat miskin, penyandang disabilitas dan orang terlantar mendapatkan kemudahan dalam menempuh proses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan bantuan transportasi tanpa memikirkan biaya.
- 2) Meringankan beban hidup serta memberikan rasa aman pada saat menjadi penerima layanan.

Perlu diingat bahwa masyarakat miskin, penyandang disabilitas dan orang terlantar sangat tergantung pada bantuan dari Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam masalah kesehatan karena bagi mereka biaya kesehatan saat ini sangatlah tinggi dan tidak mungkin terjangkau. Melalui pelayanan Inovasi LAYAR KUSUMAH masyarakat mengetahui bahwa untuk mendapatkan bantuan kesehatan dan bantuan transportasi sangatlah mudah sehingga merasakan bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah mereka yang sangat membutuhkan.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan dampak dari pelaksanaan kegiatan Inovasi LAYAR KUSUMAH serta melakukan penilaian terhadap kinerja Sumber Daya Manusiis yang terlibat, demi tercapainya peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat miskin, penyandang disabilitas dan orang terlantar.

Pada pelaksanaannya tidak selalu berjalan dengan sesuai harapan, selalu ada halangan dan rintangan yang merupakan seni dilapangan dalam optimalisasi pelayanan. Kendala yang sering terjadi adalah:

- 1) adanya halangan dari pihak-pihak yang terganggu kepentingannya;
- 2) terlambatnya penjemputan karena kekurangan kendaraan operasional seperti tidak memiliki kendaraan ambulance, bahkan untuk membuat masyarakat supaya tidak menunggu lama penjemputan sering menggunakan kendaraan jabatan yang tersedia di Dinas Sosial Kota Tasikmalaya.

## **2. KAKAREN KARAMAT (Kampung KB dan Kampung Ramah Anak Terpadu)**

Program Inovasi KAKAREN KARAMAT (Kampung KB dan Kampung Ramah Anak Terpadu). Bentuk dari inovasi ini adalah Kampung KB bersinergi dan terintegrasi dengan Kampung Ramah Anak. Inovasi KAKAREN KARAMAT dimulai pada tahun 2021.

Latar belakang inovasi ini adalah Peningkatan kualitas pelayanan publik salah satunya dengan upaya percepatan pelaksanaan reformasi yaitu fasilitas pembangunan kampung KB yang sesuai dengan kemampuan pemangku kepentingan di daerah dalam mewujudkan Kampung KB berkualitas di setiap RW, sejalan dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019.

Pembentukan Kampung KB salah satunya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara dengan



mewujudkan keluarga kecil berkualitas, serta penguatan program Bangga Kencana yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat.

Kampung Ramah anak adalah pembangunan yang berbasis dari RW, yang menyatukan komitmen dan sumber daya local, masyarakat dan dunia usaha yang berada di lingkungan setempat dalam rangka menghormati, menjamin, memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi serta mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar menyeluruh dan berkelanjutan. Pada pelaksanaannya saat ini pengembangan kedua program ini masih terpisah dan berjalan masing-masing, sehingga pencapaian dan pemanfaatan program masih belum maksimal dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kampung KB dan kampung ramah anak berintegrasi untuk mendukung akselerasi program Bangga Kencana. Dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, DPPKBP3A Kota Tasikmalaya membuat inovasi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengimplementasikan program di masyarakat untuk mencapai tujuan dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di suatu wilayah tersebut.

Tujuan dari “KAKAREN KARAMAT” dapat menciptakan kemudahan baru untuk kehidupan manusia dengan Pengembangan dan penyelarasan Program Bangga Kencana di Kampung KB dan Kampung Ramah Anak dengan memaksimalkan 8 fungsi Keluarga dan pemenuhan hak anak, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat tercapai yang dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat setempat dengan meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Diharapkan percepatan dan peningkatan kualitas keluarga dan generasi berencana melalui sinergitas Kampung KB dan Kampung Ramah Anak.

Regulasi yang harus dikeluarkan untuk mendukung pelaksanaan inovasi ini adalah Keputusan Wali Kota Tasikmalaya Nomor: 476/Kep.932-DPPKBP3A/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Advokasi Lintas Sektor Program Bangga Kencana serta Pengembangan Kampung KB Berkualitas di Kota Tasikmalaya.

Akselerasi Program Bangga Kencana terutama dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat. Pengembangan dan penyelarasan Program Bangga Kencana di Kampung KB dan Kampung Ramah Anak dengan memaksimalkan 8 Aspek Keluarga dan pemenuhan hak anak sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat tercapai. Percepatan dan peningkatan kualitas keluarga dan generasi berencana melalui sinergitas Kampung KB dan Kampung Ramah Anak.

Inovasi “KAKAREN KARAMAT” mempunyai keunikan dan nilai tambah dalam penyelesaian masalah, hal ini dapat digambarkan dengan pembauran kedua program dalam konteks wilayah yang didominasi pada kawasan perkotaan, padat penduduk dan kemiskinan. Inovasi dalam konteks wilayah terdapat 2 (dua) kriteria dalam pembentukan Kampung KB yaitu:

- 1) Kriteria program terdiri dari:

- a) Jumlah Keluarga Pra KS diatas rata-rata tingkat desa dimana kampung KB tersebut berada.
  - b) Jumlah Peserta KB dibawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa dimana kampung tersebut berlokasi.
- 2) Kriteria Wilayah: kumuh, pesisir/nelayan, daerah aliran sungai, kawasan miskin, (termasuk kawasan miskin perkotaan, terpencil, perbatasan, kawasan industri dan kepadatan penduduk.

Anggaran kegiatan ini bersumber dari APBD, APBN (DAK BOKB), Swadaya Masyarakat, CSR. Sedangkan Lurah, ketua RW, Ketua RT, PLKB, TPD, PKK tingkat kelurahan, Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Pos KB dan Sub Pos KB)/ kader, Tokoh Masyarakat, Remaja, pegawai Dinas PPKBP3A dan Lintas Sektor.

a. Proses Inovasi

- 1) Persiapan kegiatan inovasi adalah dengan menentukan lokus yang tepat dan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan pada program kampung KB dan kampung ramah anak dan yang tidak kalah pentingnya yaitu keinginan dari masyarakat itu sendiri untuk mensejahterakan dan mengembangkan serta memberdayakan masyarakat wilayah setempat, diiringi dengan partisipasi masyarakat setempat.
- 2) Pembentukan kampung KB dan Kampung Ramah Anak secara terpadu, didukung oleh pemerintah daerah setempat (Camat, Lurah), RT, RW diikuti oleh tokoh-tokoh masyarakat, kader, masyarakat setempat.
- 3) Pemahaman pokja kampung KB dan kampung ramah anak, pengaktifan semua pokja dengan rencana kerjanya yang langsung dilaksanakan dari, dan, oleh masyarakat setempat (pemberdayaan masyarakat), serta pengaktifan poktan-poktan.
- 4) Pelaporan dan pencatatan yang tepat dilaporkan supaya termonitoring capaian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kerjanya.
- 5) Evaluasi hasil kegiatan.
- 6) Pembinaan secara rutin baik internal maupun eksternal.
- 7) Menjalin mitra kerja dengan pihak lain atau instansi lain (lintas sektor) guna mengembangkan kegiatan (poktan) masyarakat yang dilakukan (implementasi 8 fungsi keluarga) dan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- 8) Pengembangan dan pembuatan sarana prasarana baik dari swadaya masyarakat maupun bantuan-bantuan dari pemerintah atau swasta, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang mendukung program inovasi kakaren karamat.
- 9) Mendorong adanya inisiatif / inovatif yang bersumber dari masyarakat, sebagai solusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hasil/keluaran yang didapat dari kegiatan atau pelayanan yang dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat diantaranya adalah:

- 1) Jumlah keluarga Sejahtera, jumlah keluarga Sejahtera 1 dan jumlah keluarga pra KS.
- 2) Jumlah Peserta KB Aktif (Cpr), partisipasi penduduk usia sekolah, jumlah peserta metode kontrasepsi jangka panjang unmet need,

partisipasi keluarga dalam pembinaan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi dan partisipasi remaja dalam kegiatan genre melalui PIK-R.

- 3) Jumlah warga yang berkomitmen terhadap pentingnya pemenuhan hak anak.
- 4) Jumlah warga yang memiliki dan yang belum memiliki KIA dan Akta lahir.
- 5) Jumlah ruangan untuk forum kegiatan anak.
- 6) Jumlah kegiatan pendampingan anak yang bermasalah dengan hukum
- 7) Jumlah kasus pernikahan dini.
- 8) Jumlah kegiatan penanganan anak berkebutuhan khusus/ disabilitas.
- 9) Jumlah/persentase partisipasi masyarakat di posyandu.
- 10) Jumlah bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif.
- 11) Jumlah tempat Kawasan bebas asap rokok.
- 12) Jumlah sarana prasarana untuk menunjang Pendidikan.
- 13) Jumlah masyarakat setempat yang paham akan pentingnya hak anak.
- 14) Jumlah kasus aksi bulliying bagi anak.
- 15) Jumlah orang tua yang paham tentang pola asuh anak.

Sasaran penerima manfaat inovasi secara langsung adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan, ibu hamil, bayi, anak-anak usia sekolah, remaja dan lansia, sasaran tidak langsung adalah pelaksana dan pengelola KB dengan tujuan, menurunkan tingkat kelahiran, melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera.

*Outcome* yang diharapkan dari inovasi ini adalah:

- 1) Tersedianya data dan peta keluarga yang bersumber dari pendataan keluarga di setiap RT/RW, sehingga dapat diketahui jumlah keluarga Sejahtera, jumlah keluarga Sejahtera 1 dan jumlah keluarga pra KS.
- 2) Tersedianya data Keluarga Berencana yang meliputi data jumlah Peserta KB Aktif (Cp r), partisipasi penduduk usia sekolah, jumlah peserta metode kobtrasepsi jangka panjang unmet need, partisipasi keluarga dalam pembinaan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi dan partisipasi remaja dalam kegiatan genre melalui PIK-R.
- 3) Adanya komitmen warga terhadap pentingnya pemenuhan hak anak.
- 4) Terdatanya warga yang memiliki dan yang belum memiliki KIA dan Akta lahir.
- 5) Tersedianya ruangan untuk forum kegiatan anak.

- 6) Adanya pendampingan anak yang bermasalah dengan hukum.
- 7) Terdatanya kasus pernikahan dini.
- 8) Adanya penanganan anak berkebutuhan khusus/ disabilitas.
- 9) Meningkatnya partisipasi masyarakat di posyandu.
- 10) Meningkatnya cakupan ASI Eksklusif.
- 11) Meningkatnya Cakupan Kawasan bebas asap rokok.
- 12) Tersedianya sarana prasarana untuk menunjang Pendidikan.
- 13) Meningkatnya pemahaman masyarakat setempat akan pentingnya hak anak.
- 14) Turunnya kasus aksi bulliying bagi anak.
- 15) Meningkatnya pemahaman orang tua tentang pola asuh anak.

Dalam rangka meningkatkan kualitas inovasi dilaksanakan Pemantauan dan Evaluasi

1) Evaluasi Internal:

- Setiap 3 bulan sekali melaksanakan Rapat Koordinasi untuk mengetahui capaian CPR/TFR dan perkembangan kegiatan di kampung sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan sebagai manfaat kegiatan yang ada di kampung, serta kendala dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target pelaksanaan kegiatan/indikator kinerja.
- Setiap bulan dilaksanakan rapat koordinasi dengan pihak terkait, rapat internal dilaksanakan melalui briefing bidang, pembinaan terhadap para koordinator PLKB dan TPD dan untuk menampung dan membahas kendala/hambatan di lapangan serta mencari solusi yang akan dilaksanakan dengan brain storming.

2) Evaluasi eksternal:

- Melakukan monitoring dan evaluasi oleh mitra kerja seperti Perguruan Tinggi. Evaluasi dari DP3AKB Jawa Barat dengan jarak waktu satu tahun satu kali, rapat koordinasi oleh BKKBN Provinsi Jawa Barat untuk review kegiatan Kota pada setiap triwulan.
- Indikator keberhasilan merupakan suatu alat ukur untuk mengetahui kondisi ataupun perkembangan pencapaian prestasi dalam hidup. Oleh karena itu dapat kita bandingkan data sebelum inovasi dan sesudah inovasi supaya dapat terlihat perkembangan pencapaian keberhasilan inovasi tersebut.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Inovasi Kakaren Karamat adalah:

- 1) Ketidaktersediaan dana atau low budgeting.
- 2) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti kegiatan secara partisipatif.
- 3) Kesadaran masyarakat untuk mematuhi prokes/ 5M masih rendah.
- 4) Dukungan lintas sektor belum optimal.

### **3. BERANDA SAKOTA (Terbebas Dari Asap Rokok Di Semua Area Kota Tasikmalaya)**

Tingginya jumlah perokok usia remaja, menurut Global Youth Tobacco Survey (GYTS) pada tahun 2009 hingga angkanya mencapai 30,4%. Perokok pada usia muda dapat berpengaruh negatif terhadap bonus demografi yang akan mengalami puncaknya pada tahun 2030. Dampak rokok terhadap kesehatan dapat menimbulkan penyakit yang berhubungan dengan merokok atau tobacco related disease (TRD), diantaranya menyerang paru-paru, yaitu bronkitis, pneumonia, emfisema dan kanker paru.

Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menindaklanjuti UU kesehatan dengan menerbitkan Peraturan Daerah No.11 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Sebagai perwujudannya, Berbagai upaya pencegahan dampak rokok telah dilakukan, namun belum membuahkan hasil sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Dinas Kesehatan meluncurkan inovasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat yaitu lembaga swasta termasuk generasi muda untuk melakukan gerakan Terbebas Dari Asap Rokok Di Semua Area Kota Tasikmalaya atau BERANDA SAKOTA. Tujuan dari inovasi ini adalah untuk meningkatkan cakupan Tidak Merokok di dalam rumah menjadi 65%.

Regulasi tentang pelaksanaan inovasi BERANDA SAKOTA masih mengacu pada Peraturan Daerah kota Tasikmalaya No.11 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok. BERANDA SAKOTA merupakan sebuah kampanye anti rokok yang target utamanya adalah pelajar atau usia remaja. Kampanye ini dilakukan melalui media yang dekat dengan gaya hidup remaja saat ini, yaitu vlog dan media sosial.

Untuk mendukung Inovasi BERANDA SAKOTA telah dialokasikan anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Adapun stakeholder yang terlibat dalam BERANDA SAKOTA meliputi:

- 1) Lembaga swasta seperti retail, Rumah Sakit, Pabrik, Hotel, Tempat wisata, Perguruan Tinggi, Rumah Makan/Restoran, Cafe, Tempat Hiburan, Perbankan, BUMN, dan BUMD.
- 2) Pelajar SMA/ sederajat.
- 3) Masyarakat kota Tasikmalaya

Adapun proses inovasi BERANDA SAKOTA yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Diseminasi BERANDA SAKOTA melalui Radar TV Tasikmalaya.
- 2) Lomba Kreasi Duta Anti Rokok (Lomba Kreasi Vlog Duta Anti Rokok dan Pemilihan Bintang BERANDA SAKOTA) bertempat di Mayasari Plaza Tasikmalaya. Peserta adalah pelajar SMA/ sederajat. Masing-masing peserta membuat video (vlog) berdurasi 1-3 menit dengan tema "Terbebas Dari Asap Rokok di Semua Area Kota Tasikmalaya". Sedangkan untuk calon peserta Bintang, harus mempersiapkan video presentasi berdurasi 10 menit dengan tema yang sama.
- 3) Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia Tingkat Kota Tasikmalaya yang meliputi upacara peringatan, talkshow di radio BEM Poltekes,

pelayanan terapi berhenti merokok oleh parasefter, himbauan di seluruh lampu merah melalui ATCS dan ditandai dengan bunyi sirine tepat jam 10.

Output dari inovasi ini adalah tersosialisasikannya inovasi BERANDA SAKOTA bagi lembaga swasta, pelajar SMA/ sederajat, dan masyarakat Kota Tasikmalaya

Melalui kegiatan BERANDA SAKOTA diharapkan tumbuh partisipasi Lembaga swasta seperti retail, Rumah Sakit, Pabrik, Hotel, Tempat wisata, Perguruan Tinggi, Rumah Makan/Restoran, Cafe, Tempat Hiburan, Perbankan, BUMN, dan BUMD, Pelajar SMA/ sederajat serta masyarakat kota Tasikmalaya, sehingga capaian PHBS kota Tasikmalaya meningkat hingga 70%.

Evaluasi kegiatan BERANDA SAKOTA dilakukan secara informal atau belum menggunakan instrumen khusus.

Permasalahan yang dihadapi dalam implementasi inovasi BERANDA SAKOTA tidak mudah untuk menyamakan kepentingan bersama, terutama karena menyangkut upaya pemberdayaan.

## B. INOVASI DAERAH UNTUK KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Tabel 4.14.

Inovasi Daerah berkaitan dengan Kualitas Sumber Daya Manusia

No.	Judul Inovasi	Inventor	Tahun
1	BUKIT LESTARI (Ibu Kader Ikut Entry, Status Gizi Teratasi)	UPTD Puskesmas Urug Kota Tasikmalaya	2022
2	Kompos Juara: Recycle Faecal Waste Menggunakan Smart Machine Compost Sebagai Solusi Alternatif Penanganan Limbah Terpadu di IPLT Singkup	UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya	2022
3	Inovasi Pengelolaan Persampahan Kota Tasikmalaya	Dinas Lingkungan Hidup	2022

Sumber: Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, Data Diolah Tahun 2023

### 1. BUKIT LESTARI (Ibu Kader Ikut Entry, Status Gizi Teratasi)

BUKIT LESTARI adalah inovasi berupa metode sistem pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat yaitu Kader Posyandu Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Urug Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya. Inovasi ini dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Urug Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya sejak tahun 2022.

Pemantauan dan pertumbuhan balita merupakan standar pelayanan minimal di setiap daerah. Status gizi masyarakat terutama pada bayi dan balita menjadi kebutuhan data di daerah untuk mendeteksi dini kelainan tumbuh kembang bayi dan balita yang ada di wilayahnya sebagai dasar perencanaan kegiatan, evaluasi kinerja dan intervensi yang harus dilakukan pada pemangku kepentingan.

Dalam pencatatan dan pelaporan yang akurat pemerintah melalui kementerian menyediakan Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat atau yang disebut e-PPGBM. Aplikasi ini merupakan bagian dari Sistem Informasi Gizi Terpadu (Sigizi Terpadu) berfungsi untuk mencatat data sasaran individu dan penimbangan atau pengukurannya dapat memberikan feedback secara langsung serta cepat pada sasaran. Untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia dalam hal entry data hasil penimbangan. Dalam rangka meningkatkan dan mengefektikan sistem pencatatan dan pelaporan program gizi berinovasi untuk memberdayakan kader untuk mengentry hasil penimbangan ke e-PPGBM diharapkan dengan adanya inovasi ini status gizi bayi dan balita dapat terpantau serta pemangku kebijakan daerah menjadi mudah mengamati permasalahan Kesehatan masyarakat untuk selanjutnya diambil keputusan sekaligus memberikan intervensi yang tepat sasaran, efektif, dan efisien.

Adapun tujuan dari inovasi Bukit Lestari ini adalah untuk meningkatkan dan mengefektikan sistem pencatatan dan pelaporan e-PPGB dengan sarannya yaitu Kader Posyandu Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Urug.

Proses Inovasi:

1. Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan e-PPGBM
2. Pembentukan Tim e-PPGBM di tingkat puskesmas dengan peserta bidan kelurahan dan kader posyandu di wilayah UPTD Puskesmas urug.
3. Pelatihan Tim e-PPGBM di tingkat Kelurahan,
4. SOP pengentryan e-PPGBM

Gambar 4.3.  
Proses Inovasi Bukit Lestari



Output secara langsung dari inovasi Bukit Lestari yaitu kader Posyandu mulai mengentry hasil penimbangan dan pengukuran melalui e-PPGBM. Outcome dari inovasi Bukit Lestari yaitu mengefektikan pelaporan dan pencatatan dalam mendeteksi dini kelainan tumbuh kembang bayi dan balita. Sehingga kader posyandu, program gizi, dan pemangku kepentingan mengetahui lebih cepat status gizi sasaran serta

mengetahui data yang diperlukan seperti stunting dan gizi buruk setiap bulannya. Selain itu, pemangku kebijakan daerah menjadi mudah mengamati permasalahan kesehatan masyarakat untuk selanjutnya diambil keputusan sekaligus memberikan intervensi yang tepat sasaran, efektif, dan efisien.

Sosialisasi e-PPGBM dan pembentukan Tim e-PPGBM dilaksanakan agar kader mengetahui manfaat dan kegunaan e-PPGBM. Setelah itu dilakukan pelatihan e-PPGBM dari membuka sistem, mengentry bayi baru, sampai mengentry penimbangan dan pengukuran balita. Setiap bulannya kader melakukan penimbangan dan pengukuran diposyandu langsung melakukan entry ke e-PPGBM. Entry bisa dilakukan di aula kelurahan secara serentak ataupun masing-masing. Data yang dientry dapat dilihat langsung status gizi setiap individu, jika ada balita dengan status gizi stunting atau gizi buruk kader yang mengentry diharapkan memvalidasi lagi agar lebih data lebih akurat. Petugas gizi menerima hasil validasi dan laporan status gizi balita, lalu melakukan validasi kembali, menganalisis dan mengintervensi. Keunggulan dari inovasi ini setiap data status gizi yang didapat selalu terbaru setiap bulannya dibandingkan sebelum ada inovasi data status gizi didapat setiap 6 bulan sekali pada saat Bulan Penimbangan Balita (Februari dan Agustus). Manfaat bagi pemegang kepentingan dapat melakukan intervensi secara tepat efektif dan efisien kepada sasaran. Selain itu, manfaat untuk kader posyandu dapat mengetahui status gizi sasarannya secara langsung.

## **2. Kompos Juara: Recycle Faecal Waste Menggunakan Smart Machine Compost Sebagai Solusi Alternatif Penanganan Limbah Terpadu di IPLT Singkup**

Kompos Juara adalah inovasi untuk mengurangi akumulasi lumpur tinja hasil olahan di IPLT Singkup, dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (UPTD SPLAD) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya bekerjasama dengan SNV Netherlands Development Organisation – Indonesia tahun 2022.

Menurut data dari BPS, jumlah penduduk Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 sebanyak 716.160 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,2% pertahun. Jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya menimbulkan dampak salah satunya meningkatnya produksi air limbah domestik (ALD). Air limbah domestik adalah air buangan sisa dari aktifitas di rumah tangga seperti buangan dari kamar mandi, WC, dapur dan buangan sisa cuci. ALD ini harus dikelola secara tepat karena didalam air limbah domestik ini menjadi media berkembang biaknya mikroorganisme patogen penyebab penyakit kolera, typhus abdominalis, disentri basiler. Selain itu juga menimbulkan bau tidak enak serta pandangan yang tidak sedap. Secara nasional dampak dari tidak terkelolanya ALD secara tepat 75% air sungai tercemar, 70% air tanah tercemar, 50 dari 100 bayi meninggal karena diare dan masyarakat membayar 25% lebih mahal untuk mendapatkan air minum.

Kota Tasikmalaya telah memiliki IPLT Singkup yang dibangun pada tahun 2014 dengan kapasitas rencana 38 m<sup>3</sup>/hari sedangkan kapasitas terpakai saat ini baru mencapai 12 m<sup>3</sup>/hari. Di IPLT, lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat akan diolah melalui



proses pengolahan fisik, proses pengolahan biologis, dan/atau pengolahan kimia sehingga produk olahannya yang berupa cairan dan padatan (lumpur kering) aman untuk dilepaskan ke lingkungan dan/atau dimanfaatkan. Dari pengolahan ini setiap bulan dihasilkan rata – rata 950 kg lumpur tinja kering. Saat ini lumpur tinja hasil olahan IPLT belum termanfaatkan secara optimal sehingga menumpuk/terakumulasi di SDB (Sludge Drying Bed/ Kolam Penampung Lumpur) tanpa pengolahan lanjutan sehingga memerlukan kebutuhan ruang yang besar untuk penyimpanan. Sedangkan SDB merupakan *bottle neck* / penentu laju kecepatan pengolahan lumpur di IPLT sehingga hal ini mempengaruhi kinerja IPLT. Sebagian lumpur tinja hasil olahan IPLT telah dimanfaatkan oleh warga sekitar sebagai kompos/ pupuk, akan tetapi pemanfaatan yang dilakukan sebelum melalui pengujian kualitas dikhawatirkan lumpur masih mengandung pathogen berbahaya dan pemanfaatan yang tidak sesuai peruntukan.

Berdasarkan hal tersebut Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (UPTD SPLAD) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya bekerjasama dengan SNV Netherlands Development Organisation - Indonesia melakukan inovasi pengolahan lanjutan lumpur tinja IPLT menjadi sebuah produk Kompos Juara: *Recycle Faecal Waste* Menggunakan *Smart Machine Compost* Sebagai Solusi Alternatif Penanganan Limbah Terpadu Di IPLT Singkup.

Tujuan dari inovasi Kompos Juara ini adalah untuk:

1. Mengurangi akumulasi lumpur tinja hasil olahan IPLT yang belum termanfaatkan.
2. Meningkatkan nilai manfaat lumpur tinja hasil dari IPLT dengan mengolahnya menjadi kompos yang memenuhi standar (permentan), mudah dan cepat di produksi, aman dari pathogen berbahaya, ramah lingkungan, ekonomis dan sesuai kebutuhan pasar sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.
3. Menjamin keamanan dari sisi kesehatan dan lingkungan dalam pemanfaatan kompos hasil dari olahan lumpur tinja.

Adapun sasaran dari inovasi Kompos Juara ini adalah pengguna kompos baik itu petani sebagai *user*, pedagang (*retail*), hingga kalangan akademisi yang berpotensi bagi pengembangan penelitian lanjutan.

Input Inovasi Kompos Juara ini adalah:

1. Alat dan Bahan

- a. Proses pengolahan lanjutan lumpur tinja menjadi kompos menggunakan alat “BCM-100 GEC Composting Machine”
- b. Bahan yang digunakan lumpur tinja hasil olahan dari IPLT dan beberapa bahan campuran lainnya seperti: cocopeat, limbah kol, kotoran sapi, limbah daun, limbah dapur.

2. Sumber daya manusia yang terlibat terdiri dari:

- a. Petugas operator : yang bertugas dalam menyerdiakan *raw material* dan melakukan proses running mesin kompos
- b. *Assistant Engineer* : bertugas dalam *maintenance* dan *troubleshooting* apabila ada kendala dalam penggunaan mesin kompos

- c. *Research Assistant* : bertugas dalam melakukan riset data hasil produksi kompos untuk melakukan riset di laboratorium dan riset di lapangan (percobaan pada tanaman)
3. Anggaran produksi KOMPOS JUARA bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya dan Bantuan dari SNV SNV Netherlands Development Organisation.

Output yang diharapkan dari inovasi Kompos Juara ini adalah produk kompos yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Permentan), aman dari sisi kesehatan dan lingkungan, mudah dan cepat di produksi, ekonomis dan dibutuhkan oleh masyarakat.

*Outcome* Inovasi Kompos Juara:

1. Meningkatkan kinerja IPLT.
2. Berkurangnya akumulasi lumpur tinja hasil olahan IPLT secara signifikan karena dapat diproses dalam waktu 72 jam menjadi kompos.
3. Terjaganya kesehatan masyarakat pemanfaat kompos dari lumpur tinja dari patogen berbahaya.
4. Berkurangnya pelepasan gas rumah kaca dari lumpur tinja terakumulasi dan tidak termanfaatkan.
5. Tercipta potensi ekonomis, sosial, dan lingkungan dari pemanfaatan kembali lumpur hasil olahan.

### **3. Inovasi Pengelolaan Persampahan Kota Tasikmalaya**

Di Kota Tasikmalaya, sekitar 300 ton sampah dihasilkan setiap hari. Pemerintah Kota Tasikmalaya telah melakukan upaya pengelolaan sampah yaitu melalui penanganan dan pengurangan sampah. Penanganan sampah dilakukan dengan pengangkutan sampah dari seluruh wilayah Kota Tasikmalaya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciangir. Sedangkan Pengurangan sampah dilakukan melalui beberapa upaya, yakni: TPS3R mengelola composting dan bank sampah.

Hingga saat ini Kota Tasikmalaya memiliki Tempat Penampungan Akhir (TPA) sebanyak 1 unit, yaitu TPA Ciangir yang berlokasi di Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari. TPA ini dibangun pada tahun 2002 dan dioptimalisasikan mulai tahun 2012. TPA yang sudah berusia pakai 10 tahun ini, pengolahan sampahnya masih dilakukan dengan sistem *Open Dumping* dan dikelola UPTD Pengelolaan Sampah, di bawah koordinasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya. Menurut dokumen Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, target yang harus dicapai oleh Kota Tasikmalaya hingga Tahun 2025 adalah 70% penanganan dan 30% pengurangan.

Berdasarkan data dari kondisi di atas, Pj. Wali Kota Tasikmalaya, Dr. Cheka Virgowansyah, SSTP., M.E., telah melakukan beberapa langkah nyata untuk mengatasi permasalahan pengelolaan persampahan di Kota Tasikmalaya, yaitu:

1. Pemasangan CCTV sebagai alat monitor di TPS

Dalam upaya penanganan persampahan di tempat pembuangan sampah, baik yang resmi dan tidak resmi, telah dipasang CCTV. Adapun CCTV dipasang di lokasi berikut ini:

- 1) Depo sampah Dadaha
  - 2) Depo sampah Pasar Lama
  - 3) TPA Ciangir
  - 4) Depo sampah Argasari/ Jl. Bantar
  - 5) Depo sampah Perkantoran/ Jl. Ir. H. Juada
  - 6) Depo sampah Eks Terminal Cilembang
  - 7) TPS liar Cigaraja (dekat SDN Nagrawangi)
  - 8) Depo sampah Cikurubuk
  - 9) TPS liar Cigaraja
  - 10) TPS liar Jl. Wasita Kusumah
  - 11) TPS liar Jl. Letjen Mashudi (dekat Simpang Tugu Telkom)
  - 12) TPS liar Jl. Letjen Mashudi (dekat RM. Hera)
  - 13) TPS liar Jl. Gubernur Sewaka (dekat Gudang Kopi Kapal Api)
  - 14) TPS liar Jl. Tamajaya (GI Jawa – Bali)
  - 15) Depo sampah Tanuwijaya
  - 16) TPS liar (arah Kelurahan Nagarasari menuju Cisalak)
2. Membentuk Tim Satuan Tugas Pengelolaan Sampah Tasik Resik (Satgas Tasik Resik) melalui Keputusan Wali Kota Tasikmalaya Nomor: 660.2/Kep. 1109-DLH/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengelolaan Sampah Tasik Resik Kota Tasikmalaya.

Adapun tujuan dari pembentukan Satgas Tasik Resik dibentuk adalah:

- 1) Melaksanakan penanganan sampah pada TPS ilegal di Kota Tasikmalaya.
- 2) Melaksanakan terobosan pengurangan sampah organik dan anorganik di sumbernya untuk mengurangi sampah dan menghasilkan nilai ekonomi masyarakat di Kota Tasikmalaya.
- 3) Meningkatkan sinergitas antar lembaga di Kota Tasikmalaya dalam melaksanakan penanganan dan pengurangan sampah di Kota Tasikmalaya.

Satgas Tasik Resik melibatkan TNI, Kepolisian, Kejaksaan dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Dalam pelaksanaan tugasnya, struktur Satgas Tasik Resik sesuai Keputusan Wali Kota Tasikmalaya terdiri dari: Pembina, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Kelompok Kerja Gerakan Cepat (POKGERCEP), Kelompok Kerja Kecamatan (POKMAT) dan Kelompok Kerja Kelurahan (POKLUR).

Selanjutnya, setiap pokja memiliki tugas masing-masing, yaitu:

- 1) Kelompok Kerja Gerakan Cepat (POKGERCEP)
  - ✓ Melaksanakan operasi pembersihan sampah pada Tempat Penyimpanan Sampah (TPS) ilegal sebanyak 4 (empat) kali kegiatan dalam 1 (satu) bulan.

- ✓ Melaksanakan penegakan hukum dalam penanganan sampah di Kota Tasikmalaya.
- 2) Kelompok Kerja Kecamatan (POKMAT)
- ✓ Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada kegiatan yang dilakukan oleh POKLUR.
  - ✓ Melaksanakan pendampinga kegiatan inovasi penanganan sampah pada masing-masing Kelurahan, sesuai kewenangan wilayah kerja.
  - ✓ Melaksanakan pendampingan kegiatan edukasi pengurangan sampah pada masing-masing Kelurahan, sesuai kewenangan wilayah kerja.
- 3) Kelompok Kerja Kelurahan (POKLUR)
- ✓ Menjaga kebersiha pada masing-masing Kelurahan.
  - ✓ Memastikan tidak ada tumpukan sampah pada masing-masing Kelurahan.
  - ✓ Melaksanakan kegiatan inovasi pengurangan sampah organik dan an-organik pada masing-masing Kelurahan.
  - ✓ Melaksanakan edukasi penanganan sampah kepada masyarakat pada masing-masing Kelurahan.

Dalam rangka peluncuran Tim Satgas Tasik Resik tersebut, pada tanggal 29 Desember 2022, Pj. Wali Kota Tasikmalaya menyerahkan gawai untuk Call Centre Satgas Tasik Resik kepada Operator Satgas Tasik Resik yang berfungsi untuk kemudahan Laporan dan Informasi Satgas Tasik Resik dengan nomor 081188897777. Selain itu, untuk pertama kalinya dilakukan apel gabungan Satgas Tasik Resik yang dilanjutkan dengan penanganan sampah pada TPS ilegal di wilayah Kota Tasikmalaya.

### **C. INOVASI DAERAH UNTUK PEMULIHAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI**

Tabel 4.15.

Inovasi Daerah berkaitan dengan Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi

<b>No.</b>	<b>Judul Inovasi</b>	<b>Inventor</b>	<b>Tahun</b>	<b>Keterangan</b>
1	PAJALE+ : eRDKK dan Bercocok Tanam dalam Genggaman	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya	2022	
2	Kompos Juara: Recycle Faecal Waste Menggunakan Smart Machine Compost Sebagai Solusi Alternatif Penanganan	UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dinas Pekerjaan Umum dan Tata	2022	

	Limbah Terpadu di IPLT Singkup	Ruang Kota Tasikmalaya		
3	KUIS BERHADIAH (Kunjungan Wisata Berdasar Hitungan dari Hunian Hotel)	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	2022	
4	Inovasi Pengelolaan Persampahan Kota Tasikmalaya	Dinas Lingkungan Hidup	2022	

Sumber: Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, Data Diolah Tahun 2023

### 1. PAJALE + : eRDKK

PAJALE + : eRDKK merupakan aplikasi penyuluhan pertanian berbasis android yang dibuat oleh petugas penyuluh pertanian di Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan

Aplikasi PAJALE+ dikembangkan karena adanya keterbatasan jumlah tenaga Penyuluh Pertanian yang ada di Kota Tasikmalaya yang hanya berjumlah 64 orang, berbanding terbalik dengan luas wilayah Kota Tasikmalaya yang cukup luas seluas 18.385,07 Ha terdiri dari 69 Kelurahan dengan jumlah kelembagaan petani yang dibina terdiri dari 64 Gapoktan dan 665 Kelompok Tani dengan jumlah anggota mencapai 28.047 orang. Melalui aplikasi ini, disediakan data dan informasi tentang tata cara budidaya yang baik, dosis pemupukan sesuai rekomendasi dan data eRDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang dapat diakses secara up to date.

Tujuan dari inovasi ini adalah Agar informasi mengenai cara budidaya tanaman yang baik dan benar sesuai rekomendasi dan data eRDKK dapat tersebar secara luas dan mudah diakses dari mana dan kapan saja.

Sedangkan sasarannya adalah:

1. Tersedianya informasi mengenai cara budidaya tanaman padi, jagung, dan kedelai yang baik dan benar sesuai dengan rekomendasi yang dapat di akses oleh masyarakat tani;
2. Tersedianya informasi mengenai sistem eRDKK (elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang dapat diakses secara mudah dan cepat oleh masyarakat.

Proses penyusunan aplikasi PAJALE+ adalah sebagai berikut ini:

- a. Menyiapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan yang terdiri dari:
  1. Laptop
  2. Sambungan internet
  3. Software Android Studio
  4. Software Corel Draw
  5. Software Excel
  6. Google Play Store
  7. Google Play Consoler
- b. Membuat sketsa mentah dari aplikasi yang akan dibuat beserta layout-layout nya.

- c. Menyusun kode/koding sesuai layout yang sudah disusun di dalam program Android Studio sampai proses membangun aplikasi/build application.
- d. Menyiapkan grafik dan materi yang sesuai layout yang sudah dibuat dengan menggunakan program Corel Draw.
- e. Mengolah data mentah menjadi database yang akan ditampilkan ke dalam aplikasi.
- f. Mengupload database yang sudah disusun ke server yang telah disiapkan.
- g. Mengintegrasikan aplikasi yang sudah dibuat dengan database yang berada di dalam server.
- h. Mendaftarkan aplikasi ke dalam Play Store.
- i. Aplikasi terdaftar dan sudah listing/terdapat di Play Store sehingga sudah dapat diunduh dan digunakan.

Sampai dengan saat ini Sistem Informasi PAJALE+ sudah dapat digunakan oleh para pengguna smartphone berbasis android, meskipun dalam penyajian data dan pengelolaannya masih dibutuhkan penyempurnaan lebih lanjut. Output dari kegiatan inovasi ini adalah terwujudnya produk dalam bentuk aplikasi berbasis android dengan nama Aplikasi PAJALE + dengan sasaran pengguna tenaga penyuluh pertanian lapangan dan masyarakat tani pada umumnya.

Outcome dari kegiatan inovasi ini yaitu:

1. Pengguna dapat mengakses data eRDKK secara praktis, mudah setiap saat, dan setiap waktu.
2. Pengguna dapat mengetahui cara budidaya tanaman sesuai rekomendasi.
3. Keterbukaan informasi publik.

Perubahan yang diharapkan dari penggunaan aplikasi ini adalah dapat terselenggaranya penyelenggaraan penyuluhan pertanian dengan lebih efektif dan efisien serta tidak terbatas ruang dan waktu dalam pelaksanaannya. Selain itu, melalui penggunaan aplikasi ini juga diharapkan adanya peningkatan keterampilan dan kemampuan para petani dalam melaksanakan budidaya pertanian yang akan berdampak positif pada peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian.

Aplikasi PAJALE + sudah tersedia di Play Store sehingga aplikasi ini dapat diunduh dan dipasang oleh siapa saja dan kapan saja. Dalam perkembangannya aplikasi ini sudah diupdate sebanyak 1 kali sehingga menjadi seperti sekarang ini. Di dalam aplikasi ini pengguna dapat mengakses informasi yang terkait dengan data eRDKK Kota Tasikmalaya yang telah dipisahkan berdasarkan 10 kecamatan yang ada di Kota Tasikmalaya dan terdapat juga informasi mengenai cara budidaya tanaman padi, jagung, dan kedelai yang baik dan benar sesuai dengan rekomendasi.

Keunggulan dari aplikasi PAJALE+ jika dibandingkan dengan aplikasi yang serupa:

1. Aplikasi PAJALE+ dibuat dengan menggunakan basis android sehingga pengguna dapat menggunakan aplikasi tersebut dengan menggunakan *Smartphone* berbasis android
2. Aplikasi PAJALE+ mudah digunakan oleh siapa saja termasuk oleh masyarakat tani karena desain yang simpel serta mudah dioperasikan oleh siapa saja

3. Fitur yang disuguhkan lebih lengkap tidak hanya berupa *handbook* tetapi juga menyuguhkan data eRDKK, tools rekomendasi pemupukan padi dan artikel berita penting yang dibutuhkan oleh para petani.

Pada saat ini Aplikasi PAJALE + ini telah digunakan oleh rekan-rekan penyuluh pertanian di lingkup Kota Tasikmalaya untuk membantu kerja penyuluh pertanian dalam hal mengetahui berbagai hal yang terkait budidaya tanaman padi, jagung, dan kedelai. Secara spesifik dicontohkan yaitu apabila ada pertanyaan terkait dosis pemupukan tanaman padi pada lahan dengan luas yang spesifik, penyuluh pertanian cukup membuka aplikasi ini kemudian memasukkan data luas lahan yang ditanyakan maka akan diketahui berapa besar dosis pupuk pada lahan tersebut. Kemudian misalkan ada petani yang menanyakan apakah sudah terdaftar di sistem eRDKK dan luas lahan yang didaftarkan berapa maka penyuluh pertanian cukup mudah membuka aplikasi ini dan bisa langsung mencari berdasarkan klasifikasi kecamatan dimana petani yang bersangkutan tinggal. Dengan adanya aplikasi PAJALE+ ini penyuluh pertanian juga terbantu sehingga baik langsung maupun tidak langsung.

## **2. KUIS BERHADIAH (Kunjungan Wisata Berdasar Hitungan dari Hunian Hotel)**

KUIS BERHADIAH merupakan aplikasi berbasis web, menjadi inovasi solusi penghitungan jumlah kunjungan wisata yang cepat, akurat dan *realtime*.

Beberapa alasan mengapa angka Kunjungan Wisata (Wisatawan Nusantara dan Mancanegara) sangat penting adalah sebagai pelaksanaan dari:

1. Resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai agenda pembangunan dunia yang ditujukan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Kunjungan Wisata termasuk bagian dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu:
  - a. Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
  - b. Target 8.9: Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.
2. Komitmen Nasional: Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kepala Daerah untuk urusan Kepariwisata adalah data Kunjungan Wisata;

Permasalahan yang ditemukan dalam penyusunan dan penghitungan Kunjungan Wisata diantaranya adalah sulitnya pengumpulan data yang disebabkan keterbatasan SDM, waktu dan aksesibilitas dengan jangkauan yang cukup luas sehingga diperlukan KUIS BERHADIAH sebagai shortcut dan solusi untuk memangkas serta mengefektifkan jarak dan waktu diantara pemerintah dan pelaku usaha pariwisata.

Aplikasi KUIS BERHADIAH merupakan aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan website resmi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, dengan alamat [www.disporabudpar.tasikmalayakota.go.id](http://www.disporabudpar.tasikmalayakota.go.id).

KUIS BERHADIAH *interface* menuntun hotel untuk membuat akun untuk menginput laporan bulanan jumlah kunjungan/tamu yang menginap, baik dalam maupun luar negeri. Aplikasi inovasi ini sudah dipublikasikan dan dapat diakses oleh para pelaku usaha pariwisata.

Tujuan dan Sasaran dari KUIS BERHADIAH adalah:

- a. Pemanfaatan teknologi informasi;
- b. Optimalisasi potensi dan sumberdaya yang terbatas;
- c. Mempercepat penyusunan pelaporan;
- d. Effisiensi dan efektivitas sumber daya;
- e. Meningkatkan potensi pendapatan; dan
- f. Mengetahui secara realtime perkembangan pencapaian Indikator Kinerja.

Input KUIS BERHADIAH berupa anggaran untuk membangun sistem informasi, sosialisasi dan promosi. Output dari KUIS BERHADIAH adalah dokumen laporan jumlah kunjungan hotel/wisata dengan klasifikasi nama hotel, jumlah kunjungan, lama tinggal (*length of stay*), wisatawan nusantara dan mancanegara, kewarganegaraan wisatawan mancanegara bulanan dan tahunan. Outcome KUIS BERHADIAH yaitu data *real time* indikator capaian kinerja daerah dan perangkat daerah serta series data bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan usaha pariwisata.

Realisasi KUIS BERHADIAH telah berjalan selama 1 (satu) tahun masa percobaan. Dengan pelbagai kekurangan dan kelebihan, pengaplikasian KUIS BERHADIAH telah menunjukkan efektivitas dan efisiensi waktu dan biaya.

Penerapannya pada masyarakat dan dunia industri yaitu industri perhotelan diberikan sosialisasi dan bimbingan teknis singkat Pengaplikasian KUIS BERHADIAH. Materi diberikan dalam bentuk hard dan soft (ebook dan video tutorial).

#### **D. INOVASI DAERAH UNTUK INFRASTRUKTUR DAN PENATAAN RUANG**

Tabel 4.16.

Inovasi Daerah berkaitan dengan Infrastruktur dan Penataan Ruang

<b>No.</b>	<b>Judul Inovasi</b>	<b>Inventor</b>	<b>Tahun</b>	<b>Keterangan</b>
1	PROTASIK (Profil Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya)	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya	2021	
2	SIPEJAL (sistem informasi perlengkapan jalan)	Dinas Perhubungan	2021	

Sumber: Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, Data Diolah Tahun 2023

##### **1. PROTASIK (Profil Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya)**

Inovasi PROTASIK (Profil Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya) merupakan inovasi berbasis teknologi yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya dan mulai dikembangkan pada tahun 2019. Inovasi ini mendukung salah



satu prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yaitu inovasi pelayanan publik dan penataan daerah. Juga mendukung Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya yaitu Tujuan 5: Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi, dan sasaran 11 yaitu: Meningkatnya kualitas Pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang inovatif berbasis teknologi informasi.

Inovasi PROTASIK dilatabelakangi oleh kurang optimalnya penggunaan dan pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya. Permasalahan tersebut antara lain lokasi keberadaan tanah yang hanya bisa diketahui dengan cara survey lapangan, dokumentasi bukti kepemilikan berupa sertifikat masih dilakukan secara manual, sulitnya menentukan pemanfaatan tanah dengan nilai terbaik dan penggunaan terbaik (highest and best use) serta sulitnya melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan dan pemanfaatan tanah. PROTASIK (Profil Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya) merupakan sebuah inovasi terkait pengelolaan BMD berupa tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan menggunakan Teknologi Informasi. PROTASIK menyajikan informasi peta sebaran, data lokasi, titik koordinat, data kepemilikan, kondisi foto lokasi serta scan sertifikat dan perjanjian pemanfaatan. PROTASIK juga dapat menghitung potensi, target dan realisasi pendapatan dari hasil pemanfaatan tanah. Tujuan dari inovasi PROTASIK (Profil Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya) adalah untuk menyajikan informasi identitas, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan memanfaatkan Teknologi Informasi berbasis Web, informasi realisasi pendapatan hasil pemanfaatan tanah secara realtime, serta menjadi salah satu sumber informasi bagi Pengguna Barang, Pengelola Barang dan Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah terkait penggunaan dan pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Regulasi yang harus dikeluarkan untuk mendukung pelaksanaan inovasi ini adalah:

- 1) Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengatur tentang penggunaan Teknologi Informasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 2) Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Penggunaan Aplikasi PROTASIK (Profil Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya) di lingkup Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- 3) Keputusan Walikota Tasikmalaya tentang Tim Pengelola Aplikasi PROTASIK (Profil Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya).

Bentuk Inovasi PROTASIK termasuk pada Bidang Pelayanan Masyarakat yang berjenis digital. Teknologi yang digunakan untuk mendukung inovasi ini adalah:

- 1) Web Platform;
- 2) Cloud Computing System

Aplikasi PROTASIK dapat diakses dimana saja oleh berbagai platform dan tidak memerlukan instalasi desktop. Software berupa aplikasi PROTASIK (Profil Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya) berbasis Web yang terintegrasi dengan Simda BMD. Dan Hardware berupa PC.

Unit/Laptop dan Global Positioning System (GPS). PROTASIK telah memanfaatkan teknologi Google Maps Source sehingga PROTASIK dapat menentukan titik koordinat tanah secara akurat melalui citra satelit google maps. PROTASIK juga telah terintegrasi dengan Simda BMD yaitu aplikasi yang digunakan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam Penatausahaan Barang Milik Daerah sehingga data yang disajikan adalah data yang akurat dan akuntabel sesuai dengan aplikasi Simda BMD. Inovasi PROTASIK ini dapat memberikan solusi terhadap permasalahan sulitnya mendapatkan informasi lokasi, kondisi, penggunaan dan pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Untuk mendukung Inovasi PROTASIK telah dialokasikan anggaran dan Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan untuk mendukung inovasi ini baik Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Administrator; Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas sebagai Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna; dan Tim Pengembang Aplikasi (Programmer).

Proses Inovasi untuk melaksanakan inovasi ini adalah:

- 1) Standar Operasional Prosedur (SOP)
- 2) Progres Pelaksanaan Kegiatan Inovasi

Implementasi Inovasi PROTASIK (Profil Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya. Keluaran langsung dari inovasi PROTASIK (Profil Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya) adalah Aplikasi PROTASIK berbasis Web. PROTASIK dapat diakses melalui alamat <http://protasik-tasikmalayakota.simdacloud.id>.

Dampak jangka panjang yang diharapkan dari adanya inovasi PROTASIK adalah berupa terciptanya tertib administrasi pengelolaan BMD secara khusus pada siklus penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa Tanah. Sedangkan dampak jangka pendek adalah meningkatnya realisasi pendapatan dari hasil pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Manfaat dari penggunaan aplikasi PROTASIK (Profil Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya) adalah menyajikan informasi identitas, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi Pengguna Barang, Pengelola Barang dan Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah terkait penggunaan dan pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Harapan perubahan dari inovasi PROTASIK (Profil Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya) adalah transformasi pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya dari yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi digital memanfaatkan Teknologi Informasi secara maksimal.

Evaluasi kegiatan Inovasi:

- 1) Per bulan dilaksanakan evaluasi antara Administrator dan Pengurus Barang Pengguna sebagai User;
- 2) Per enam bulan dilaksanakan evaluasi antara Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran dan Administrator;
- 3) Per enam bulan dilaksanakan evaluasi antara Administrator dan Programmer.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Inovasi PROTASIK (Profil Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya) adalah:

- 1) Identifikasi lokasi bidang tanah pada proses survey & pengambilan titik koordinat;
- 2) Inventarisasi dokumen perjanjian pemanfaatan tanah antara Pengguna Barang dan Mitra Pemanfaatan;
- 3) Terdapat beberapa bidang tanah yang diperlukan koreksi pada Kartu Inventaris Barang (KIB) karena terdapat perbedaan antara pencatatan dengan kondisi di lapangan.

Objek inovasi ini adalah Barang Milik Daerah berupa Tanah yang ada di semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. PROTASIK dapat menyajikan informasi berupa peta sebaran tanah, data lokasi tanah, titik koordinat tanah, data kepemilikan, kondisi tanah, foto lokasi serta scan sertifikat dan scan perjanjian pemanfaatan secara up to date. Melalui implementasi Inovasi PROTASIK, Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah dapat melakukan pemantauan terhadap potensi, target dan realisasi pendapatan dari hasil pemanfaatan tanah secara digital, mudah dan cepat.

## **2. SIPEJAL (sistem informasi perlengkapan jalan)**

SIPEJAL (sistem informasi perlengkapan jalan) adalah sistem aplikasi database pengelolaan perlengkapan jalan (PJU, Rambu dan perlengkapan jalan lainnya).

Aplikasi SIPEJAL merupakan aplikasi yang user friendly atau mudah digunakan, aplikasi ini berbasis web based dengan leaflet (plug-in) dan OSM (Open Street Map), dimana keunggulannya adalah gratis selamanya seberapa banyakpun akses yang dilakukan (Hit), bisa dikombinasikan dengan Streetview googlemaps secara gratis dan bisa ditambahkan layer jalan apabila memiliki layer jalan, kecamatan, kelurahan, jembatan, dan lainnya. Fitur yang disediakan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan baik oleh pengelola perlengkapan jalan dan pengambil kebijakan. Fitur lainnya adalah dengan adanya fitur pengaduan masyarakat. Dimana masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui gadget/hp serta dapat menyampaikan masukan/kritik/saran mengenai pelayanan perlengkapan jalan kepada perangkat daerah.

Inovasi ini dilatabelakangi oleh salah satu isu strategis di Kota Tasikmalaya yaitu belum optimalnya manajemen rekayasa lalu lintas yang mana salah satunya adalah manajemen perlengkapan jalan yang masih perlu mendapatkan perhatian. Upaya kearah itu, dititik beratkan kepada bagaimana perlengkapan jalan terkelola dengan baik dan tetap berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu alat keselamatan lalu lintas di jalan.

Terkait dengan upaya tersebut, selain membenahan perlengkapan jalan secara fisik, Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya juga sedang berupaya melaksanakan membenahan secara administrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Teknologi informasi tersebut diharapkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan pengelolaan perlengkapan jalan dan mampu memberikan pelayanan

kepada masyarakat terkait pengaduan perlengkapan jalan menjadi lebih baik lagi.

Atas dasar itulah, Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya membangun suatu aplikasi yang kami namakan SIPEJAL (Sistem Informasi Perlengkapan Jalan) yaitu suatu sistem informasi database perlengkapan jalan yang mencakup informasi spesifikasi, foto, kondisi, alamat, peta lokasi dan sebagainya.

Tujuan inovasi ini adalah:

- 1) Mewujudkan tata kelola perlengkapan jalan yang tertib administrasi.
- 2) Menyediakan informasi perlengkapan jalan yang ada dalam wilayah administratif Kota Tasikmalaya.
- 3) Memudahkan petugas pengelola perlengkapan jalan dalam melaksanakan tugas monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi perlengkapan jalan.
- 4) Memudahkan masyarakat menyampaikan pengaduan perlengkapan jalan yang ada di wilayahnya.
- 5) Menghimpun partisipasi masyarakat melalui pemberian masukan/saran/kritik tentang pelayanan perlengkapan jalan.

Selanjutnya, manfaat aplikasi SIPEJAL bagi Perangkat Daerah:

- 1) Memudahkan dalam penyediaan data/informasi perlengkapan jalan yang ada di Wilayah Kota Tasikmalaya.
- 2) Memudahkan verifikasi / pengujian tagihan listrik lampu PJU, Traffic Light.
- 3) Membantu kemudahan dalam penyusunan perencanaan penganggaran kebutuhan perlengkapan jalan baik pengadaan/pemeliharaan.
- 4) Memudahkan verifikasi dalam penyusunan laporan aset pada kelompok aset jaringan jalan-irigasi.
- 5) Memudahkan petugas pemeliharaan perlengkapan jalan, khususnya lampu PJU menemukan lokasi lampu PJU yang kondisinya harus memerlukan pemeliharaan dan/atau perbaikan. Baik atas inisiatif petugas maupun atas informasi dari masyarakat.
- 6) Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan perlengkapan jalan.
- 7) Mewujudkan tertib administrasi pengaduan masyarakat.

Dan manfaat bagi masyarakat adalah masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara langsung melalui aplikasi dengan menggunakan gadget/hp dan secara tepat menentukan titik lokasi perlengkapan jalan yang diadukannya. Serta dapat memberikan masukan/saran/kritik kepada perangkat daerah dalam pelaksanaan pemberian pelayanan perlengkapan jalan.

Regulasi tentang pelaksanaan inovasi SIPEJAL mengacu pada Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tasikmalaya.

Sipejal adalah sebuah aplikasi sistem informasi perlengkapan jalan berbasis web based dengan leaflet dan OSM yang dapat bermanfaat bagi:

- 1) Petugas pengelola perlengkapan jalan sebagai alat bantu kerja yang dapat memudahkan pelaksanaan mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- 2) Masyarakat dengan melalui fitur pengaduan masyarakat dimana masyarakat dapat menyampaikan pengaduan secara langsung melalui aplikasi dengan menggunakan gadget ataupun hp. Serta dapat memberikan masukan/saran/kritik kepada perangkat daerah dalam pelaksanaan pemberian pelayanan perlengkapan jalan.

Adapun keunggulan dari aplikasi ini adalah penggunaannya yang mudah (user friendly), informasi data yang disediakan lebih lengkap, sebagai pengamanan data aset perangkat daerah dapat memberikan kemudahan pengaduan masyarakat.

Fitur yang disediakan pada aplikasi Sipejal tersebut antara lain dapat memberikan informasi meliputi data lokasi (titik ordinat), peta lokasi, spesifikasi perlengkapan jalan, tahun pengadaan, dan waktu pelaksanaan pemeliharaan. Hal ini dapat memberikan kemudahan bagi para petugas pengelola serta mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan perlengkapan jalan dan pengelolaan aset dinas di bidang perlengkapan jalan.

Untuk mendukung Inovasi SIPEJAL telah dialokasikan anggaran di Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya. Adapun stakeholder yang terlibat dalam BERANDA SAKOTA Pegawai pada Unit Kerja Fasilitas Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.

Adapun proses penggunaan inovasi SIPEJAL adalah:

1. melengkapi master data meliputi: master lampu, master Daya PJU, Jenis, Jalan, Rangkaian PJU, master Rambu, jenis pemeliharaan dan lain-lain;
2. Pengadaan dan survey
3. Verifikasi data;
4. Pemeliharaan perangkat.

Output inovasi tersebut adalah tersedianya database perlengkapan jalan meliputi:

- 1) Data master (induk) perlengkapan jalan.
- 2) Data master monitoring kondisi dan lokasi perlengkapan jalan terpasang.
- 3) Posisi / titik ordinat dan peta lokasi perlengkapan jalan terpasang.
- 4) Pengamanan aset.

Sedangkan capaian jangka panjang (out come) dari implementasi inovasi ini adalah mewujudkan manajemen perlengkapan jalan dan pelayanan masyarakat yang handal. Dengan memberikan dampak efektifitas, efisiensi serta akuntabilitas pengelolaan perlengkapan jalan dan layanan masyarakat, antara lain:

- 1) Terwujudnya tata laksana pengelolaan perlengkapan jalan yang tertib administratif dan akuntabel.
- 2) Terwujudnya efektifitas pelayanan masyarakat, melalui penyediaan manajemen pengaduan masyarakat dan menghimpun saran/kritik/masukan dari masyarakat yang dapat dijadikan

informasi bagi pengelola dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat dan dapat diandalkan.

Secara umum aplikasi system perlengkapan jalan (Sipejal) telah dapat dipergunakan dan dimanfaatkan. Namun untuk optimalisasi penggunaan aplikasi tersebut perlu dilakukan survey inventarisasi perlengkapan jalan se-Wilayah Kota Tasikmalaya.

Masalah utama dalam pelaksanaannya adalah penyediaan data master (induk) perlengkapan jalan, hal ini perlu dilakukan survey inventarisasi perlengkapan jalan se-Wilayah Kota Tasikmalaya. Sehingga diperlukan dukungan anggaran dalam pelaksanaannya.

## E. INOVASI DAERAH UNTUK REFORMASI BIROKRASI

Tabel 4.17.

Inovasi Daerah berkaitan dengan Reformasi Birokrasi

No.	Judul Inovasi	Inventor	Tahun	Keterangan
1	BISMA (BMD Barcode Information System Mobile Apps)	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya	2021	
2	SIDDAKTA (Penyisiran Dokumen Dan Data Kependudukan Kota Tasikmalaya)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya	2022	
3	ASIAPP (Aplikasi Sistem Informasi Aspirasi Publik dan Pengaduan Puskesmas)	UPTD Puskesmas Urug Kota Tasikmalaya	2022	
4	SIABAH ASIK (Sistem Aplikasi Hibah Kesra Kota Tasikmalaya)	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Tasikmalaya	2022	
5	(PASUTRI) Pasca Akad Nikah Pengantin Terima Kartu Keluarga dan KTP-Elektronik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya	2022	

Sumber: Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, Data Diolah Tahun 2023

### 1. BISMA (BMD Barcode Information System Mobile Apps)

Inovasi BISMA (BMD Barcode Information System Mobile Apps) merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya sejak tahun 2021.

Teknologi Informasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah namun hanya sebatas pada penatausahaannya belum melakukan pencocokan fisik barang dan pencatatan pada Kartu Inventaris Barang (KIB). Inovasi BISMA ini dapat memberikan solusi terhadap permasalahan sulitnya

melakukan identifikasi pencocokan antara fisik BMD dengan pencatatannya pada Kartu Inventaris Barang (KIB). Melalui implementasi Inovasi BISMA, Pengurus Barang Pengguna dapat melakukan pencocokan antara pencatatan BMD pada Kartu Inventaris Barang dengan fisik barang secara digital, mudah dan cepat.

Objek inovasi ini adalah Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya (Buku Perpustakaan dan Barang Bercorak Kebudayaan) yang ada di semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. BISMA dapat menyajikan informasi berupa foto, kode barang, nama barang, tahun perolehan, merk/type, nilai perolehan, usia, nilai akumulasi penyusutan dan nilai buku barang secara instan. BISMA dapat diintegrasikan dengan aplikasi Simda BMD yaitu aplikasi yang banyak digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam Penatausahaan Barang Milik Daerah sehingga data yang disajikan adalah data yang akurat dan akuntabel sesuai dengan aplikasi Simda BMD.

Tujuan dari inovasi BISMA (BMD Barcode Information System Mobile Apps) adalah mengurangi kesalahan entri data, menghindari ketergantungan pengelolaan BMD kepada Pengurus Barang Pengguna secara personal dan meningkatkan akuntabilitas data BMD (data yang disajikan berdasarkan kondisi yang sebenarnya). Dengan BISMA (BMD Barcode Information System Mobile Apps) kontrol inventaris menjadi lebih baik karena lebih tepat dan cepat dalam mengidentifikasi BMD.

Regulasi yang harus dikeluarkan untuk mendukung pelaksanaan inovasi ini adalah:

- 1) Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengatur tentang penggunaan Teknologi Informasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 2) Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Penggunaan Aplikasi BISMA (BMD Barcode Information System Mobile Apps) di lingkup Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- 3) Keputusan Walikota Tasikmalaya tentang Tim Pengelola Aplikasi BISMA (BMD Barcode Information System Mobile Apps).

Bentuk Inovasi BISMA untuk mendukung inovasi ini adalah:

- 1) QR Code Technology;
- 2) Web & Android Platform.

Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung inovasi ini adalah:

- 1) Software berupa aplikasi BISMA (BMD Barcode Information System Mobile Apps) berbasis Web dan Android yang terintegrasi dengan Simda BMD;
- 2) Hardware berupa Server, Printer Barcode dan Ponsel Android;
- 3) Barang Pakai Habis berupa Label Barcode.

Untuk mendukung Inovasi BISMA telah dialokasikan anggaran dan Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan untuk mendukung inovasi ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Administrator; Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas sebagai Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna; dan Tim Pengembang Aplikasi (Programmer). Proses Inovasi antara lain:

- 1) Pembuatan Mock Up dan Wireframe Aplikasi

- 2) Reviu Mock Up dan Wireframe Aplikasi
- 3) Pengembangan Aplikasi
- 4) Uji coba Aplikasi
- 5) Soft Launching dan Sosialisasi Aplikasi
- 6) Labelling Barcode
- 7) Evaluasi Kegiatan.

Keluaran langsung dari inovasi BISMA (BMD Barcode Information System Mobile Apps) adalah:

- 1) Aplikasi BISMA berbasis Web;
- 2) Aplikasi BISMA berbasis Android;
- 3) Label Barcode; Merupakan label BMD dengan memberikan informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 yang telah disesuaikan dengan penambahan QR Code yang merupakan output dari aplikasi BISMA (BMD Barcode Information System Mobile Apps).

Dampak dari inovasi BISMA (BMD Barcode Information System Mobile Apps) dalam jangka panjang adalah terciptanya tertib administrasi pengelolaan BMD secara khusus pada siklus penatausahaan dan pengamanan BMD. Selain itu adalah untuk mendukung pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Manfaat dari penggunaan aplikasi BISMA (BMD Barcode Information System Mobile Apps) adalah meningkatnya kinerja Pengurus Barang Pengguna dalam mengelola BMD. Dengan memanfaatkan keunggulan inovasi BISMA (BMD Barcode Information System Mobile Apps), Pengurus Barang Pengguna dapat bekerja dengan lebih cepat, mudah dan akuntabel.

Harapan perubahan dari inovasi BISMA (BMD Barcode Information System Mobile Apps) adalah transformasi pengelolaan BMD dari yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi digital memanfaatkan Teknologi Informasi secara maksimal.

Evaluasi kegiatan Inovasi

- 1) Per bulan dilaksanakan evaluasi antara Administrator dan Pengurus Barang Pengguna sebagai User;
- 2) Per enam bulan dilaksanakan evaluasi antara Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran dan Administrator;
- 3) Per enam bulan dilaksanakan evaluasi antara Administrator dan Programmer.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Inovasi BISMA (BMD Barcode Information System Mobile Apps) adalah:

- 1) Sulitnya penyesuaian field data antara BISMA dan SIMDA BMD;
- 2) Sulitnya sinkronisasi Database antara BISMA dan SIMDA BMD;
- 3) Proses rechecking BMD dalam rangka labeling barcode BISMA.

## **2. SIDDAKTA**

Melalui peran dalam tugas pokok dan fungsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Koa Tasikmalaya, mengajukan proposal inovasi SIDDAKTA (Penyisiran Dokumen dan Data Kependudukan Koa



Tasikmalaya) Tahun 2022 sebagai metode kerja penertiban penyelenggaraan administrasi kependudukan yang bertujuan mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat memutakhirkan dokumen dan data kependudukan, sehingga data kependudukan memiliki validitas yang baik, dapat dimanfaatkan menunjang aksesibilitas Pelayanan publik dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Tasikmalaya.

Menyadari bahwa data kependudukan pengolahan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), *database* Pelayanan Disdukcapil Kota Tasikmalaya masih harus “konsolidasi data” terhadap Data Konsolidasi Bersih *Database* Dirjen Dukcapil Departemen Dalam Negeri sebagaimana rekomendasi hasil evaluasi kinerja tanggal 8 Agustus 2021, di antaranya adalah: kewajiban perekaman/pencetakan KTP -el usia 17 tahun sejumlah 162.748 jiwa atau 26,57% kewajiban di semester I tahun 2021) serta produk layanan Dukcapil lainnya seperti Akta Kelahiran 0-18 tahun, Akta Kematian serta *updating* Kartu Keluarga, sedangkan evaluasi internal *update* data per tanggal 28 Januari 2022, didapatkan pula kewajiban pengolahan data, di antaranya:

1. Perekaman Penduduk di atas Usia 17 tahun sebanyak: 18.854 jiwa
2. Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk usia: 0 th s.d 18 th sejumlah: 19.702 dokumen.

Kondisi ini senantiasa harus segera dilakukan penertiban secara progresif, tidak hanya mengandalkan kegiatan standar biasanya melalui pelayanan yang bersifat statis (*official services*), tetapi melalui pendekatan gradual yang simultan untuk percepatan tercapainya data kependudukan yang terkonsolidasikan secara menyeluruh, terutama dalam rangka penerapan kebijakan SIAK terpusat.

Inovasi SIDDAKTA merupakan pelaksanaan Pilar Ke -2 Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA), pelaksanaannya harus mendapatkan komitmen; Pemerintah Kota, Kecamatan, Kelurahan serta warga masyarakat maupun institusi pelayanan publik lainnya, dengan harapan adanya kontribusi positif kesadaran masyarakat, pelayanan langsung yang bersifat terintegrasi dan simultan.

Agenda SIDDAKTA atau aksi Penyisiran Data dan Dokumen Kependudukan Kota Tasikmalaya, memiliki sasaran sebagaimana tujuan pengawasan penyelenggaraan *adminduk* yaitu:

1. Meningkatkan prosentase kepemilikan dokumen *adminduk* yang seimbang dengan jumlah penduduk menetap dan aktif pada suatu wilayah kelurahan.
2. Meningkatkan validitas data kependudukan perseorangan dan data agregat berdasar kewilayahan yang sesuai dengan data konsolidasi bersih dalam *database* kependudukan Disdukcapil Kota Tasikmalaya.



Keterangan:

- Aktivitas Siddakta, berawal dari hasil Pengolahan Data kependudukan Disdukcapil Kota Tasikmalaya; Data Pelayanan dan Data Konsolidasi Bersih (DKB);
- Area Aktivitas Siddakta, merupakan wilayah penugasan yang dilakukan oleh Petugas Adminduk dari Bidang Pendaftaran Penduduk dan Bidang Pencatatan Sipil, dalam bentuk Pelayanan; konsolidasi data, input data, perekaman KTP-el, penerbitan KK, penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian.

Kegiatan SIDDAKTA, merupakan kegiatan yang simultan dalam pelaksanaan Pilar ke-2 Gerakan Sadar Adminduk dengan Penerapan Pada Masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan melalui kegiatan SIDDAKTA dilakukan di satu kelurahan setiap minggunya. Prioritas pelayanan yang difasilitasi antara lain perekaman KTP-el bagi pemula, pencetakan KTP-el pemula, *Updating* Kartu keluarga, penerbitan Kartu Keluarga, Penerbitan Akta Kelahiran dan Penerbitan Akta Kematian.

Setiap pra pelaksanaan kegiatan SIDDAKTA, tim/petugas Disdukcapil akan mengkoordinasikan dengan Camat, Lurah, Ketua RT/RW terkait teknis pelaksanaan yang nantinya akan diinformasikan lebih lanjut kepada masyarakat di wilayahnya. Dari sisi masyarakat itu sendiri hanya perlu meluangkan waktu dan menyiapkan berkas persyaratan untuk pengajuan penerbitan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan prioritas layanan tersebut diatas.

Masyarakat bisa langsung mendatangi petugas Disdukcapil yang sudah siap di Kelurahan untuk mengajukan berkas pembuatan dokumen adminduk. Adapun untuk keperluan lain yang tidak difasilitasi oleh Dukcapil seperti fotocopy berkas, materai dan lain-lain dilaksanakan oleh masing-masing individu masyarakat.

### 3. Aplikasi Sistem Informasi Aspirasi Publik dan Pengaduan Puskesmas (ASIAPP)

ASIAPP merupakan inovasi sistem informasi pelayanan publik yang dikeluarkan oleh Puskesmas Urug Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya sejak tahun 2022.

Dalam dunia kesehatan khususnya puskesmas pemanfaatan teknologi internet ini berkembang dengan pesat. Terbukti dari semakin maraknya perancangan sistem informasi di dunia kesehatan. Masyarakat kini sudah menggunakan teknologi untuk membantu aktivitas sehari-hari. Tidak terkecuali jika menghadapi permasalahan terhadap layanan publik yang kurang memuaskan maupun akses terhadap sarana dan prasarana publik yang kurang. Masyarakat cenderung menuangkannya di media sosial. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat mempermudah pengaduan serta dari masyarakat dimana hal tersebut dapat dilakukan dengan mudah, sehingga diharapkan masalah-masalah yang sering terjadi tetapi sulit terdeteksi dapat segera ditindak lanjuti hingga terselesaikan secara cepat dan tepat.

Lingkup Inovasi ASIAPP adalah Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Urug dapat mengetahui sistem informasi aspirasi publik dan pengaduan serta media informasi yang dapat digunakan. Tercantum dalam SK Nomor 445.4/SK.018/urg/2022 tentang Tim Pengaduan Masyarakat.

Adapun tujuan inovasi ASIAPP yaitu membuat media informasi UPTD Puskesmas Urug Seperti website, kontak WA pendaftaran online dan pengaduan, facebook, instagram dan youtube dengan sasaran masyarakat umum pengguna layanan kesehatan Puskesmas Urug Kecamatan Kawalu.

Pelaksanaan Inovasi ASIAPP diawali dengan Input Inovasi ASIAPP melalui pemanfaatan Teknologi informasi yang digunakan untuk aspirasi publik seperti media sosial : Website, Whats App (WA), facebook, instagram dan youtube, sarana ruangan khusus untuk pengaduan masyarakat.

Proses Pembuatan akun media sosial UPTD Puskesmas Urug meliputi:

Website : [puskesmasurug.tasikmalayakota.go.id](http://puskesmasurug.tasikmalayakota.go.id)

Whats App (WA) : 081250004940 (Pendaftaran Online)  
081250004941 (Pengaduan)

Facebook : Puskesmas Urug

Instagram : @pkmurug

Youtube : UPTD Puskesmas Urug

*Output* Inovasi ASIAPP yaitu masyarakat mulai menggunakan pendaftaran online untuk melakukan pengobatan ke Puskesmas Urug. Sedangkan *Outcome* Inovasi ASIAPP yang didapat dari pendaftaran online yaitu upaya mempermudah prosedur pelayanan, serta masyarakat mengetahui jenis-jenis pelayanan kesehatan yang ada di UPTD Puskesmas Urug, upaya mengurangi penumpukan pasien di ruang tunggu di masa pandemic saat ini, dan pemanfaatan teknologi informasi seperti media sosial untuk memberikan informasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pegawai UPTD Puskesmas Urug.

Manfaat Inovasi ASIAPP adalah masyarakat yang akan berobat atau memerlukan pelayanan kesehatan ke UPTD Puskesmas Urug dapat dengan mudah mengetahui jenis pelayanan yang ada di UPTD Puskesmas Urug melalui media sosial seperti Website, WA, Facebook, instagram dan youtube. UPTD Puskesmas Urug merupakan satu-

satunya puskesmas yang ada di Pemerintahan Kota Tasikmalaya yang memiliki website. Website sendiri memiliki banyak keuntungan dan keterbukaan dalam segi pelayanan. Masyarakat yang akan mendaftar dapat langsung melakukan pendaftaran dari rumah dengan cara pendaftaran online melalui kontak WA pendaftaran online h-1 pasien akan berobat. Apabila masyarakat memiliki aspirasi atau keluhan atau pengaduan kepada Puskesmas Urug mengenai layanan kesehatan dapat menghubungi kontak WA pengaduan atau mendatangi ruang pengaduan masyarakat. Manfaat bagi masyarakat mempermudah pelayanan kepada masyarakat, upaya mengurangi penumpukan pasien di ruang tunggu di masa pandemic saat ini, dan pemanfaatan teknologi informasi.

#### **4. SIABAH ASIK (Sistem Aplikasi Hibah Kesra Kota Tasikmalaya)**

SIABAH ASIK merupakan sebuah inovasi yang diluncurkan oleh Bagian Kesra Setda Kota Tasikmalaya dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang mengusulkan permohonan dana hibah kepada pemerintah kota tasikmalaya melalui Bagian Kesra Setda Kota Tasikmalaya.

Pemerintah Indonesia telah mengencarkan prinsip Dilan “Digital Melayani” dalam memberikan pelayanan publik, tak terkecuali dengan Program Tasikmalaya BERBUDI (Berbudaya Digital) Sehingga mendorong Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk melaksanakan sebuah konsep tata pemerintahan yang baik yang biasanya dapat disebut dengan good governance. Dalam upaya peningkatan pelayanan publik khususnya pelayanan hibah di Bagian Kesra perlu adanya inovasi dalam mengatasi segala keterbatasan SDM dan Sarana Prasarana.

Di era yang serba digital seperti sekarang ini, menjadi sebuah tuntutan bagi pelayanan publik manajemen administrasi pemerintahan khususnya administrasi Pelayanan Hibah pada Bagian Kesra, disamping mengelola dan menata berkas Hibah yang asli oleh pengelola hibah, perlu juga mengelola dan menata berkas hibah berbasis digital yang dikerjakan oleh bagian khusus yang menangani Teknologi Informasi (TI) hibah yang terintegrasi dengan dokumen atau berkas hibah asli di Bagian Kesra.

Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya menjelaskan bahwa hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah lain, BUMN/BUMD, badan, lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus.

Tujuan dari diberikannya dana Hibah adalah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kota Tasikmalaya sesuai urgensi dan kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Dalam hal penganggaran dana hibah, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah melakukan penata usahaan usulan hibah melalui aplikasi

berbasis teknologi informasi. Sebagaimana telah diatur oleh Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya pada Bagian Ketiga tentang penunjukan perangkat daerah dalam verifikasi penganggaran pasal 28 dijelaskan, bahwa Bagian Kesejahteraan Rakyat diberikan tugas untuk melakukan verifikasi proposal pada Bidang Fasilitas Keagamaan, Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kesehatan dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Kebudayaan dilaksanakan.

Secara teknis manajemen administrasi Pengelolaan Hibah di lingkungan Bagian Kesra sudah diatur dalam Panduan Aplikasi "SIABAH ASIK". Didalam penataan dan pengelolaan manajemen administrasi berkas hibah yang hanya ditata berkas-berkas asli, menimbulkan kesulitan saat akan mencari dan mengecek kembali berkas tersebut, mengingat banyaknya berkas hibah yang masuk setiap hari ke Bagian Kesra maka berkas hibah pun semakin menumpuk, sehingga disamping data tersimpan dalam dokumen asli maka data hibah harus diinput kedalam sistem guna memudahkan bagi internal pengelola hibah dan pihak yang berkepentingan dalam proses hibah tersebut saat membutuhkan, maka dari itu Bagian Kesra mulai mengembangkan sistem elektronik untuk mengelola arsip hibah melalui Aplikasi SIABAH ASIK.

Ruang Lingkup Inovasi SIABAH ASIK:

1. Aplikasi Siabah Asik merupakan aplikasi yang dirancang untuk mengelola hibah di lingkungan Bagian Kesra Setda Kota Tasikmalaya;
2. Aplikasi Siabah Asik mencakup pengelolaan bagaimana pengarsipan dan pemrosesan proposal pengajuan, proposal pencairan progres proposal sampai pelaporan penerima hibah;
3. Dalam Aplikasi SIABAH ASIK penerima hibah dapat memantau seluruh progres atas usulan proposal pencairan yang diajukan;
4. Dengan adanya aplikasi SIABAH ASIK dapat lebih meningkatkan pelayanan hibah dapat lebih cepat dengan berbasis digital android dengan sistem pelaksanaan pemrosesan dimana saja;
5. Melakukan pengembangan inovasi aplikasi SIABAH ASIK.

Maksud dilaksanakannya Inovasi Program Pelayanan Publik Berbasis Digital Government "SIABAH ASIK" (Sistem Aplikasi Hibah Kesra Kota Tasikmalaya) adalah dalam rangka mendorong peningkatan pelayanan service excellence hibah pada Bagian Kesra Setda yang berbasis digital menuju Sekretariat Daerah Wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).

Adapun tujuan dilaksanakannya Inovasi Program Pelayanan Publik Berbasis Digital Government "SIABAH ASIK" (Sistem Aplikasi Hibah Kesra Kota Tasikmalaya) adalah:

1. Meningkatkan pelayanan hibah pada Bagian Kesra Setda Kota Tasikmalaya;
2. Menghindari adanya mis data hibah yang akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
3. Memberikan pelayanan hibah yang cepat, efektif dan efisien Bagian Kesra Setda Kota Tasikmalaya.
4. Sebagai implementasi program "Tasik BERBUDI" (Berbudaya Digital) serta sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2014.

Pengembangan aplikasi SIABAH ASIK mempunyai input sebagai berikut:

1. Sistem aplikasi berbasis website/ android
2. Karyawan/ Operator Hibah
3. Server
4. Jaringan Internet
5. SOP

Pengembangan SIABAH ASIK dimaksudkan untuk memberikan berbagai kemudahan kepada pegawai di Bagian Kesra dalam melaksanakan tata kelola dan mendapatkan informasi tentang dana hibah serta memberikan kemudahan kepada pengusul dana hibah untuk mentracking proposal yang diusulkan, dengan rincian proses sebagai berikut:

- 1) Tersedianya Toolbar Surat Masuk yang memberikan informasi tentang:
  - Proposal awal / proposal permohonan pencairan hibah yang masuk ke Bagian kesra.
  - Status proposal. apakah sedang diproses atau masih di operator.
  - Status proposal awal, apakah bisa direkomendasikan untuk menjadi calon penerima hibah pada tahun berikutnya atau diblok/ditolak karena ada administrasi yang belum terselesaikan pada usulan tahun sebelumnya.;
- 2) Toolbar Surat Keluar yang memberikan informasi tentang:
  - Nota dinas/rekomendasi usulan pencairan hibah lengkap dengan proposal awal, proposal pencairan dan dokumen kelengkapan pencairan dana hibah.
  - Rekomendasi usulan hibah untuk tahun berikutnya.
  - Surat Pengantar untuk proses pencairan atas dokumen usulan hibah yang sudah disetujui oleh kepala OPD
- 3) Toolsbar Kendali Anggaran Hibah yang memberikan informasi tentang pagu anggaran hibah, jumlah penerima hibah, hibah yang sudah dibayarkan, hibah yang belum dibayarkan.
- 4) Riwayat hibah yang bersisi tentang berisi tentang informasi riwayat penerimaan hibah yang telah diterima oleh penerima hibah selama dua tahun berturut turut.
- 5) Mewujudkan toolbar penyampaian laporan penggunaan hibah secara digital.
- 6) Mewujudkan toolbar geotagging atas titik lokasi pengusul dan penerima hibah, agar lebih akurat dan menghindari adanya lokasi fiktif.

Adapun output Pengembangan aplikasi SIABAH ASIK adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
- 2) Meningkatkan efisiensi waktu, biaya, dan tenaga, berkurangnya penggunaan kertas, dan
- 3) Meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih cepat, serta meningkatkan produktivitas kinerja pegawai di lingkungan Bagian Kesra Setda Kota Tasikmalaya berbasis layanan.
- 4) Terwujudnya sistem *Work From Anywhere*.

Inovasi Pengembangan aplikasi SIABAH ASIK mempunyai *outcome* yang sangat mendukung terhadap program Sekretariat Daerah Wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM)

menuju Electronic Government (E-Government) Berbasis Digital Government adalah sebagai berikut:

- 1) Efektif, bahwa proses penata usahaan dapat dilakukan dengan tepat sesuai peruntukannya.
- 2) Efisien, bahwa pemberian paraf persetujuan dapat dilakukan secara cepat dan mudah.
- 3) Transparan, bahwa informasi dana hibah dan proses penata usahaan dapat dipantau secara transparan oleh pihak –pihak yang berkepentingan.
- 4) *Paperless*, bahwa aplikasi ini mengurangi ketergantungan kepada kertas.

Aplikasi SIABAH ASIK mempunyai keunggulan dibandingkan dengan aplikasi yang lainnya diantaranya:

- 1) Efektif dan Efisien tentunya terkait efektif waktu, efisiensi biaya, dan tenaga;
- 2) *Paperless* artinya dapat menghemat dan meminimalisir penggunaan kertas yang berlebihan;
- 3) Transparan dapat diartikan semua proses pelayan dapat di lihat baik di unsur pemangku kebijakan Pemerintah Kota Tasikmalaya maupun masyarakat penerima hibah.

Penerapan Aplikasi SIABAH ASIK diantaranya sebagai berikut:

- 1) Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat mengetahui progress usulan yang disampaikan kepada pemerintah kota tasikmalaya melalui bagian kesra setda kota tasikmalaya
- 2) Memberikan kemudahan kepada penerima hibah untuk dapat menyampaikan laporan penggunaan hibah.

Untuk Pengembangan Aplikasi SIABAH ASIK Dalam rangka mendukung kelancaran inovasi berbasis digital menuju Sekretariat Daerah Wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM), diperlukan anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diperuntukan untuk membangun aplikasi, pembelian *hardwere* dan jaringan internet.

##### **5. Pasca Akad Nikah Pengantin Terima Kartu Keluarga dan KTP-Elektronik (PASUTRI)**

Inovasi PASUTRI ini dicanangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya pada bulan Desember 2022 sebagai tindaklanjut Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya tentang Pelayanan Penerbitan Dokumen Buku Nikah, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik pada waktu akad nikah.

Kepemilikan dan pemutakhiran data & dokumen kependudukan setelah perkawinan dalam hal ini Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik masih terdapat penundaan atau tidak langsung diurus oleh masyarakat yang bersangkutan dalam waktu yang cukup lama setelah proses akad nikah. Masyarakat yang sudah melakukan perkawinan, dalam hal mengurus data dan dokumen kependudukannya harus mendatangi kantor Disdukcapil atau kantor kecamatan. Kerjasama Sinergitas dalam hal verifikasi dan validasi data kependudukan.

Maksud dari inovasi PASUTRI yaitu meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemberian pelayanan perubahan data pada dokumen kependudukan masyarakat Kota Tasikmalaya setelah melaksanakan

perkawinan di semua Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan se-Kota Tasikmalaya.

Tujuan dari Inovasi PASUTRI adalah memberikan pelayanan prima dengan mempermudah dan mempercepat proses perubahan data pada dokumen kependudukan masyarakat Kota Tasikmalaya setelah melaksanakan perkawinan di semua Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan se-Kota Tasikmalaya.

Ruang Lingkup Inovasi PASUTRI adalah:

- a. Sosialisasi dan penyuluhan pelayanan terpadu penerbitan dokumen kependudukan bagi masyarakat setelah melaksanakan perkawinan di semua Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Tasikmalaya;
- b. Mempersiapkan data masyarakat yang sudah melakukan perkawinan, persyaratan perubahan data dan memiliki Buku Nikah yang berkekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan verifikasi, mencetak dan menyerahkan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK) bagi masyarakat setelah melaksanakan perkawinan di semua Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan se-Kota Tasikmalaya.

Inovasi ini memiliki keuntungan bagi 3 pihak yang terkait, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

a. Masyarakat

- ✓ Kepemilikan. Memudahkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan baru bagi masyarakat yang telah melaksanakan perkawinan.
- ✓ Pemutakhiran. Data dan Dokumen Kependudukan yang sudah update statusnya setelah perkawinan.
- ✓ Dalam mendapatkan KK & KTP-el dengan status baru, cukup pemberkasan di KUA.

b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

- ✓ Update Database. Proses langsung data kependudukan masyarakat yang akan melakukan perkawinan.
- ✓ Minimalisir Antrian. Antrian masyarakat dalam mengurus adminduk dapat diminimalisir karena pemberkasan cukup di KUA.
- ✓ Kualitas Pelayanan. Dengan layanan Pasutri dapat mendongkrak kualitas layanan Dukcapil.

c. Kementerian Agama

- ✓ Verifikasi Data. Terbantu dalam hal verifikasi dan validasi data calon pengantin.
- ✓ Membangun SIN (Single Identity Number) dari sisi perkawinan.
- ✓ Mendongkrak kualitas pelayanan Kementerian Agama melalui layanan Pasutri.

Alur Proses Inovasi PASUTRI secara teknis dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu:



- a. Online/ daring dengan mengakses website <https://simkah4.Kementerian Agama.go.id/>
- b. Offline/ luring dengan tahapan sebagai berikut:
  - 1) Pemohon (CPP/CPW) datang ke KUA untuk melakukan pendaftaran pernikahan.
  - 2) Petugas KUA melakukan verifikasi dan validasi data pemohon.
  - 3) Wawancara antara petugas KUA dengan pemohon terkait adminduk.
    - ✓ Persyaratan (KTP, KK, Akta Kelahiran).
    - ✓ Mengisi Form Pindah Datang jika salah satu CP berasal dari luar Kota dan akan menetap di Kota Tasikmalaya.
  - 4) Petugas KUA mengirimkan berkas perubahan alamat dan status perkawinan satu hari sebelum akad nikah melalui No WA yang telah ditentukan.
  - 5) Petugas Disdukcapil Memproses pengajuan berkas yang dikirimkan petugas KUA.
  - 6) Dokumen KK dan KTP diserahkan kepada Petugas KUA untuk diberikan kepada pengantin secara bersamaan dengan dokumen Buku Nikah oleh petugas KUA / Petugas dari Disdukcapil.

Gambar 4.4  
Alur Proses Inovasi PASUTRI



Program PASUTRI Disdukcapil Kota Tasikmalaya ini mulai launching pada 11 Desember 2022 oleh Pj. Wali Kota Tasikmalaya, Dr. Cheka Virgowansyah, SSTP., M.E. Pada kesempatan tersebut, disampaikan bahwa mulai saat itu, bagi masyarakat Kota Tasikmalaya yang menikah akan langsung mendapatkan tiga dokumen sekaligus yaitu KTP Elektronik, Buku Nikah dan Kartu Keluarga secara gratis. Program ini bertujuan untuk mempercepat pelayanan dan mengurangi terjadinya maladministrasi atau kecurangan di dalam pelayanan kependudukan bagi masyarakat.

Evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK, dan hasilnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya dengan tembusan kepada Pj. Wali Kota Tasikmalaya.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Usulan rencana kebutuhan pembangunan untuk tahun 2024 yang tertuang dalam program dan kegiatan disusun dengan sumber pendanaan dari dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota serta sumber lainnya. Penyusunan rencana program dan kegiatan dilakukan melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang meliputi pendekatan teknokratis, politik, atas bawah (top down), bawah atas (*bottom up*) dan partisipatif melalui serangkaian mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota, provinsi dan nasional, kemudian diverifikasi dan disepakati sebagai usulan prioritas program dan kegiatan untuk tahun 2024.

Penyusunan rencana program dan kegiatan prioritas disusun dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran pembangunan melalui prioritas dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2024.

Rencana program dan kegiatan dalam RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024 sebanyak 199 program, 895 kegiatan dan 3.494 sub kegiatan dengan total anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 1.577.367.211.645,00.

Rekapitulasi rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan indikatif berdasarkan Perangkat Daerah tersaji dalam tabel 5.1, sedangkan matrik rencana program dan kegiatan secara terperinci disajikan dalam tabel 5.2. sebagai berikut:

Tabel 5.1  
Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
serta Pendanaan Indikatif Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan	5	40	140	492.895.625.516
2	Dinas Kesehatan	5	114	767	354.957.003.054
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	11	25	74	60.110.735.990
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	15	53	11.016.967.464
5	Satuan Polisi Pamong Praja	2	11	53	17.009.057.843
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	16	78	9.445.723.873
7	Dinas Sosial	6	14	57	12.807.522.793
8	Dinas Tenaga Kerja	5	18	50	7.811.889.228
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	13	43	135	25.436.690.791
10	Dinas Lingkungan Hidup	10	23	91	31.862.147.153
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	16	42	10.570.067.597

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9	27	82	15.816.666.456
13	Dinas Perhubungan	2	18	84	39.678.843.362
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	15	60	16.277.792.345
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	17	33	106	16.747.267.841
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	14	58	8.216.379.169
17	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	10	14	71	15.874.428.877
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	4	16	43	6.531.934.341
19	Sekretariat Daerah	3	22	81	75.704.444.261
20	Sekretariat DPRD	2	17	66	61.433.306.838
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	18	72	17.670.162.472
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3	13	84	47.845.518.916
23	Badan Pendapatan Daerah	2	13	57	24.572.174.964
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	14	69	13.002.006.973
25	Inspektorat	3	12	41	16.781.389.187
26	Kecamatan Cihideung	5	28	77	10.502.153.493
27	Kecamatan Cipedes	5	20	49	9.126.884.884
28	Kecamatan Tawang	5	30	93	9.757.040.693
29	Kecamatan Indihiang	5	26	74	10.652.552.411
30	Kecamatan Kawalu	5	24	84	16.103.058.295
31	Kecamatan Cibeureum	5	24	78	14.104.291.656
32	Kecamatan Tamansari	5	39	125	12.253.596.521
33	Kecamatan Mangkubumi	5	39	123	13.561.493.494
34	Kecamatan Bungursari	5	35	109	12.182.795.970
35	Kecamatan Purbaratu	5	33	106	10.682.116.099
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	16	62	48.365.480.825
JUMLAH		199	895	3.494	1.577.367.211.645

BAB VI  
KINERJA PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah pada akhir periode perencanaan. Indikator ini merupakan akumulasi pencapaian indikator *outcome* atau *impact* dari pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan pembangunan daerah. Penetapan indikator dan target kinerja didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja pemerintahan daerah masa lalu dan proyeksi yang disertai perhitungan atas hasil pelaksanaan program dan kegiatan kedepan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penetapan indikator kinerja daerah dibagi kedalam dua kelompok, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). IKU Daerah merupakan gambaran ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan IKD merupakan indikator kinerja pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah.

Selain penetapan IKU Daerah dan IKD, untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan Indikator Makro Pembangunan sebagaimana disajikan pada table 6.1. berikut.

Tabel 6.1.  
Proyeksi Capaian Indikator Makro Kota Tasikmalaya  
Tahun 2024

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73,83	73,95	74,28
	Indeks Pendidikan	Poin	69,18	70,04	70,51
	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,53	9,76	9,89
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,47	13,50	13,52
	Indeks Kesehatan	Poin	80,97	80,88	81,06
	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,63	72,57	72,69
	Indeks Daya Beli	Poin	71,85	71,40	71,72
	Pengeluaran per Kapita	Juta Rp	10,57	10,424	10,58
2.	PDRB Perkapita ADH Berlaku	Juta Rp	34,05	33,40	34,35
3.	PDRB Perkapita ADH Konstan	Juta Rp	22,88	23,47	24,11
4.	PDRB ADH Berlaku	Triliun	24,97	24,40	25,21
5.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,01	5,15	5,69
6.	Inflasi	%	6,65	2,47	3,11
7.	Indeks gini	Poin	0,405	0,390	0,380
8.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,32	0,71	0,61
9.	Angka Kemiskinan	%	12,72	12,33	11,33
10.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,62	7,35	5,77

Tabel 6.2.  
Proyeksi Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Tasikmalaya Tahun 2024

NO.	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
1	Angka kemiskinan	(%)	Persentase Angka Kemiskinan yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	12,72	12,33	11,33
2	Indeks Pencapaian SPM Bidang Sosial	point	Capaian indikator SPM bidang sosial/jumlah total SPM bidang sosial	94,18	90	90
3	Rata-rata Lama Sekolah	(%)	Persentase Rata-rata Lama Sekolah yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	9,53	9,76	9,89
4	Harapan Lama Sekolah	Point	Harapan Lama Sekolah yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	13,47	13,50	13,52
5	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	point	Capaian indikator SPM bidang pendidikan/jumlah total SPM bidang Pendidikan	84,53	72	75
6	Usia Harapan Hidup	Tahun	Usia Harapan Hidup yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	72,63	72,57	72,69
7	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	point	Capaian indikator SPM bidang Kesehatan/jumlah total SPM bidang Kesehatan	81,59	75	80
8	Laju Pertumbuhan Penduduk	Tahun	Laju Pertumbuhan Penduduk yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	1,32	0,71	0,61
9	Indeks Pemberdayaan Gender	Point	Indeks Pemberdayaan Gender yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	belum rilis	60,00	60,10
10	Indeks Pembangunan Gender	Point	Indeks Pembangunan Gender yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	91,87	91,84	91,94
11	Indeks Pencapaian SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum	point	Capaian indikator SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat/jumlah total SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	86,67	100	100

NO.	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
12	Indeks Resiko Bencana	Poin	Tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, keterpaparan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana, dan dikeluarkan oleh BNPB	-	Sedang (117,15)	Sedang (117,15)
13	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	5,01	5,15	5,69
14	PDRB Perkapita	Juta / Tahun/Kapita	Persentase PDRB Per kapita berdasarkan hasil penghitungan dikeluarkan oleh BPS	34,05	33,40	34,35
15	Pengeluaran Per Kapita	Juta / Tahun/Kapita	Pengeluaran Per Kapita berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	10,57	10,424	10,58
16	Indeks Gini	Poin	Indeks Gini berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	0,405	0,390	0,380
17	Inflasi	%	Inflasi berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	6,65	2,47	3,11
18	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	Tingkat Penangguran terbuka berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	6.62	7,35	5,77
19	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adh Berlaku	(milyar)	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	8.072,08	8.002,90	8.283,45
20	Indeks kemandapan jalan	Poin	Indeks dari Jalan dalam kondisi mantap/total panjang jalan x 100%	-	59,23	62,05
21	Indeks kawasan permukiman layak huni	Poin	Indeks dari kawasan permukiman layak huni/ total kawasan permukiman x 100%	-	15,88	31,77
22	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	poin	Capaian indikator SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/jumlah total SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100	91,07	94,74

NO.	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
23	Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan rakyat	Poin	Capaian indikator SPM bidang Perumahan Rakyat/jumlah total SPM bidang Bidang Perumahan rakyat	60	100	100
24	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	51,94	57,93	58,15
25	Persentase Pengelolaan Sampah	%	Persentase sampah yang dikelola+persentase sampah pengurangan	81,77	99	99
26	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori/Poin	Hasil survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah	Baik (83,32)	Baik (83,32 - 85,80)	Baik (83,32 - 85,80)
27	Indeks Inovasi Daerah	Kategori/Poin	Indeks inovasi yang dihitung dan dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri	Inovatif	Inovatif (46,43)	Inovatif (52,43)
28	Indeks SPBE	Kategori/Poin	Capaian Indeks SPBE yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB	Baik (2,62)	Baik (2,9)	Baik (3,0)
29	Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah	(Opini)	Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh BPK	WTP*	WTP	WTP
30	Nilai Evaluasi SAKIP	Kategori/Poin	Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh KemenPANRB	BB (70,73)	BB (72,50-75,00)	BB (72,50-75,00)
31	Nilai Evaluasi LPPD	Kategori	Hasil Evaluasi LPPD yang dikeluarkan oleh Kemendagri	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
32	Tingkat Maturitas SPIP	Level	Hasil penilaian SPIP oleh BPKP	3	3	3



Tabel 6.3.  
 Proyeksi Capaian Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan  
 Kota Tasikmalaya Tahun 2024

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/	Satuan	FORMULASI	REALISAS I	TARGET KINERJA	
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2022	2023	2024
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1.1.	Pertumbuhan PDRB (%)	%	Angka Pertumbuhan PDRB yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	5,01	5,15	5,69
1.2.	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (%)	%	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	2,97	4,59	5,86
1.3.	Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian (%)	%	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	1,91	3,71	4,60
1.4.	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian (%)	%	Persentase Pertumbuhan PDRB kategori Pertanian yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	4,54	0,45	0,56
1.5.	Laju inflasi Kota (%)	%	Angka Inflasi daerah yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	6,65	2,47	3,11
1.6.	♦ Indeks Gini (point)	point	Indeks gini yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	0,405	0,390	0,380
1.7.	♦ Indeks Pembangunan Manusia/ IPM (point)	point	Angka IPM yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	73,83	73,95	74,28
1.7. 1	♦ Indeks Kesehatan	point	Indeks kesehatan yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	80,97	80,88	81,06
1.7. 2	♦ Indeks Pendidikan	point	Indeks kesehatan dan dikeluarkan oleh BPS	69,18	70,04	70,51
1.7. 3	♦ Indeks Daya Beli	point	Indek daya beli yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	71,85	71,40	71,72

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/	Satuan	FORMULASI	REALISAS I	TARGET KINERJA	
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2022	2023	2024
Fokus Kesejahteraan Masyarakat						
1.	Pendidikan					
1.1.	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	Point	Angka RLS yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	9,53	9,76	9,89
2.	Kesehatan					
2.1.	Angka Kematian Bayi (per 1.000)	Point	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu /Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu x 1.000	7,67	8,6	8,2
2.2.	Angka Kematian Ibu (per 100.000)	Point	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun/ Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama x 100.000	180,15	303,8	286,5
2.3.	Persentase masyarakat miskin mendapat jaminan kesehatan	%	Realisasi jaminan kesehatan daerah masyarakat miskin terhadap masyarakat miskin yang ditetapkan oleh pemerintah x 100	98,39	84	86
2.4.	Prevalensi Stunting (%)	%	Jumlah kasus stunting/Jumlah anak x 100	12,62	14,8	13,8
ASPEK PELAYANAN UMUM						
Fokus Layanan Urusan Wajib						
Urusan Wajib Pelayanan Dasar						
1.	Pendidikan					
1.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	Jumlah Siswa TK/RA/KB/SPS/TPA dibagi Penduduk usia 3-6 thn X 100	40,82	25,78	25,79
1.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	Jumlah Siswa SD/MI/Paket A usia 7-12 thn dibagi Penduduk usia 7-12 thn X 100	89,86	89,79	89,80
1.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	Jumlah Siswa SMP/MTs/Paket B usia 13-15 thn dibagi Penduduk usia 13-15 thn X 100	84,44	78,65	78,66

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/	Satuan	FORMULASI	REALISAS I	TARGET KINERJA	
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2022	2023	2024
1.4	Tingkat Partisipasi Pendidikan Kesetaraan	%	Jumlah Warga Belajar yang lulus dan mendapatkan sertifikat / Jumlah seluruh Warga Belajar yang mengikuti pelatihan x 100	-	100,00	100,00
1.5	Indeks Capaian SPM Bidang Pendidikan	%	Jumlah Peserta Didik PAUD, dan Pendidikan Dasar yang terlayani SPM / Jumlah Seluruh Peserta Didik PAUD dan Pendidikan Dasar x 100	84,53	72	75
1.6	Persentase Pendidik yang memiliki sertifikat pendidik (...%)	%	Persentase Pendidik PAUD + Pendidikan Dasar Bersertifikat Pendidik	-	51,55	51,65
1.7	Persentase PAUD Terakreditasi B	%	Jumlah PAUD Terakreditasi B dibagi Jumlah seluruh PAUD	-	35,76	35,79
1.8	Persentase SD Terakreditasi A	%	Jumlah SD Terakreditasi A dibagi Jumlah seluruh SD	-	60,26	60,32
1.9	Persentase SMP Terakreditasi A	%	Jumlah SMP Terakreditasi A dibagi Jumlah seluruh SMP	-	58,19	58,25
1.10	Persentase Non Formal /Kesetaraan Terakreditasi B	%	Jumlah Non Formal/kesetaraan Terakreditasi B dibagi Jumlah seluruh Non Formal/kesetaraan	-	51,85	51,90
1.11	Persentase Sarana Prasarana dalam kondisi baik	%	Jumlah Ruang Kelas SD,SMP,PAUD dan Non Formal/Kesetaraan Kondisi Baik dibagi seluruh Ruang Kelas SD,SMP,PAUD dan Non Formal/Kesetaraan	-	67,38	67,45
1.12	Persentase capaian pengembangan kurikulum	%	Jumlah peserta yang mendapatkan sertifikat pelatihan kurikulum dibagi Jumlah seluruh peserta Pelatihan Penyusunan Kurikulum	100	100	100
1.13	Persentase Capaian Kualitas Pendidik PAUD dan Pendidikan Dasar	%	Jumlah pendidik PAUD dan Pendidikan Dasar yang bersertifikat pendidikan dibagi seluruh pendidik PAUD dan Pendidikan Dasar	45,93	51,45	51,50
1.14	Persentase Siswa Prestasi yang dicapai ke Tingkat Provinsi jenjang Pendidikan Dasar	%	Jumlah prestasi siswa Pendidikan Dasar yang diraih di tingkat provinsi dibagi Jumlah peserta yang mengikuti perlombaan ke tingkat provinsi	40,32	25,03	25,05
2.	Kesehatan					
2.1	Angka Kematian Bayi (per 1.000)	Point	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu /Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu x 1.000	7,67	8,4	8,2

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	FORMULASI	REALISAS I	TARGET KINERJA	
	2022			2023	2024	
2.2	Angka Kematian Ibu (per 100.000)	Point	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun/ Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama x 100.000	180,5	303,8	286,5
2.3	Prevalensi Stunting (%)	%	Jumlah kasus stunting/Jumlah anak x 100	12,62	14,8	10,2
2.4	Indeks Pencapaian SPM kesehatan	%	Rata-rata capaian SPM Kesehatan masyarakat	81,59	75	100
2.5	Indeks Pencapaian SPM kesehatan masyarakat	%	Rata-rata capaian SPM Kesehatan masyarakat	86,19	75	100
2.6	Indeks Pencapaian SPM Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	%	Rata-rata capaian SPM PM dan PTM	68,17	75	80
2.7	Indeks Keluarga Sehat	Point		Belum rilis	0,30	0
2.8	Persentase tenaga kesehatan yang tersertifikasi	%	Jumlah tenaga kesehatan yang tersertifikasi dibagi jumla tenaga kesehatan dikali 100	98,3	91	94
2.9	Persentase sarana kefarmasian dan Makanan Minuman Sesuai Standar	%	Jumlah sarana kefarmasian dan makanan minuman sesuai standar dibagi jumlah sarana kefarmasian dan makanan minuman yang diperiksa	100	77	80
2.10	Persentase Keluarga berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	Jumlah Keluarga ner-PHBS dibagi jumlah keluarga dikali 100	43,88	25,78	25,79
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
3.1	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik (bobot 70%) + panjang drainase dalam kondisi baik (bobot 30%) / total panjang jalan dan jembatan * 100%	-	53,49	57,34
3.2	Prosentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar Teknis	%	Prosentase bangunan gedung kewenangan pemda yang ditangani (70%) + Persentase Kawasan/ Lingkungan Yang di Tingkatkan Sesuai dengan RTBL nya (10%) + persentase jumlah penyedia jasa yang mendapatkan pembinaan (20%)	-	32,86	47,86

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	FORMULASI	REALISAS I	TARGET KINERJA	
	2022			2023	2024	
3.3	Persentase Permukiman yang Layak Huni	%	Permukiman yang Layak Huni/ Luas Permukimanx 100%	-	25	50
3.4	Indeks Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	Target capaian RT yang berakses SPALD dan RT yang berakses Air Minum tahun exsisting / target pertahun capaian RT yang berakses SPALD dan RT yang berakses Air Minum (100%)	100	100	100
3.5	Persentase panjang jalan dan jembatan yang dibangun, direhabilitasi dan direkonstruksi	%	Panjang jalan dan jembatan yang dibangun, direhabilitasi dan direkonstruksi / total panjang jalan dan jembatan *100%	-	68,66	68,08
3.6	Persentase Drainase Jalan dalam kondisi baik	%	Panjang drainase dalam kondisi baik / total panjang drainase	-	18,10	19,19
3.7	Prosentase bangunan gedung kewenangan pemda yang ditangani	%	Jumlah bangunan gedung kewenangan pemda yang ditangani/ total bangunan gedung yang menjadi kewenangan pemda (114 gedung)	32,45	32,46	49,12
3.8	Persentase Kawasan/ Lingkungan Yang di Tingkatkan Sesuai dengan RTBL nya	%	Kawasan/ Lingkungan Yang di Tingkatkan Sesuai dengan RTBL nya/ Jumlah Kawasan x 100%	-	16,67	-
3.9	persentase jumlah penyedia jasa yang mendapatkan pembinaan	%	jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan / jumlah badan usaha di kota tasikmalaya (236 badan usaha * 100%)	-	42,37	42,37
3.10	Persentase sistem jaringan sarana prasarana permukiman dalam kondisi baik	%	Jumlah sistem jaringan sarana prasarana permukiman dalam kondisi baik / jumlah target sistem jaringan sarana prasarana permukiman akan ditangani (800 untuk 4 th)	-	25	50
3.11	Prosentase KK/RT Yang berakses SPLD	%	KK/RT Yang berakses SPLD/jumlah KK/RT x 100%	61,71	61,62	62,05
3.12	Prosentase KK/RT yang Berakses Layanan Air Minum	%	KK/RT yang Berakses Layanan Air Minum/Jumlah KK/RT x 100%	56,81	56,67	57,26
3.13	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	97,02	90	80

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	FORMULASI	REALISAS I	TARGET KINERJA	
	2022			2023	2024	
4.	Perumahan Dan Kawasan Permukiman					
4.1	Persentase Perumahan yang Layak huni	%	Persentase PSU yang diverifikasi+yang diserahterimakan+yang dikelola dibagi 3	-	25	50
4.2	Indeks Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat	%	Jumlah unit penyediaan/rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan rekolasi program yang ditangani terhadap target	60	100	100
4.3	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	%	Luas penanganan kawasan kumuh/total kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha (82, 68 Ha)	-	2,42	4,84
4.4	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	Jumlah penanganan RTLH (didalam kawasan kumuh+diluar kawasan kumuh) dibagi total RTLH se Kota (9081 unit)	-	9,24	18,55
4.5	Persentase rumah korban bencana yang ditangani	%	Jumlah unit penyediaan/rehabilitasi rumah bagi korban bencana yang ditangani terhadap target	100	100	100
4.6	Persentase rumah korban relokasi program kabupaten/kota yang ditangani	%	Jumlah rumah korban relokasi program yang difasilitasi terhadap target	-	100	100
4.7	Persentase Pengelolaan PSU Perumahan	%	Persentase PSU yang diverifikasi+yang diserahterimakan+yang dikelola dibagi 3	-	25	50
4.8	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	%	Luas penanganan kawasan kumuh/total target kawasan kumuh yang ditangani	-	20	40
4.9	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	%	Jumlah unit RTLH yang ditangani di dalam kawasan kumuh/total RTLH di dalam kawasan kumuh (1.752 Unit)	-	8,56	17,24
4.10	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	%	Jumlah unit RTLH yang ditangani di dalam kawasan kumuh/total RTLH di dalam kawasan kumuh (7329 Unit)	-	1,36	2,63

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	FORMULASI	REALISAS I	TARGET KINERJA	
	2022			2023	2024	
5.	Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					
5.1	Presentase Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang di selesaikan	%	Jumlah pengaduan yang ditangani/Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk x 100%	100	100	100
5.2	Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan/ Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi x 100%	100	93	94
5.3	Tingkat Penyelesaian pelanggaran keamanan, ketertiban dan Keindahan (K3)	%	Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang di selesaikan/jumlah gangguan x 100%	100	100	100
5.4	Persentase Pengawasan dan penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	Pengawasan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah/Jumlah Pelanggaran x 100%	-	93	94
5.5	Presentase PPNS yang dibina	%	Jumlah PPNS yang dibina/jumlah total PPNS x 100%	-	80	81
5.6	Indeks Katahanan Daerah	Poin	Tercapainya Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, Program Pengelolaan Kedaruratan dan Logistik Bencana dan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	-	0.34	0.35
5.7	Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran	%	Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran	-	86	86
5.8	Persentase Masyarakat yang Memperoleh Informasi Layanan Bencana	%	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana / Seluruh penduduk di kawasan rawan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana x 100%	-	100	100
5.9	Persentase Masyarakat yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	%	Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh Layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai jenis ancaman bencana / Seluruh penduduk di kawasan rawan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana x 100%	-	100	100
5.10	Persentase Penanganan Bencana dan warga negara korban bencana	%	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi / Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana x 100%	-	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/	Satuan	FORMULASI	REALISAS I	TARGET KINERJA	
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2022	2023	2024
5.11	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah Wilayah Managemen Kebakaran (WMK)	Poin	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	-	86	86
6.	Sosial					
6.1	Persentase Rehabilitasi Sosial Terhadap PPKS	%	Jumlah PPKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial/ Data PPKS X 100	-	10	10.5
6.2	Persentase Capaian Jaminan Sosial terhadap PPKS	%	Jumlah PPKS yang mendapatkan Jaminan sosial/Jumlah Data DTKS X 100	-	78	79
6.3	Persentase Capaian Penanganan Perlindungan Sosial korban bencana alam dan korban bencana sosial	%	Jumlah Korban Bencana alam dan Sosial yang di tangani/ Jumlah Korban Bencana alam dan Sosial X 100	-	100	100
6.4	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan PPKS	%	Jumlah PSKS yang diberdayakan/Jumlah Data PSKS X 100	-	25	25
6.5	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	%	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Daerah Asalnya/ Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan X 100	0	100	100
6.6	Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	%	Jumlah Lanjut Usia Terlantar, Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial/ Jumlah Target X 100	83	100	100
6.7	Persentase penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	Jumlah PPKS yang Menerima Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial/ Target X 100	100	100	100
6.8	Persentase Penanganan Bencana Alam dan Sosial	%	Jumlah Korban Bencana alam dan Sosial yang di tangani/ Jumlah Korban Bencana alam dan Sosial X 100	100	100	100
6.9	Persentase PSKS Aktif	%	Jumlah PSKS aktif/Target X 100	-	100	100



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	FORMULASI	REALISAS I	TARGET KINERJA	
	2022			2023	2024	
6.10	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	Jumlah TMP yang Dikelola / Jumlah TMP X 100	-	100	100
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar					
7.	Tenaga Kerja					
7.1	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak / Jumlah perusahaan x 100 %	-	54,23	54,50
7.2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi / jumlah tenaga kerja keseluruhan x 100%	-	4,98	6
7.3	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja daerah	%	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD / jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota x 100%	-	4	5
7.4	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	Jumlah pencaker yang ditempatkan / jumlah pencaker yang terdaftar x 100 %	-	27	29
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
8.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	91,87	91,84	91,86
8.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	Blm rilis	60,00	60,10
8.3	Persentase Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak	%	Penyelesaian Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak / Jumlah Pengaduan x 100	100	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	FORMULASI	REALISAS I	TARGET KINERJA	
	2022			2023	2024	
8.4	Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA)	Poin	Realisasi Jumlah Skor dari indikator tingkatan Kota Layak Anak	382,1	758	760
8.5	Persentase Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak	%	Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak/Jumlah Pengaduan x100	100	100	100
8.6	Persentase Capaian PUG SKPD/Lembaga/Organisasi yang Responsif Gender	Persen	Jumlah SKPD/Lembaga/Organisasi yang responsif gender / Jumlah SKPD/lembaga/Organisasi x 100	100	100	100
8.7	Persentase Pembinaan Peningkatan Kualitas Keluarga	Persen	Jumlah Keluarga yang dibina / Jumlah Keluarga Sasaran x 100	100	100	100
8.8	Persentase Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak	Persen	Penyelesaian Pengaduan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak/Jumlah Pengaduan x100	100	100	100
8.9	Cakupan Sistem Data Gender dan Anak	Persen	Jumlah Gender dan Anak yang didata/dibina / Jumlah Total Gender dan Anak yang ada x 100	100	100	-
8.10	Persentase Penanganan Kasus Anak	Persen	Jumlah Kasus yang ditangani/jumlah kasus x 100	100	100	100
9.	Ketahanan Pangan					
9.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	poin	PPH = % angka kecukupan gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan	91,3	91,4	91,5
9.2	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang dibangun	unit	Jumlah infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang dibangun	0	1	2
9.3	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	%	Persentase Angka Kecukupan Energi	111,7	110,7	110,8
9.4	Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP)	%	Persentase Angka Kecukupan Protein	122,9	125	125,5
9.5	Persentase kelurahan rentan rawan pangan yang ditangani (%)	%	Jumlah kelurahan rentan rawan pangan yang ditangani/Jumlah kelurahan rentan warga	33,33	15	15

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	FORMULASI	REALISAS I	TARGET KINERJA	
	2022			2023	2024	
9.6	Persentase pengawasan keamanan pangan	%	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi/Total sampel pangan yang diawasi	100	100	100
10.	Pertanahan					
10.1	Persentase Pengelolaan dan Penatagunaan Tanah	%	Persentase Pengelolaan dan Penatagunaan Tanah	100	100	100
11.	Lingkungan Hidup					
11.1	Indeks kualitas Air	poin	$IP_j = [\sqrt{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}]/2$	35,33	53,7	53,75
11.2	Indeks kualitas Udara	Poin	$IKU = 100 - [(50/0,9 \times I_{eu} - 0,1)]$	82,26	80,00	80,50
11.3	Persentase Penanganan Sampah	%	Persentase capaian kinerja penanganan sampah	65,11	72	71
11.4	Persentase Pengurangan Sampah	%	Persentase capaian kinerja Pengurangan sampah	16,66	27	28
12.	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil					
12.1	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	%	Dokumen Pendaftaran penduduk + Dokumen pencatatan sipil/2 x 100%	87,04	94	95
12.2	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	%	Jumlah Lembaga yang telah memanfaatkan data kependudukan/jumlah lembaga yang telah melakukan perjanjian kerjasama x 100%	-	100	100
12.3	Persentase Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	%	Jumlah kepemilikan KTP + kepemilikan KIA + kepemilikan KK/3 x 100%	-	98	98
12.4	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	%	Kepemilikan Akte Kelahiran + kepemilikan Akte Kematian + kepemilikan Akte Perceraian dan Perkawinan + kepemilikan Akte lainnya/4 x 100%	-	93	99,07

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	FORMULASI	REALISAS I	TARGET KINERJA	
	2022			2023	2024	
12.5	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	Jenis Sistem Informasi/Jumlah system informasi x 100%	100	100	100
12.6	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	%	Data kependudukan dan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan/2*100%	-	100	100
13.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
13.1	Cakupan Anggota BKB yang Ber KB	Persen	Jumlah Anggota BKB yang ber KB/Jumlah Anggota BKB x 100	82,12	82,53	83,03
13.2	Cakupan Anggota BKR yang Ber KB	Persen	Jumlah Anggota BKR yang ber KB/Jumlah Anggota BKR x 100	76,53	76,61	77,11
13.3	Cakupan Anggota BKL yang Ber KB	Persen	Jumlah Anggota BKL yang ber KB/Jumlah Anggota BKL x 100	74,48	74,97	75,47
13.4	Jumlah Dokumen Laporan Pemutakhiran Data Kependudukan	Dokumen	Jumlah Dokumen Laporan Pemutakhiran Data Kependudukan	1	1	1
13.5	Persentase Kebersertaan KB MKJP	Persen	Realisasi pelayanan Kb MKJP/Target Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM KB) x100	72,98	100	100
13.6	Persentase Kebersertaan Un Meet Need	Persen	Unmeet need (ingin anak ditunggu (iat)+ tidak ingin anak lagi (tial)/PUS x 100	12,94	13,50	13,25
14.	Perhubungan					
14.1	Prosentase layanan lalu lintas dan angkutan berkeselamatan	%	Rata-rata prosentase layanan lalu lintas dan angkutan berkeselamatan	-	67,23	68,62
14.2	Persentase Layanan Lalu Lintas Berkeselamatan	%	Jumlah realisasi ruas jalan berkeselamatan / ruas jalan kota	-	61,07	58,93
14.3	Persentase layanan angkutan berkeselamatan	%	Jumlah realisasi angkutan berkeselamatan/Jumlah angkutan yang di targetkan	-	77,32	78,32

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	FORMULASI	REALISAS I	TARGET KINERJA	
	2022			2023	2024	
15.	Komunikasi dan Informatika					
15.1	Capaian Predikat Indeks SPBE	Poin	Capaian Indeks SPBE berdasarkan Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 dan Permenpan RB No. 5 Tahun 2018	2,62	2,90	3,00
15.2	Capaian Predikat Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	%	Capaian Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan UU No 14 Tahun 2008, PP No 61 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2021 yang 15.3 diselenggaraan oleh Komisi Informasi	-	80	81
15.3	Persentase Layanan SPBE yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	Jumlah Layanan SPBE yang dilakukan secara online dan terintegrasi/Jumlah Layanan SPBE yang ada*100	-	60	60
15.4	Persentase Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik	%	Akumulasi hasil penilaian seluruh kriteria/indikator untuk kualifikasi predikat keterbukaan informasi dan komunikasi publik. Penilaian: PPID 10%, SLIP 20%, Berkala 30%, Setiap Saat 20%, Serta Merta 20%	-	Informatif (80%)	Informatif (80%)
16.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah					
16.1	Persentase koperasi yang memiliki NIK (Nomor Induk Koperasi)	%	Jumlah Koperasi yang bersertifikat NIK/ Jumlah Koperasi Aktif x 100%	-	64	65
16.2	Persentase usaha mikro yang bersertifikat	%	Jumlah usaha mikro yang bersertifikat/ jumlah total usaha mkro x 100%	2,2	2	2
16.3	Persentase koperasi simpan pinjam yang diberi rekomendasi penerbitan izin usaha dan/ atau izin operasional	%	Jumlah koperasi yang diberi rekomendasi/ jumlah koperasi pemohon rekomendasi x 100%	100	100	100
16.4	persentase koperasi aktif	%	Jumlah Pertumbuhan koperasi aktif/ total Koperasi Aktif x 100%	32,79	1	1
16.5	Persentase Koperasi Sehat	%	Jumlah KSP/USP sehat/Jumlah total KSP/USP x 100%	40	6	6
16.6	Persentase SDM koperasi yang kompeten	%	Jumlah SDM koperasi yang bersertifikat kompetensi/Jumlah SDM koperasi yang dibina x 100%	33,3	25	25

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	FORMULASI	REALISAS I	TARGET KINERJA	
	2022			2023	2024	
16.7	Persentase koperasi aktif yang diberdayakan	%	Jumlah koperasi aktif yang diberdayakan/Jumlah total koperasi aktif x 100%	-	25	25
16.8	Persentase pemberdayaan usaha mikro	%	Jumlah usaha mikro yang diberdayakan / Jumlah usaha mikro x 100%	29,83	2	2
16.9	Persentase Usaha Mikro yang dibina	%	Jumlah usaha mikro yang dibina / Jumlah usaha mikro x 100%	-	5	5
17.	Penanaman Modal					
17.1	Nilai penanaman modal daerah dari PMA dan PMDN yang masuk	Rp/Milyar	Jumlah nilai PMA dan PMDN yang masuk yang tercatat di Dinas PMPTSP	4.777	1.304	1.304
17.2	Capaian penerbitan perijinan terpadu tepat waktu sesuai SOP	%	Persentase capaian penerbitan perijinan terpadu sesuai SOP terhadap pengajuan perijinan dengan persyaratan yang lengkap	100	100	100
17.3	Persentase realisasi RUPM Kota Tasikmalaya	%	Realiasi RUPM/Jumlah tahapan dalam RUPM x 100%	0	20	100
17.4	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%	Jumlah investor yang dibina/Jumlah total investor x 100%	120	100	100
17.5	Persentase pengelolaan basis data potensi Penanaman Modal sesuai SOP	%	Jumlah basis data potensi penanaman modal yg dikelola sesuai SOP/Jumlah total basis data potensi investasi x 100%	100	25	25
17.6	Persentase pengelolaan data perijinan sesuai SOP	%	Jumlah data perijinan yang dikelola sesuai SOP/Jumlah total data perijinan x 100%	100	100	100
18.	Kepemudaan dan Olahraga					
18.1	Persentase prestasi pemuda tingkat provinsi (%)	%	Jumlah prestasi kepemudaan tingkat provinsi / jumlah OKP terdaftar x 100	-	2,20	3,30
18.2	Persentase prestasi olahraga tingkat provinsi (%)	%	Jumlah prestasi olahraga tingkat provinsi / jumlah cabor x 100	85,71	34,15	36,59

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	FORMULASI	REALISAS I	TARGET KINERJA	
	2022			2023	2024	
18.3	Persentase Pemuda / OKP yang dibina	%	Jumlah OKP yang dibina / Jumlah OKP x 100	30,77	29,67	30,77
18.4	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi	%	Perolehan medali tingkat provinsi / jumlah cabang olahraga * 100	85,71	34,15%	36,59
19.	Statistik					
19.1	Persentase data dan informasi statistik sektoral	%	Jumlah realisasi kelompok data pada statistik sektoral terhadap jumlah kelompok data statistik sektoral. Berdasarkan Permendagri No 70 Tahun 2019 tentang SIPD terdapat 3 Kelompok Data: Kelompok Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan dasar dan Non Dasar, Kelompok Urusan Pemerintahan Pilihan dan Kelompok Data Umum.	100	100	100
19.2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dlm penyusunan perencanaan Pembangunan Daerah/Jumlah OPD yang ada di Pemerintah Kota*100	-	100	100
20.	Persandian					
20.1	Capaian penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	%	Realisasi Area Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah terhadap total Area Pengendalian Sistem Manajemen Keamanan Informasi	63,64	41,00	41,50
20.2	Persentase tingkat keamanan informasi Pemerintah Daerah	%	Jumlah Nilai per Area Keamanan/Jumlah Area Keamanan*100	-	41,00	42,00
21.	Kebudayaan					
21.1	Persentase Pelestarian Seni dan Budaya Daerah	%	Jumlah OPK yang dilestarikan / Jumlah OPK x 100	-	63,73	68,63

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	FORMULASI	REALISAS I	TARGET KINERJA	
	2022			2023	2024	
21.2	Persentase Pengembangan Kebudayaan	%	OPK yang dikembangkan /Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) x 100	63,77	63,73	68,63
21.3	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kesenian Tradisional	%	Jumlah grup kesenian yang dibina / jumlah grup kesenian tercatat x 100	20,23	25	25
21.4	Persentase sejarah lokal yang dilestarikan	%	Jumlah sejarah lokal yang dilestarikan/jumlah target x 100%	50,00	25	25
21.5	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	Cagar budaya yang dipelihara / jumlah cagar budaya terdaftar x 100	40	46,15	53,85
22.	Perpustakaan					
22.1	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	%	Jumlah penambahan pengunjung pada tahun berkenaan / Jumlah pengunjung tahun lalu X 100%	51,39	0,3	0,3
22.2	Persentase pembinaan perpustakaan	%	Jumlah perpustakaan yang dibina /Jumlah Perpustakaan yang seharusnya dibina X 100%	5,53	4,42	4,42
22.3	Persentase kesesuaian penyelenggaraan perpustakaan umum daerah dengan standar nasional perpustakaan	%	Rata-rata persentase kesesuaian penyelenggaraan perpustakaan umum daerah dengan standar nasional perpustakaan	37,47	38	38
22.4	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	%	Jumlah Calon Naskah Kuno dan koleksi etnis nusantara yang dilestarikan /Jumlah keseluruhan naskah kuno dan koleksi etnis nusantara yang direncanakan pada akhir periode renstra X 100%	50	23,81	26,19
23.	Kearsipan					
23.1	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	Rata-rata Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Seluruh Perangkat Daerah, dengan kategori: a. > 90 – 100 = AA (Sangat Memuaskan) b. > 80 – 90 = A (Memuaskan)	54,73	52,43	53,26



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/	Satuan	FORMULASI	REALISAS I	TARGET KINERJA	
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2022	2023	2024
			c. > 70 – 80 = BB (Sangat Baik) d. > 60 – 70 = B (Baik) e. > 50 – 60 = CC (Cukup) f. > 30 – 50 = C (Kurang) g. 0 – 30 = D (Sangat Kurang)			
23.2	Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal	Nilai	Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal, dengan kategori: a. > 90 – 100 = AA (Sangat Memuaskan) b. > 80 – 90 = A (Memuaskan) c. > 70 – 80 = BB (Sangat Baik) d. > 60 – 70 = B (Baik) e. > 50 – 60 = CC (Cukup) f. > 30 – 50 = C (Kurang) g. 0 – 30 = D (Sangat Kurang)	56,05	44,80	56,39
23.3	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai pengawasan kearsipan internal minimal kategori cukup	%	Jumlah Perangkat Daerah dengan Nilai Pengawasan Kearsipan minimal Kategori Cukup /Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pengawasan X 100%	55,56	77,78	86,11
23.4	Persentase kesesuaian kinerja kearsipan pada Lembaga Kearsipan Daerah	%	Total Nilai Perolehan pada Laporan Pengawasan Eksternal /Jumlah komponen pada aspek penilaian X 100%	-	37,48	47,24
Fokus Layanan Urusan Pilihan						
1	Kelautan dan Perikanan					
1.1	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	10.003,31	10.000	10.100
1.2	Produksi produk hasil olahan perikanan	Ton	Jumlah produksi produk hasil olahan perikanan	333,1	300	310
1.3	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	Jumlah Ikan yang Dikonsumsi dibagi jumlah pendudukn	-	22,25	22,5

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	FORMULASI	REALISAS I	TARGET KINERJA	
	2022			2023	2024	
2	Pariwisata					
2.1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	Jumlah occupancy hotel	642.128	443.505	542.625
2.2	Persentase peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata	%	Objek pariwisata dipelihara/objek pariwisata terdaftar di RIPDA x 100%	56	59,18	61,22
2.3	Meningkatnya kapasitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif	%	Jumlah usaha pariwisata dan sub sektor ekonomi kreatif yang dibina/jumlah Jumlah usaha pariwisata dan sub sektor ekonomi kreatif	46,15	53,33	56,67
3	Pertanian					
3.1	Produksi pertanian dan perikanan	Ton	Jumlah produksi pertanian dan perikanan	-	75.000	80.000
3.2	Persentase peningkatan populasi ternak	%	Jumlah populasi ternak tahun n – Jumlah populasi ternak tahun n-1/jumlah populasi ternak n-1 x 100	0,67	1	1
3.3.	Produksi Tanaman Pangan	Ton	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	82.019	85.500	75.000
3.4	Produksi Hortikultura dan Perkebunan	Ton	Jumlah Produksi Hortikultura dan Perkebunan	4.146	5.900	6.000
3.5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Kw/Ha	Produksi padi/luas panen hektar	62,68	62,9	63
3.6	Produksi Hasil Peternakan	Ton	Jumlah Produksi Hasil Peternakan	10.634	10.350	10.400
3.7	Persentase penanganan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	jumlah kejadian/kasus yang ditangani dibagi jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular yang terjadi	-	100	100
3.8	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian	%	Jumlah area yang dapat ditanggulangi (Ha) dibagi Luas Area Terkena Bencana	-	75	75
3.9	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	%	Jumlah kelompok tani yang naik kelas dibagi jumlah kelompok tyani x 100	3,8	4,5	5
3.10	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	izin	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	-	3	3

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/	Satuan	FORMULASI	REALISAS I	TARGET KINERJA	
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2022	2023	2024
4.	Perdagangan					
4.1	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	$(\text{PDRB sector perdagangan } n - \text{PDRB sector perdagangan } n-1) / \text{PDRB sector Perdagangan } n-1 \times 100 \%$	2,97	4,59	5,86
4.2	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekpor	%	$(\text{Nilai eskpor tahun } n - \text{nilai ekpor tahun } n-1) / \text{nilai ekpor tahun } n-1 \times 100 \%$	-	2	2
4.3	Persentase fasilitasi pemenuhan perizinan dan pendaftaran perusahaan	%	Jumlah perusahaan yang difasilitasi/Jumlah total perusahaan pemohon x 100%	100	100	100
4.4	Persentase pasar rakyat dalam kondisi baik	%	Jumlah pasar rakyat dalam kondisi baik / Jumlah total pasar rakyat x 100%	80	70	80
4.5	Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil	%	Jumlah bapokting yang harganya stabil/Jumlah total bapokting x 100%	34,5	40	40
4.6	Persentase peningkatan penggunaan produk unggulan Kota Tasikmalaya	%	Jumlah peningkatan pelaku usaha produk unggulan yang mengikuti even/Jumlah IKM leseluruhan x 100%	66,7	10	10
4.7	Persentase peningkatan pelaku usaha yang berorientasi ekspor	%	Jumlah pelaku usaha yg berorientasi ekspor/Jumlah total pelaku usaha x 100%	0,47	1	1
4.8	Persentase alat UTTP yang bertera sah	%	Jumlah alat UTTP yang bertera sah/ Jumlah total alat UTTP x 100%	88,9	80	80
5.	Perindustrian					
5.1	Persentase pertumbuhan industri	%	Jumlah pertumbuhan industri/ total industri x 100%	43,2	4	4
5.2	Persentase implementasi pencapaian sasaran rencana pembangunan industri	%	Jumlah realisasi sasaran RPIK/Jumlah total sasaran dalam RPIK x 100%	92,31	5	5
5.3	Persentase pengendalian Izin Usaha Industri	%	Jumlah Izin Usaha Industri yang dipantau dan diawasi/ jumlah total Izin Usaha Industri yang diterbitkan x 100%	100	100	100
5.4	Persentase IKM yang terdaftar di sistem informasi industri nasional	%	Jumlah IKM yang Terdaftar/ jumlah total IKM x 100%	0,78	5	5

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/	Satuan	FORMULASI	REALISAS I	TARGET KINERJA	
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2022	2023	2024
Layanan Pendukung dan Penunjang Pemerintahan						
1.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
1.1	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada Hasil Evaluasi SAKIP Kota	Nilai	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada Hasil Evaluasi SAKIP Kota	-	11,00	11,25
1.2	Persentase Nilai IKM Perangkat Daerah Berkategori sangat Baik	Kategori	(Jumlah Nilai IKM Perangkat Daerah berkategori sangat baik/ Jumlah Perangkat Daerah) X 100%	-	40,00	45,00
1.3	Persentase Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang Meningkatkan	Kategori	Nilai LPPD dari Kemendagri	-	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
1.4	Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron Dengan Peraturan Perundang-undangan	%	(Jumlah Produk Hukum yang Direvisi / Jumlah Produk Hukum yang harus direvisi) 100%	100	100	100
1.5	Indek Tata Kelola Barang dan Jasa	%	Hasil Evaluasi dari LKPP	-	40	50
1.6	Persentase Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Hukum Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Meningkatkan	%	Capaian IKK Bidang Hukum Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Meningkatkan X 100%	-	100	100
1.7	Persentase Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja Baik	%	Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja Baik/ Jumlah Kecamatan dan Kelurahan x 100%	100	100	100
1.8	Persentase Produk Hukum Daerah yang Diundangkan	%	Produk Hukum Daerah yang Diundangkan/ Jumlah Target x 100%	100	100	100
1.9	Persentase Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Bidang Perekonomian dan Pembangunan	%	"Capaian IKK Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang Meningkatkan/ Seluruh Jumlah IKK Bidang Perekonomian dan Pembangunan" X 100%	-	100	100
1.10	Persentase Optimalisasi Percepatan Pembangunan Daerah	%	Perbandingan Target Pembangunan Daerah Terhadap Capaian Fsik dan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah	-	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/	Satuan	FORMULASI	REALISAS I	TARGET KINERJA	
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2022	2023	2024
1.11	Indek Kematangan UKPBJ	%	Dihitung oleh LKPP		3	5
1.12	Persentase hasil pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD	%	Target fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD/Realisasi fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD x 100%	100	100	100
2	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					
1	Perencanaan Pembangunan					
1.1	Nilai Perencanaan Kinerja dalam penilaian SAKIP	Poin	Jumlah variable pada komponen perencanaan kinerja SAKIP Kota Tasikmalaya	-	25,20 - 25,30	25,30 - 25,40
1.2	Nilai Pengukuran Kinerja dalam penilaian SAKIP	Poin	Jumlah variable pada komponen pengukuran kinerja SAKIP Kota Tasikmalaya	-	17,65 - 17,85	17,85 - 18,00
1.3	Persentase capaian Indikator Kinerja Utama Daerah berpredikat minimal baik	%	Jumlah indikator kinerja daerah berpredikat minimal baik/jumlah indikator kinerja daerah x 100%	-	80	83
2	Keuangan					
2.1	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	OPini	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP
2.2	Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	%	Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah/Target x 100%	-	100	100
2.3	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Standar	%	Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Standar/standar x 100%	-	100	100
2.4	Persentase peningkatan pajak daerah	%	Capaian pajak tahun berkenaan /capaian pajak tahun lalu (n-1) x 100%	13,74	2,31	7,82
2.5	Persentase peningkatan PAD bukan pajak daerah	%	Capaian PAD tahun berkenaan /capaian PAD tahun lalu (n-1) x 100%	8,35	-1,24	-1,06
2.6	Capaian Pajak Daerah	%	Capaian Pajak Daerah/target x100%	94,49	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/ INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	FORMULASI	REALISAS I	TARGET KINERJA	
	2022			2023	2024	
2.7	Capaian PAD bukan pajak daerah	%	Capaian PAD bukan Pajak Daerah/target x100%	68,11	100	100
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan					
3.1	Indeks Merit Sistem	Poin	Indeks Merit Sistem	0,62 (254,5)	175/ Kurang	250/Bai k
3.2	Persentase ASN yang diangkat sesuai dengan formasi	%	ASN yang diangkat sesuai dengan formasi/Jumlah ASN x 100%	-	100	100
3.3	Persentase capaian pelayanan kepegawaian	%	capaian pelayanan kepegawaian/jumlah layanan kepegawaian x 100%	100	100	100
3.4	Persentase PNS yang terpetakan kompetensinya	%	PNS yang terpetakan kompetensinya/jumlah PNS x 100%	-	12	12
3.5	Persentase penyelesaian evaluasi kinerja dan penanganan disiplin	%	penyelesaian evaluasi kinerja dan penanganan disiplin	-	100	100
3.6	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	%	ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi/Jumlah ASN x 100%	-	17	18
4	Penelitian dan Pengembangan					
4.1	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	%	Hasil kajian yang direkomendasikan/jumlah kajian yang dihasilkan dalam periode 1 tahun berjalan x 100%	-	85	90
4.2	Jumlah inovasi daerah yang dilaporkan dan terverifikasi dalam Inovation Government Award (IGA)	Buah	Jumlah inovasi daerah yang dilaporkan dan terverifikasi dalam Inovation Government Award (IGA)	-	10	11
5	Unsur Pengawasan Pemerintahan					

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/	Satuan	FORMULASI	REALISAS I	TARGET KINERJA	
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2022	2023	2024
5.1	Tingkat capaian kapabilitas APIP	Level	Capaian kapabilitas APIP dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	Level 3	Level 3
5.2	Tingkat Maturitas SPIP Kota	Level	Tingkat Maturitas SPIP dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	Level 3	Level 3
5.3	Pemenuhan Elemen Praktek Profesional	Level	Pemenuhan Elemen Praktek Profesional dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	Level 2	Level 2
5.4	Pemenuhan Elemen Praktek Budaya dan hubungan Organisasi	Level	Pemenuhan Elemen Praktek Budaya dan hubungan Organisasi dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	Level 2	Level 2
5.5	Pemenuhan Elemen Praktek Struktur Tata Kelola	Level	Pemenuhan Elemen Praktek Struktur Tata Kelola dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	Level 2	Level 2
5.6	Pemenuhan Elemen Praktek Peran Dan Layanan	Level	Pemenuhan Elemen Praktek Peran Dan Layanan dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	Level 2	Level 2
6.	Unsur Kewilayahan					
6.1	Tingkat Kinerja Kecamatan	Kategori	Tingkat Kinerja Kecamatan hasil penilaian Setda	Sedang	Baik	Baik
6.2	Persentase Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban UmumLingkungan	%	Jumlah gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani/jumlah gangguan x 100%	-	100	100
6.3	Persentase Kelurahan dengan kategori "Cepat Berkembang"	%	Jumlah kelurahan kategori "Cepat berkembang" / jumlah kelurahan x 100%	100	100	100
6.4	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik	%	Capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik	-	100	100
6.5	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	Capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	-	100	100
6.6	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	%	Capaian Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	-	100	100
6.7	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	Capaian pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	100	100

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/URUSAN/	Satuan	FORMULASI	REALISAS I	TARGET KINERJA	
	INDIKATOR KINERJA DAERAH			2022	2023	2024
7.	Urusan Pemerintahan Umum					
7.1	Persentase penyelesaian potensi konflik sosial	%	Jumlah potensi konflik sosial yang diselesaikan/jumlah potensi konflik x 100%	100	100	100
7.2	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	%	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu dikeluarkan oleh KPU	-	-	86,50
7.3	Persentase ormas yang aktif	%	Jumlah ormas aktif/jumlah ormas x 100%	63,4	65	66
7.4	Persentase capaian pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	Jumlah peserta yang dibina/target x 100%	100	100	100
7.5	Persentase capaian pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	%	Jumlah peserta yang dibina/target x 100%	100	100	100
7.6	Persentase penanganan konflik sosial	%	Jumlah potensi konflik social yang ditangani/jumlah potensi konflik x 100%	100	64	100
7.7	Persentase partai politik yang dibina	%	Jumlah parpol yang dibina/jumlah parpol x 100%	-	100	100
7.8	Persentase ormas yang dibina	%	Jumlah ormas yang dibina/jumlah parpol x 100%	-	71	71



## BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2024 merupakan tahun ke-2 pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026. Dokumen memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta RKPD Provinsi Jawa Barat.

Dalam rangka menjamin terlaksananya prioritas dan sasaran daerah serta untuk terwujudnya sinergitas dan tercapainya target kinerja pembangunan, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan pembangunan di Kota Tasikmalaya, melaksanakan RKPD Tahun 2024 secara sinergis, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
2. RKPD Tahun 2024 menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 dan RAPBD Tahun Anggaran 2024.
3. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari APBD Kota/APBD Provinsi/APBN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun dan membuat Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang RKPD Tahun 2024, sebagai dasar pelaksanaan rencana program dan kegiatan Tahun 2024.
4. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar difasilitasi melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas dapat terakomodasi secara proporsional.
5. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, potensi sumber daya dari masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan di dorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan daerah.
6. Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD tahun 2024, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai dengan tupoksi masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan, serta melaporkannya secara berkala kepada Wali Kota melalui Kepala Bappelitbangda.
7. Kepala Bappelitbangda melakukan pengendalian, evaluasi, dan analisis lebih lanjut terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2024. Hasil evaluasi, kajian dan analisis RKPD Tahun 2024 menjadi bahan dasar penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja yang direncanakan dalam RKPD tahun 2024, seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya hendaknya melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024 berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian terhadap asumsi, target, sasaran, program dan kegiatan serta kondisi lainnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024, maka akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

CHEKA VIRGOWANSYAH